**BAB V**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Hasil Penelitian**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana yang dimanatkan oleh undang-undang tentang pemerintahan daerah, memiliki peran yang sangat strategis dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Dalam kedudukan tersebut lembaga DPRD memiliki fungsi legislasi dalam hal ini adalah membentuk peraturan daerah disamping fungsi anggaran dan pengawasan.

Kebijakan dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, juga menempatkan DPRD sebagai lembaga representasi rakyat dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Kebijakan tersebut mengakui dan menempatkan masyarakat sebagai hal yang utama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan berbagai urusan yang ada. Untuk itulah diperlukan akuntabilitas politik oleh DPRD kepada Publik.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh peneliti dengan menggali informasi melalui wawancara dan observasi serta memahaminya dengan cara menganalisis pada setiap hasil wawancara dari para informan maka dapat diketahui, dianalisis dan diintepretasikan mengenai akuntabilitas politik dalam pembuatan peraturan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado.

Keseluruhan data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder berupa wawancara mendalam dan menyandingkannya dengan data sekunder dimana sumber-sumber informasi dirangkaikan menjadi satu teks dan selanjutnya dilakukan triangulasi untuk keabsahan data dengan ditunjang oleh sejumlah dokumen-dokumen penting sesuai dengan permasalahan (data sekunder). Penelitian ini menganalisis secara mendalam *(verstehen)* dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus *(case studi)* karena sifat dari masalah yang diteliti bersifat khusus *(particularity)* karena penelitian ini mengambil permasalahan dengan latar alamiah *(naturalistic)* dan menyeluruh *(holistic)* pada pembuatan peraturan daerah olehDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado khususnya Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD. Penelitian ini membagi 3 (tiga) fokus yakni: (1) proses pelaksanaan akuntabilitas politik dalam pembuatan peraturan daerah pada DPRD Kota Manado, (2) faktor determinan dalam pembuatan peraturan daerah, dan (3) alternatif model akuntabilitas politik dalam pembuatan peraturan daerah.

Gambaran yang lebih operasional dari konsep yang digunakan sebagai pisau analisis disetiap fokus dalam penelitian ini, dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Akuntabilitas politik, adanya legitimasi program oleh masyarakat melalui partisipasinya dalam sistem demokrasi serta pengakuan atas kewenangan politik yang dimiliki oleh DPRD untuk mengatur, membuat dan menetapkan keputusan politik.Indikator akuntabilitas ini merujuk pada apa yang dikemukakan oleh David Hulme dan Mark Turner yang mengformulasikan 6 (enam) indikator utama, yaitu: (1) *legitimacy decision makers* (legitimasi DPRD sebagai pembuat Perda), (2) *moral conduct* (keberadaan kualitas moral dari DPRD), (3) *responsiveness* (kepekaan terhadap aspirasi yang berkembang), (4) *openness* (keterbukaan atas informasi dan partisipasi), (5) *optimal resource utilization* (pemanfaatan sumberdaya secara optimal), dan (6) *improving efficiency and effectiviness* (peningkatan efisiensi dan efektivitas).

Faktor determinan, faktor yang menentukan dalam proses pembahasan dan pembuatan Perda oleh DPRD. Indikator untuk faktor deteriminan ini merujuk pada pengembangan konsep akuntabilitas politik yang dikemukakan oleh Jabbra dan Dwivedi, yaitu *the legitimate of public program with participation*. Indikator dari rujukan konsep tersebut adalah, meliputi: (1) adanya partisipasi, dan (2) adanya pengakuan atas kewenangan

Alternatif model, adalah suatu model alternatif yang merupakan hasil rekomendasi dari penelitian ini setelah menganalisis dari aspek *theroitical model* dan *existing model* sebagai hasil kajian dari fokus akuntabilitas politik dan fokus faktor determinan dalam pembuatan Perda oleh DPRD yang dalam penelitian ini akan melahirkan rekomendasi tentang model akuntabilitas politik DPRD.

Akuntabilitias politik DPRD sebagai sebuah organisasi publik yang memiliki tanggungjawab etis-politik kepada rakyat, salah satu indikatornya adalah terletak pada sejauh mana isntitusi ini memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilihnya melalui berbagai kebijakan yang berbentuk peraturan daerah yang dibahas secara bersama-sama dengan pihak eksekutif (pemerintah) yang akan bemuara pada program-program yang didukung oleh anggaran yang secara teknis operasional akan dilaksanakan oleh jajaran eksekutif dibawa kendali walikota sebagai kepala daerah. Aspek yang perlu dipertanggungjawabkan DPRD kepada publik adalah terkait dengan bagaimana proses dan prosedur perencanaan, penyusunan dan pembahasan berbagai hal yang terkait dengan kepentingan masyakarat yang kemudian melahirkan produk kebijakan dalam bentuk Perda.

Selanjutnya pada bagian ini akan menyajikan data-data hasil penelitian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari penelitian, fokus penyajian data dan analisis yang masing-masing akan diuraikan kedalam tiga fokus penelitian dan dibagi lagi menjadi beberapa indikator. Adapun paparan data hasil penelitian yang sudah dianalisis dapat dipaparkan dibawah ini:

1. **Proses pelaksanaan akuntabilitas politik pada DPRD Kota Manado dalam pembuatan Peraturan Daerah**
2. *Legitimasi decision makers*

*Legitimacy decision makers* adalah adanya pengakuan atau keabsahan dalam pembuatan dan pembahasan serta penetapan Perda yang berasal dari DPRD. Pada Sub fokus ini untuk mengetahui proses akuntabilitas yang dilaksanakan dibagi lagi menjadi beberapa indikator, yakni: (1) *constitutions* adalah pelaksanaan kewenangan pembuatan Perda oleh DPRD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) *electoral systems for governments and decisions-making*, dalam hal ini berkaitan dengan sistem dan mekanisme yang digunakan dalam pengajuan dan pembahasan serta penetapan Perda yang dilakukan oleh DPRD bersama eksekutif, (3) *bureaucratic system of representation,* adalah pelaksanaan sistem perwakilan dalam pembuatan Perda di DPRD, (4) *royal prerogrative,* berkaitan dengan hak istimewa yang melekat pada DPRD dalam hal ini hak untuk mengajukan Ranperda (hak inisiatif), (5) *legislation,* dalam hal ini tugas dan fungsi DPRD sebagai pembuat peraturan, (6) *letters of appointment,* dalam hal ini terkait dengan adanya kerjasama dalam pembahasan Ranperda baik DPRD dengan pihak eksekutif, (7) *formal delegation of authority,* adanya pendelegasian kewenangan secara formal dalam pelaksanaan pembahasan Ranperda secara delegatif, (8) *standing orders*, adanya muatan kepentingan tertentu oleh DPRD sebagai titipan atau pesanan dari pihak tertentu dalam pembahasan Ranperda.

1. *Constitutions* (konstitusi)

*Constitutions* adalah pelaksanaan kewenangan pembuatan Perda oleh DPRD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengetahui hal tersebut peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan “HK” sebagai anggota DPRD Kota Manado Periode 2009–2014, apakah ada produk Peraturan Daerah (Perda) yang berasal dari DPRD (Perda Inisiatif)? Demikian pernyataan informan “HK”:

Kinerja atau performance DPRD Manado sangat tergantung pada produk Raneprda yang ditetapkan menjadi Perda. Tetapi kenyataannya sulit direalisasikan. Sebab hanya 2 (dua) perda inisiatif tetapi tepatnya perda tentang apa, saya sudah lupa. Yang mengurus itu ketua Balegda Sdr. Franklyn Sinjal. Ada yang sudah dibahas tetapi belum disahkan walaupun menurut Kabag Hukum pada saat itu Bapak Donal Supit mengatakan itu sudah disahkan, tapi saya katakan belum. Memang Ranperda itu ada 2 (dua), ada yang usul dari pemerintah atau Walikota danada yang usulan dari DPRD Manado. Dan kalau sampai usulan itu sama maka yang digunakan adalah usulan dari DPRD Manado. Tapi yang selesai dibahas dan ditetapkan hanya ada 2 (dua) Perda dari 6 atau 7 Ranperda Inisiatif DPRD Manado yang lain belum sempat terealisasi karena pada waktu itu berkas-berkasnya kena banjir (Wawancara, 14-09-2015).

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa yang selesai dibahas dan ditetapkan hanya ada 2 (dua) Perda dari 6 atau 7 Ranperda Inisiatif DPRD Manado yang lain belum sempat terealisasi karena pada waktu itu berkas-berkasnya kena banjir. Selanjutnya peneliti mengexplore data untuk mengetahui lebih mendalam mengenai Perda yang berasal dari DPRD kepada informan “BP” dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Manado Periode 2009–2014, tentang produk Peraturan Daerah (Perda) yang berasal dari DPRD atau yang dikenal dengan Perda Inisiatif, apakah ada Perda yang berasal dari DPRD Kota Manado Periode 2009-2014?Demikian pernyataan informan “BP”:

Ada beberapa Perda yang berasal dari DPRD. Tunggu, saya hubungi teman ketua Balegda (informan saat itu menelepon melalui telepon genggam/hp) tapi tidak tersambung). Kemudian informan melanjutkan dan mengatakan bahwa ada, waktu lalu kalau tidak salah Perda tentang penyertaan modal dan perusahaan daerah pasar. Ada kurang lebih 10 Perda inisiatif tetapi yang ditetapkan selama Periode 2009 – 2010 tidak lebih dari 6 (enam) Perda yang ditetapkan. Ada beberapa yang tidak sampai dibahas atau ditetapkan karena banjir dan ada yang sudah dibahas namun tidak sampai masuk dalam lembaran daerah karena berkas-berkasnya lenyap karena banjir (Wawancara, 14-09-2015).

Dari data diatas dapat diketahui bahwa kurang lebih 10 Perda inisiatif tetapi yang ditetapkan selama Periode 2009 – 2010 tidak lebih dari 6 (enam) Perda yang ditetapkan. Ada beberapa yang tidak sampai dibahas atau ditetapkan karena banjir dan ada yang sudah dibahas namun tidak sampai masuk dalam lembaran daerah karena berkas-berkasnya lenyap karena banjir. Dari kedua data diatas terjadi perbedaan mengenai jumlah Perda yang dibahas di DPRD sebelum ditetapkan. Selanjutnya data di dalami kepada salah satu pimpinan DPRD Kota Manado yakni informan “JK” Sebagai anggota DPRD Kota Manado Periode 2009 – 2014, untuk mengetahui apakah ada Peraturan Daerah (Perda) yang berasal dari DPRD atau Perda Inisiatif. Demikian pernyataan informan “JK”:

Yang benar-benar dari DPRD tidak ada. Karena ada beberapa yang mau diusulkan tetapi hanya sampai pada rencana tetapi tidak dibahas secara serius hanya sampai pada konsep yang masuk pada Prolegda tetapi selanjutnya tidak pernah dibahas. Konsep untuk usulan dari DPRD tersebut memang ada hingga diagendakan oleh Balegda walaupun konsep tertulisnya belum ada kemudian dibawah dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi program legislasi daerah.Mengenai apakah Ranperda dari DPRD Manado tersebut, usulan dari siapa atau apakah dari anggota DPRD Manado, atau Komisi atau dari Balegda, menurut saya, itu langsung dari Balegda yang diusulkan kepada Pimpinan DPRD Manado dan ditetapkan menjadi program legislasi daerah dalam rapat paripurna DPRD Manado.Mengapa usulan Perda tersebut tidak dibahas oleh DPRD Manado bersama dengan pihak eksekutif (Walikota Manado). Karena Balegda tidak menyiapkan nama Perdanya tentang apa. Akhirnya ikut usulan yang dari pihak eksekutif atau pemerintah Kota Manado kebetulan lagi banyak usulan Perda dari yang diajukan atau diusulkan oleh eksekutif (Walikota). Ada beberapa yang disepakati menjadi usulan perda inisiatif DPRD Manado dalam Prolegda (Wawancara, 21-09-2015).

Dari data diatas agak berbeda dengan data sebelumnya, sebab menurut informan Perda inisiatif tidak pernah ada, apalgi dibahas.Ada beberapa yang hendak diusulkan tetapi hanya sampai pada rencana dan tidak dibahas secara serius hanya sampai pada konsep yang masuk pada Prolegda tetapi selanjutnya tidak pernah dibahas. Konsep untuk usulan dari DPRD tersebut memang ada hingga diagendakan oleh Balegda walaupun konsep tertulisnya belum ada kemudian dibawah dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi program legislasi daerah. Selanjutnya karena beberapa data yang berbeda peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan tahapan credibility dengan mendalami pertanyaan mengenai Apakah ada Perda yang berasal dari DPRD Kota Manado Periode 2009 -2014 informan “NT” sebagai Kepala Bidang Hukum dan Risalah Persidangan, dan “DS”sebagai Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Pemerintah Kota Manado lalu, dan “SL”serta “DM” sebagai Sekretaris Balegda DPRD Periode 2009-2014. Dari Semua informan menjawab bahwa ada Perda inisiatif namun mereka masing masing kurang mengetahui persis ada berapa yang dibahas tetapi semuanya menjawab sama bahwa ada 2 (dua) produk Perda inisiatif yang dihasilkan. Namun terjadi perbedaan data primer dimana ada beberapa pimpinan DPRD bahkan anggota Balegda sendiri kurang memahami dan mengetahui pasti jumlah Perda inisiatif yang dihasilkan, bahkan ada yang menjawab tidak ada. Hal ini menjadi *Question mark* bagi peneliti mengenai akuntabilitas politik untuk menjalankan fungsi legislasi dari anggota DPRD Kota Manado, sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut terkait prosedur yang dilakukan apakah sesuai dengan landasan aturan yang ada atau bagaimana, demikian data tersebut yang digali melalui informan “MM” sebagai staf Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kota Manado, demikian pernyataan informan:

Menjawab pertanyaan Bapak tentang apakah ada Perda yang berasal dari DPRD Kota Manado Periode 2009-2014 menurut saya ada Perda yang dibuat pada periode terakhir, tapi atas desakan dan hanya ada 2 Perda inisiatif yang dibuat. Desakan tersebut berasal dari publik melalui media. Kalau tidak didesak saya rasa tidak akan dibuat, namun itupun hasilnya tidak sesuai harapan masyarakat. Dan jika ditanyakan apakah Perda inisiatif yang dibuat sudah sesuai dengan prosedur? Dari pengamatan saya kurang prosedural karena dalam pembuatan Perda tersebut tidak efisien dan efektif dan hanya disuruh pihak sekretariat untuk mengolahnya dan diambil dari usulan eksekutif lalu di atur sedemikian rupa tetapi tahapannya tidak dilakukan sesuai aturan dalam penyusunan Perda inisiatif, hanya dikumpulkan melalui media tanpa melalui musyawarah dengan masyarakat. Perda inisiatif tidak jalan karena dimentahkan oleh Depdagri (Wawancara, 23-10-2015).

Selanjutnya data di explore kepada rekan kerja dari informan sebelumnya mengenai 2 (dua) Perda yang berasal dari DPRD Kota Manado tersebut terkait Perda tentang apa saja? Atau isinya tentang apa saja, Demikian pernyataan informan “HK”:

Perda yang dibahas dan disetujui oleh DPRD ada 2 (dua) tetapi tidak ingat lagi tepatnya Perda tentang apa. Kalau tidak salah Perda tentang Penyertaan Modal Bank Sulut dan Perda tentang PD Pasar (Wawancara dengan HK, 14-09-2016).

Jadi tidak ada Perda yang ditetapkan oleh DPRD Kota Manado Periode 2009-2014? Demikian pernyataan informan JK:

Kalau Perda inisiatif ada, hanya waktudiusul untuk masuk dalam Program legislasi daerah Balegda tidak ada. Itu ada saat sudah ada kesepakatan atau pembicaraan dengan pihak pemerintah kota Manado dan akhirnya ada Perda usulan DPRD Manado yang masuk Prolegda Kota Manado (Wawancara, 21-09-2015).

Jika ada, ada berapa Perda yang berasal dari DPRD (Perda inisiatif) yang dihasilkan selama DPRD periode 2009-2014? Demikian pernyataan informan NT:

Yang dibahas disetujui oleh DPRD Manado ada 4 Perda, hanya saja yang diproses sampai ditetapkan oleh Walikota dan masuk lembaran daerah hanya 2 Perda (Wawancara, 29-09-2015).

Selanjutnya data yang ada dikonfirmasi kembali pada informan sebelumnya yang menjawab tidak ada, ketika dikonfirmasi kembali mengenai berapa banyak Perda inisiatif yang ditetapkan oleh DPRD Manado sepanjang periode 2009-2014? Demikian pernyataan informan “JK”:

Kalau yang ditetapkan maksudnya yang disetujui oleh DPRD Kota Manado melalui keputusan Pimpinan DPRD Kota Manado dalam rapat paripurna DPRD, kalau tidak salah ada 4 Perda. Kalau tidak salah ada Perda inisiatif yang dibahas oleh DPRD Kota Manado hanya saja itu tidak sampai diproses namun Perda itu sudah selesai dibahas di DPRD atau sudah disetujui oleh DPRD bersama dengan Walikota Manado karena berkas risalah-rasalah persidangan dan berita acara persetujuan pimpinan DPRD Manado hilang karena waktu itu ada banjir (Wawancara, 21-09-2015).

Berapa banyak Perda yang berasal dari DPRD (Perda inisiatif) yang dihasilkan oleh DPRD selama periode 2009-2010? Demikian pernyataan informan DS:

Kalau tidak salah ada 4, DPRD Manado sempat membahas Ranperda inisiatif, antara lain tentang: (1) Perda penempatan tower siaran dan komunikasi, (2) Perda tata letak reklame, (3) Perda penyertaan modal pada Bank Sulut, (4) Perda tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Nanti dicek lagi sama Pak Noldy Kasubag Persidangan dan Hukum (Wawancara, 29-09-2015).

Jika ada, ada berapakah banyak Perda yang berasal dari DPRD (perda inisiatif) yang dihasilkan oleh DPRD selama periode 2009-2010? Demikian pernyataan informan DM:

Kalau tidak salah hanya 2 (dua) perda inisiatif yang ditetapkan sampai diundangkan dalam lembaran daerah. Saya tidak ingat jelas, tetapi kira-kira hanya 2 (dua) memang dan kalau tidak salah ingat 2 (dua) Perda inisiatif tersebut, adalah Perda tentang perparkiran dan Perda tentang tata cara pembentukan peraturan daerah. Dan ada lagi 2 Perda yang sudah selesai dibahas dan DPRD sudah menyetujuinya namun tidak dapat ditindaklanjuti kepada Walikota Manado untuk ditetapkan, kalau tidak salah Perda itu mengenai tata letak penempatan reklame, dan Perda tentang tower siaran dan komunikasi (Wawancara, 07-10-2015).

Jika ada, berapakah Perda yang berasal dari DPRD Kota Manado periode 2009-2014? pernyataan informan SL, SS dan “MM” menjawab semuanya ada 4 Perda. Dari data tersebut terjadi perbedaan mencolok dimana tidak semua anggota DPRD Kota Manado memahami tugas dan fungsinya dalam menjalankan fungsi legislasi terkait pembuatan Perda oleh DPRD Kota Manado. Hal tersebut terlihat adanya perbedaan data, dari ke 17 informan ada 9 informan yang menjawab berbeda dan kurang memahami mengenai produk yang dihasilkan yakni Perda inisiatif tersebut.

Selanjutnya mengenai ada berapa Perda yang dibahas dan ditetapkan. Jika ada, berapakah Perda yang berasal dari DPRD (Perda inisiatif) yang dihasilkan selama periode 2009-2014? Demikian pernyataan informan “DR”:

Kalau tidak salah ada 2 (dua),Perda yang sudah selesai dibahas dan diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Manado itu kalau kita tidak salah ingat ada Perda tentang Penempatan Reklame, ada Perda tentang Pembentukan Perda (Wawancara, 29-10-2015).

Perda tentang apa saja yang telah dihasilkan oleh DPRD Kota Manado yang merupkan Perda insiatif? Demikian pernyataan informan SL:

Saya lupa tetapi kalau tidak salah, ada Perda tentang Tower, baru Perda tentang penempatan reklame dan Perda tentang aset PD Pasar serta Perda tentang pembentukan Perda. Kalau saya tidak lupa, itu tentang Perparkiran dan Perda tentang penempatan tower dan siaran. Dua Perda ini yang mungkin tidak berlanjut prosesnya, hanya saja sudah selesai dibahas dan disetujui oleh DPRD Kota Manado.Kalau Perda yang sudah masuk di Prolegda terus tidak dibahas oleh DPRD Manado, setahu saya ada yang tidak sempat dibahas (Wawancara, 23-10-2015).

Perda apa saja yang telah dihasilkan oleh DPRD Kota Manado yang merupakan Perda yang berasal dari DPRD Kota Manado? Demikian pernyataan informan “NT”:

Ada 2 (dua) Perda-perda itu yaitu: (1) Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Perarturan Daerah, ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2012, (2) Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Letak Penempatan Reklame. Terus ada Ranperda yang sudah selesai dibahas bahkan disetujui oleh DPRD bersama dengan Walikota namun tidak dapat diproses lanjut sampai untuk ditetapkan oleh Walikota Manado karena berkasnya hilang karena banjir. Kedua Ranperda itu yaitu: (1) Ranperda tentang Tata Letak Penempatan Tower Siaran dan Komunikasi, (2) Ranperda tentang Pengelolaan Perparkiran di Kota Manado. Kedua Ranperda tersebut dibahas juga telah disetujui oleh DPRD melalui rapat paripurna DPRD Kota Manado pada tanggal 30 Desember 2013 (Wawancara, 29-10-2015).

Dari data diatas dapat diperoleh bahwa ada 2 (dua) Perda inisiatif yang dihasilkan. Perda-perda itu yaitu: (1) Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Perarturan Daerah, ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2012, (2) Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Letak Penempatan Reklame. Terus ada Ranperda yang sudah selesai dibahas bahkan disetujui oleh DPRD bersama dengan Walikota namun tidak dapat diproses lanjut sampai untuk ditetapkan oleh Walikota Manado karena berkasnya hilang karena banjir. Kedua Ranperda itu yaitu: (1) Ranperda tentang Tata Letak Penempatan Tower Siaran dan Komunikasi, (2) Ranperda tentang Pengelolaan Perparkiran di Kota Manado. Kedua Ranperda tersebut dibahas juga dan telah disetujui oleh DPRD melalui rapat paripurna DPRD Kota Manado pada tanggal 30 Desember 2013.

Apakah ada Ranperda yang belum dibahas atau belum ditetapkan pada periode 2009-2014? Demikian pernyataan informan HK:

Ada tapi saya tidak ingat lagi Ranperda-Ranperda yang tidak sempat dibahas khususnya yang berasal dari DPRD.Sebelum menjawab pertanyaan, informan menanyakan hal tersebut kepada anggota DPRD lainnya (Revanny Parasan) yang juga anggota DPRD Periode 2009-2014. Informan menanyakan tentang Ranperda inisiatif DPRD yang belum atau tidak dapat dibahas dan ditetapkan oleh DPRD Manado periode lalu. Namun yang ditanya menjawab sudah tidak ingat lagi. Demikian juga informan tidak lagi mengetahui Ranperda-Ranperda tersebut. Kalau tidak salah salah satu Ranperda yang sudah dibahas oleh DPRD Manado tapi kemudian tidak dapat dilanjutkan karena berkas-berkasnya sudah hilang karena banjir, yaitu Perda tentang Menara Telkomsel (Wawancara, 14-09-2015).

Apakah ada Perda yang belum dibahas atau belum ditetapkan pada periode 2009-2014? Demikian pernyataan informan DS:

Seingat saya ada, namun Tidak semuanya apa yang telah di programkan dalam Prolegda terus direalisasikan. Bahkan kalau tidak salah ada yang sudah dibahas melalui Pansus, terus sudah melakukan studi banding ke daerah-daerah lain namun pembahasannya tidak berlanjut. Tidak tahu juga apa penyebabnya sehingga pembahasan Perda tersebut tidak berlanjut padahal sudah ada anggarannya. Ada. Dari beberapa Perda yang masuk Prolegda, ada Perda yang tidak dibahas (Wawancara, 29-09-2015).

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa beberapa informan menjawab bahwa ada Perda yang masuk dalam Prolegda, namun tidak semuanya yang telah diprogramkan dalam Prolegda terus direalisasikan. Dari data bahwa ada yang sudah dibahas melalui Pansus, terus sudah melakukan studi banding ke daerah-daerah lain namun pembahasannya tidak berlanjut. Penyebabnya karena kurang serius dalam menjalankan tugasnya, sehingga pembahasan Perda tersebut tidak berlanjut padahal sudah ada anggarannya.

Hal ini lebih disebabkan karena tidak semua anggota DPRD Manado memiliki kemampuan, kualitas, kompetensi dan leadership yang baik. Disatu sisi ada yang punya kualitas, pintar tapi tidak digunakan hak privilagenya. Adakalanya hanya lebih menonjol kepentingan pribadi. Banyak juga yang cuek, yang penting terima gaji. Sehingga yang peduli hanya orang-orang tertentu. Ini juga yang menyebabkan kinerja DPRD secara lembaga kurang maksimal. Ada juga karena faktor anggaran yang terbatas sebab kebutuhan biaya untuk setiap perda sekitar 250 s.d 300 juta. Sebab itu kadang tinggal ada kesepakatan dan pembagian Ranperda-Ranperda untuk dibagikan antara usulan dari DPRD dan usulan dari Pemerintah atau Walikota Manado. Ada juga alasan lain penyebabnya ketika sudah diprogramkan dan berkasnya sudah masuk tapi, karena banjir semua berkas hilang sebelum ada pengesahan.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah setiap tahun ada Ranperda inisiatif yang disiapkan oleh DPRD Manado kemudian ditetapkan menjadi Prolegda? Demikian pernyataan informan BP:

Karena itu adalah salah satu tugas dan fungsi DPRD, harusnya itu ada dalam setiap program DPRD bersama dengan eksekutif. Tetapi kenyataannya itu belum jalan, karena banyak anggota juga yang acuh, cuek dan masa bodoh. Masalahnya sampai Perda itu tidak dibahas, karena anggota DPRD, Komisi dan Balegda tidak serius untuk menyiapkan dan membahas Ranperda yang berasal dari DPRD Manado (Wawancara, 14-09-2015).

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa Perda yang diusulkan belum dibahas dan dimasukkan dalam Prolegda dan kenyataannya itu belum jalan, karena banyak anggota juga yang acuh, cuek dan masa bodoh. masalahnya sampai Perda itu tidak dibahas, hal tersebut disebabkan karena anggota DPRD, Komisi dan Balegda tidak serius untuk menyiapkan dan membahas Ranperda yang berasal dari DPRD Manado.

Selanjutnya data di *explore* melalui teknik *triangulasi* untuk keabsahan data tentang apa permasalahannya atau penyebabnya sehingga Perda tersebut belum dibahas atau ditetapkan menjadi Perda? Demikian pernyataan informan “DS” sebagai Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Pemerintah Kota Manado:

Mungkin lebih disebabkan tidak cukup waktu DPRD untuk membahasnya juga waktu itu kalau saya amati karena lebih disebabkan DPRD tidak serius mau membahasnya itukan Perda inisiatif. Jadi sebenarnya tergantung dari mereka di DPRD mau membahas atau bagimana prinsipnya kami waktu itu dari eksekutif kalau kami diundang untuk membahasnya kami siap, cuman itu DPRD tidak mengundang kami untuk membahasnya (Wawancara, 29-09-2015).

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa disebabkan tidak cukup waktu DPRD untuk membahasnya juga waktu itu kalau saya amati karena lebih disebabkan DPRD tidak serius mau membahasnya itukan Perda inisiatif. Jadi sebenarnya tergantung dari mereka di DPRD mau membahas atau bagimana prinsipnya kami waktu itu dari eksekutif kalau kami diundang untuk membahasnya kami siap, dari pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa beberapa informan sebagai anggota DPRD kurang memahami proses dan prosedur dari tahapan yang harus dilakuakn dalam pembuatan Perda insiatif tersebut. Selanjutnya untuk lebih diketahui mengenai apa permasalahannya atau penyebabnya sehingga Perda tersebut belum dibahas atau ditetapkan menjadi perda? Demikian pernyataan informan “SL”:

Karena masalah banjir sehingga dokumen-dokumennya tidak ada lagi, karena ada yang sudah dibahas dan ada yang baru direncanakan untuk dibahas. Juga itu, karena ada himbauan dari Mendagri untuk mengevaluasi Perda-Perda yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi (Wawancara: 23-10-2015).

Alasan klasik yang disampaikan adalah disebabkan karena masalah banjir sehingga dokumen-dokumennya tidak ada lagi, karena ada yang sudah dibahas dan ada yang baru direncanakan untuk dibahas. Juga itu, karena ada himbauan dari Mendagri untuk mengevaluasi perda-perda yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Namun permasalahan disini juga karena Balegda DPRD tidak serius mau membahas.

Kemudian apakah setiap Komisi atau anggota DPRD mengajukan atau mengusulkan Ranperda? Demikian pernyataan informan HK:

Pengajuan atau usul Ranperda merupakan hak anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Badan Legislasi Daerah (Balegda). Setahu saya pada periode 2009–2014 setiap Komisi mengusulkan masing-masing 2 (dua) Ranperda jadi seluruhnya ada 8 (delapan) Ranperda dan itu disampaikan kepada Balegda, Balegda yang kemudian membahasnya apakah dapat diterima menjadi Program Legislasi Daerah atau tidak. Hanya saja yang terjadi adalah khusus untuk Ranperda inisiatif sepengetahuan saya tidak ada yang diusulkan oleh anggota atau komisi, yang ada itu usulan langsung dari Balegda. Ranperda disiapkan dan dikaji oleh Balegda setelah sebelumnya telah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) (Wawancara, 14-09-15).

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pengajuan atau usul Ranperda merupakan hak anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Badan Legislasi Daerah (Balegda). Pada periode 2009–2014 setiap Komisi mengusulkan masing-masing 2 (dua) Ranperda, seluruhnya ada 8 (delapan) Ranperda dan itu disampaikan kepada Balegda, Balegda yang kemudian membahasnya apakah dapat diterima menjadi Program Legislasi Daerah atau tidak. Dari temuan yang ada khusus untuk Ranperda inisiatif tidak ada yang diusulkan oleh anggota atau komisi, yang ada itu usulan langsung dari Balegda. Ranperda disiapkan dan dikaji oleh Balegda setelah sebelumnya telah masuk dalam program lelgislasi daerah (Prolegda).Kalau pengusulan komisi tidak ada, apalagi usulan dari anggota. Seharusnya sesuai aturan usulan Ranperda itu dapat dari anggota DPRD Kota Manado dan juga dari Komisi atau Balegda. Kenyataan yang ada penyiapan Ranperda itu langsung oleh Balegda. Dalam ketentuan seharusnya proses pengajuan Ranperda diusul oleh minimal 5 (lima) orang anggota 1 (satu) fraksi yang diusulkan dalam rapat paripurna. Kalau disetujui akan dilanjutkan oleh Balegda dan dimasukan dicatat dalam Prolegda. Dan Bamus membentuk Pansus.

Selanjutnya mengenai Komisi-komisi mana saja yang mengusulkan Ranperda dan komisi mana saja yang tidak mengusulkan Ranperda? Demikian pernyataan informan”BP”:

Proses pengajuan Ranperda diusul oleh minimal 5 (lima) orang anggota 1 (satu) fraksi yang diusulkan dalam rapat paripurna. Kalau disetujui akan dilanjutkan oleh Balegda dan dimasukan dicatat dalam Prolegda. Dan Bamus membentuk Pansus. Untuk Perda penyertaan modal itu diusulkan oleh Balegda karena itu sangat urgen (Wawancara, 14-09-2015).

Komisi-komisi mana saja yang mengusulkan Ranperda inisiatif? Demikian pernyataan informan JK:

Kalau komisi tidak ada apalagi usulan dari anggota. Sebab usulan Ranperda itukan dapat dari anggota DPRD Kota Manado dan juga dari Komisi atau Balegda. Sepengetahuan kita penyiapan Ranperda itu langsung oleh Balegda (Wawancara, 21-09-2015)

Apa yang dikemuakan oleh informan JK ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan NT,DS, DM, SL, DR. Intinya bahwa tidak ada Perda inisiatif yang diusulkan oleh Komisi, semuanya usulan dari Balegda.

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa semua Ranperda yang bersasal dari DPRD itu tidak ada yang diusulkan oleh komisi yang ada itu dari Balegda. Anggota kurang aktif dan dalam pengamatan saya sebagian besar anggota DPRD Manado periode itu, kurang aktif baik dalam menyampaikan ide, gagasan, maupun pendapat apalagi menyiapkan ranperda. Dalam pembahasan Perda sebagian besar saja anggota tidak aktif, yang aktif hanya beberapa orang saja hanya sekitar 6 atau 7 orang yang aktif dan memiliki perahatian serta kapasitas.

Apakah memang setiap Ranperda tersebut telah dimasukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda)? Demikian pernyataan informan HK:

Karena harus diperiksa setelah itu barulah akan diputuskan apakah akan disetujui atau tidak di rapat paripurna DPRD. Apabila disetujui maka ranperda itu dilakukan pembahasan dan melalui Bamus menetapkan apakah perlu dibentuk Pansus atau langsung diserahkan pada komisi tertentu untuk pembahasannya (Wawancara dengan HK, 14-09-2016).

Pernyataan informan HK ini juga sejalan dengan yang disampaikan ole informan BP, JK, NT, DS, SL, MM, DR. Mereka menyatakan bahwa setiap Ranperda sebelumnya telah masuk dalam Prolegda.

Selanjutnya dapat dianalisis bahwa pengajuan pembahasan Ranperda dari Balegda sebelumnya telah ditetapkan menjadi Prolegda dalam rapat paripurna yang diagendakan oleh Badan Musyawarah (Bamus) dan setelah itu dibuat naskah akademiknya oleh Balegda karena dalam UU Nomor 12 tahun 2011 harus ada naskah akademik sebagai pertanggungjawaban secara akademik. Karena Prolegda itu adalah amanat UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sejak berlakuknya peraturan tersebut maka sejak tahun 2011 telah dibahas juga tentang Prolegda untuk tahun 2012. Dan Prolegda DPRD Manado tahun 2012, telah ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2011. Pada Prolegda tersebut telah ditetapkan ada 6 Perda inisiatif DPRD yang diprogramkan untuk dibahas pada tahun 2012. Perda-perda tersebut adalah: (1) Perda Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Inisiatif Balegda). Perda ini telah ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah, (2) Perda Tata Letak Penempatan Tower Siaran dan Komunikasi (Inisiatif Balegda). Akhir tahun 2013 telah dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Manado, namun tidak sempat diproses dan kirim kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara karena berkas-berkasnya hilang karena banjir bandang di Manado, (3) Perda Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan PDAM dan PD. Pasar Kota Manado (Inisiatif Komisi A). Perda ini tidak sempat dibahas, (4) Perda Pegelolaan Perparkiran di Kota Manado (Inisiatif Komisi B). Tidak sempat dibahas, (5) Perda Tata Letak Penempatan Reklame (Inisiatif Komisi C). Perda ini telah ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah, (6) Perda Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Manado (Inisiatif Komisi D). Perda ini sebelumnya merupakan usulan dalam Prolegda dari pihak eksekutif namun saat masuk dalam pembahasan Prolegda bersama Balegda di DPRD, usulan Prolegda ini diambil alih oleh DPRD Manado dan kemudian ditetapkan menjadi Prolegda inisiatif DPRD Manado. Demikian juga dengan rencana pos anggaran pembentukan Perda tersebut dipindahkan di pos DPRD Kota Manado. Hanya saja Perda inipun tidak sempat dibahas oleh DPRD Manado bersama-sama dengan pihak eksekutif. Hanya saja setiap tahun DPRD Manado telah menetapkan Prolegdanya. Untuk Prolegda tahun 2014 telah dibahas secara bersama dengan pihak eksekutif pada tahun 2013, hanya saja tidak sempat keluar penetapan prolegdanya karena berkas-berkas yang ada telah hilang dan lenyap karena Manado dilanda banjir bandang pada saat itu. Disamping juga pada saat itu sudah memasuki masa transisi atau peralihan dengan kegiatan-kegiatan persiapan pelaksanaan pemilihan umum dan Pilpres. Sehingga DPRD Manado tidak lagi terkonsentrasi pada membicarakan dan membahas kembali Prolegda tahun 2014.

Agar datanya bersifat kredibel, maka data primer tersebut kemudian peneliti sandingkan dengan data sekunder yang terkait dengan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kota Manado pada tahun 2011 sebagai program yang akan dilaksanakan untuk tahun 2012. Jumlah Prolegda tersebut dapat dilihat melalui Tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.1 Daftar Perda Inisiatif Program Legislasi Daerah Kota Manado Tahun 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tentang | Status | | Keterangan |
| Baru | Ubah |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah | Baru |  | Insiatif DPRD  (Balegda) |
| 2. | Tata Letak Pnempatan Tower Siaran dan Komunikasi | Baru |  | Inisiatif DPRD  (Balegda) |
| 3. | Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan PDAM dan PD. Pasar Kota Manado |  | Ubah | Inisiatif DPRD  (Komisi A) |
| 4. | Pengelolaan Perparkiran di Kota Manado | Baru |  | Inisiatif DPRD  (Komisi B) |
| 5. | Tata Letak Penempatan Reklame | Baru |  | Inisiatif DPRD  (Komisi C) |
| 6. | Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Manado | Baru |  | Inisiatif DPRD  (Komisi D) |
| 7. | Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Manado Tahun 2011 2/d 2031 |  | Ubah | Usul Pemerintah Kota Manado |
| 8. | Bangunan Gedung |  | Ubah | Usul Pemerintah Kota Manado |
| 9. | Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Baru |  | Usul Pemerintah Kota Manado |
| 10. | Perixinan Sarana Penunjang Kesehatan dan Praktek Tenaga Kesehatan di Kota Manado | Baru |  | Usul Pemerintah Kota Manado |
| 11. | PBB Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) | Baru |  | Usul Pemerintah Kota Manado |
| 12. | Penyidik Pegawai Negeri Sipil | Baru |  | Usul Pemerintah Kota Manado |
| 13. | Pengelolaan Air Tanah | Baru |  | Usul Pemerintah Kota Manado |
| 14. | Rencana Induk Pengembnagan Pariwisata Daerah (RPPDA) | Baru |  | Usul Pemerintah Kota Manado |
| 15. | Penanggulangan Bencana di Kota Manado | Baru |  | Usul Pemerintah Kota Manado |
| 16. | Ikon, Branding dan Batik Manado | Baru |  | Usul Pemerintah Kota Manado |
| 17. | Situs dan Obyek Wisata di Kota Manado | Baru |  | Usul Pemerintah Kota Manado |
| 18. | Pembentukan, Pemekaran dan Perubahan Kecamatan Bunaken, Kecamatan Paal Dua dan Kecamatan Winangun | Baru |  | Usul Pemerintah Kota Manado |
| 19. | Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat KORPRI Kota Manado | Baru |  | Usul Pemerintah Kota Manado |
| 20. | Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organaisasi dan Tata Kerja Teknis Lembaga Teknis Daerah Kota Manado |  | Ubah | Usul Pemerintah Kota Manado |
| 21. | Perubahan Atas Perda Kota Manado Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Dinas Kota Manado |  | Ubah | Usul Pemerintah Kota Manado |
| 22. | Perubahan Atas Perda Kota Manado Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kota Manado |  | Ubah | Usul Pemerintah Kota Manado |

Sumber: Data Diolah Peneliti (2015)

Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Manado, berdasarkan data yang ada secara efektif baru ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kota Manado pada tahun 2011 untuk Program Legislasi Daerah tahun 2012. Dan untuk Prolegda tahun-tahun berikutnya tidak ditemukan lagi. Hal ini disebabkan proses penyiapan dan penyusunan Prolegda tidak lagi mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan DPRD Kota Manado dimana tidak lagi ditetapkan melelui keputusan pimpinan DPRD Kota Manado, tetapi dalam prakteknya proses penyusunan Prolegda langsung dibahas bersama oleh Badan Legislasi daerah (Balegda) bersama dengan pihak pemerintah Kota Manado.

Selanjutnya pertanyaan yang baru diajukan kepada beberapa informan yang telah dipilih secara purposive, untuk mengetahui apa landasan juridisnya untuk pengusulan pengajuan dan pembahasan Ranperda yang berasal dari DPRD Kota Manado. Demikian pernyataan informan “HK”:

Saat itu informan menghubungi Pak Novi staff di bagian hukum dan risalah DPRD Manado via telp genggam menanyakan tentang landasan hukum pengjuan dan pembahasan Ranperda yang berasal dari DPRD. Dan dari situ kemudian informan mendapat jawabannya adalah Perda 1 2014 (PP No. 1) (Wawancara, 14-10-15).

Dalam pengusulan Perda tersebut bisa diketahui landasan aturan yang digunakan? Demikian pernyataan informan BP:

Memang diakui ada sosialisasi dalam Bimtek dan studi banding, namun dari prosedur resmi terkait aturan saya lupa, lebih saya jawab apa adanya daripada saya salah menyebutkan, apalagi ini masalahnya aturan, harus tepat kalau salah beri informasi, bisa intepretasinya lain (Wawancara, 14-10-15).

Selanjutnya karena informan diatas belum memahami sepenuhnya maka data dikonfirmasi kembali kepada anggota DPRD Kota Manado lainnya, untuk mengetahi dalam pengusulan Perda tersebut boleh tahu apa landasan hukum atau atruan yang digunakan? Demikian pernyataan informan “JK” :

Landasan aturannya itu ada dalam peraturan tata tertib DPRD Kota Manado Nomor 4 Tahun 2010 juga ada dalam PP Nomor 16 Tahun 2010 dan beberapa peraturan pendukung lainnya (Wawancara, 21-09-15).

Dari data diatas diketahui bahwa landasan aturannya itu ada dalam peraturan tata tertib DPRD Kota Manado Nomor 4 Tahun 2010 juga ada dalam PP Nomor 16 Tahun 2010. Dalam pengusulan Perda inisiatif, apa landasan aturan yang digunakan? Demikian pernyataan informan “NT”:

Memang ada beberapa aturan, namun saya lupa (Wawancara, 29-9-15).

Dari pernyataan diatas sudah ditemukan ada beberapa anggota DPRD yang belum memahami dasar aturan tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang sama diajukan untuk mengetahui dalam pengusulan Perda tersebut bisa diketahui landasan aturan yang digunakan? Demikian pernyataan informan DS:

Ada UU Susduk Kalau tidak salah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, ada UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan, terus PP Nomor 16 Tahun 2010, Permendagri Nomr 53 Tahun 2011 dan Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 4 Tahun 2010 (Wawancara, 29-09-2015).

Dapat diperoleh dasar aturan dari informan diatas yakni UU Susduk Kalau tidak salah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, ada UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan, terus PP Nomor 16 Tahun 2010, Permendagri Nomr 53 Tahun 2011 dan Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 4 Tahun 2010.Dalam pengusulan perda bisa diketahui landasan aturan yang digunakan? Demikian pernyataan informan “DM”:

Ada. Kalau tidak salah ingat seperti: (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susduk, (2) PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD, (3) Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum DaerahPeraturan DPRD Kota Manado Nomor 04 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Manado (Wawancara, 09-10-2015).

Dari informan diatas juga sama meemahami dasar aturan yakni (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susduk, (2) PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD, (3) Permendagri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (4) Peraturan DPRD Kota Manado Nomor 04 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Manado. Ditanyakan kembali terkait pembentukan Perda inisiatif, apakah ada landasan hukumnya? Demikian pernyataan informan “SL”:

Pembentukan Perda mengacu pada aturan menindaklanjuti Permen Nomor 7 atau Nomor 54 tahun, saya lupa. Ada PP Nomor 16 Tahun 2010 kemudian dirubah PP Nomor 54 tahun 2014 (Wawancara, 23-10-2015).

Dalam pengusulan perda tersebut bisa diketahui landasan aturan yang digunakan yang belum dipahami oleh anggota DPRD Kota Manado, Demikian pernyataan informan “MM” sebagai satf Sekretariat DPRD Kota Manado, demikian pernyataan informan:

Masih ada anggota DPRD belum memahaminya dapat diakui, walaupun sudah dilakuakn sosialisasi bahkan Bimtek dan kunjungan kerja, semua tergantung kemauan dan kesadaran untuk menjalankan tugasnya. Terkait pengusulan Pengusulan ini lebih pada aspek politis (Wawancara, 23-10-2015).

Dari data diatas dapat ditemukan bahwa mengenai pengusulan Perda apakah diketahu landasan aturan, dari beberapa informan menjawab kurang memahami aturan, walaupun oleh sekretariat Dewan sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi bahkan pelatihan dan Bimtek serta kunjungan kerja atau studi banding, namun masih ditemukan beberapa anggota DPRD Kota Manado belum memahami dengan benar perihal regulasi yang terkait pembuatan Perda inisiatif dari DPRD Kota Manado. Namun ada juga yang mengetahui walaupun belum menguasai seutuhnya. Dasar hukumnya adalah: (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undang, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Peraturan DPRD Kota Manado Nomor 04 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Manado.

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui bagaimana prosedur atau tata cara pengajuan dan pembahasan Ranperda yang berasal dari DPRD Kota Manado? Demikian pernyataan informan “HK”:

Setiap komisi menyusun program-program legislasi lalu disampaikan kepada Baleg untuk dikaji apakah disetujui atau tidak. Namun prosedur selebihnya saya lupa, jika ditanya apakah itu dilakukan, menurut sya belum sepenuhnya saya akui (Wawancara, 14-09-2016).

Dari data diatas prosedur atau tata cara pengajuan dan pembahasan Ranperda yang berasal dari DPRD Kota Manadodimulai dari setiap komisi menyusun program-program legislasi lalu disampaikan kepada Baleg untuk dikaji apakah disetujui atau tidak. Namun hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Selanjutnya didalami tentang bagaimanakah prosedur atau tatacara dalam pengajuan dan pembahasan Ranperda yang berasal dari DPRD Kota Manado? Demikian pernyataan informan BP:

Bamus membuat agenda. Kalau Perda inisiatif langsung diusulkan oleh Pimpinan DPRD. Sebelum dibahas diundang pihak-pihak terkait hingga dalam pembahasan. Melibatkan unsur masyarakat, unsur kampus juga wartawan dilibatkan dalam pembahasan. Mereka diundang dalam rapat paripurna. Unsur masyarakat yang diundang adalah tokoh masyarakat atau kelompok profresi yang berkorelasi dengan materi ranperda misalnya Perda perburuhan, maka diundang organisasi buruh, dll. (Wawancara, 14-09-2015)

Tata cara dalam pengajuan dan pembahasan Ranperda yang berasal dari DPRD Kota Manado Banmus membuat agenda. Kalau Perda inisiatif langsung diusulkan oleh Pimpinan DPRD. Sebelum dibahas diundang pihak-pihak terkait hingga dalam pembahasan. Melibatkan unsur masyarakat, unsur kampus juga wartawan dilibatkan dalam pembahasan. Mereka diundang dalam rapat paripurna. Unsur masyarakat yang diundang adalah tokoh masyarakat atau kelompok profesi yang berkorelasi dengan materi Ranperda.

Dari temuan yang ada, apa yang dijelaskan informan dari hasil observasi dan data primer yang ada, ditemukan bahwa hal tersebut belum juga sepenuhnya dilakukan dimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan Perda belum dilakukan.

Selanjutnya pertanyaan kembali diajukan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya prosedur atau tata cara dalam pengajuan dan pembahasan Perda yang berasal dari DPRD Kota Manado? Demikian pernyataan informan JK:

Proses pengusulan atau pengajuan Ranperda itu melalui usulan anggota DPRD, atau melaui komisi-komisi atau Balegda dan usulan itu dibahas dalam panitia khusus yang dibentuk oleh DPRD Manado terus kalau sudah selesai dibahas diputuskan di rapat paripurna DPRD Kota Manado yang dipimpin oleh ketua dan didampingi oleh wakil-wakil ketua DPRD Kota Manado. Dalam rapat paripurna itu juga dihadiri oleh Walikota dan jajaran pemerintah Kota Manado atau SKPD (Wawancara, 21-09-2015).

Menurut data primer diatas bahwa proses pengusulan atau pengajuan Ranperda itu melalui usulan anggota DPRD, atau melalui komisi-komisi atau Balegda dan usulan itu dibahas dalam panitia khusus yang dibentuk oleh DPRD Manado terus kalau sudah selesai dibahas diputuskan di rapat paripurna DPRD Kota Manado yang dipimpin oleh ketua dan didampingi oleh wakil-wakil ketua DPRD Kota Manado. Dalam rapat paripurna itu juga dihadiri oleh Walikota dan jajaran pemerintah Kota Manado atau SKPD belum sepenuhnya dilakukan oleh DPRD Kota Manado.

Untuk mengetahui selanjutnya tentang prosedur atau tata cara dalam pengajuan dan pembahasan Ranperda yang berasal dari DPRD Kota Manado? Demikian pernyataan informan NT:

Ranperda diajukan oleh anggota DPRD Manado atau oleh Komisi dan Balegda. Usulan tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD, setelah itu pimpinan DPRD menyerahkan kepada Balegda untuk dikaji kemudian hasil kajian itu disampaikan kepada dalam rapat paripurna di DPRD melalui pimpinan DPRD. Ranperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan kepada Walikota (Wawancara: 29-09-2015).

Dari temuan yang diperoleh sebagian besar anggota DPRD Kota Manado belum maksimal memahami bahkan melaksanakan secara baik hakekat tugas pokok dan fungsi sebagi anggota Dewan.

1. *Elektoral System for Governments and Decision-Making Bodies*

Terkait *electoral systems for governments and decisions-making*, dalam hal ini berkaitan dengan sistem dan mekanisme yang digunakan dalam pengajuan dan pembahasan serta penetapan Perda yang dilakukan oleh DPRD bersama eksekutif.

Untuk mengetahui hal tersebut diajukan pertanyaan kepada informan untuk mengetahui mengenai alur pembentukan Perda yang berasal dari DPRD yang digunakan dalam pembentukan Perda yang berasal dari DPRD? Demikian pernyataan informan “HK”:

Biasanya pimpinan DPRD meminta kepada komisi-komisi untuk pengajuan usulan Ranperda yang nanti akan ditetapkan sebagai program legislasi daerah (Prolegda), tetapi itu tergantung dari Balegda apakah hal tersebut setelah dikaji oleh Balegda itu dapat diterima atau tidak. Kalau diterima kemudian DPRD melibatkan unsur staff ahli dari Perguruan Tinggi untuk menyiapkan naskah akademik dalam hal ini dari Universitas Sam Ratulangi Manado, dan konsultan lainnya yang memahami (Wawancara, 14-09-2016).

Pimpinan DPRD meminta kepada komisi-komisi untuk pengajuan usulan Ranperda yang nanti akan ditetapkan sebagai Prolegda, tetapi itu tergantung dari Balegda apakah hal tersebut setelah dikaji oleh Balegda itu dapat diterima atau tidak. Kalau diterima kemudian DPRD melibatkan unsur staff ahli dari Perguruan Tinggi untuk menyiapkan naskah akademik dalam hal ini dari Universitas Sam Ratulangi Manado dan konsultan lainnya yang memahami. Pertanyaan kembali diajukan pada informan selanjutnya mengenai alur pembentukan perda yang berasal dari DPRD (perda inisiatif)? Demikian pernyataan informan “NT”:

Menurut ketentuan yang daiatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Manado bahwa, ranperda inisiatif yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau, Badan Legislasi Daerah (Balegda) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademi, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD Kota Manado. Selanjutnya Ranperda itu oleh pimpinan DPRD Manado disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian kemudian juga pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah kepada rapat paripurna DPRD, sebelum itu juga Ranperda yang telah dikaji oleh Balegda disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD. Dalam rapat paripurna DPRD diberikan pengusul memberikan penjelasan, setelah itu fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan, dan pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. Setelah tahap tersebut, kemudian rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah tersebut dalam bentuk berupa persetujuan, atau persetujuan dengan perubahan, atau penolakan. Dan dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, badan legislasi daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Ranperda tersebut. Dan setelah itu Ranperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikankan dengan surat pimpinan DPRD kepada Walikota Manado. Dan setelah Ranperda usulan dari DPRD itu disampaikan kepada Walikota, selanjutnya itu menunggu untuk penjadwalan oleh DPRD Manado melalui Badan Musyawarah DPRD untuk pelaksanaan pembahasan baik dalam pembicaraan tingkat I maupun pemibicaraan tingkat II (Wawancara, 29-09-2015)

Dasar yang digunakan adalah Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Manado bahwa, ranperda inisiatif yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau, Badan Legislasi Daerah (Balegda) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD Kota Manado. Selanjutnya Ranperda itu oleh pimpinan DPRD Manado disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian kemudian juga pimpinan DPRD Mando menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah kepada rapat paripurna DPRD Kota Manado, sebelum itu juga Ranperda yang telah dikaji oleh Balegda disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

Dalam rapat paripurna DPRD diberikan kesempatan pengusul memberikan penjelasan, setelah itu fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan, dan pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. Setelah tahap tersebut, kemudian rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah tersebut dalam bentuk berupa persetujuan, atau persetujuan dengan perubahan, atau penolakan. Dan dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, badan legislasi daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Ranperda tersebut.

Ranperda yang telah disiapkan oleh DPRD Kota disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Kota Manado kepada Walikota Manado. Dan setelah Ranperda usulan dari DPRD itu disampaikan kepada Walikota, selanjutnya menunggu untuk penjadwalan oleh DPRD Manado melalui Badan Musyawarah DPRD untuk pelaksanaan pembahasan baik dalam Pembicaraan tingkat I maupun pemibicaraan tingkat II.

Apakah proses dan prosedur tersebut telah dilaksanakan oleh DPRD Kota Manado Periode 2009-2014 dalam pembentukan Perda inisiatif? Demikian pernyataan informan NT:

Yang saya amati hal prosedur tersebut tidak lagi dilakukan oleh DPRD Kota Manado, maksudnya mekanisme internal tersebut tidak lagi dilakukan oleh DPRD karena ranperdanya langsung disiapkan oleh Balegda bersama dengan tim akademisi terus setelah itu langsung dibawah dalam rapat paripurna DPRD masuk dalam pembasahan pembicaraan tingkat I (Wawancara, 29-09-15)

Dari temuan yang diperoleh pada indikator ini bahwa alur tersebut tidak lagi dilakukan oleh DPRD Kota Manado, maksudnya mekanisme internal tersebut tidak dilakukan oleh DPRD karena Ranperdanya langsung disiapkan oleh Balegda bersama dengan tim akademisi setelah itu langsung dibawah dalam rapat paripurna DPRD masuk dalam pembahasan pembicaraan tingkat I.

Selanjutnya dijelaskan mengenai alur pembentukan Perda yang berasal dari DPRD (Perda inisiatif), demikian pernyataan informan DM:

Jika sesuai prosedur, Pertama harus ada Prolegda dan Ranperda dapat diajukan oleh anggota,atau komisi, atau gabungan komisi atau dari Balegda secara tertulis Ranperda itu disampaikan kepada DPRD baru pimpinan DPRD menyerahkan itu kepada Balegda untuk di kaji selesai dikaji dibawa dalam forum rapat paripurna oleh pimpinan DPRD namun sebelum dibahas dirapat paripurna Ranperda itu disampaikan kepada seluruh anggota DPRD satu minggu sebelum pelaksanaan rapat paripurna. Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh pimpinan DPRD pengusul diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan mengenai ranperda yang diusulkan setelah itu ditanggapi oleh fraksi atau anggota DPRD lainnya. Selesai itu pimpinan DPRD mengambil keputusan melalui rapat paripurna apakah usulan tersebut disetujui atau ditolak. Apabila disetujui, maka ranperda itu disampaikan kepada Walikota oleh pimpinan DPRD. Selesai tahapan itu baru masuk pada pembahasan Perda yang mana pembahasan Perda dilalui dengan 2 tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Proses pembicaraan tingkat pertama dan pembicaraan tingkat kedua sama seperti yang sudah disampaikan sebelumnya (Wawancara, 09-10-2015)

Alur yang seharusnya dilakukan adalah: Pertama harus ada Prolegda dan Ranperda dapat diajukan oleh anggota, atau komisi, atau gabungan komisi atau dari Balegda secara tertulis Ranperda itu disampaikan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan DPRD menyerahkan itu kepada Balegda untuk di kaji selesai dikaji dibawa dalam forum rapat paripurna oleh pimpinan DPRD namun sebelum dibahas pada paripurna, Ranperda itu disampaikan kepada seluruh anggota DPRD satu minggu sebelum pelaksanaan rapat paripurna. Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh pimpinan DPRD pengusul diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan mengenai Ranperda yang diusulkan setelah itu ditanggapi oleh fraksi atau anggota DPRD lainnya. Selesai itu pimpinan DPRD mengambil keputusan melalui rapat paripurna apakah usulan tersebut disetujui atau ditolak. Apabila disetujui, maka Ranperda itu disampaikan kepada Walikota oleh pimpinan DPRD Kota Manado. Selesai tahapan itu baru masuk pada pembahasam Perda yang mana pembahasan Rerda dilalui dengan 2 tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Bisa dijelaskan mengenai alur pembentukan Perda yang berasal dari DPRD (perda inisiatif)? Demikian pernyataan informan SL:

Jadi setelah ditetapkan Prolegda dikembalikan kepada Balegda untuk mempersiapakan materinya, tetapi dapat juga kita bentuk panitia kerja atau panitia khusus untuk membahas agenda tersebut. Jadi langsung pembahasanya ke Pansus tetapi sebelum membahas itu kita siapkan draft naskah akademiknya selanjutnya kita bahas. Tetapi memang prosedurnya banyak tidak dimengerti oleh para anggota DPRD (Wawancara, 23-10-2015).

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa alurnya yakni setelah ditetapkan Prolegda dikembalikan kepada Balegda untuk mempersiapkan materinya, tetapi dapat juga kita bentuk panitia kerja atau panitia khusus untuk membahas agenda tersebut. Jadi langsung pembahasanya ke Pansus tetapi sebelum membahas itu kita siapkan draft naskah akademiknya selanjutnya kita bahas.

Ditemukan tahapan demi tahapan tidak semua dilalui, sehingga proses pembuatan Perda inisiatif oleh DPRD Kota Manado dapat disimpulkan improsedur atau proses yang tidak sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Dapat dianalisis dengan dasar yang digunakan yakni PP Nomor 16 Tahun 2010, Permendagri Nomor 53 Tahun 2011, dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Manado. Prosedurnya yakni Ranperda inisiatif yang diajukan oleh anggota DPRD Kota Manado, komisi, gabungan komisi atau, Badan Legislasi Daerah (Balegda) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Kota Manado disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademi, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD Kota Manado. Selanjutnya Ranperda itu oleh pimpinan DPRD Manado disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian kemudian juga pimpinan DPRD Mando menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah kepada rapat paripurna DPRD Kota Manado, sebelum itu juga Ranperda yang telah dikaji oleh Balegda disampaikan oleh pimpinan DPRD Kota Manado kepada semua anggota DPRD Kota Manado selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD Kota Manado.

Selanjutnya dalam rapat paripurna DPRD, pengusul memberikan penjelasan, setelah itu fraksi dan anggota DPRD Kota Manado lainnya memberikan pandangan, dan pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD Kota lainnya. Setelah tahap tersebut, kemudian rapat paripurna DPRD Kota Manado memutuskan usul Ranperda tersebut dalam bentuk berupa persetujuan, atau persetujuan dengan perubahan, atau penolakan. Dan dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD Kota Manado menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Ranperda tersebut.

Dan setelah itu Ranperda yang telah disiapkan oleh DPRD Kota Manado disampaikankan dengan surat pimpinan DPRD Kota Manado kepada Walikota Manado. Selanjutnya menunggu untuk penjadwalan oleh DPRD Manado melalui Badan Musyawarah DPRD untuk pelaksanaan pembahasan baik dalam Pembicaraan tingkat I maupun pemibicaraan tingkat II.Dari temuan peneliti bahwa prosedur alur pembentukan Perda banyak tidak dimengerti oleh para anggota DPRD.

1. *Bereuacratic System Of Representation*

*Bureaucratic system of representation,* adalah pelaksanaan sistem perwakilan dalam pembuatan Perda di DPRD. Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi oleh penyelenggara pemerintahan merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukan kepada publik atau masyarakat. Hal ini dilatari oleh tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki merupakan amanat yang diberikan oleh rakyat sebagai pemilik kekuasaan dan pemegang kedaulatan yang dijamin oleh konstitusi.

Sebab itu penyelenggaran pemerintahan dengan kekuasaan dan kewenangan yang diberikan melalui proses sistem demokrasi dan dengan penggunaan sumberdaya keuangan yang bersumber dari masyarakat berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan (*accountability*) kepada publik atau masyarakat itu sendiri. Akuntabilitas menjadi landasan bagi proses untuk penyelenggaraan kepemerintahan (*good governance*) dan keberadaannya menentukan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang benar-benar akuntabel.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan sistem perwakilan dalam pembuatan Perda di DPRD, terkait apakah dalam setiap Komisi ada perwakilan dari setiap Fraksi yang ada di DPRD Manado? Demikian pernyataan informan “HK”:

Ada, setiap komisi ada perwakilan dari setiap fraksi yang ditugaskan oleh pimpinan partai politik masing-masing anggota (Wawancara,14-09-2015)

Pernyataan informan HK tersebut sejalan juga yang dikemukakan oleh informan DP, JK, DS, DM, SL, MM, SS.Setiap informan menyatakan bahwa keanggotaan di setiap komisi merupakan representasi dari setiap fraksi yang ada.

Sementara informan RR menyatakan:

Sepengetahuan saya bahwa penempatan personal anggota DPRD Kota Manado baik di Komisi, Balegda ataupun pada alat kelengkapan DPRD lainnya dari periode ke periode DPRD tidak sesuai dengan kapasitas dan latar belakang pendidikan dan pengalaman dari anggota DPRD yang ada. Dari fraksi sembarangan saja menempatkan orang atau wakil-wakilnya di setiap alat kelengkapan Dewan (Wawancar, 28-10-2015).

Hal yang sama dikemukakan oleh informan TU. Demikian pernyataan informan TU:

Penempatan pimpinan komisi tidak tepat sesuai dengan kompetensi atau bidang ilmu yang dimiliki. Hal itu disebabkan oleh kewenangan partai untuk penugasan pada setiap komisi pemilihan dilakukan formalitas (Wawancara, 07-01-2015)

Kemudian hal ini juga dikonfirmasi lagi kepada informan yang sering meliput dan menyaksikan aktivitas kegiatan di DPRD Kota Manado, demikian informan RP mengatakan:

Sangat sulit untuk mengharapkan DPRD mengedepankan kualitas dan profesionalitas kerja mereka saat ini, karena tidak ada standart atau pedoman yang baku yang mengatur penempatan anggota pada setiap alat kelengkapan Dewan Balegda, Komisi, badan anggaran, Badan kehormatan dan lain-lain. Itu mau-maunya pimpinan Partai dan anggota (Wawancara, 17-01-2015).

Pernyataan informan-informan tersebut kemudian dikonfirmasi kepada informan yang mantan Ketua Partai, juga anggota dan pimpinan DPRD Kota Manado 3 (tiga) Periode, demikian informan JD mengatakan:

Berkaitan dengan keanggotaan disetiap alat kelengkapan Dewan itu merupakan perwakilan dari setiap fraksi yang ada di DPRD Kota Manado, dan soal jumlahnya setiap perwakilan fraksi itu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Itu ada aturannya. Menyangkut kompetensi dan kemampuan menurut saya itu relatif dan tidak ada masalah karena fraksi pasti telah mempertimbangkannya (Wawancara, 19-11-2015).

Dari beberapa diatas dapat dijelaskan bahwa setiap komisi ada perwakilan atau representasi dari setiap fraksi yang ada di DPRD Kota Manado dan hal tersebut sifatnya wajib karena anggota yang ada disetiap komisi itu adalah utusan-utusan terbaik dari setiap fraksi dan setiap komisi anggotanya merupakan perwakilan dari setiap fraksi di DPRD Manado, demikian juga angota Balegda juga seluruhnya diusulkan oleh fraksi, bukan usulan komisi. Hal tersebut sudah sesuai ketentuan ada karena itu ada ketentuannya dimana setiap komisi anggotanya berasal dari setiap fraksi.setiap komisi anggotanya merupakan perwakilan dari setiap fraksi di DPRD Manado, demikian juga angota Balegda juga seluruhnya diusulkan oleh fraksi, bukan usulan komisi. Setiap komisi anggotanya adalah perwakilan dari setiap fraksi yang ditugaskan oleh pimpinan partai politik masing-masing anggota. Dari data diatas ditemukan bahwa Penempatan pimpinan komisi kurang mempertimbangkan kompetensi atau bidang ilmu yang dimiliki. Hal itu disebabkan oleh kewenangan partai untuk penugasan pada setiap komisi pemilihan dilakukan hanya secara formalitas saja.

Selanjutnya terkait bagaimanakah proses pembentukan Balegda di DPRD Kota Manado, dalam hal ini unsur keterwakilan dari komisi yang diusulkan oleh Fraksi? Demikian pernyataan informan HK:

Diawali dengan pemasukan nama-nama oleh setiap Fraksi dan diajukan kepada Pimpinan DPRD. Kemudian selanjutnya ditetapkan oleh Pimpinan DPRD (Wawancara, 14-09-2015)

Hal tersebut juga sejalan dengan yang disampaikan oleh beberapa informan lainnya, yaitu JK, NT, DS, DM, SL, DS, TU, RS, JD. Bahwa keanggotaan Belegda diusulkan oleh setiap fraksi.

Dapat dijelaskan dari beberapa data diatas bahwa diawali dengan pemasukan nama-nama oleh setiap Fraksi dan diajukan kepada Pimpinan DPRD. Kemudian selanjutnya ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.Pembentukan Balegda amanah UUD 27/2009 tentang kedudukan DPR, badan legislatif adalah alat kelengkapan. Informan tidak menguraikan bagaimana keterwakilan yang duduk dalam Balegda. Balegda bukan utusan komisi tetapi utusan juga dari setiap fraksidi DPRD Kota Manado yang jumlah keanggotaannya sama dengan jumlah anggota komisi di DPRD Kota Manado.Balegda adalah salah satu alat kelengkapan DPRD yang bertugas salah satunya menyusun Prolegda dan menyiapkan Ranperda usulan DPRD. Pembentukannya dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kota Manado. Susunan dan keanggotaan Balegda dibentuk pada permulaan keanggotaan DPRD Kota Manado dan anggota Balegda diusulkan masing-masing fraksi. Balegda itu anggotanya bukan utusan dari komisi tetapi utusan dari setiap fraksi. Fraksi yang mengutus anggotanya untuk duduk dalam Balegda.Pimpinan Balegda dipilih oleh anggota Balegda sendiri. Jumlah anggota Balegda sama dengan jumlah anggota disatu komisi.Sesuai tata tertib DPRD Kota Manado sebanyak-banyaknya Balegda terdiri dari 12 orang yang disulkan oleh setiap Fraksi yang ada di DPRD Kota Manado. Diperoleh temuan kalau keterwakilan komisi itu berjalan tapi hanya formalitas saja tanpa melihat backroundya atau latar belakang kompetensinya.

Selanjutnya peneliti mengexplore data untuk mengetahui tentang bagaimana keterlibatan Fraksi dan Komisi dalam Balegda?Demikian pernyataan informan “HK”:

Setiap komisi merupakan perwakilan dari setiap fraksi dan dalam badan legislasi daerah keanggotaannya merupakan representasi juga dari setiap fraksi yang diberikan tugas salah satunya adalah mempersiapkan rancangan peraturan daerah (Wawancara, 14-09-2015)

Bagaimana keterlibatan Fraksi dan Komisi dalam Balegda? Demikian pernyataan informan BP:

Mereka semua ikut terlibat dalam pembentukan Perda karena setiap komisi ada perwakilan Fraksi dibahas secara bersama dan setelah itu diserahkan ke Pansus untuk diproses selanjutnya (Wawancara, 14-09-2015).

Bagaimana keterlibatan fraksi dan komisi dalam Balegda? Demikian pernyataan informan NT:

Dalam ketentuan Tata Tertib DPRD Kota Manado, yang duduk dalam Balegda itu adalah utusan dari setiap fraksi bukan komisi dan jumlah anggota Balegda sama dengan jumlah anggota pada satu komisi serta pimpinan komisinya dipilih dari anggota Balegda (Wawancara, 29-09-2015).

Bagaimana keterlibatan fraksi dan komisi dalam Balegda? Demikian pernyataan informan JD:

Keanggotaan Balegda berasal dari fraksi bukan dari komisi. Jadi utusan dari fraksi anggota Balegda (Wawancara: 19-11-2015) .

Apakah anggota Balegda aktif dalam pelaksanaan tugas Balegda, terutama dalam memperjuangkan aspirasi publik atau masyarakat dalam hubungannya dengan pembuatan Perda inisiatif? Demikian pernyataan informan HK:

Dalam pengamatan saya ada yang aktif dan ada juga yang kurang aktif, baik dalam menyatakan pendapat, pikiran maupun dalam pembahasan. Tetapi ada juga yang pasif, maksudnya hadir mengikuti pembahasan tetapi kurang memberikan pendapat, gagasan atau pemikiran (Wawancara, 14-09-2016).

Apa yang menyebabkan anggota DPRD kurang aktif dalam proses pembahasan Ranperda di DPRD? Demikian pernyataan informan HK:

Itu terkait dengan sumberdaya manusia. Ada anggota yang kurang memahami hak dan kewajibannya, terutama dalam hubungan dengan fungsi legislasi. Hak privat untuk menyatakan pendapat, gagasan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat kurang dipahami oleh sebagian besar anggota DPRD Kota Manado (Wawancara, 14-09-2016).

Menurut Bapak Hengky, anggota DPRD yang aktif kira-kira berapa orang dari 40 anggota DPRD Kota Manado? Demikian pernyataan informan HK:

Kurang lebih hanya 10% yang aktif (Wawancara, 14-09-2016).

Apakah mereka anggota yang aktif itu adalah para pimpinan DPRD atau pimpinan Komisi, Fraksi atau Pimpinan? Demikian pernyataan informan HK:

Ada juga dikalangan pimpinan yang tidak aktif. Ada yang bukan pimpinan juga yang aktif (Wawancara, 14-09-2016).

Dari data primer diatas mengenai keterlibatan Fraksi dan Komisi dalam Balegda dapat dijelaskan bahwa setiap komisi merupakan perwakilan dari setiap fraksi dan dalam Balegda keanggotaannya merupakan representasi juga dari setiap fraksi yang diberikan tugas salah satunya adalah mempersiapkan rancangan peraturan daerah. Sebab itu setiap fraksijuga terlibat dalam pembentukan Perda karena setiap komisi ada perwakilan Fraksi. Dalam ketentuan Tata Tertib DPRD Kota Manado, yang duduk dalam Balegda itu adalah utusan dari setiap fraksi bukan komisi dan jumlah anggota Balegda sama dengan jumlah anggota pada satu komisi serta pimpinan komisinya dipilih dari anggota Balegda.

Terkait keaktifan anggota Balegda ada yang aktif dan ada juga yang kurang aktif. Ada beberapa yang aktif baik dalam menyatakan pendapat, pikiran maupun dalam pembahasan. Tetapi ada juga yang pasif, terkait hadir mengikuti pembahasan tetapi kurang memberikan pendapat, gagasan atau pemikiran. Keaktifan tersebut terkait dengan sumberdaya manusia. Ada anggota yang kurang memahami hak dan kewajibannya, terutama dalam hubungan dengan fungsi legislasi. Hak privat untuk mengajukan Ranperda, menyatakan pendapat, gagasan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat kurang dipahami oleh sebagian besar anggota DPRD Kota Manado. Ketidakaktifan bukan hanya pada anggota tetapi ada juga dikalangan pimpinan yang tidak aktif.

Selanjutnya untuk mengetahui mengenai bagaimana keterwakilan eksekutif (Walikota) dalam pembentukan Peraturan Daerah. Demikian pernyataan informan “JD”:

Mereka ikut terlibat dalam pembentukan Perda. Kalau Ranperda inisiatif, walikota melalui pihak yang terkait diundang untuk meminta informasi atau memberikan pertimbangan hukum baik sebelum usulan pengajuan Ranperda untuk masuk dalam Prolegda maupun saat Ranperda diterima untuk dibahas dalam pembahasan di komisi atau melalui pansus bersama dengan pihak eksekutif dalam hal ini walikota atau pejabat yang ditunjuk (Wawancara, 19-11-2015).

Apa yang dikemukakan oleh informan JD ini linier dengan jawaban dari informan HK, BP, JK, NT, DS, DM, SL, MM, DR, SS, TU.

Dari data-data diatas terkait bagaimana keterwakilan eksekutif (Walikota) dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dijelaskan dan dianalisis bahwa Walikota ikut terlibat dalam pembentukan Perda. Kalau Ranperda inisiatif, Walikota melalui pihak yang terkait diundang untuk meminta informasi atau memberikan pertimbangan hukum baik sebelum usulan pengajuan Ranperda untuk masuk dalam Prolegda maupun saat ranperda diterima untuk dibahas dalam pembahasan di komisi atau melalui pansus bersama dengan pihak eksekutif dalam hal ini walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Ada SKPD atau tim yang ditunjuk oleh pimpinan Walikota atau melalui surat tugas dari Pak Sekretaris Kota yang menugaskan bagian hukum Setwilda Kota Manado selalu mendampingi setiap pembahasan Perda inisiatif di DPRD. Juga ada SKPD terkait atas penunjukan Walikota melalui Sekretaris Kota Manado. Pada setiap pembahasan perda inisiatif ada perwakilan pihak eksekutif yang ditugaskan oleh Walikota atau Bapak Sekda Kota Manado, dan seluruh pembentuan dan pembahasan Perda di DPRD dibahas bersama dengan Walikota atau paling tidak dengan pejabat yang ditugaskan oleh Walikota.

Selanjutnya bagaimana keterwakilan atau keterlibatan masyarakat untuk penyerapan aspirasi dalam pembentukan Ranperda? Demikian pernyataan informan HK:

Melibatkan masyarakat, unsur LSM, tokoh-tokoh masyarakat. Contoh pembentukan Perda pajak hiburan. Megapa pajak hiburan tinggi karena waktu diundang para pegnusaha, pengelolah hiburan mereka tidak hadir, sebab itu DPRD menetapkan nilai pajak tinggi sekitar 30%. Mungkin kalau mereka memenuhi undangan kami untuk melakukan mendapatkan masukan sebagai bahan pertimbangannya pasti nilai pajak yang ditetapkan realtif rendah. Jadi untuk melibatkan masyarakat bagi kami perlu dan wajib, hanya saja kadang masyarakat tidak meresponnya secara baik. Nanti belakangan baru mereka mengelun bahkan melakukan complain kepada pemerintah sekaligus meminta untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan dalam perda itu (Wawancara, HK, 14-09-2016).

Dapat dijelaskan bahwa seharusnya masyarakat dilibatkan.Begitu juga unsur LSM, tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian untuk mengetahui bagaimana bentuk keterwakilan masyarakat dalam penyerapan aspirasi pada pembentukan Perda oleh DPRD?Demikian pernyataan informan. Demikian pernyataan informan JK:

Diundang oleh Pansus untuk dimintakan keterangan atau data yang berhubungan dengan materi Perda (Wawancara, 21-09-2015).

Hanya diundang saat diperlukan ya? Demikian pernyataan informan JK:

Sesuai kebutuhan (Wawancara, 21-09-2015).

Bagaimana keterwakilan masyarakat dalam penyerapan aspirasi pada pembentukan Perda oleh DPRD Manado? Demikian pernyataan informan NT:

Biasanya pansus yang mengundang masyarakat atau unsur perwakilan masyarakat.

Pernyataan dari informan HK, BP, JK dan NT sejalan juga yang disampaikan oleh informan DS,DM, SL, MM, SS, DR, JD dan TU yang semuanya menyatakan bahwa dilibatkan dalam pembentukan Perda yang diusulkan oleh Pansus kepada Pimpinan DPRD Kota Manado.

Dari data-data primer diatas dapat dijelaskan tentang bagaimana keterwakilan atau keterlibatan masyarakat untuk penyerapan aspirasi dalam pembahasan Ranperda inisiatifunsur masyarakat yang diundang diusulkan oleh Pansus kepada pimpinan DPRD Kota Manado. Unsur masyarakat tersebut dapat bersifat orang perorang juga dapat secara lembaga atau organisasi.

Temuan dalam indikator ini adalah keterwakilan masyarakat namun tidak secara maksimal dan kurang representatif, juga sifatnya hanya sesuai dengan kepentingan saja. Adapun keterlibatan pakar hanya dilibatkan pada saat akhir proses penyusunan Ranperda. Ranperda yang dibuat hanya berasal dari staf dewan saja dan melihat Perda dari daerah lain. Prosedur tidak diikuti dalam pembuatan Perda Inisiatif. Akibatnya produk Perda inisiatif tidak berjalan setelah ditetapkan. Ada anggota Dewan yang kurang mengetahui tentang Perda inisiatif sehingga prosesdur tidak diketahui juga. Masyarakat akan dilibatkan dalam pembahasan Ranperda inisiati hanya apabila dibutuhkan. Saat pembahasan, Pansus mengundang unsur yang mewakili masyarakat tetapi hanya mereka yang terkait langsung dengan materi Ranperda.

Data kemudian diexplore tentang siapa saja atau organisasi atau perorangan yang dilibatkan dalam penyerapan aspirasi? Demikian pernyataan informan HK:

LSM, organisasi-organisasi yang ada, kepala lingkungan maupum masyarakat lainnya (Wawancara, 14-09-2016).

Kalau boleh tahu, dapatkah diberikan referensi atau rujukan siapa atau organisasi atau perorangan yang dilibatkan dalam penyerapan aspirasi?Demikian pernyataan informan BP:

Ada dari pihak akademisi, masyarakat serta wartawan mereka diundang dalam rapat paripurna maupun jugga sebelum masuk pembahasan Ranperda mereka diminta pemikiran dan pandangan mereka dalam rapat di komisi atau pansus (Wawancara, 14-09-2015).

Kalau boleh tahu, dapatkah diberikan referensi atau rujukan siapa atau organisasi atau perseorangan yang dilibatkan dalam penyerapan aspirasi? Demikian pernyataan informan JK:

Jadi siapa-siapa yang akan diundang itu biasanya diputuskan oleh pansus langsung terus diundang oleh pimpinan DPRD Manado atas usulan pansus (Wawancara, 21-09-2105).

Pernyataan dari informan JK tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh informan DS, DM, SL, MM, SS, DR, JD.

Dapat dijelaskan dari data diatas tentang siapa saja atau organisasi atau perorangan yang dilibatkan dalam penyerapan aspirasi yakni LSM, organisasi-organisasi yang ada, kepala lingkungan maupum masyarakat lainnya, Ada dari pihak akademisi, masyarakat serta wartawan mereka diundang dalam rapat paripurna maupun juga sebelum masuk pembahasan Ranperda mereka diminta pemikiran dan pandangan mereka dalam rapat di komisi atau pansus. Siapa-siapa yang akan diundang itu biasanya diputuskan oleh pansus langsung terus diundang oleh pimpinan DPRD Manado atas usulan pansus. Karena Pansus yang menentukan siapa-siapa unsur masyarkat yang akan dilibatkan dalam pembahasan.

Temuan yang ada dimana LSM ataupun akademisi yang dilibatkan adalah orang-orang yang sengaja ditunjuk yang memiliki hubungan dengan pimpinan DPRD yang ada ataupun Balegda, sehingga terkesan orang-orang atau LSM itu-itu saja yang terlibat, sehingga memungkinkan adanya kerjasama didasari pada kepentingan politis lebih dominan daripada akuntabilitas politik kepada publik.

1. *Royal Prerogrative*

*Royal prerogrative,* berkaitan denganhak istimewa yang melekat pada DPRD dalam hal ini hak untuk mengajukan Ranperda (hak inisiatif).

Untuk mengetahui apakah ada hak istimewa yang melekat di DPRD dalam pembentukan Ranperda oleh DPRD? Demikian pernyataan informan “HK”:

Seharusnya ada. Karena itu merupakan kewenangan DPRD (Wawancara, 14-09-2015)

Apakah anda mengetahui ada hak istimewa yang melekat di DPRD dalam pembentukan Ranperda oleh DPRD?Demikian pernyataan informan “BP”:

Itu sudah bersifat normatif. Maksudnya menjadi tugas kewenangan DPRD (Wawancara, 14-09-2015).

Apakah anda mengetahui ada hak istimewa yang melekat di DPRD dalam pembentukan Perda oleh DPRD Manado? Demikian pernyataan informan JK:

Ada. (Wawancara, 21-09-2015)

Apakah anda mengetahui hak istimewa yang melekat di DPRD dalam pembentukan perda oleh DPRD Manado? Demikian pernyataan informan NT:

Hak itu menurut saya berhubungan dengan hak pembentukan Perda yang berasal dari DPRD karena DPRD memiliki fungsi legislasi atau sebagai lembaga pembentuk Perda di daerah, juga sebenarnya bagi anggota DPRD dan komisi mereka memiliki hak untuk mengajukan Ranperda. Itu menurut saya yang sebenarnya hak istimewanya DPRD. (Wawancara, 29-09-2105)

Apakah anda mengetahui hak istimewa yang melekat di DPRD dalam pembentukan Perda? Demikian pernyataan informan DS:

Sebagai Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota saya tahu persis bahwa sepanjang saya Kabag Hukum tidak ada Ranperda yang diusulkan oleh anggota DPRD bahkan oleh komisi di DPRD. Dan menurut saya sebenarnya itulah hak istimewa yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk pembuatan Perda inisiatif. Mungkin juga sampai saat ini belum ada anggota DPRD yang menggunakan hak tersebut. (Wawancara, 29-09-2105)

Informan lainnya seperti informan DM, SL, MM dan SS memberikan jawaban yang kurang lebih sama dengan pernyataan informan-informan sebelumnya dimana mereka menjelaskan bahwa tidak ada hak istimewa yang dimiliki DPRD terkait membuat Perda inisiatif.

Dari data yang ada ditemukan ada beberapa anggota DPRD yang kurang memahami kalau ada hak istimewa yang dimiliki salah satunya adalah mengajukan Ranperda inisiatif.Kalu melihat hak anggota ataupun hak lembaga DPRD bila kita merujuk pada ketentuan yang ada anggota memiliki hak mengajukan Ranperda dan kalau insitusi DPRD melekat hak membentuk Perda.

1. *Legislation*

*Legislation,* dalam hal ini tugas dan fungsi DPRD sebagai pembuat Perda.Akuntabilitias politik DPRD sebagai sebuah organisasi publik memiliki tanggungjawab etis-politik kepada rakyat, salah satu indikatornya adalah terletak pada sejauh mana institusi ini memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilihnya melalui berbagai kebijakan dalam bentuk Perda yang dibahas secara bersama-sama dengan kalangan eksekutif (pemerintah) yang bemuara pada program-program yang didukung oleh anggaran yang bersifat teknis operasional dilaksanakan oleh jajaran eksekutif dibawa kendali walikota sebagai kepala daerah.

Selanjutnya fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Perda inisiatif dapat diketahui dari beberapa data informan dibawah ini. Demikian pernyataan informan HK:

DPRD mempunyai wewenang dan fungsi legislasi dalam pembentukan Perda bersama Walikota. Hanya saja apakah anggota memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan hak tersebut? Itu yang menurut pengamatan saya banyak yang belum ada pada anggota Dewan. Karena banyak yang tidak memilikinya sehingga banyak yang bersifat tak peduli, cuek masa bodoh. Yang peduli dan mau belajar serta yang melaksanakan hak-hak istimewa tersebut hanya sedikit saja. Harusnya setiap anggota harus melihat itu sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan kebutuhan bagi kesejahteraan konstituen atau masyarakat tetapi hal itu tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh sebagian besar anggota Dewan. Bayangkan dari 40 (empat puluh) anggota DPRD Manado menurut saya hanya sekitar 25% anggota yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. (Wawancara, 14-09-2016)

Data diatas terkait fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Perda inisiatif dapat dijelaskan bahwa DPRD mempunyai wewenang dalam pembentukan Peraturan daerah bersama Walikota. Hanya saja apakah anggota memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan fungsi tersebut? Itu yang menurut informan “HK” banyak yang belum ada pada anggota Dewan. Karena banyak yang kurang memilikinya mengakibatkan banyak yang tak peduli, cuek masa bodoh. Yang peduli dan mau belajar serta yang melaksanakan tugas dan fungsi tersebut hanya sedikit saja. Harusnya setiap anggota harus melihat itu sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan kebutuhan bagi kesejahteraan konstituen atau masyarakat tetapi hal itu tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh sebagian besar anggota Dewan. Bayangkan dari 40 (empat puluh) anggota DPRD Manado menurut saya hanya sekitar 25% anggota yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Fungsi legislasi sangat penting karena bisa melahirkan berbagai pearturan seperti dasar kebijakan urusan publik dsb.

Dengan fungsi legislasi DPRD dapat merumuskan berbagai kebijakan atau peraturan-peraturan yang bermanfaat bagi kepentingan dan kebutuhan untuk kesejahteraan. Demikian pernyataan informan “BP”:

Fungsi legislasi sangat penting karena bisa melahirkan berbagai pearturan seperti dasar kebijakan urusan publik, dsb. Ada 3 fungsi DPRD. Dengan fungsi legislasi DPRD dapat mmerumuskan berbagai kebijakan atau peraturan-peraturan yang bermanfaat bagi kepentingan dan kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat. (Wawancara, 14-09-2015)

Apa yang anda ketahui tentang fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan perda inisiatif? Demikian pernyataan informan “JK”:

DPRD itukan memiliki fungsi legislasi, dalam hal ini pembentukan Perda adalah melekat pada insitusi DPRD. Jadi hak yang melekat pada lembaga perwakilan rakyat ini sebagai pembuat peraturan. (Wawancara, 21-09-2015)

Data diatas terkait fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Perda inisiatif dapat dijelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, dalam hal ini pembentukan Perda adalah melekat pada insitusi DPRD. Dan DPRD adalah dapur penggodokan Perda atau DPRD sebenarnya adalah lembaga yang kaya dengan konsep-konsep Perda. Karena lembaga ini sebagai pembentuk Perda di daerah dengan fungsi legislasinya. Hanya saja DPRD sebagai lembaga masih kurang melahirkan Perda terlebih Perda inisiatif. Demikian pernyataan informan “NT”:

DPRD adalah dapur penggodokan Perda atau DPRD sebenarnya adalah lembaga yang kaya dengan konsep-konsep Perda. Karena lembaga ini sebagai pembentuk Perda di daerah dengan fungsi legislasinya. Hanya saja DPRD sebagai lembagai masih kurang melahirkan Perda terlebih perda inisiatif. (Wawancara, 29-09-2105)

Mengenai fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Perda inisiatif? Demikian pernyataan informan DS:

Itu sudah normatif artinya telah diamanatkan oleh undang-undang baik undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan tata tertib DPRD Kota Manado itu jelas sekali bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah bersama dengan Walikota juga DPRD mempunyai fungsi salah satunya adalah fungsi legislasi. Termasuk dalam hal ini juga adalah membentuk perda inisiatif. Cuman saja ini yang kurang dilakukan oleh teman-teman di DPRD Kota Manado. (Wawancara, 29-09-2015)

Selanjutnya hal yang sama dinyatakan oleh informan DM, SL, MM, dan SS. Bahwa menurut mereka itu sudah bersifat normatir untuk institusi DPRD

Data diatas terkait fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Perda inisiatif dapat dijelaskan bahwasudah normatif artinya telah diamanatkan oleh undang-undang baik undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan tata tertib DPRD Kota Manado itu jelas sekali bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang membentuk Perda bersama dengan Walikota juga DPRD mempunyai fungsi salah satunya adalah fungsi legislasi. Termasuk dalam hal ini juga adalah membentuk Perda inisiatif. Fungsi legislasi itu harus diwujudkan dalam pembentukan Perda inisiatif karena hal itu sudah merupakan tugas dan wewenang DPRD.

Dari keseluruhan data diatas dapat dijelaskan bahwa DPRD Kota Manado mempunyai wewenang dalam pembentukan Perda bersama Walikota. Hanya saja apakah anggota memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan hak tersebut? Itu yang menurut beberapa informan banyak yang belum ada pada anggota Dewan. Karena banyak yang bersifat tak peduli, cuek masa bodoh.

Kinerja DPRD Kota Manado dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembuat Perda, maka data sekunder untuk pembandingnya mengenai jumlah Perda inisiatif DPRD Kota Manado Periode 2009-2014, dapat dilihat melalui Tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5.2 Daftar Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif DPRD Kota Manado Periode 2009 - 2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nomor Perda | Tentang |
| 1. | 5 Tahun 2012 | Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah |
| 2. | 11 Tahun 2012 | Tata Letak Penempatan Reklame |

1. *Letters of Appoinment*

*Letters of appointment,* dalam hal ini terkait dengan adanya kerjasama dalam pembahasan Ranperda baik DPRD dan pihak eksekutif.Implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut menjadi landasan normatif bagi institusi DPRD sebagai bentuk akuntabilitas politiknya kepada publik yang telah memilih dan melegitimasi atas kewenangan-kewenangan untuk menjabarkan berbagai kepentingan publik baik melalui penyusunan anggaran, pembuatan peraturan daerah dan pengawasan yang benar-benar merepresentasikan kepentingan dan untuk kesejahteraan rakyat yang memilihnya. Perwujudan atas tugas dan fungsi yang berorientasi pada perjuangan aspirasi dan kepentingan publik tersebut merupakan bagian perwujudan daripada akuntabilitas politik DPRD itu sendiri bagi publik. Sebaliknya bila DPRD tidak dapat melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya secara bersama-sama baik secara internal DPRD maupun bersama dengan pihak eksekutif (Walikota), maka DPRD tidak menunjukkan akuntabilitas politik secara baik kepada publik.

Untuk mengetahui adanya kerjasama dalam pembahasan Ranperda baik DPRD dengan pihak eksekutif, peneliti ingin mengetahui mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam pembahasan Ranperda oleh DPRD dengan eksekutif? Demikian pernyataan informan “HK”:

Dalam penyusunan Ranperda dibahas dalam badan musyawarah (Banmus) setelah itu dibuat agenda-agenda khusus pembahasan nota pengantar ke pihak pemerintah lalu ditindak lanjuti oleh Balegda dalam bentuk Prolegda. Pembahasan ranperda dilakukan bersama antara DPRD Manado bersama Walikota Manado. (Wawancara, 14-09-2016)

Bentuk-bentuk kerjasama dalam pembahasan Ranperda oleh DPRD dengan eksekutif terlihat dalam penyusunan Ranperda dibahas dalam badan musyawarah (Banmus) setelah itu dibuat agenda-agenda khusus pembahasan nota pengantar ke pihak pemerintah lalu ditindak lanjuti oleh Balegda dalam bentuk Prolegda. Pembahasan ranperda dilakukan bersama antara DPRD Manado bersama Walikota Manado. Kerjasama salahsatunya terkait Perda usulan dari eksekutif jika masuk di DPRD kemudian Sekretaris DPRD menerima dicatat dalam registrasi setelah itu diteruskan kepada pemimpin DPRD Manado lalu dikaji oleh Balegda apa Perda ini bisa dibahas atau tidak demikian juga dengan Perda inisiatif dari DPRD juga dikordinasikan dengan pihak pemerintah untuk persiapan dan pelakasanaan pembahasan Ranperda. Pada saat pembahasan Ranperda di DPRD oleh Pansus maka tim dari pihak eksekutif bersama-sama dalam pembahasan juga akan diundang SKPD-SKPD yang terkait termasuk bagian hukum Setwilda Pemerintah Kota Manado untuk dengar pendapat dengan tujuan untuk mengkonfirmasi, untuk mendapatkan data yang lengkap hal-hal yang dibutuhkan oleh Pansus. Demikian pernyataan informan “BP”:

Mereka selalu bekerjasama dengan baik, contoh perda usulan dari eksekutif jika masuk di DPRD kemudian Sekretaris DPRD menerima dicatat dalam registrasi setelah itu diteruskan kepada pemimpin DPRD Manado lalu dikaji oleh Balegda apa Perda ini bisa dibahas atau tidak demikian juga dengan persa inisiatif dari DPRD juga dikordinasikan dengan pihak pemerintah untuk persiapan dan pelakasanaan pembahasan Ranperda. (Wawancara, 14-09-2015)

Bagaimana bentuk-bentuk kerjasama dalam pembahasan Ranperda oleh DPRD dengan eksekutif? Demikian pernyataan informan JK:

Itu yang tadi, pada saat pembahasan Ranperda di DPRD oleh Pansus maka tim dari pihak eksekutif bersama-sama dalam pembahasan juga akan diundang SKPD-SKPD yang terkait termasuk bagian hukum Setwilda Pemerintah Kota Manado untuk dengar pendapat dengan tujuan untuk mengkonfirmasi, untuk mendapatkan data yang lengkap hal-hal yang dibutuhkan oleh pansus. (Wawancara, 21-09-2105)

Bentuk-bentuk kerjasama dalam pembahasan Ranperda oleh DPRD dengan eksekutif, terkait pembahasan Ranperda khususnya Ranperda inisiatif DPRD, dari eksekutif atau pemerintah kota Manado berkedudukan sebagai mitra dan menjadi pihak yang dapat memberikan data atau keterangan baik dalam aspek dasar regulatornya atau peraturan perundang-undangan maupun juga dalam hal membagi pengalaman dalam hal-hal teknis opersional dilapangan. Untuk menjalankan tugas bersama dalam membentuk Perda, maka sudah pasti kedua lembaga ini melakukan kerjasama dalam hal mulai dari pengajuan usulan Prolegda yang harus dibahas secara bersama-sama, juga dalam pembahasan Ranperda juga dilakukan bersama-sama dan selesai dibahas maka dilakukan paripurna untuk persetujuan DPRD dan setelah Perda disetujui baru ditindaklanjuti oleh Walikota dengan penetapan Perda sampai pelaksanaan atau implementasinya oleh Walikota. Itulah pola kerjasama yang dilakukan oleh DPRD bersama Walikota dalam pembentukan Perda termasuk dalam hal ini Perda inisiatif. Demikian pernyataan informan “NT”:

Dalam pembahasan Ranperda khususnya Ranperda inisiatif DPRD, kami dari eksekutif atau pemerintah kota Manado berkedudukan sebagai mitra dan menjadi pihak yang dapat memberikan data atau keterangan baik dalam aspek dasar regulatornya atau peraturan perundang-undangan maupun juga dalam hal membagi pengalaman dalam hal-hal teknis opersional dilapangan. (Wawancara, 29-09-2105)

Bentuk-bentuk kerja sama dalam pembahasan Ranperda oleh DPRD dengan eksekutif? Demikian pernyataan informan DS:

Untuk menjalankan tugas bersama dalam membentuk Perda, maka sudah pasti kedua lembaga ini melakukan kerjasama dalam hal mulai dari pengajuan usulan Prolegda yang harus dibahas secara bersama-sama, juga dalam pembahasan Ranperda juga dilakukan bersama-sama dan selesai dibahas maka dilakukan paripurna untuk persetujuan DPRD dan setelah Perda disetujui baru ditindaklanjuti oleh Walikota dengan penetapan Perda sampai pelaksanaan atau implementasinya oleh Walikota. Itulah pola kerjasama yang dilakukan oleh DPRD bersama Walikota dalam pembentukan Perda termasuk dalam hal ini Perda inisiatif. (Wawancara, 29-09-2015)

Dari jawaban informan JK, NT dan DS sejalan dengan jawaban dari informan DM, SL, MM, SS, JD.Intinya baik pihak DPRD maupun Walikota ada proses kerja sama dalam pembentukan Perda termasuk Perda inisiatif itu sendiri.

Dari keseluruhan data diatas dapat dipaparkan bahwa bentuk-bentuk kerjasama dalam pembahasan Ranperda oleh DPRD dengan eksekutif terlihat dalam penyusunan Ranperda dibahas dalam badan musyawarah (Banmus) setelah itu dibuat agenda-agenda khusus pembahasan nota pengantar ke pihak pemerintah lalu ditindak lanjuti oleh Balegda dalam bentuk Prolegda. Pembahasan Ranperda dilakukan bersama antara DPRD Manado bersama Walikota Manado. Kerjasama salahsatunya terkait Perda usulan dari eksekutif jika masuk di DPRD kemudian Sekretaris DPRD menerima dicatat dalam registrasi setelah itu diteruskan kepada pemimpin DPRD Manado lalu dikaji oleh Balegda apa Perda ini dapat dibahas atau tidak demikian juga dengan Perda inisiatif dari DPRD juga dikordinasikan dengan pihak pemerintah untuk persiapan dan pelakasanaan pembahasan Ranperda. Pada saat pembahasan Ranperda di DPRD oleh Pansus maka tim dari pihak eksekutif bersama-sama dalam pembahasan juga akan diundang SKPD-SKPD yang terkait termasuk bagian hukum Setwilda Pemerintah Kota Manado untuk dengar pendapat dengan tujuan untuk mengkonfirmasi, untuk mendapatkan data yang lengkap hal-hal yang dibutuhkan oleh Pansus.

Bentuk-bentuk kerjasama dalam pembahasan ranperda inisiatif oleh DPRD dengan eksekutif kerjasamanya yaitu bersama-sama membahas mulai dari pembahasan Prolegda hingga sampai pembahasan Ranperda baik melalui komisi, gabungan komisi atau melalui pansus sampai pada penetapan Perda itu sendiri.

1. *Formal Delegation of Authority*

*Formal delegation of authority,* adanya pendelegasian kewenangan secara formal dalam pelaksanaan pembahasan Ranperda secara delegatif. Institusi DPRD yang keanggotaannya dipilih dan mendapatkan legitimasi politik rakyat diberikan mandat sebagai wakil rakyat dengan kewenangan yang dimilikinya. Oleh Jabbra dan Dwivedi (1989), kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang bersumber dari rakyat yang telah memilihnya untuk menjalankan tugas mengatur, menetapkan prioritas dan mendistribusikan sumber daya. Kekuasaan otoritas politik ini harus dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pembentuk Perda.

Terkait bentuk-bentuk pendelegasian kewenangan secara formal dalam pembahasan Ranperda dimana setelah Badan Musyawarah menetapkan agenda DPRD Kota Manado kemudian diberikan kewenangan kepada Balegda untuk menyiapkan Prolegda yang memuat prioritas Ranperda untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD Kota Manado. Setelah itu Balegda menyiapkan Ranperda usul DPRD Kota Manado berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. Demikian pernyataan informan HK:

Setelah Badan Musyawarah menetapkan agenda DPRD Kota Manado kemudian diberikan kewenangan kepada Balegda untuk menyiapkan rancangan Prolegda yang memuat prioritas Ranperda untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD Kota Manado. Setelah itu Balegda menyiapkan Ranperda usul DPRD Kota Manado berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. (Wawancara, 14-09-2016)

Demikian jawaban informan HK tersebut sejalan juga dengan yang dikemukakan oleh informan BP, JK, NT, DS, DM, SL, MM, SS, RS, JD.

Bentuk-bentuk pendelegasian kewenangan secara formal dalam pembahasan Ranperda insiatif dimana DPRD sama dengan Walikota memiliki tugas membentuk Perda inisiatif, DPRD membahas bersama-sama dengan Walikota dan memberikan persetujuan dan Walikota melaksanakan Perda tersebut terus DPRD mengawasi pelaksanaan Perda yang ditetapkan itu. Demikian pernyataan informan DR:

DPRD sama dengan Walikota memiliki tugas membentuk Perda inisiatif, DPRD membahas bersama-sama dengan Walikota dan memberikan persetujuan dan Walikota melaksanakan Perda tersebut terus DPRD mengawasi pelaksanaan Perda yang ditetapkan itu. Lebih baik masyarakat untuk mengetahuiPerda inisiatif di pemerintahan. (Wawancara, 27-10-2015)

Dari keseluruhan data diatas dapat dipaparkan terkait bentuk-bentuk pendelegasian kewenangan secara formal dalam pembahasan Ranperda terkait bentuk-bentuk pendelegasian kewenangan secara formal dalam pembahasan Ranperda dimana setelah Badan Musyawarah menetapkan agenda DPRD Kota Manado kemudian diberikan kewenangan kepada Balegda untuk menyiapkan rancangan Prolegda yang memuat prioritas Ranperda untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD Kota Manado. Setelah itu Balegda menyiapkan Ranperda usul DPRD Kota Manado berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. Selanjutnya bentuk-bentuk pendelegasian kewenangan secara formal dalam pembahasan Ranperda di DPRD Kota Manado dalam pembahasan Perda inisiatif di DPRD, pimpinan DPRD menugaskan Balegda menyiapkan konsep draft Ranperda inisiatif dan setelah diterima dan dibicarakan dengan pimpinan DPRD Manado terus disampaikan kepada Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota setelah itu DPRD melalui Badan Musyawarah DPRD menetapkan waktu agenda pembahasan melalui rapat paripurna DPRD Kota Manado sekaligus membentuk Pansus dan menugaskan kepada Pansus untuk membahas Perda tersebut besama dengan tim dari pihak eksekutif.Bentuk-bentuk pendelegasian kewenangan secara formal dalam pembahasan Ranperda ada mekanisme pembahasan, misalnya pimpinan DPRD membentuk Balegda, dimana Balegda ini salah satu tugasnya menyusun Prolegda dan menyiapkan Ranperda terus dalam rapat paripurna DPRD juga dapat dibentuk Pansus yang diberikan tugas untuk menyaiapkan danmengatur, merencanakan dan membahas Ranperda dan menyampaikan hasil pembahasan tersebut dalam rapat paripurna untuk pegambilan keputusan. Kamipun dari pihak eksekutif dalam hal ini Walikota dapat menugaskan pejabat lainnya atau SKPD termasuk kami Bagian Hukum untuk hadir dan mengikuti proses pembahasan Perda di DPRD Kota Manado.

Selanjutnya pertanyaan di explore untuk mengetahui tentang bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh DPRD dan Walikota dalam pembahasan Ranperda antara Walikota dan DPRD? Demikian pernyataan informan “HK”:

DPRD melakukan pembahasan untuk persetujuan jadi kewenangan untuk membahas atau tidak ada pada DPRD dan walikota selanjutnya menetapkan atau mengesahkan. Pembahasan Ranperda dapat dilakukan melalui Komisi atau Panitia Khusus (Pansus) yang proses pembahasannya dilaksanakan bersama dengan tim dari pemerintah yang dikordinasi oleh Pak Sekretaris Daerah Kota Manado yang ditugaskan oleh Walikota. (Wawancara,14-09-2016)

Data diatas dapat dijelaskan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh DPRD dan Walikota dalam pembahasan Ranperda inisiatif, DPRD menetapkan waktu pembahasan melalui rapat paripurna dan mengundang Walikota. Sebelumnya Ranperda inisiatif dibahas secara internal oleh DPRD dalam rapat paripurna. Setelah Ranperda inisiatif diterima oleh paripurna DPRD, seterusnya Ranperda itu disampaikan oleh pimpinan kepada Walikota dan selanjutnya dijadwalkan oleh Bamus untuk waktu pembahasan dengan mengundang pemerintah kota Manado. Selesai pembahasan dilanjutkan dengan penetapan atau persetujuan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan setelah itu Ranperda yang disetujui oleh DPRD diteruskan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda dan masuk dalam lembaran daerah. DPRD yang menyetujui dan Walikota yang mengesahkan atau menetapkan, DPRD dan Walikota memiliki kewenangan bersama membentuk Perda termasuk Perda inisiatif, dan dibahas bersama di DPRD. DPRD membentuk pansus untuk membahasnya dan DPRD mengundang pihak eksekutif, hasil pembahasan oleh pansus dibawa dalam rapat paripurna untuk disetujui bersama dipimpin oleh pimpinan DPRD. Setelah Ranperda tersebut disetujui oleh rapat paripurna DPRD, maka Ranperda itu disampaikan kepada Walikota, dan Walikota harus membubuhkan tandatangannya untuk sahnya Ranperda itu menjadi Perda dan dimasukan dalam lembaran daerah.. Demikian pernyataan informan “DS”:

DPRD dan Walikota memiliki kewenangan bersama membentuk Perda termasuk perda inisiatif, dan dibahas bersama di DPRD. DPRD membentuk pansus untuk membahasnya dan DPRD mengundang pihak eksekutif, hasil pembahasan oleh pansus dibawa dalam rapat paripurna untuk disetujui bersama dipimpinoleh pimpinan DPRD. Setelah Ranperda tersebut disetujui oleh rapat paripurna DPRD, maka Ranperda itu disampaikan kepada Walikota, dan Walikota harus membubuhkan tandatangannya untuk sahnya ranperda itu menjadi Perda dan dimasukan dalam lembaran daerah.

Apa yang dikemukakan oleh informan DS tersebut sama halnya yang dikemukakan oleh informan DM, SL, MM, SS, DR, JD, RS.

Dari keseluruhan data diatas dapat dipaparkan bahwa DPRD sebagai lembaga pembentuk Perda dan Walikota yang menindaklanjuti atau yang melaksanakan Perda yang ditetapkan oleh DPRD Manado yang sebelumnya dibahas bersama antara pihak DPRD Manado dan tim dari Pemerintah Kota Manado yang ditugaskan oleh Walikota Manado. Kedua-duanya memiliki kewenangan untuk membentuk Perda termasuk perda inisiatif DPRD. DPRD memberikan persetujuan dan Walikota menetapkan dan melaksanakan Perda tersebut.

Kalau menurut ketentuan yang berlaku seperti yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Manado Nomor 04 Tahun 2010, bahwa pembahasan Ranperda dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu, tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I, meliputi: (1) Dalam hal Ranperda berasal dari Walikota Manado dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: (a) penjelasan Walikota Manado dalam rapat paripurna mengenai Ranperda, (b) pemandangan Umum fraksi terhadap Ranperda, (c) tanggapan dan/atau jawaban Walikota Manado terhadap pemandangan umum fraksi. (2) Dalam hal Ranperda berasal dari DPRD Kota Manado dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: (a) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan badan legislasi dareah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Ranperda, (b) pendapat Walikota Manado terhadap Ranperda, dan (c) tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota Manado. (3) Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. Pembicaraan tingkat II, meliputi: (1) pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: (a) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada huruf c, (b) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna, (c) pendapat akhir Walikota Manado.

Dapakah dijelaskan bahwa semua Ranperda baik yang berasal dari DPRD Kota Manado maupun yang berasal dari Walikota Manado dibahas secara bersama oleh DPRD Kota Manado dan Walikota dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dan pembahasan itu dilakukan melalui 2 (dua) tingak pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat pertama dan pembicaraan tingkat kedua. Di masing-masing tingkatan pembicaraan itu ada juga mekanismenya yang berbeda dan itu bergantung pada Ranperda itu berasal dari mana.

Informan selanjutnya memberikan informasi terkait apa-apa yang dibahas pada setiap tingkatan pembahasan ranperda? Demikian pernyataan informan DM:

Untuk pembahasan Perda khususnya Perda inisiatif DPRD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat pertama, yang dilakukan melalui kegiatan: (1) Penjelasan pimpinan pansus, (2) Pendapat Walikota terhadap Ranperda, (3) Tanggapan atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota. Setelah proses tahapan itu baru masuk dalam kegiatan pembahasan bersama dan biasanya pembahasan Ranperda dilaksanakan melalui Pansus. Pembahasan dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat atau SKPD yang terkait dengan pembahasan ranperda. Setelah melewati pembahasan tersebut, kemudian masuk pada tahap selanjutnya yaitu tingkat pembicaraan kedua. Dalam tahapan ini dilakukan kegiatan : (1) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: (a) penyampaian laporan pimpinan Pansus tentang hasil pembahasan Ranperda sebelumnya, (b) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan. (2) Pendapat akhir Walikota. (Wawancara, 09-09-2015)

Apa saja yang dibahas pada setiap tingkat pembicaraan dalam proses pembahasan Perda di DPRD Kota Manado? Demikian pernyataan informan SL:

Sebenarnya pada tingkat satu cuman dilakukan pembukaan pembahasan dan pada pembicaraan tingkat dua baru kesepakatan. Artinya pada tingkat satu dibuka persidangannya dan terus dilanjutkan dengan pembahasan dan tingkat dua ditutup atau penetapan perda. (Wawancara, 23-10-2015)

Selanjutnya diketahui tentang, apa-apa yang dibahas pada setiap tingkatan pembahasan ranperda inisiatif? Demikian pernyataan informan SS:

Ada pembahasan ditingkat I ini paripurna untuk masuk dalam pembahasan dan ada tingkat II itu merupakan rapat paripurna untuk pengambilan keputusan tentang perda yang dibahas pada pembahasan tingkat I. (Wawancara, 26-10-2015)

Dapatkah dijelaskan, apa-apa yang dibahas pada setiap tingkatan pembahasan ranperda inisiatif? Demikian pernyataan informan DR:

Pembahasan ranperda inisiatif DPRD dimulai dengan pembahasan tingkat I, disini ada penjelasan dari Walikota terus ada pemandangan umum dari setiap fraksi dan selesai itu masuk dalam pembahasan melalui pansus. Didalam pembahasan juga dilakukan bersama-sama dengan pihak eksektuif dan kalau sudah selesai pembahasan di pansus terus masuk pada pembahasan tingkat II, yaitu proses pengambilan keputusan dalam rapat paripuran yang dipimpin oleh pimpinan DPRD. (Wawancara, 27-10-2015)

Baik. Apakah hal proses atau juga prosedur tahap-tahap tingkat pembicaraan itu telah dilaksanakan oleh DPRD dalam pembahasan Ranperda? Demikian pernyataan informan NT:

Belum. Yang dilakukan dalam pembicaraan tingkat I itu adalah mekanisme pada huruf a bukan mekanisme yang diatur pada huruf b. seharusnya karena Ranperdanya berasal dari DPRD atau perda inisiatif maka yang harus dilakukan adalah mekanisme pada huruf b, tetapi kenyataannya yang berlangsung di DPRD itu mengikuti pola pengajuan Ranperda yang dari eksekutif yang dimulai dangan penjelasan dari Walikota Manado. (Wawancara, 29-09-2105)

Bolehkah dikemukakan secara rinci prosesnya dari pembicaraan tingkat pertama dan pembicaraan tingkat dua terkait acara dan materi pembahasannya? Demikian pernyataan informan SL:

Itu sudah normatif. Saya tidak ingat lagi secara rincinya nanti dicek dibagian hukum. (Wawancara, 23-10-2015)

Maksudnya, Pembahasan Ranperda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD Kota Manado dan Walikota Manado untuk mendapat persetujuan bersama, dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan. Bagaimana implementasinya? Demikian pernyataan informan HK:

Pengusul diberikan kesempatan memberikan penjelasan mengenai Ranperda yang akan dibahas dalam persidangan DPRD Kota Manado. (Wawancara, 14-09-2015)

Apa saja yang dibahas dimasing-masing tingkat pembicaraan pembahasan Perda? Demikian pernyataan informan BP:

Pada dasarnya setiap pembahasan Ranperda oleh DPRD Manado semua anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau pikirannya pada setiap pembahasan Perda. (Wawancara, 14-09-2015)

Apakah pembahasan Perda-perda inisiatif DPRD juga mengikuti mekanisme itu? Demikian pernyataan informan DS:

Memang belum semuanya mengikuti mekanisme seperti itu. Sayapun tidak tahu, karena mungkin sudah terbiasa juga dengan praktek-praktek sebelumnya. Karena untuk Perda inisiatifkan baru. Sementara pengajuan Ranperda itukan sebelum-sebelumnya dari pihak eksekutif belum ada yang berasal dari DPRD. Jadi dalam pembahasan Ranperda di rapat paripurna langsung dimulai dengan penjelasan dari Walikota baru kemudian disusul oleh pemdangan umum setiap fraksi. Kalau sekarangkan ada perbedaan, misalnya kalau Ranperda inisiatif berartikan itu dari DPRD jadi dalam rapat paripurna itu dimulai dengan penjelasan dari pansus yang dibentuk oleh DPRD baru diikuti oleh pendapat walikota dan kemudian diikuti oleh tanggapan atau jawaban fraksi ini lagi bukan pemandangan umum fraksi tetapi tanggapan atau jawaban dari fraksi-fraksi. (Wawancara, 29-10-2015)

Apakah mekanisme tersebut benar-benar telah dilakukan oleh DPRD Kota Manado dalam pembentukan keempat Perda inisiatif yang anda sampaikan sebelumnya? Demikian pernyataan informan MM:

Memang aturannya sudah seperti itu, masalahnya adalah apakah itu telah dilaksanakan? Harus saya akui bahwa sejujurnya pembentukan Perda khususnya Perda yang berasal dari DPRD (Perda inisiatif) belum sepenuhnya dilakukan dengan proses seperti itu. Jadi yang terjadi atau proses yang dilakukan di DPRD Kota Manado ini pada pembicaraan tingkat I harusnya dimulai dengan penjelasan dari pengusul dalam hal ini Pansus DPRD mengenai Ranperda yang ada baru kemudian ada pendapat walikota dan seterusnya tanggapan atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota Manado, tetapi prakteknya selama ini dilakukan pertama langsung dengan memberikan kesempatan kepada Walikota Manado untuk memberikan penjelasan terhadap Ranperda dan selesai itu langsung dengan pemandangan umum setiap fraksi kemudian langsung masuk dalam pembahasan melalui pansus.Saya sudah beberapa kali sampaikan kepada pimpinan untuk mekanismenya. Tetapi kenyataannya terus dilakukan seperti itu. Saya kurang mengerti mengapa masih terus dipraktekan seperti itu. (Wawancara, 23-10-2015)

Temuan terkait pembentukan Perda khususnya Perda yang berasal dari DPRD (Perda inisiatif) belum sepenuhnya dilakukan dengan proses seperti itu. Jadi yang terjadi atau proses yang dilakukan di DPRD Kota Manado ini pada pembicaraan tingkat I harusnya dimulai dengan penjelasan dari pengusul dalam hal ini Pansus DPRD mengenai Ranperda yang ada baru kemudian ada pendapat walikota dan seterusnya tanggapan atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota Manado, tetapi prakteknya selama ini dilakukan pertama langsung dengan memberikan kesempatan kepada Walikota Manado untuk memberikan penjelasan terhadap Ranperda dan selesai itu langsung dengan pemandangan umum setiap fraksi kemudian langsung masuk dalam pembahasan melalui pansus.

1. *Standing Orders*

*Standing orders*, mengenai yakni adanya muatan kepentingan tertentu oleh DPRD sebagai titipan atau pesanan dari pihak tertentu dalam pembahasan Ranperda. Kewajiban politik untuk memperjuangkan aspirasi, kepentingan, kesejahteraan publik menjadi tugas dan fungsi DPRD yang dilakukannya melalui pengaturan atas kebijakan dalam bentuk Perda yang implementasinya dilaksanakan oleh pihak eksekutif.

Selanjutnya peneliti mendalami dengan mengajukan pertanyaan tentang Apakah ada muatan kepentingan tertentu oleh DPRD dalam pembahasan materi Ranperda? Demikian pernyataan informan HK:

Selalu ada karena setiap perda inisiatif sangat sarat dengan kepentingan pribadi, kepentingan fraksi dll. Ada banyak proses perdebatan dan tidak dapat dihindari. Sudah menjadi ciri dan karakteristiknya sebagai lembaga politik, walaupun banyak yang berdebat itu hanya orang-orang tertentu hampir disetiap pembahasan yang lain kebanyakan hanya diam dan mendengar. (Wawancara, 14-09-2016)

Jawaban dari HK ini linier dengan jawaban dari informan BP, JK, NT, DS, SL, DM, SS, DR, RS, JD. Semuanya menyatakan bahwa sebagai lembaga politik maka unsur kepentingan (interes) dilembaga tersebut merupakan keniscayaan.

Selanjutnya ditemukan masalah terkait muatan kepentingan tertentu oleh DPRD dalam pembahasan materi Ranperda. Demikian pernyataan informan TU:

Pembuatan Perda tidak konsekuen dengan Prolegda, penyebabnya karena tari ulur soal kepentingan. Dapat diketahui bahwa budget Perda yang dianggarkan beasal dari APBD murni. Di DPRD juga ada yang disebut dengan tim 9 yang mempengaruhi pengambilan keputusan atau dapat dikatakan pembuat skenario dalam pengambilan keputusan. Dalam pembuatan Perda inisiatif juga tim sembilan ini mempengaruhi keputusan. Perda inisiatif menurut pandangan pengamat yang dikeluarkan dewan tidak dimonitoring dan tidak berjalan. Pembuatan Perda hanya untuk menyeimbangi porsi budget saja. Tidak tahu apakah Perda yang dibuat menguntungkan pribadi, golongan atau parpol. Pertanggungjawaban moral dan politik kepada masyarakat tidak nampak. (Wawancara, 07-01-2016)

Dari data diatas dapat dijelaskan terkait ada muatan kepentingan tertentu oleh DPRD dalam pembahasan materi Ranperda bahwa muatan kepentingan tertentu oleh DPRD dalam pembahasan materi Ranperda selalu ada karena setiap Perda inisiatif sangat sarat dengan kepentingan pribadi, kepentingan fraksi dll.

Temuan lainnya adalah Pembuatan Perda tidak konsekuen dengan Prolegda, penyebabnya karena tarik ulur soal kepentingan. Dapat diketahui bahwa budget Perda yang dianggarkan berasal dari APBD murni. Di DPRD juga ada yang disebut dengan tim 9 yang mempengaruhi pengambilan keputusan atau dapat dikatakan pembuat skenario dalam pengambilan keputusan.

Kesimpulan dari keseluruhan indikator yang ada pada fokus satu Sub Fokus *Legitimacy of decision Makers* (legitimasi dari pembuat kebijakan)dapat disajikan sebagai berikut:

*Constitutions* adalah pelaksanaan kewenangan pembuatan Perdaoleh DPRD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belumlah sesuai harapan yang ada dari temuan diperoleh bahwa prosedur atau tata cara pengajuan dan pembahasan Ranperda yang berasal dari DPRD Kota Manadodimulai dari setiap komisi menyusun program-program legislasi lalu disampaikan kepada Baleg untuk dikaji apakah disetujui atau tidak. Namun hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan atau tidak memenuhi prosedur dan belum memenuhi regulasi yang ada.Selanjutnya tentang prosedur atau tata cara dalam pengajuan dan pembahasan Ranperda yang berasal dari DPRD Kota Manado, dari temuan yang diperoleh sebagian besar anggota DPRD Kota Manado belum maksimal memahami Tupoksi.

*Electoral systems for governments and decisions-making*, dalam hal ini berkaitan dengan sistem dan mekanisme yang digunakan dalam pengajuan dan pembahasan serta penetapan Perda yang dilakukan oleh DPRD bersama eksekutif, dapat diketahui mengenai alur pembentukan Perda yang berasal dari DPRD yang digunakan dalam pembentukan Perda yang berasal dari DPRD belumlah sesuai dengan tahapan prosedur yang ada. Alur tersebut tidak lagi dilakukan oleh DPRD Kota Manado, maksudnya mekanisme internal tersebut tidak lagi dilakukan oleh DPRD karena Ranperdanya langsung disiapkan oleh Balegda bersama dengan tim akademisi setelah itu langsung dibawah dalam rapat paripurna DPRD masuk dalam pembahasan pembicaraan tingkat I. Dari temuan peneliti selanjutnya bahwa prosedur alur pembentukan Perda banyak tidak dimengerti oleh para anggota DPRD.

*Bureaucratic system of representation,* adalah pelaksanaan sistem perwakilan dalam pembuatan Perda di DPRD. Pelaksanaan sistem perwakilan dalam pembuatan Perda di DPRD, terkait apakah dalam setiap Komisi ada perwakilan dari setiap Fraksi yang ada di DPRD Manado ditemui bahwa keanggotaan di setiap komisi merupakan representasi dari setiap fraksi yang ada, namun pelaksanaan sistem perwakilan belum sepenuhnya dilakukan secara optimal.

*Royal prerogrative,* berkaitan denganhak istimewa yang melekat pada DPRD dalam hal ini hak untuk mengajukan Ranperda (hak inisiatif). Dari temuan bahwa ada beberapa anggota DPRD Kota Manado yang kurang mengetahui mengenai hak istimewa yang dimiliki DPRD terkait membuat Perda inisiatif.

*Legislation,* dalam hal ini tugas dan fungsi DPRD sebagai pembuat Perda.Terkait fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Perda inisiatif dapat disimpulkan bahwa DPRD mempunyai wewenang dalam pembentukan Peraturan daerah bersama Walikota namun anggota DPRD Kota Manado masih kurang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan hak tersebut. Hal ini terkait kualitas SDM pada anggota Dewan. Karena banyak yang kurang memilikinya sehingga banyak yang bersifat tak peduli, cuek masa bodoh. Yang peduli dan mau belajar serta yang melaksanakan hak-hak istimewa tersebut hanya sedikit saja. Harusnya setiap anggota harus melihat itu sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan kebutuhan bagi kesejahteraan konstituen atau masyarakat tetapi hal itu tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh sebagian besar anggota DPRD Kota Manado.

*Letters of appointment,* dalam hal ini terkait dengan adanya kerjasama dalam pembahasan Ranperda baik DPRD dan pihak eksekutif.Bentuk-bentuk kerjasama dalam pembahasan Ranperda oleh DPRD dengan eksekutif terlihat dalam penyusunan Ranperda dibahas dalam badan musyawarah (Banmus) setelah itu dibuat agenda-agenda khusus pembahasan nota pengantar ke pihak pemerintah lalu ditindak lanjuti oleh Balegda dalam bentuk Prolegda. Pembahasan ranperda dilakukan bersama antara DPRD Manado bersama Walikota Manado. Bentuk-bentuk kerjasama dalam pembahasan ranperda inisiatif oleh DPRD dengan eksekutif kerjasamanya yaitu bersama-sama membahas mulai dari pembahasan Prolegda hingga sampai pembahasan Ranperda baik melalui komisi, gabungan komisi atau melalui pansus sampai pada penetapan Perda itu sendiri.

*Formal delegation of authority,*belum adanya pendelegasian kewenangan secara formal dalam pelaksanaan pembahasan Ranperda secara delegatif.Bentuk-bentuk pendelegasian kewenangan secara formal dalam pembahasan Ranperda insiatif dimana DPRD sama dengan Walikota memiliki tugas membentuk Perda inisiatif, DPRD membahas bersama-sama dengan Walikota dan memberikan persetujuan dan Walikota melaksanakan Perda tersebut terus DPRD mengawasi pelaksanaan Perda yang ditetapkan itu.

*Standing orders*, adanya muatan kepentingan tertentu oleh DPRD sebagai titipan atau pesanan dari pihak tertentu dalam pembahasan Ranperda. muatan kepentingan tertentu oleh DPRD dalam pembahasan materi Ranperda bahwa muatan kepentingan tertentu oleh DPRD dalam pembahasan materi Ranperda selalu ada karena setiap Perda inisiatif sangat sarat dengan kepentingan pribadi, kepentingan fraksi atau Parpol. Pembuatan Perda tidak konsekuen dengan Prolegda, penyebabnya karena tarik ulur soal kepentingan. Dapat diketahui bahwa budget Perda yang dianggarkan berasal dari APBD murni. Di DPRD juga ada yang disebut dengan tim 9 yang mempengaruhi pengambilan keputusan atau dapat dikatakan pembuat skenario dalam pengambilan keputusan.

Tabel 5.3 Temuan Sub Fokus *Legitimacy Decision Makers*

(legitimasi pembuat kebijakan)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fokus: Proses Akuntabilitas Politik Pada DPRD Kota Manado dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah  Sub Fokus : *legitimacy decision makers* (legitimasi pembuat keputusan) | | |
| Indikator | Temuan | Ket |
| *Constitutions* | 1. Pelaksanaan kewenangan pembuatan Perda oleh DPRD belum sesuai dengan prosedur tata cara pembentukan Perda. Prosedur atau tata cara pengajuan dan pembahasan Ranperda yang berasal dari DPRD Kota Manado dimulai dari setiap komisi menyusun program-program legislasi lalu disampaikan kepada Baleg untuk dikaji tersebut belum sepenuhnya dilakukan atau belum memenuhi regulasi yang ada, 2. Prosedur atau tata cara dalam pengajuan dan pembahasan Ranperda yang berasal dari DPRD, sebagian besar anggota DPRD Kota Manado belum memahaminya. | Proses belum sesuai prosedur  dan kurang memahami prosedur oleh anggota DPRD Kota Manado |
| *Electoral systems for governments and decisions-making* | 1. Sistem dan mekanisme yang digunakan dalam pengajuan dan pembahasan serta penetapan Perda yang dilakukan oleh DPRD bersama eksekutif belum memenuhi alur atau prosedur yang beralaku. 2. Sistem mekanisme internal dalam pengajuan Ranperda kurang dilakukan oleh DPRD karena Ranperdanya langsung disiapkan oleh Balegda bersama dengan tim akademisi setelah itu langsung dibawah dalam rapat paripurna DPRD masuk dalam pembahasan pembicaraan tingkat I. 3. Kuranga anggota memahami dan melaksanakan mekanisme yang ada | Sistem yang ada kurang dipahami dan dijalankan bukan sesuai mekanisme yang ada dalam aturan |
| *bureaucratic system of representation,* | Pelaksanaan sistem perwakilan dalam pembuatan Perda di DPRD keanggotaan di setiap komisi merupakan representasi dari setiap fraksi yang ada, namun pelaksanaan sistem perwakilan belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. | Sistem perwakilan belum optimal |
| *Royal prerogrative* | anggota DPRD masih kurang mengetahui jika ada hak istimewa yang dimiliki DPRD terkait membuat Perda inisiatif | Belum memenuhi harapan |
| *Legislation,* | 1. DPRD mempunyai wewenang dalam pembentukan Peraturan daerah bersama Walikota namun anggota DPRD masih kurang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan hak tersebut, 2. Kualitas SDM pada beberapa anggota Dewan yang kurang. sehingga banyak yang bersifat tak peduli, cuek masa bodoh. | SDM yang masih kurang |
| *Letters of appointment,* | 1. Bentuk-bentuk kerjasama dalam pembahasan Ranperda oleh DPRD dengan eksekutif terlihat dalam penyusunan Ranperda dibahas dalam badan musyawarah (Banmus). Namun produk Perda didasarkan pada hasil Prolegda 2 tahun sebelumnya. | Bentuk kerjasama didasari hanya pada kepentingan |
| *Formal delegation of authority,* | Belum adanya pendelegasian kewenangan secara formal dalam pelaksanaan pembahasan Ranperda secara delegatif. | Belum memenuhi harapan |
| *Standing orders* | 1. Adanya muatan kepentingan tertentu oleh DPRD sebagai titipan atau pesanan dari pihak tertentu dalam pembahasan Ranperda. muatan kepentingan tertentu oleh DPRD terkait dalam pembahasan materi Ranperda, setiap Perda inisiatif sangat sarat dengan kepentingan pribadi, kepentingan fraksi atau Parpol. 2. Pembuatan Perda tidak konsekuen dengan Prolegda, penyebabnya karena tarik ulur soal kepentingan. | Sarat kepentingan sehingga tidak konsekwennya antara prolegda dan Perda Inisiatif. |

Sumber: Diolah Peneliti (2016)

1. Moral Conduct (suatu keadaan kualitas moral yang mendukung dalam proses pembahasan dan penetapan perda yang berasal dari DPRD)

*Moral conduct* adalah suatu keadaan kualitas moral yang mendukung dalam proses pembahasan dan penetapan Perda yang berasal dari DPRD. Lembaga DPRD dan pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada masyarakat luas melalui pembentukan Peraturan Daerah yang sarat dengan nilai-nilai yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteran rakyat.

1. *Society Values*

*Society values*, yaitu dalam hal ini menunjuk pada kualitas Perda harus linier dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat.Pembuatan keputusan merupakan fungsi DPRD dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah demi tercapainya kesejahteraan bersama yang disepakati. Secara konstitusional, DPRD berfungsi membentuk citra pemerintahan umum, dimana pemimpin dan atau kebijakansanaan-kebijaksanaan yang baik dan tidak baik, atau yang dapat diterima dan didukung oleh seluruh rakyat.

Kembali ke produk Perda inisiatif DPRD Kota Manado Periode 2009 – 2014. Berapa Ranperda inisiatif yang dibahas dan kemudian disetujui DPRD Kota Manado? Dan Perda apa saja yang telah dibahas bersma oleh DPRD dengan Walikota Manado? Demikian pernyataan informan HK:

Kalau tidak salah ada 2 (dua) dari DPRD atau Perda inisiatif. Perda yang sudah dilaksanakan yaitu Perda tentang penyertaan modal ke Bank Sulut dan juga Perda tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado. (Wawancara, 14-09-2016)

Pernyataan yang lain dikemukakan oleh beberapa informan, yaitu informan BP, JK, NT, DS, DM, MM, DR, SS, RS, bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti tentang Perda-Perda yang telah dibahas dan disetujui oleh DPRD Kota Manado.

Karena itu dapat dianalisis dari keseluruhan data yang ada pada masing-masing informan berebeda-beda terkaitberapa jumlah Perda yang dihasilkan selama periode 2009-2014. Ada yang menjawab 4 (empat) dan ada yang menjawab 5 (lima) dan 6 (enam), ada juga yang mengatakan lebih dari 6 (enam) dan ada juga yang kurang paham, bahkan ada informan yang menjawab ada 3 (tiga) Perda yang dihasilkan dari Ranperda yang diusulkan. Dari data selanjutnya diketahui pula bahwa ada 4 (empat) Ranperda itu dibahas dan disetujui DPRD Kota Manado bersama dengan Walikota Manado. Hanya saja hanya 2 (dua) yang benar-benar menjadi Perda, karena yang 2 berkas-berkas administrasinya kami tidak dapat proses atau tindaklanjuti kepada pemerintah Kota Manado (Walikota) karena berkas-berkas itu hilang karena peristiwa banjir bandang pada tahun 2013 lalu. Ada 2 perda yang ditetapkan pada akhir tahun 2013 lalu, belum sempat berkas administrasinya di proses Manado saat itu dilanda banjir semua berkas kami disini hilang, rusak dsb. Perbedaan data dari informan yang semuanya adalah anggota DPRD Kota Manado, bahkan ada diantaranya sebagai anggota Baleg, menunjukan adanya perbedaan persepsi diakibatkan karena mereka kurang memahami prosedur dan tidak mengikuti dengan baik tahapan-tahapan dalam penyusunan Perda tersebut. Hal ini tergambar bahwa sumber daya manusia yang ada pada anggota DPRD kota Manado menunjukan kurang profesional dan akuntabel dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi.

Selanjutnya peneliti mendalami data yang sudah ada dengan teknik triangulasi untuk memperoleh data yang kredibel, dengan mengajukan pertanyaan kepada beberapa informan untuk mengetahui ada berapa Ranperda yang di tetapkan menjadi Perda? Demikian pernyataan informan “BP”:

Ada sekitar 36 Perda karena setiap tahun ada sekitar 6 Perda yang di tetapkan. Baik Ranperda bersifat rutin maupun dan Perda-perda lainnya termasuk didalamnya Perda inisiatif DPRD Manado.Perda bersifat rutin misalnya Perda tentang APBD Perda APBD Perubahan. (Wawancara, 14-09-2015)

Dari data informan diatas menjelaskan bahwa ada sekitar 36 Perda karena setiap tahun ada sekitar 6 Perda yang di tetapkan. Baik Ranperda bersifat rutin maupun dan Perda-perda lainnya termasuk didalamnya Perda inisiatif DPRD Manado. Perda bersifat rutin misalnya Perda tentang APBD Perda APBD Perubahan. Data informan “BP” berbeda dengan informan “NT” yang menjelaskan kalau Perda ada 2, yaitu 1. Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, 2. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Letak Penempatan Reklame.Terus ada 2 Ranperda yang sudah dibahas dan disetujui DPRD, yaitu Ranperda tentang Tata Letak Penempatan Tower dan Komunikasi dan tentang Pengelolaan Perparkiran di Kota Manado. Kedua Ranperda itu dibahas dan disetujui oleh DPRD Kota Manado pada tanggal 30 Desember 2013. Demikian pernyataan informan “NT”:

Kalau Perda ada 2, yaitu 1. Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, 2. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Letak Penempatan Reklame.Terus ada 2 Ranperda yang sudah dabahas dan disetujui DPRD, yaitu Ranperda tentang Tata Letak Penempatan Tower dam Komunikasi dan tentang Pengelolaan Perparkiran di Kota Manado. Kedua Ranperda itu dibahas dan disetujui oleh DPRD Kota Manado pada tanggal 30 Desember 2013. (Wawancara, 29-09-2015)

Selanjutnya terjadi pula perbedaan data dari informan “DS” dan “DM” yang keduanya adalah Pimpinan Dewan yang menyebutkan jumlah yang berbeda dimana menurut “DS” ada 4 (empat) Perda yang ditetapkan sedangkan “DM” menyebutkan ada 2 (dua) Perda yang ditetapkan. Data tersebut dapat disajikan dibawah ini. Hal sama juga dikatakan oleh informan “SS” dan “SL”.

Dapat dianalisis dari keseluruhan data yang ada pada masing-masing informan berebeda-beda terkaitberapa jumlah Ranperda yang dihasilkan selama periode 2009-2014. Ada yang menjawab 4 (empat) dan ada yang menjawab 5 (lima) dan 6 (enam), ada juga yang mengatakan lebih dari 6 (enam) dan ada juga yang kurang paham, bahkan ada informan yang menjawab ada 3 (tiga) Perda yang dihasilkan dari Ranperda yang diusulkan. Dari data selanjutnya diketahui pula bahwa ada 4 (empat). Ada pula informan menjelaskan bahwa ada sekitar 36 Perda karena setiap tahun ada sekitar 6 Perda yang di tetapkan. Baik Ranperda bersifat rutin maupun dan Perda-perda lainnya termasuk didalamnya Perda inisiatif DPRD Manado.Perda bersifat rutin misalnya Perda tentang APBD Perda APBD Perubahan. Data informan berbeda dengan informan lain yang menjelaskan kalau Perda ada 2, yaitu 1. Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, 2. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Letak Penempatan Reklame. Dari data yang ada terdapat 2 (dua) Ranperda yang sudah dibahas dan disetujui DPRD, yaitu Ranperda tentang Tata Letak Penempatan Tower dan Komunikasi dan tentang Pengelolaan Perparkiran di Kota Manado. Kedua Ranperda itu dibahas dan disetujui oleh DPRD Kota Manado pada tanggal 30 Desember 2013, hanya saja hanya 2 (dua) yang benar-benar menjadi Perda, karena yang lainnya berkas-berkas administrasinya kami tidak dapat proses atau tindaklanjuti kepada pemerintah Kota Manado (Walikota) karena berkas-berkas itu hilang saat peristiwa banjir bandang pada tahun 2013 lalu. Sehingga dari beberapa data menyampaikan hal yang sama bahwa ada 2 (dua) Perda yang ditetapkan pada akhir tahun 2013 lalu, belum sempat berkas administrasinya di proses Manado karena dilanda banjir semua berkas kami disini hilang dan rusak.

Selanjutnya ketika jumlah Perda yang sudah dibahas diketahui, apakah Perda-Perda tersebut sudah memenuhi nilai-nilai yang ada dimasyarakat? Demikian pernyataan informan HK:

Pasti sudah memenuhi, karena setiap Ranperda yang telah disetujui telah melalui pembahasan yang melibatkan orang-orang yang terkait dalam setiap pembahasan dan semua itu didasarkan pada kebutuhan untuk kepentingan masyarakat. (Wawancara, 14-09-2015)

Maksudnya, apakah Perda-perda tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dan/atau telah benar-benar mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat? Demikian pernyataan informan HK:

Ia karena kami DPRD Kota Manado telah berusaha untuk membahas Ranperda dengan melakukan dan melibatkan masyarakat sebelum pembahasan Ranperda dengan maksud untuk menampung pemikiran dan pendapat-pendapat dari masyarakat. (Wawancara, 14-09-2015)

Apakah perda-perda tersebut sudah memenuhi nilai-nilai yang ada di masyarakat? Demikian pernyataan informan BP:

Sudah memenuhi syarat karena setiap Perda yang direncanakan dan dilaksanakan selalu melibatkan orang-orang yang terkait dalam setiap pembahasaan Perda. (Wawancara, 14-09-2015)

Apakah Perda-perda itu sudah memenuhi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat? Demikian pernyataan informan JK:

Itu relatif, karena itukan masyarakat yang menilai. Kami di DPRD sudah berusaha supaya perda-perda itu juga harus mempertimbangkan atau paling kurang memperhatikan nilai-nilai yang ada dimasyarakat khususnya masyarakat kota Manado. (Wawancara, 21-09-2015)

Apakah Perda-perda tersebut sudah memenuhi nilai-nilai yang ada dimasyarakat? Demikian pernyataan informan NT:

Tidak tahu. Masyarakatlah yang menilai dan lebih tahu. Kadang kami katakan sudah tapi masyarakat bilang belum, tergantung sudut pandang mana kita lihat. (Wawancara, 29-09-2015)

Jawaban yang sama disampaikan oleh kedua informan terkait pertanyaan. Apakah Perda-perda tersebut sudah memenuhi nilai-nilai yang ada dimasyarakat? Demikian pernyataan informan DS:

Mudah-mudahan ya. Itu harapan kami, tergantung masyarakat sajalah yang menilai, karena penilaian ditangan masyarakat. (Wawancara, 29-09-2015)

Harapan kedua legislator berbeda dengan data pada informan berikutnya yang mengatakan bahwa Perda-perda tersebut belum mengakomodasi keinginan atau belum berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kalau Perda tersebut benar-benar lahir dari inisiatif DPRD mungkin jadi lain, tetapi kenyataan tidak seperti itu. Kalau anggota DPRD benar-benar berjuang untuk mewakili kepentingan masyarakat, dia harus berjuang untuk memperjuangkan lebih banyak Perda inisiatif yang berorientasi pada aspirasi masyarakat. Tetapi itu belum dilakukan oleh DPRD sebagai perwakilan politik rakyat paling kurang harus berjuang untuk kepentingan rakyat di daerah pemilihannya atau konstituennya. Juga kalau mau telusuri, Perda-perda inisiatif yang ada lebih banyak beorientasi pada kepentingan para pelaku usaha atau lebih banyak manfaatnya bagi kelompok usahawan bukan masyarakat umum. Demikian pernyataan informan “DM” secara gamblang:

Kalau menurut saya Perda-perda tersebut belum mengakomodasi keinginan atau belum berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kalau Perda tersebut benar-benar lahir dari inisiatif DPRD mungkin jadi lain, tetapi kenyataan tidak seperti itu. Kalau anggota DPRD benar-benar berjuang untuk mewakili kepentingan masyarakat, dia harus berjuang untuk memperjuangkan lebih banyak Perda inisiatif yang berorientasi pada aspirasi masyarakat. Tetapi itu belum dilakukan oleh DPRD sebagai perwakilan politik rakyat paling kurang dia berjuang untuk kepentingan rakyat di daerah pemilihannya atau konstituennya. Juga kalau mau telusuri, perda-perda inisiatif yang ada lebih banyak beorientasi pada kepentingan para pelaku usaha atau lebih banyak manfaatnya bagi kelompok usahawan bukan masyarakat umum. (Wawancara, 09-10-2015)

Data diatas didukung oleh informan yang lain terkait apakah Perda-perda tersebut sudah memenuhi nilai-nilai yang ada di masyarakat? Demikian pernyataan informan “MM”:

Saya rasa belum, karena kalau menurut saya dalam pembahasan Perda harus banyak mendengar apa yang diingikan oleh masyarakat. Jangan-jangan Perda yang dikeluarkan bukan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah kalau Perda itu sudah banyak melibatkan unsur-unsur masyarakat disosialisasikan, didiskusikan dengan kalangan kampus, diminta pendapat dan tanggapan masyarakat pemerhati atau pengamat dapat dijamin Perda itu dapat mewakili keinginan dan kebutuhan masyarakat. (Wawancara, 23-10-2015)

Dari data diatas menyatakan hal yang sama bahwa mereka menyadari bahwa Perda yang dihasilkan belum memenuhi nilai-nilai yang dibutuhkan mayarakat.Perda harus banyak mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Didiskusikan dengan kalangan kampus, diminta pendapat dan tanggapan masyarakat pemerhati atau pengamat

Selanjutnya data dilakukan triangulasi kepada informan yang lain terkait hal yang sama yakni apakah Perda-perda yang telah ditetapkan tersebut sudah memenuhi nilai-nilai yang ada dimasyarakat? Demikian pernyataan informan “SL”:

Sebenarnya itu yang kita utamakan karena kita mengedapankan kebutuhan yang ada dimasyarkat. Ada juga yang belum dan ada juga yang sudah, seperti menyangkut retribusi tata letak reklame yang menurut para pelaku usaha itu terlalu tinggi yang ditetapkan yaitu 30% mereka merasa sangat dirugikan. (Wawancara, 23-10-2015)

Pernyataan yang sejalan juga disampaikan oleh informan “SS”, “DR”, dan “RR” yang mengatakan bahwa mereka menyadari Perda yang telah ditetapkan mungkin belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, namun kami telah berusaha untuk dapat memenuhi harapan masyarakat.

Dapat dianalisis dari kenyataan yang ada bahwa Perda-perda tersebut belum mengakomodasi keinginan atau belum berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kalau Perda tersebut benar-benar lahir dari inisiatif DPRD mungkin jadi lain, tetapi kenyataan tidak seperti itu. Kalau anggota DPRD benar-benar berjuang untuk mewakili kepentingan masyarakat, dia harus berjuang untuk memperjuangkan lebih banyak Perda inisiatif yang berorientasi pada aspirasi masyarakat. Tetapi itu belum dilakukan oleh DPRD sebagai perwakilan politik rakyat paling kurang harus berjuang untuk kepentingan rakyat di daerah pemilihannya atau konstituennya. Juga kalau mau telusuri, Perda-perda inisiatif yang ada lebih banyak beorientasi pada kepentingan para pelaku usaha atau lebih banyak manfaatnya bagi kelompok usahawan bukan masyarakat umum.

Selanjutnya ketika jumlah Perda, dan Perda apa saja serta nilai yang ada diketahui peneliti mengexplore data untuk mengetahui apakah masyarakat atau unsur perwakilan dari masyarakat dilibatkan dalam keseluruhan proses perencanaan persiapan materi Ranperda, pengajuan menjadi Prolegda hingga proses pembahasan baik di komisi, gabungan komisi atau pansus dan pada saat paripurna pesetujuan? Demikian pernyataan informan “HK”:

Belum sampai pada tahap-tahap itu. Maksudnya pada saat pembahasan Ranperda baru masyarakat diundang untuk berpartisipasi khususnya juga bagi masyarakat yang terkait dengan materi pembahasan (Ranperda). Misalnya kalau pembahasan Ranperda tentang PD Pasar, diundang para pelaku atau pedagang di pasar dan unsur pedagang kaki lima. (Wawancara, 14-09-2015)

Data diatas menunjukan bahwa masyarakat atau unsur perwakilan dari masyarakat dilibatkan dalam keseluruhan proses perencanaan persiapan materi Ranperda, belum dilaksanakan pada tahap-tahap itu. Maksudnya pada saat pembahasan Ranperda baru masyarakat diundang untuk berpartisipasi khususnya juga bagi masyarakat yang terkait dengan materi pembahasan (Ranperda). Misalnya kalau pembahasan Ranperda tentang PD Pasar, diundang para pelaku atau pedagang di pasar dan unsur pedagang kaki lima. Data dikembangkan dengan pertanyaan apa maksudnya selalu melibatkan orang-orang yang terkait dalam setiap pembahasan Perda?Demikian pernyataan informan BP:

Artinya, bahwa pada setiap pembahasan Ranperda, kami DPRD Manado selalu mengundang masyarakat, atau tokoh masyarakat juga dari kalangan akademisi dan wartawan untuk meminta masukan dari masyarakat sebelum Ranperda itu ditetapkan. (Wawancara, 14-09-2015)

Siapa-siapa saja atau dari masyarakat mana yang diundang oleh DPRD Manado? Demikian pernyataan informan BP:

Ada yang dari kalangan kampus atau akademisi, LSM, kalangan profesional atau pengusaha, dan pedagang. (Wawancara, 14-09-2015)

Bagaimana menentukan siapa-siapa yang dapat diundang dalam pembahasan Ranperda tersebut? Demikian pernyataan informan BP:

Itu tergantung pada materi yang sedang dibahas oleh DPRD Manado pada saat itu. Misalnya Ranperda yang dibahas adalah penyertaan Modal ke Bank Sulut. Itu kami mengundang kalangan pemerhati perbankan, dan kalangan kampus, dan profesional lainnya. Begitu juga saat pembahasan Ranperda tentang PD. Pasar kami mengundang para pengelolah dan pelaku atau perwakilan pedagang dan kaki lima. (Wawancara, 14-09-2015)

Dari data diatas dapat dideskripsikan dan dianalisis mengenai melibatkan orang-orang yang terkait dalam setiap pembahasan Perdabahwa pada setiap pembahasan Ranperda, DPRD Manado mengundang masyarakat, atau tokoh masyarakat juga dari kalangan akademisi dan wartawan untuk meminta masukan dari masyarakat sebelum Ranperda itu ditetapkan, itu terjadi sifatnya situasional dan orang-orang yang dilibatkan ditunjuk secara langsung oleh Tim,yang dilibatkan ada yang dari kalangan kampus atau akademisi, LSM, kalangan profesional atau pengusaha, dan pedagang, tergantung pada materi yang sedang dibahas oleh DPRD Manado pada saat itu. Misalnya Ranperda yang dibahas adalah penyertaan Modal ke Bank Sulut. Itu kami mengundang kalangan pemerhati perbankan, dan kalangan kampus, dan profesional lainnya. Begitu juga saat pembahasan Ranperda tentang PD. Pasar kami mengundang para pengelolah dan pelaku atau perwakilan pedagang dan kaki lima.

Dari keseluruhan data pada indikator ini yang dapat disajikan dan dianalisis adalah pertama terkait data yang ada pada masing-masing informan berebeda-beda terkaitberapa jumlah Ranperda yang dihasilkan selama periode 2009-2014. Perbedaan data dari informan yang semuanya adalah anggota DPRD Kota Manado, bahkan ada diantaranya sebagai anggota Baleg, menunjukan adanya perbedaan persepsi diakibatkan karena mereka kurang memahami prosedur dan tidak mengikuti dengan baik tahapan-tahapan dalam penyusunan Perda tersebut. Hal ini tergambar bahwa sumber daya manusia yang ada pada anggota DPRD kota Manado menunjukan kurang profesional dan akuntabel dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi.

Selanjutnya yang kedua terkait Perda apa sajayang ditetapkan, dapat dianalisis bahwa dari beberapa data diatas kembali terjadi perbedaan data, kalau sebelumnya para anggota DPRD kurang memahami berapa jumlah Ranperda dan Perda inisiatif yang ditetapkan, kembali persepsi berbeda terkait Perda apa saja yang telah dibahas dan di tetapkan.

Yang ketiga data yang diperoleh terkait nilai-nilai sudah memenuhinilai-nilai yang dibutuhkan mayarakat, dapat dianalisis dari kenyataan yang ada bahwa Perda-perda tersebut belum mengakomodasi keinginan atau belum berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kalau Perda tersebut benar-benar lahir dari inisiatif DPRD mungkin jadi lain, tetapi kenyataan tidak seperti itu. Kalau anggota DPRD benar-benar berjuang untuk mewakili kepentingan masyarakat, dia harus berjuang untuk memperjuangkan lebih banyak perda inisiatif yang berorientasi pada aspirasi masyarakat. Tetapi itu belum dilakukan oleh DPRD sebagai perwakilan politik rakyat paling kurang harus berjuang untuk kepentingan rakyat di daerah pemilihannya atau konstituennya. Juga kalau mau telusuri, perda-perda inisiatif yang ada lebih banyak beorientasi pada kepentingan para pelaku usaha atau lebih banyak manfaatnya bagi kelompok usahawan bukan masyarakat umum.

1. *Concept of Social Justice and Public Interest*

*Concept of social justice and public interest*, hal ini berkaitan dengan bagaimana Perda insiatif yang ditetapkan sejalan dengan keinginan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Akuntabilitas politik menunjuk pada pengakuan atas kewenangan pemegang kekuasaan politik dari badan legislasi untuk mengatur (pengambilan keputusan/pembuatan peraturan), menetapkan prioritas dan pendistribusian kembali sumberdaya dan menjamin kepatuhan atas perintah.

Akuntabilitas politik apabila dilaksanakan secara normatif berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan akan dapat meminimalisir pengambilan keputusan melalui Perda oleh DPRD yang bertentangan dengan keinginan publik. Sebab itu apabila Perda yang dibahas dan ditetapkan oleh DPRD berorientasi pada keinginan, kehendak dan berpihak pada publik, maka legitimasi dan/atau pengakuan publik atas kewenangan politik DPRD akan mendapat dukungan dari publik.

Untuk mengetahui berkaitan dengan bagaimana Perda yang ditetapkan sejalan dengan keinginan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada beberapa informan menanyakan apakah Perda yang ditetapkan tersebut dapat dijamin sudah sejalan dengan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat? Demikian pernyataan informan “HK”:

Kalau dilihat, hingga saat ini tidak ada penolakan masyarakat terhadap Perda inisiatif yang telah ditetapkan tersebut. Karena Perda inisiatif yang ditetapkan atau sebelum dibahas kemudian ditetapkan selalu diadakan pertemuan khusus dengan pihak-pihak terkait agar bisa mencapai suatu kesepakatan bersama tanpa harus merugikan pihak lain. (Wawancara, 14-09-2016)

Dari data diatas menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada penolakan masyarakat terhadap Perda inisiatif yang telah ditetapkan tersebut. Karena Perda inisiatif yang ditetapkan atau sebelum dibahas kemudian ditetapkan selalu diadakan pertemuan khusus dengan pihak-pihak terkait agar bisa mencapai suatu kesepakatan bersama tanpa harus merugikan pihak lain, senada dengan informan diatas informan “BP” juga menjelaskan pandangan yang sama yakni Perda yang ditetapkan atau sebelum dijalankan selalu diadakan pertemuan khusus dengan pihak-pihak terkait agar bisa mencapai suatu kesepakatan bersama tanpa harus merugikan pihak lain. Contoh Perda penyertaan modal ke Bank Sulut, menara telkomsel, dan PD Pasar. Begitu juga dengan Perda-perda yang lain. Demikian pernyataan informan”BP”:

Perda yang ditetapkan atau sebelum dijalankan selalu diadakan pertemuan khusus dengan pihak-pihak terkait agar bisa mencapai suatu kesepakatan bersama tanpa harus merugikan pihak lain. Contoh Perda pernyataan modal ke bank sulut, menara telkomsel, dan PD Pasar Begitu juga dengan perda-perda yang lain. (Wawancara, 14-09-2015)

Berbeda dengan informan sebelumnya “JK” menyampaikan bahwa masyarakat yang memberikan pendapat atau penilaian terkait Perda yang ditetapkan tersebut sejalan dengan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat. Demikian pernyataan informan JK:

Nanti soal itu biar masyarakat yang memberikan pendapat atau penilaian. (Wawancara, 21-10-2015)

Selanjutnya pertanyaan yang sama yakni Apakah Perda yang ditetapkan sejalan dengan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat ditujukan pada informan “NT”. Demikian pernyataan informan :

Mungkin belum masih jauh terutama perda tentang Tata Letak Reklame karena ada suara-suara dari para pengusaha yang keberatan dengan penetapan pajak atau retribusinya. (Wawancara, 29-09-2015)

Sejalan dengan informan NT, informan lain juga sama pendapatnya seperti informan DS, DM, SL, MM, SS, DR, JD. Menurut mereka belum linier menjamin rasa keadilan dan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya pertanyaan disampaikan kepada informan untuk memperkuat data sebelumnya untuk mengetahui apakah dalam implementasi kebijakan Perda tersebut benar-benar telah dilaksanakan oleh setiap pemangku dari kebijakan Perda tersebut? Demikian pernyataan informan “HK”:

Memang kalau implementasi di lapangan perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan lebih lanjut lagi. Seberapa efektifnya pelaksanaan atau penerapan Perda-perda tersebut. (Wawancara, 14-09-2015)

Pertanyaan yang sama diajukan agar dapat disajikan untuk penarikan kesimpulan dan dianalisis pada indikator ini terkait apakah Perda yang ditetapkan sejalan dengan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat? (DPRD, Sekwan, masyarakat yang mewakili seperti LSM, akademisi). Demikian pernyataan informan RS:

Pertama untuk memenuhi rasa keadilan karena ada payung hukum. Pada bagian awal contohnya keamanan ketertiban (contohnya Perda anti mabuk). Karena apabila Perda ini tidak berjalan maka kami juga merasa terbebani. Ada banyak aspirasi yang masuk pada saat itu. Awal tahun 2015 sudah kami bahas. Sudah ada wacana tetapi ternyata di provinsi juga sudah ada. Dalam pendelegasian terdapat kendala karena ada wacana Perda pembatasan Miras. Disitu ada wewenang dari lembaga hukum yang mengatur tentang jumlah produksi dan distribusi tetapi tetap ada usulan tentang keamanan dan ketertiban. Kalau produksi jangan karena itu juga merupakan pendapatan PAD. Tetapi produksi yang sudah ada wacana. Diskusi ini belum tuntas apakah akan dibahas atau tidak karena kami sudah kehilangan arah. Kalau masalah hukum itu masalah penegak keamanan, kami tidak bisa membuat Perda yang kami pikir bahwa aparat pemerintah juga tidak mampu karena saya pikir aparat pemerintah di kelurahan ini lebih condong untuk pelayanan publik. Masalah keamanan ini biarlah menjadi tanggungjawab petugas keamanan. (Wawancara, 22-12-2015)

Dari keseluruhan data diatas dapat dipaparkan dan dianalisis bahwa bahwa Perda yang ditetapkan kurang sejalan dengan rasa keadilan dan kepentingan masyaraka, hal tersebut lebih disebabkan karena sebagian besar anggota DPRD kurang serius ikut dalam pembahasannya padahal kita semua ini mewakili rakyat dan diforum pembahasan Perda inisiatif sebenarnya itu adalah kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang kita wakili namun kenyataan itu sebagian besar tidak aktif memberikan kontribusinya dalam bentuk ide atau gagasan.

1. *Profesional values*

*Profesional value,* proses pengajuan, pembahasan dan penetapan Perda oleh DPRD harus mengedepankan kualitas nilai profesionalnya sebagai representasi publik.

Sebagai anggota yang telah memasuki tahun Periode ketiga,kalau menurut Bapak Hengky, apakah proses pengajuan pembahasan dan penetapan Perda oleh DPRD terutama DPRD Periode 2009 – 2014 telah mengedepankan kualitas profesional anggota DPRD sebagai representasi publik? Demikian pernyataan informan HK:

Kualitas profesional sebagai representasi publik tergantung juga pada masing-masing anggota DPRD ada yang pro aktif tapi ada juga yang hanya diam begitu saja selalu cuek dengan tugas dan tanggung jawab mereka. (Wawancara, 14-09-2015)

Data diatas dijelaskan bahwa kualitas profesional sebagai representasi publik tergantung juga pada masing-masing anggota DPRD ada yang pro aktif tapi ada juga yang hanya diam begitu saja selalu cuek dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Apakah proses pengajuan pembahasan dan penetapan Perda oleh DPRD sudah mengedepankan kualitas profesional sebagai representasi publik?Demikian pernyataan informan BP:

Saya kira belum, karena banyak anggota yang tidak aktif dan kurang memberi perhatian terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Ada anggota yang hanya datang dan pergi tanpa melakukan apa-apa. (Wawancara, 14-09-2015)

Kualitas profesional belum nampak karena banyak anggota yang tidak aktif dan kurang memberi perhatian terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Ada anggota yang hanya datang dan pergi tanpa melakukan apa-apa. Apakah proses pengajuan pembahasan dan penetapan Perda inisiatif oleh DPRD Kota Manado sudah mengedepankan kualitas profesionalistas sebagai representasi publik. Demikian pernyataan informan “JK”:

Memang kalau melihat apakah DPRD sudah mengedepankan kualitas profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengajuan, pembahasan dan penetapan Perda kami akui mungkin belum memenuhi harapan dari masyarakat Kota Manado. Ada yang mengatakan bahwa DPRD Manado kurang produktif melahirkan Perda terlebih lagi dengan Perda inisiatif, ada yang bilang DPRD Manado kinerjanya kurang dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Hanya saja semua itu bagi saya menjadi masukan untuk terus berkarya dan mengabdi bagi kepentingan masyarakat. (Wawancara, 21-09-2015)

Informan menjelaskan mengenai apakah DPRD sudah mengedepankan kualitas profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengajuan, pembahasan dan penetapan Perda kami akui mungkin belum memenuhi harapan dari masyarakat Kota Manado. Ada yang mengatakan bahwa DPRD Manado kurang produktif melahirkan Perda terlebih lagi dengan Perda inisiatif, ada yang menyatakan DPRD Manado kinerjanya kurang dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Perlu untuk menjadi masukan bagi DPRD Kota Manado untuk terus berkarya dan mengabdi bagi kepentingan masyarakat. Informan NT yang menyatakan bahwa memang belum Profesional, hal ini lebih disebabkan karena itu belum benar-benar lahir dari keinginan dan pemikiran dari anggota atau DPRD sendiri. Banyak juga anggota DPRD yang tidak serius mengikuti pembahasan Ranperdanya di Pansus, anggota DPRD kurang serius dan tidak disiplin dalam proses pembahasan. Bahkan ada anggota pansus yang tidak ada kontribusi dalam bentuk ide, pikiran, karena yang bersangkutan kalaupun hadir hanya diam tidak mengemukakan pendapat atau pandangan. Sejalan juga dengan informan HK, BP, JK dan NT tersebut, maka hal sama juga dikemukakan oleh informan DS, DM, SL, MM, SS, RS, JD.

Banyak anggota DPRD Kota Manado yang belum menyadari bahwa yang bersangkutan adalah wakil rakyat yang harus berjuang dan meperjuangkan aspirasi rakyat dan sebagai anggota parlemen harus benar-benarberbicara tentang kepentingan rakyat di DPRD Kota Manado. Kemudian banyak juga yang belum memahami dan menguasai kerja politiknya di DPRD Kota Manado. Hal ini juga dinyatakan oleh informan HK dan BP.

Proses pengajuan pembahasan dan penetapan Perda inisiatif oleh DPRD Kota Manado belum mengedepankan kualitas profesional sebagai representasi publik. Disebabkan proses pengajuan usulan mulai dari usulan Prolegda dari DPRD, itu hampir tidak ada usulan dari DPRD. Selalu hanya mengambil usulan dari pihak eksekutif kemudian dijadikan sebgaai perda inisiatif DPRD dalam Prolegda. Belum lagi soal proses pengusulan Ranperda inisiatif yang harusnya juga dibahas terlebih dahulu di internal persidangan DPRD tetapi tidak dilakukan karena langsung masuk pada pembahasan pembicaraan tingkat I. Sebagian besar anggota DPRD kurang aktif, kurang terlibat dalam pembahasan secara aktif, pemikiran, pandangan kontribusi terhadap materi Ranperda. Pada setiap persidangan termasuk dalam rapat-rapat pansus hanya didominiasi oleh anggota DPRD tertentu saja. Dari data banyak anggota DPRD yang sebenarnya belum siap dan memiliki kapasitas menjadi anggota DPRD, ada yang anggota yang kurang mengetahui tentang tugas dan fungsinya, kurang profesional dan kurang cakap.

1. *Training/induction programs*

*Training/induction programs*, berkaitan dengan program pelatihan untuk pengembangan tugas-tugas legislasi.Muncul pertanyaan: Bagaimana meningkatkan akuntabilitas? Di perlukan adanya *Training/induction programs* tentang pendidikan dan pelatihan dan juga menemukan pentingnya dialog sebagai mekanisme akuntabilitas politik pada organisasi publik.

Untuk mengetahui berkaitan dengan program pelatihan untuk pengembangan tugas-tugas legislasi, maka diajukanlah beberapa pertanyaan kepada beberapa informan dengan pertanyaan: Apakah ada bentuk-bentuk pelatihan untuk pengembangan tugas-tugas legislasi? Demikian pernyataan informan “HK”:

Selalu diadakan pelatihan-pelatihan semua anggota melalui Bimtek. Dan ini bagi anggota sebenarnya wajib dan harus mengikuti dan sering diadakan di awal-awal periode 1 tahun sekali. (Wawancara, 14-09-2016)

Bentuk pelatihan ada, bahkan selalu diadakan pelatihan-pelatihan semua anggota melalui Bimbingan Teknis (Bimtek). Dan ini bagi anggota sebenarnya wajib dan harus mengikuti dan sering diadakan di awal-awal periode 1 tahun sekali. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh informan BP, DS, JK, JD. Lain halnya dengan pernyataan informan DM:

Kalau tidak salah ingat pada tahun 2011, DPRD Manado pernah menyelenggarakan pelatihan dalam bentuk Bimbingan Teknis dalam rangka untuk pengembangan kapasitas anggota Dewan, bekerja sama dengan Kemekumham Sulawesi Utara. Pesertanya disamping anggota DPRD Manado juga staf secretariat dan utusan beberpa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hanya saja anggota DPRD Manado banyak yang kurang peduli dan banyak yang tidak ikut, terkesan cuek dan tidak aktif sebagian besar yang ikut dari secretariat Dewan dan utusan dari SKPD. Selain itu juga anggota DPRD Manado ikut Bimtek yang dilaksanakan di Jakarta oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi pelatihan Bimtek ada bagi anggota DPRD Manado. Pelaksanaan bimtek tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk pemberdayaan kapasitas, kompetensi anggota DPRD dalam melaksanakan tugas fungsi Dewan yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Jadi pada dasarnya manfaat kegiatan bimtek atau pelatihan tersebut sangat penting bagi anggota DPRD sejauh anggota serius dan peduli ikut secara aktif seluruh kegiatan dimaksud. Dalam pengamatan dan pengalaman saya, kalau kegiatan Bimtek dilaksanakan diluar daerah sebagian besar anggota DPRD Manado berangkat, namun tidak semua juga mereka aktif mengikuti kegiatan tersebut. Berdasarkan informasi, banyak juga yang hanya mengambil absen dan seterusnya meninggalkan kegiatan pelatihan atau tidak mengikuti seluruh kegiatan secara aktif. Bahkan ada laporan, ada yang tidak ikut Bimtek. (Wawancara, 07-10-2015)

Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2011, DPRD Manado pernah menyelenggarakan pelatihan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka untuk pengembangan kapasitas anggota Dewan, bekerja sama dengan Kemekumham Sulawesi Utara. Pesertanya disamping anggota DPRD Manado juga staf sekretariat dan utusan beberpa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hanya saja anggota DPRD Manado banyak yang kurang peduli dan banyak yang tidak ikut, terkesan cuek dan tidak aktif sebagian besar yang ikut dari sekretariat Dewan dan utusan dari SKPD. Pelaksanaan bimtek tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk pemberdayaan kapasitas, kompetensi anggota DPRD dalam melaksanakan tugas fungsi Dewan yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Jadi pada dasarnya manfaat kegiatan Bimtek atau pelatihan tersebut sangat penting bagi anggota DPRD sejauh anggota serius dan peduli ikut secara aktif seluruh kegiatan dimaksud. Menurut informan, apabila kegiatan Bimtek dilaksanakan diluar daerah sebagian besar anggota DPRD Manado berangkat, walaupun demikian sekalipun dilaksanakan diluar daerah, tetapi banyak juga yang hanya mengambil absen dan seterusnya meninggalkan kegiatan pelatihan atau tidak mengikuti seluruh kegiatan secara aktif. Bahkan ada laporan, ada yang tidak ikut Bimtek. Bentuk bentuk pelatihan yang diikuti oleh anggota DPRD dalam rangka pengembangan kapasitas anggota sudah dilakukan, namun tidak semua yang berperan aktif untuk mau belajar dan memahami terkait pelaksanaan tugasnya.

Data diexplore dengan menanyakan Apakah ada bentuk pelatihan yang diikuti oleh anggota DPRD dalam rangka pengembangan kapasitas anggota? Demikian pernyataan informan SL:

Ada dan itu dilaksanakan dalam bentuk Bimtek dan semua anggota wajib ikut. Tiap tahun dilaksanakan kegiatan pelatihan tersebut kita kerjasama dengan kemendagri atau lembaga-lembaga pelatihan yang ada. (Wawancara, 23-10-2015)

Bentuk-bentuk pelatihan untuk pengembangan tugas-tugas legislasi sudah dilakukan oleh DPRD yang dibiayai oleh negara, namun terkesansumberdayanya lemah dan perilaku yang kurang direspon dengan baik, namun walaupun bentuk pelatihan sudah dibuat. Tapi kadang-kadang sama saja karena meskipun sudah dilakukan pelatihan tapi ada yang tidak juga memamahi tupoksi dan pembuatan Perda. Demikian beberapa pernyataan informan, MM, SS dan DR yang menyatakan hal yang sama yakni bahwa pelatihan tersebut sudah/ada dilakukan. Pelatihan tersebut oleh DPRD juga difasilitasi oleh negara dalam aturan kita juga hal itu ada, tetapi jika dasar sumberdayanya lemah ya pasti lemah juga.” Hal senada juga disampaikan informan “TU” yang menyatakan soal efektif dan efisiensi pelaksanaan Bimtek, Demikian pernyataan informan:

Ya ada bentuk pelatihan yang dibuat. Tapi kadang-kadang sama saja karena meskipun sudah dilakukan pelatihan tapi ada yang tidak juga memamahi tupoksi dan pembuatan Perda. Sedangkan pelatihan itu juga dilakuakan di Jakarta. Kalau menurut saya lebih baik dilakukan di Manado saja segingga menghemat anggaran tapi DPRD lebih suka jika dilakukan diluar daerah karena anggarannya tinggi. (Wawancara, 01-01-2016)

Dari data primer beberapa informan bentuk-bentuk pelatihan untuk pengembangan tugas-tugas legislasi sudah dilakukan oleh DPRD yang dibiayai oleh negara, namun terkesan sumberdayanya lemah dan perilaku yang kurang direspon dengan baik, namun walaupun bentuk pelatihan sudah dibuat dibuat. Tapi kadang-kadang sama saja karena meskipun sudah dilakukan pelatihan tapi ada yang tidak juga memahami tupoksi dan pembuatan Perda.

Terdapat temuan dalam penelitian pada kegiatan tersebut ada yang ikut hingga selesai pelaksanaan Bintek, tetapi banyak yang tidak ikut hingga selesai. Misalnya ada yang hanya muncul di acara pembukaan, atau hanya pada hari pertama, atau ada yang datang hanya ambil absen lalu pergi, dan sebagainya. Dengan kata lain sangat disayangkan banyak juga anggota DPRD Kota Manado yang bersifat dan besikap masa bodoh, cuek dan tidak peduli dengan kegiatan Bimtek tersebut. Biasanya kegiata-kegiatan tersebut diselenggarakan atau dilakasanakan beberapa hari. Pesertanya banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan lain diluar kegiatan Bimtek. Sehingga mereka yang tidak ikut, otomatis kurang mendapatkan materi sebagai pengetahuan yang dapat membantu untuk menunjang kedudukan dia sebagai anggota DPRD Kota Manado. Adapula yang hadir namun tidak serius, hal tersebut terlihat ketika peserta banyak yang keluar masuk dan semaunya saja ikut dan tidak disiplin mengikuti materi selama pelaksanaan Bimtek padahal tujuan pelaksanaan bimtek untuk pemberdayaan dan penguatan kemampuan anggota untuk menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Manado.

Selanjutnya diketahui mengenai Pelatihan apa saja yang pernah diterima atau diikuti selama Periode 2009 – 2014 informan menyampaikan pelatihan yang diikuti, seperti Bimtek yang terkait dengan pelaksanaan tupoksi DPRD yaitu, legislasi, anggaran dan pengawasan. Dan itu dilaksanakan biasanya pada setiap awal periode sebagai anggota DPRD Kota Manado. Demikian pernyataan informan “HK”:

Pelatihan yang saya ikuti, seperti Bimtek yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yaitu, legislasi, anggaran dan pengawasan. Dan itu dilaksanakan biasanya pada setiap awal periode sebagai anggota DPRD Kota Manado. (Wawancara, 14-09-2015)

Pelatihan apa sajakah yang pernah diterima atau diperoleh selama periode 2009-2014 berkaitan dengan tugas-tugas legislasi? Demikian pernyataan informan BP:

Pelatihan Bimtek, dan berbagai manfaat pun akan didapatkan tapi sayang belum semua yang berpartisipasi dalam pelatihan tersebut ada yang datang mengambil absen lalu pergi masa bodoh dengan pelatihan tersebut. Banyak yang tidak serius ikut pelatihan, ada yang hanya ikut di hari pertama seterusnya tidak lagi, ada yang terlihat di hari-hari tertentu tidak ikut seluruhnya. Banyak yang sibuk dengan urusan masing-masing. (Wawancara, 14-09-2015)

Pelatihan apa sajakah yang pernah diterima atau diperoleh selama periode 2009-2014berkaitan dengan tugas-tugas legislasi? Demikian pernyataan informan NT, SL dan DS:

Biasanya dalam bentuk Bimtek.Anggota DPRD setiap awal periode selalui dijadwalkan mengiktui pelatihan seperti Bimtek. (Wawancara, 29-09-2015, 23-10-2015, 27-10-2015 )

Pelatihan apa saja yang pernah diterima atau diperoleh selama periode 2009-2014 berkaitan dengan tuga-tugas legislasi? Demikian pernyataan informan MM:

Dari kami bagian persidangan sekretariat DPRD ada pelatihan Bimtek tentang pelaksanaan tugas DPRD. (Wawancara, 23-10-2015)

Pelatihan apa saja yang perna diterima atau diperoleh selama Periode 2009-2014 berkaitan dengan tugas-tugas legislasi? Demikian pernyataan informan “SS” dan “DR”:

Ada beberapa kali. Bukan juga hanya di DPRD saya ikut, dan juga saya ini sebagai pemateri. Banyak juga lembaga-lembaga yang membuatnya ada yang diluar daerah ada juga di tingkat daerah. Materinya berkaitan dengan tupoksi.Hampir setiap ada Bimtek saya ikut. (Wawancara, 26-10-2015 dan 27-10-2015)

Pelatihan apa sajakah yang pernah diterima atau diperoleh selama periode 2009-2014 berkaitan dengan tugas-tugas legislasi? Demikian pernyataan informan RS:

Yang saya ketahui banyak pelatihan yang diikuti oleh DPRD. Salah satunya pelatihan mengenai penyusunan Perda. (Wawancara, 22-11-2015)

Pelatihan yang di ikuti, seperti Bimtek yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yaitu, legislasi, anggaran dan pengawasan. Dan itu dilaksanakan biasanya pada setiap awal periode sebagai anggota DPRD Kota Manado.Pelatihan Bintek, dan berbagai manfaat pun akan didapatkan tapi sayang belum semua yang berpartisipasi dalam pelatihan tersebut ada yang datang mengambil absen lalu pergi masa bodoh dengan pelatihan tersebut. Bimtek untuk anggota DPRD adalah pelatihan mengenai penyusunan perda. Bimtek pada bagian persidangan sekretariat DPRD ada pelatihan bimbingan teknis tentang pelaksanaan tugas DPRD.

Terkait manfaat setelah mengikuti pelatihan tersebut dalam pelaksanaan tugas legislasi, seharusnya banyak sekali manfaat yang akan didapatkan karena dalam pelatihan tersebut kita banyak diajarkan serta diberi masukkan kiat-kiat dalam menjalankan tugas sebagai anggota dewan yang baik bagaimana cara untuk mempertanggungjawabkan tugas kita dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat luas dsb. Demikian pernyataan informan HK:

Banyak sekali manfaat yang akan didapatkan karena dalam pelatihan tersebut kita banyak diajarkan serta diberi masukkan kiat-kiat dalam menjalankan tugas sebagai anggota dewan yang baik bagaimana cara untuk mempertanggungjawabkan tugas kita dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat luas dsbterutama menyangkut pengetahuan dan keterampilan tentang berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. (Wawancara, 14-09-2015)

Apakah ada manfaat pelatihan tersebut untuk diaplikasikan dalam tugas legislasi? Demikian pernyataan informan BP:

Banyak sekali manfaat yang akan didapatkan karena dalam pelatihan tersebut kita banyak diberikan pengetahuan dan masukkan bagaimana strategi dalam menjalankan tugas sebagai anggota dewan yang baik bagaimana cara untuk mempertanggungjawabkan tugas kita sebagai wakil rakyat yang berjuang untuk kesejahteraan rakyat, dsb. (Wawancara, 14-09-2015)

Apakah ada manfaat pelatihan tersebut untuk diaplikasikan dalam tugas-tugas legislasi? Demikian pernyataan informan JK:

Ada, terutama menyangkut pengetahuan dan keterampilan tentang berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. (Wawancara, 21-09-2015)

Pernyataan yang sama jugan dikemukakan oleh informan DM, MM, SS,

DR. Namun lain lagi yang dikemukakan oleh informan DS, demikian:

Kalau menurut saya belum ada manfaat untuk diaplikasikan dalam tugas legislasi karena 80% DPRD Kota Manado tidak memahami akan tupoksinya. (Wawancara, 29-09-2015)

Data kemudian di triangulasi terkait bimtek Di DPRD Kota Manado, apakah ada pelibatan kalangan akademisi (Perguruan Tinggi) sebagai  *induction* (staf ahli/tim pakar)? Demikian pernyataan informan “HT” sebagai pengamat pemerintahan politik di Sulawesi Utara:

Dalam pembentukan Perda inisiatif, DPRD memakai staf ahli dari kalangan Universitas, sedangkan dalam proses pembahasan tim dari eksekutif ada tim legal bagian hukum. Cuman sampai saat ini tidak diketahui apa yang dikerjakan oleh staf ahli, bahkan secara transparan pada pola rekruitmen tidak dilakuakan sehingga terkesan tim pakar tersebut hanya kalangan tertentu saja dan yang pasti hanya orang-orang itu-itu saja yang dilibatkan, sehingga rawan terjadinya kolusi. (Wawancara, 17-11-2015)

Dapat dijelaskan bahwa dalam pembentukan Perda inisiatif, DPRD memakai staf ahli dari kalangan universitas, sedangkan dalam proses pembahasan tim dari eksekutif ada tim legal bagian hukum. Namun sampai saat ini tidak diketahui apa yang dikerjakan oleh staf ahli, bahkan secara transparan pada pola rekruitmen tidak dilakukan sehingga terkesan tim pakar tersebut hanya kalangan tertentu saja dan yang pasti hanya orang-orang itu-itu saja yang dilibatkan, sehingga rawan terjadinya kolusi. Selanjutnya data dikonfirmasi kepada informan lain, apakah ada pelibatan kalangan akademis sebagai *induction* (staf khusus atau staf ahli)? Demikian pernyataan informan JK:

Secara formal tidak ada, kalau untuk Perda inisiatif saya tidak tahu karena itu ranah-nya mereka di DPRD Kota Manado. (Wawancara, 21-09-2015)

Di DPRD Kota Manado, apakah ada pelibatan kalangan akademisi sebagai *induction* (staf khusus atau staf ahli) Demikian pernyataan informan DM:

Pelibatan kalangan akademisi atau tim pakar/ahli di DPRD Manado, memang tidak ada pengangkatan. Walaupun terlihat ada yang dilibatkan hanya karena kebutuhan situasional saja. (Wawancara,07-10-2015)

Tanggapan informan selanjutnya mengenai keterlibatan dari akademisi dalam pembentukan Perda inisiatif menurutnya seharusnya ada staf ahli, baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan sosial budaya, tetapi kita dibatasi oleh aturan. Juga harusnya di fraksi harus ada. Hanya di DPRRI yang ada. Termasuk periode DPRD Manado pada tahun 2009-2014 lalu itu ada, mereka itu adalah pak Toar Palilingan dan pak Ronny Maramis, tetapi tidak pernah diangkat melalui surat keputusan. Setahu saya juga waktu itu sudah ada anggarannya, tetapi tidak tahu apa sebab utamanya hal tersebut tidak pernah ada. Walaupun dari segi peraturan mendukung hal tersebut atau bersifat normatif, artinya itu diamanatkan oleh PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD. Demikian pernyataan informan “ SL”:

Ya kita seharusnya ada staf ahli, baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan sosial budaya, tetapi kita dibatasi oleh aturan. Juga harusnya di fraksi harus ada. Hanya di DPRRI yang ada. Termasuk periode DPRD Manado pada tahun 2009-2014 lalu itu ada, mereka itu adalah pak Toar Palilingan dan pak Ronny Maramis, tetapi tidak pernah diangkat melalui surat keputusan. Setahu saya juga waktu itu sudah ada anggarannya, tetapi tidak tahu apa sebab utamanya hal tersebut tidak pernah ada. (Wawancara, 23-10-2015)

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh informan MM, SS, DR, TU yang kurang mengetahui secara pasti tentang adanya staf ahli atau staf khusus di DPRD Kota Manado. Lain lagi yang dikemukakan oleh informan HT, demikian:

Staf ahli hanya dilibatkan pada saat akhir proses saja karena yang membuat Ranperda hanya dari staf dewan saja yang mengambil dari Perda daerah lain. (Wawancara, 17-11-2015)

Siapa yang mengangkat dan menetapkan serta bagaimana proses pelibatan staf ahli atau tim pakar di DPRD Kota Manado. Demikian pernyataan informan HK:

Biasanya ditetapkan oleh Pimpinan DPRD, dan staf ahli hanya dilibatkan dalam pembuatan naskah akademik untuk pembuatan Ranperda. (Wawancara,14-09-2016)

Mengapa demikian? Demikian pernyataan informan BP:

Sebab kami tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh tim ahli. Itu hanya pihak Setwan atau pimpin DPRD yang tahu. Mungkin tugas mereka hanya pada pembuatan naskah akademik selesai itu tidak ada lagi atau hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan pada pimpinan DPRD Manado. (Wawancara, 14-09-2015)

Mengapa sampai tidak diangkat? Itukan bersifat normatif, artinya itu diamanatkan oleh PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD? Demikian pernyataan informan DM:

Ia, memang seperti itu aturannya. bahwa Tim Pakar/Ahli DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD Manado, hanya saja pada saat itu kami memiliki kesulitan soal bagaimana penghitungan untuk pemberian honor bagi tim pakar ini sebab tim pakar ini hanya bekerja sesuai dengan kebutuhan atau hanya bersifat temporer dan pengaturan jam kerja, waktu kerja serta dasar pemberian honor juga belum ada rujukannya. Kami pernah berkonsultasi dengan BPK dan menurut BPK, bahwa pemberian honor harus dihitung sesuai dengan jam kerja tidak sistem perbulan. Itulah kesulitan kami waktu itu, sehingga kami memang tidak mengangkat tim pakar. (Wawancara, 07-10-2015)

Maksudnya secara formal tidak ada, bagaimana itu? Demikian pernyataan informan JK:

Pengangkatan staf ahli itukan melalui keputusan Sekretaris DPRD, hanya saja setahu kita itu tidak ada. (Wawancara, 21-09-2015)

Terus kalau yang membuat naskah akademik, kalau tidak staf ahli siapa yang menyiapkan? Demikian pernyataan informan SS:

Kalau tugas untuk menyiapkan naskah akademik bersama draft atau Ranperda itukan pihak ketiga kita bekerja sama dengan akademisi dari kampus Unsrat dan itu dilelang. (Wawancara, 26-10-2015)

Dari data diatas dapat dipaparkan bahwa ada tanggapan informan selanjutnya mengenai keterlibatan dari akademisi dalam pembentukan Perda inisiatif menurutnya seharusnya ada staf ahli, baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan sosial budaya, tetapi kita dibatasi oleh aturan terutama terkait tentang pemberian honorer mereka. Disatu sisi Tim Ahli diamanatkan oleh PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD.Tim Pakar/Ahli DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD Manado, hanya saja pada saat itu DPRD Kota Manado memiliki kesulitan soal bagaimana penghitungan untuk pemberian honor bagi tim pakar ini sebab tim pakar ini hanya bekerja sesuai dengan kebutuhan atau hanya bersifat temporer dan pengaturan jam kerja, waktu kerja serta dasar pemberian honor juga belum ada rujukannya. Pihak sekretariat pernah berkonsultasi dengan BPK dan menurut BPK, bahwa pemberian honor harus dihitung sesuai dengan jam kerja tidak sistem perbulan. Itulah kesulitan kami waktu itu, sehingga DPRD Kota Manado tidak mengangkat tim pakar.

Kesimpulan dari keseluruhan indikator yang ada pada fokus satu Sub Fokus yakni *Moral conduct* (keberadaan kualitas moral dari DPRD), bahwa masih kurangnya kualitas moral yang mendukung dalam proses pembahasan dan penetapan Perda yang berasal dari DPRD. Selanjutnya dipaparkan kesimpulan masing–masing indikator sebagai berikut:

*Society values* dalam hal ini menunjuk pada kualitas Perda harus linier dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat belum terpenuhi sesuai harapan. Adanya perbedaan persepsi diakibatkan karena mereka kurang memahami prosedur dan tidak mengikuti dengan baik tahapan-tahapan dalam penyusunan Perda tersebut sangat menentukan kualitas Perda tersebut.Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Manado, berdasarkan data yang ada secara efektif baru ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kota Manado pada tahun 2011 untuk Program Legislasi Daerah tahun 2012. Dan untuk Prolegda tahun-tahun berikutnya tidak ditemukan lagi. Hal ini disebabkan proses penyiapan dan penyusunan Prolegda tidak lagi mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan DPRD Kota Manado dimana tidak lagi ditetapkan melelui keputusan pimpinan DPRD Kota Manado, tetapi dalam prakteknya proses penyusunan Prolegda langsung dibahas bersama oleh Badan Legislasi daerah (Balegda) dengan pihak pemerintah Kota Manado. Sumber daya manusia yang ada pada anggota DPRD kota Manado menunjukan kurang profesional dan akuntabel dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi.

*Concept of social justice and public interest*, hal ini berkaitan dengan bagaimana Perda insiatif yang ditetapkan sejalan dengan keinginan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat itu sendiri, belumlah memenuhi sesuai harapan yang ada.Perda yang ditetapkan kurang sejalan dengan rasa keadilan dan kepentingan masyaraka, hal tersebut lebih disebabkan karena sebagian besar anggota DPRD kurang serius ikut dalam pembahasannya padahal kita semua ini mewakili rakyat dan diforum pembahasan Perda inisiatif sebenarnya itu adalah kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang kita wakili namun kenyataan itu sebagian besar tidak aktif memberikan kontribusinya dalam bentuk ide atau gagasan.

*Profesional values,* proses pengajuan, pembahasan dan penetapan Perda oleh DPRD belumlah mengedepankan kualitas nilai profesionalnya sebagai representasi publik. DPRD Manado kurang produktif melahirkan Perda terlebih lagi dengan Perda inisiatif, begitu juga dengan kinerjanya kurang dan belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat. Proses pengajuan pembahasan dan penetapan Perda inisiatif oleh DPRD Kota Manado belum mengedepankan kualitas profesional sebagai representasi publik. Disebabkan proses pengajuan usulan mulai dari usulan Prolegda dari DPRD, itu hampir tidak ada usulan dari DPRD. Selalu hanya mengambil usulan dari pihak eksekutif kemudian dijadikan sebgaai perda inisiatif DPRD dalam Prolegda. Belum lagi soal proses pengusulan Ranperda inisiatif yang harusnya juga dibahas terlebih dahulu di internal persidangan DPRD tetapi tidak dilaksanakan itu langsung masuk pada pembahasan pembicaraan tingkat I. Sebagian besar anggota DPRD kurang aktif, kurang terlibat dalam pembahasan secara aktif, pemikiran, pandangan kontribusi terhadap materi Ranperda. Pada setiap persidangan termasuk dalam rapat-rapat pansus hanya didominiasi oleh anggota DPRD tertentu saja. Dari data banyak anggota DPRD yang sebenarnya belum siap dan memiliki kapasitas menjadi anggota DPRD, ada yang anggota yang kurang mengetahui tentang tugas dan fungsinya, kurang profesional dan kurang cakap.

*Training/Induction Programs,* setiap tahun ada program pelatihan dalam rangka untuk pengembangan tugas dan kapasitas anggota DPRD Kota Manado dalam pembuatan Perda. Namun program-program pelatihan tersebut belum secara maksimal diikuti oleh anggota Dewan. Ada kecenderungan anggota Dewan kurang disiplin dan kurang serius mengikuti kegiatan atau program-program yang berorientasi pada pengembangan kapasitas anggota Dewan.

Tabel 5.4 Temuan Sub Fokus *Moral conduct*

(keberadaan kualitas moral dari DPRD)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fokus:Proses Akuntabilitas Politik Pada DPRD Kota Manado dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah  Sub Fokus : *Moral conduct* (keberadaan kualitas moral dari DPRD) | | |
| Indikator | Temuan | Ket |
| *Society values* | 1. Kualitas Perda kurang sejalan dengan nilai-nilai yang tumbuh didalam masyarakat. 2. Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Manado, secara efektif baru ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kota Manado pada tahun 2011 untuk Program Legislasi Daerah tahun 2012. 3. Adanya perbedaan persepsi diakibatkan karena mereka kurang memahami prosedur dan belum secara maksimal mengikuti tahapan-tahapan dalam penyusunan dan pembuatan Perda. 4. Ada 2 (dua) Perda insiatif yang telah ditetapkan. Kedua Perda tersebut adalah Perda Nomor 5/2012 tentang pembentukan peraturan daerah dan Perda Nomor 11/2012 tentang tata letak penempatan reklame. 5. Anggota DPRD kota Manado kurang profesional dan akuntabel dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi. | Belum berkualitas Perda inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD Kota Manado |
| *Concept of social justice and public interest* | 1. Perda insiatif yang ditetapkan kurang sejalan dengan keinginan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut lebih disebabkan karena sebagian besar anggota DPRD kurang serius ikut dalam pembahasan Perda. | Perda yang dihasilkan belum sejalan dengan harapan masyarakat. |
| *Profesional value,* | 1. Proses pengajuan, pembahasan dan penetapan Perda oleh DPRD kurang mengedepankan kualitas nilai profesionalnya sebagai representasi publik. 2. DPRD kurang produktif melahirkan Perda inisiatif, begitu juga dengan kinerjanya kurang dan belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat. | Belum Profesionalnya kinerja DPRD Kota Manado dalam memenuhi harapan konstituennya. |
| *Training/Induction Programs* | 1. Setiap tahun ada program pelatihan atau Bimtek dalam rangka untuk pengembangan tugas dan kapasitas anggota DPRD Kota Manado dalam pembuatan Perda. Namun program-program pelatihan tersebut belum direson secara maksimal oleh anggota Dewan. 2. Anggota Dewan kurang disiplin dan serius mengikuti kegiatan atau program-program yang berorientasi pada pengembangan kapasitas anggota Dewan | Anggota DPRD Manado belum secara maksimal mengikuti program pelatihan |

Sumber: Diolah Peneliti (2016)

1. *Responsiveness*

*Responsiveness* adalah menunjuk pada kepekaan menangkap dan memenuhi keinginan dan kepentingan publik atau masyarakat. Sehubungan dengan materi yang diatur dalam Perda secara substansial dan terkait langsung dengan persoalan-persoalan publik atau berhubungan langsung dengan pengaturan tentang kebutuhan publik disatu pihak dan terkait dengan kepentingan pemerintah, maka membangun konstruksi kebijakan yang transparan, partisipatif, akomodatif menjadi penting untuk menjadi pertimbangan utama bagi DPRD sebagai lembaga politik pembentukan Perda.

1. *Public Participation and Consultation*

*Public participation and consultation*, adanya ruang dan media bagi terwujudnya komunikasi dan partisipasi publik bagi proses pembuatan Perda dari DPRD.Partisipasi mendorong: terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah. Dan keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu issu.Partisipasi mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan akuntabilitas, serta mendorong publik untuk mengamati apa yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi publik tercermin dalam: kesempatan untuk melakukan kajian terhadap rancangan keputusan, kesempatan untuk memberikan masukan, dan tanggapan terhadap masukan publik dari pengambil keputusan, dalam hal ini pemerintah.

Secara normatif peraturan perundang-undangan telah memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk mengetahui secara politik setiap pembentukan regulasi, kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan keputusan publik, program kebijakan publik, dan prsoes pembuatan pengambilan keputusan publik, serta pengambilan suatu keputusan publik. Akuntabilitas politik menekankan perlunya kepekaan terhadap pemilih mereka untuk mengimplementasikan ekspektasi mereka terhadap apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh publik.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai adanya ruang dan media bagi terwujudnya komunikasi dan partisipasi publik bagi proses pembuatan Perda dari DPRD. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa informan, yang pertama mengenai apakah ada ruang dan media sebagai sarana terwujudnya komunikasi dan partisipasi publik untuk proses pembuatan Perda oleh DPRD, misalnya melalui diskusi, seminar atau lokakarya? Demikian pernyataan informan HK:

Belum ada. Ya kami berpandangan bahwa seluruh pembahasan Ranperda di DPRD Manado dilakukan secara terbuka hanya untuk pembahasan-pembahasan misalanya tentang jadwal acara atau agenda kegiatan di komisi ada yang dilaksanakan secara tertutup. Kalau untuk kegiatan melalui seminar, lokakarya atau diskusi terbuka belum kami lakukan. Kami berpandangan juga bahwa dengan publikasi dari teman-teman jurnalis dari berbagai media massa cetak, elektronik dan media online itu masyarakat dapa mengikutinya sekaligus dapat memanfaatkannya sebagai saran untuk berpartisipasi dalam pembentukan dan pembahasan Ranperda di DPRD Manado. Jadi selama ini hanya melalui teman-teman pers (wartawan) yang bertugas di DPRD Kota Manado. Belum ada wadah atau media khusus yang memfasilitasi publik atau masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan Perda. Termasuk media untuk penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Dengan demikian ketika media meliput maka masyarakat dapat mengkasesnya. Dan kami juga sebagai anggota DPRD sekaligus juga merupakan unsur representasi rakyat. (Wawancara, 14-09-2015)

Jawaban informan HK tersebut sejalan dengan jawaban informan BP, NT, DS, SL, DM, RS, TU, JK, SS, MM, JD bahwa di DPRD belum menyiapkan forum atau media untuk adanya media komunikasi yang menjembatani partisipasi masyarakat untuk pembuatan Perda.

Dari data keseluruhan dapat dipaparkan bahwa dapat dijelaskan bahwa ruang dan media sebagai sarana terwujudnya komunikasi dan partisipasi publik untuk proses pembuatan Perda oleh DPRD, misalnya melalui diskusi, seminar atau lokakarya belum dilakukan oleh DPRD. Kalangan DPRD berpandangan bahwa terkait pembahasan Ranperda di DPRD Manado dilakukan secara terbuka hanya untuk pembahasan apabila menyangkut tentang jadwal acara, agenda kegiatan di komisi ada yang dilaksanakan secara tertutup. Dan untuk kegiatan melalui seminar, lokakarya atau diskusi terbuka belum dilakukan. Pihak DPRD juga berpandangan bahwa dengan publikasi dari teman-teman jurnalis dari berbagai media massa cetak, eleltronik dan media online telah mempublikasikan untuk masyarakat dan masyarakat dapat mengikutinya sekaligus dapat memanfaatkannya sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam pembentukan dan pembahasan ranperda di DPRD Manado.

1. *Debates*

*Debate* maksudnya disini adalah adanya aktivitas diskusi dengan publik untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk konsep ide dan gagasan mereka.Masyarakat menjadi unsur utama yang dilibatkan dalam *debate*. Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yakni: memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat, meningkatkan peran serta masyarkat, dan mengembangkan peran dan fungsi. Aktivitas diskusi dengan publik untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk konsep ide dan gagasan mereka diperlukan dalam pembuatan Perda inisiatif.

Selanjutnya adanya partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan sangat diperlukan dalam rangka demokrasi, hal ini menjadikan partisipasi adalah syarat mutlak untuk suatu kehidupan demokrasi. Partisipasi publik menjadi keharusan bagi suatu negara yang menganut sistem demokrasi sebagaimana Indonesia, sebab itu partisipasi merupakan unsur yang menentukan bagi sistem politik dan administrasi pemerintahan terkait dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan dan tak terkecuali juga dalam pembuatan Perda.

Untuk mengetahui adanya aktivitas diskusi dengan publik untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk konsep ide dan gagasan mereka, peneliti mengajukan pertanyaan kepada beberapa informan, dengan pertanyaan apakah ada aktivitas diskusi dengan publik untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk konsep, ide dan gagasan dari masyarakat sebagaimana diatur PP Nomor 16/2010, Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 dan Peraturan DPRD Kota Manado Nomor 04 Tahun 2010 terkait dengan partisipasi masyarakat dan juga penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat Pasal 119? Demikian pernyataan informan HK:

Tidak ada aktivitas diskusiyang dilakukanuntuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk konsep, ide dan gagasan dari masyarakat. Kamipun Dewan banyak anggota yang kurang paham akan ketentuan yang mengatur hal tersebut. (Wawancara, 14-09-2015)

Apa yang disampaikan oleh informan HK sejalan juga yang disampaikan oleh informan JD, RR, HT, RP, DT, BP, NT, DS, DM, SL, MM, SS, DR, RS, TU.

Dari keseluruhan data diatas terkait bahwa aktivitas diskusi dengan publik untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk konsep, ide dan gagasan masyarakat (merujuk pada PP No. 16/2010 dan Permendagri 53 Tahun 2011) dari beberapa informan mengatakan bahwa memang belum ada aktivitas diskusi yang dilakukan atau yang disebut debate, apalagi terkait beberapa aturan yang ada.

Dari data primer diatas menjelaskan bahwa untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk konsep, ide dan gagasan dari masyarakat sebagaimana diatur PP Nomor 16/2010, Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 dan Peraturan DPRD Kota Manado Nomor 04 Tahun 2010 terkait dengan Partisipasi Masyarakat dan juga penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat Pasal 119 belum sepenuhnya dilakukan bahkan dipahami oleh DPRD kota Manado.

Selanjutnya data yang ada kemudian dikembangkan dengan pertanyaan apakah DPRD Kota Manado periode 2009-2014, ada penyampaian gagasan, ide oleh masyarakat terkait dengan Pembahasan Ranperda inisiatif DPRD Kota Manado?Demikian pernyataan informan “HK”:

Sebagai anggota Belegda pada periode itu kalau untuk aspirasi atau gagasan serta ide dari masyarakat selalu ada dan itu wajib karena Perda itu untuk kepentingan masyarakat. (Wawancara, 14-09-2016)

Apakah ada konsep gagasan, ide disampaikan oleh masyarakat secara tertulis dalam penyampaian aspirasi pada pembuatan perda DPRD?Demikian pernyataan informan BP:

Kalau untuk keterlibatan masyarakat secara tertulis belum ada karena sudah ada naskah akademik kebanyakan yang terlibat hanya para awak media seperti wartawan. (Wawancara, 14-09-2015)

Apakah ada konsep gagasan, ide disampaikan oleh masyarakat secara tertulis dalam penyampaian aspirasi pada pembentukan Perda inisiatif DPRD Kota Manado? Demikian pernyataan informan JK:

Tidak ada konsep gagasan, ide disampaikan oleh masyarakat secara tertulis dalam penyampaian aspirasi pada pembentukan Perda inisiatif DPRD Kota Manado. (Wawancara, 21-09-2015)

Jawaban informan JK tersebut sama dengan jawaban dari informan NT, DM, SL, MM, SS, RS, dan DR.

Apakah ada konsep gagasan, ide disampaikan oleh masyarakat secara tertulis dalam penyampaian aspirasi pada pembentukan Perda DPRD? (triangulasi data ke masyarakat). Demikian pernyataan informan TU:

Gagasan tertulis ada oleh masyarakat, namun follow up kurang dilakukan. Bentuk tertulis secara resmi oleh lembaga-lembaga namun surat-surat tersebut tidak dicakan dalam paripurna, yang dibacakan hanya surat dari parpol dan eksekutif. Surat-surat yang masuk tidak ditindak lanjuti termasuk masa reses tidak dilakukan. (Wawancara, 07-01-2016)

Menjawab pertanyaan Apakah ada yang disampaikan secara tertulis oleh masyarakat atau unsur masyarakat pada saat itu? Demikian pernyataan informan HK:

Secara tertulis setahu saya tidak ada tetapi secara lisan pasti ada. Kita lakukan diskusi pada saat melakukan reses atau juga diundang pada saat pembahasan di DPRD Kota Manado. (Wawancara,14-09-2015)

Apakah Ranperda inisiatif DPRD Kota Manado sebelum disahkan dan disetujui bersama DPRD Kota Manado dan Walikota Manado, apakah dilakukan debat publik terlebih dahulu untuk mendapatkan masukan dan hasil yang maksimal? Demikian pernyataan informan HK:

Untuk perdebatan pasti selalu ada dalam pembuatan Perda apalagi kalau Perda hanya untuk kepantingan diri sendiri atau kelompok pasti selalu ada perdebatan tapi kalau untuk hasil akhir perda yang muncul karena kepentingan sendiri selalu tdk mendapatkan titik temu. Kalau Perda yang diusul oleh setiap komisi akan dibahas oleh Baleg apakah Perda tersebut sudah memenuhi syarat atau tidak. (Wawancara, 14-09-2015)

Pernyataan dari informan HK tersebut sejalan dengan yang disampaikan oelh informana BP, JK, NT, DS, SL, MM, SS, TU dan DM.

Dari keseluruhan data primer yang diperoleh terkaitterkait bahwa aktivitas diskusi dengan publik untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk konsep, ide dan gagasan masyarakat apalagi terkait beberapa aturan yang mengatur tentang hal tersebut.

Dari data primer diatas menjelaskan bahwa untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk konsep, ide dan gagasan dari masyarakat sebagaimana diatur PP Nomor 16/2010, Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 dan Peraturan DPRD Kota Manado Nomor 04 Tahun 2010 terkait dengan Partisipasi Masyarakat dan juga penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat Pasal 119 belum sepenuhnya dilakukan bahkan dipahami oleh DPRD kota Manado.Terkait debat publik tidak dilaksanakan akan tetapi kalau pembahasan di Komisi atau Pansus pasti selalu ada dalam pembuatan Perda apalagi kalau Perda hanya untuk kepentingan diri sendiri pasti selalu ada perdebatan tapi kalau untuk hasil akhir Perda yang muncul karena kepentingan sendiri selalu tidak mendapatkan titik temu.

1. *Advisory Bodies*

Politik sebagai “proses alokasi nilai dalam masyarakat secara otoritatif.” Memahami politik sebagai alokasi nilai yang bersifat otoritatif ini menandai 2 tahap pembentukan teori sistem politiknya. Perhatian pada nilai sebagai komoditas yang dinegosiasikan di dalam masyarakat merupakan titik awal berlangsungnya suatu proses politik. Namun, proses alokasi nilai ini tidaklah dilakukan secara sembarang atau oleh siapa saja melainkan oleh lembaga-lembaga masyarakatyang memiliki kewenangan untuk itu. Masukan-masukan ataupun kritikan yang kondusif diperlukan dalam rangka dinamika organisasi sebagai bagian dari aspirasi masyarakat untuk mem-*forecast* (prakiraan) terkait dampak apakah ada resistensi terhadap keputusan yang diambil atau tidak, yang tentu sesuai dengan harapan yang diinginkan *(intended)* dari tujuan *(goals)* yang ingin dicapai.

*Advisory Bodies* disini lebih terkait apakah ada masukan-masukan ataupun kritikan baik dalam bentuk penyampaian lewat media massa ataupun lewat demonstrasi yang merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang direspon sebagai isu untuk dijadikan bahan masukan dalam pembentukan Perda oleh DPRD yang dimasukan dalam Prolegda. Demikian pernyataan informan HK:

Ada banyak masukan yang mereka sampaikan tapi sebelum memutuskan semuanya akan dibahas terlebih dahulu dalam setiap rapat paripurna apa akan disetujui atau mengadakan perubahan kearah yang lebih baik. (Wawancara, 14-09-2016)

Dari data diatas dijelaskan bahwa ada banyak masukan yang mereka sampaikan tapi sebelum memutuskan semuanya akan dibahas terlebih dahulu dalam setiap rapat paripurna apa akan disetujui atau mengadakan perubahan kearah yang lebih baik. Hal senada juga disampaikan oleh informan “BP” yang menjawabApakah ada masukan-masukan ataupun kritikan baik dalam bentuk penyampaian lewat media masa ataupun lewat demonstrasi yang merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang direspon sebagai issu untuk dijadikan bahan masukan dalam pembentukan perda oleh DPRD? Demikian pernyataan informan BP:

Ada juga masukan dari masyakarat, namun demonstrasi pernah ada namun dilakukan bukan untuk pemebentukan Perda, tetapi untuk mengkritik kebijakan Pemerintah Kota Manado. (Wawancara, 14-09-15)

Data yang berbeda disampaikan oleh informan “JK” yang menyatakan bahwa tidak ada masukan-masukan ataupun kritikan baik dalam bentuk penyampaian lewat media masa ataupun lewat demonstrasi yang merupakan bagian dari aspirasi masyarakat direspon sebagai isu untuk dijadikan bahan masukan dalam pembentukan Perda oleh DPRD Kota Manado? Demikian pernyataan informan “JK”:

Saya amati rasanya memang tidak ada, kalau ada pandangan yang resmi disampaikan atau tidak resmi perlu dipertanyakan, saya rasa saya tetap konsisten dari awal menyatakan debat saja tidak dilakukan masakan kritikan secara langsung ada, otomatis kan sudah terjadi diskusi, kalau kritikan itu hanya dari koran, bisa disadari ada yang murni tetapi juga ada yang tidak murni dari masyarakat, biasanya membangun opini saja oleh beberapa media massa tertentu. (Wawancara, 21-09-15)

Dari jawaban informan diatas bahwa tidak ada masukan-masukan ataupun kritikan baik dalam bentuk penyampaian lewat media masa ataupun lewat demonstrasi yang merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang direspon sebagai isu untuk dijadikan bahan masukan dalam pembentukan Perda oleh DPRD Manado. Hal yang sama juga dijawab oleh informan, NT, DS yang mengatakan bahwa tidak adamasukan-masukan ataupun kritikan baik dalam bentuk penyampaian lewat media masa atau demonstrasi langsung dari masyarakat yang juga merupakan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan dalam pembentukan Perda oleh DPRD (dimasukan dalam Prolegda).

Dari keseluruhan data ditemukan bahwa tidak ada masukan-masukan ataupun kritikan baik dalam bentuk penyampaian lewat media masa kalau demonstrasi langsung dari masyarakat ada juga namun bukan merupakan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan dalam pembentukan Perda oleh DPRD, tetapi hanya mengkritik kebijakan pemerintah saja. Terlihat jelas bahwa terlalu mengandalkan media konvensional. Pembahasan cenderung improsedural dan tidak sesuai. Ranperda merupak tolak ukur kinerja DPRD. Bentuk kritikan ada tetapi kalau kritikan itu hanya dari koran, bisa disadari ada yang murni tetapi juga ada yang tidak murni dari masyarakat, biasanya membangun opini saja oleh beberapa media massa tertentu, namun tidak terkait langsung dengan materi pengusulan Perda inisiatif.

1. *Public Meeting*

*Public meeting*, berkaitan dengan adanya pertemuan dengan publik secara rutin dan teratur. Aktifitas fungsional terkait *public meeting* dapat disandingkan yang dimaksud Schacter terkait aktivitas yang dilakukan yakni dilakukannya *public meeting* guna mendapatkan: Informasi *(information),* untuk memberikan penjelasan (penyampaian informasi) atas tindakan (kebijakan) yang dilakukan dan hasilnya, serta alasan-alasan yang menjadi pembenarnya, tindakan (*action)*, untuk menilai dan sekaligus mengajukan tuntutan *(demands)* atas informasi tentang tindakan (kebijakan) dan hasilnya serta alasan pembenarnya yang telah disampaikan tersebut, dan tanggapan *(response)*, untuk mengenali dan memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang berkembang (diajukan) setelah informasi disampaikan melalui *public meeting* tersebut, termasuk melakukan tindakan koreksi apabila dinilai memang ada kesalahan yang terjadi. Ketiga aktivitas fungsional ini berhubungan sebagai suatu siklus yang terus berulang untuk dilakukan guna mewujudkan akuntabilitas politik di DPRD Kota Manado.

Untuk mengetahui terkait *public meeting* atau berkaitan dengan adanya pertemuan dengan publik secara rutin dan teratur, peneliti menanyakan ke beberapa informan dengan pertanyaan: Apakah ada program pertemuan dengan publik atau masyarakat yang dilaksanakan secara teratur dan rutin? Demikian pernyataan informan “HK”:

Ada melalui kegiatan reses anggota DPRD Kota Manado melaksanakan pertemuan dengan konstituennya di setiap daerah pemilihan masing-masing tujuannya untuk menyampaikan rencana Prolegda, sekaligus kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh anggota atau DPRD Kota Manado juga untuk menampung aspirasi masyarakat. Hanya saja, kegiatan reses itu dalam pangematan saya belum semua anggota DPRD melaksanakannya secara baik. Karena ada yang hanya melakukan pertemuan dengan tidak mengedepankan maksud yang sebenarnya dari kegiatan reses, kebanyakan hanya dilakukan dengan pertemuan biasa, dan tidak berbobot, tidak ada hasil yang berkualitas yang didapat. Kemudian juga ada yang hanya sekali dilaksanakan di tempat tertentu. (Wawancara, 14-09-2015)

Pertemuan dengan publik secara rutin dan teratur (pada masa reses atau diluar masa reses) dilakukan/ada, yakni melalui kegiatan reses anggota DPRD Kota Manado melaksanakan pertemuan dengan konstituennya di setiap daerah pemilihan masing-masing tujuannya untuk menyampaikan rencana Prolegda, sekaligus kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh anggota atau DPRD Kota Manado juga untuk menampung aspirasi masyarakat. Hanya saja, kegiatan reses itu dalam pangamatan belum semua anggota DPRD melaksanakannya secara baik. Karena ada yang hanya melakukan pertemuan dengan tidak mengedepankan maksud yang sebenarnya dari kegiatan reses, kebanyak hanya dilakukan dengan pertemuan biasa, dan tidak berbobot, tidak ada hasil yang berkualitas yang didapat. Kemudian juga ada yang hanya sekali dilaksanakan di tempat tertentu. Hal yang sama disampaikan oleh informan “BP”:

Pertemuan pasti ada karena untuk membangun kepercayaan publik harus konsistensi jangan setengah-setengah begitu juga dengan tindakan dilapangan dengan selalu menemui konstituen atau masyarakat untuk mendapatkan masukan dari masyarakat untuk pembahasan berbagai hak di DPRD Manado. (Wawancara, 14-09-2015)

Menurutnya pertemuan pasti ada karena untuk membangun kepercayaan publik harus konsistensi jangan setengah-setengah begitu juga dengan tindakan dilapangan dengan selalu menemui konstituen atau masyarakat untuk mendapatkan masukan dari masyarakat untuk pembahasan berbagai hak di DPRD Manado. Begitu halnya juga disampaikan oleh Informan “JK” yang menyatakan terkait Apakah ada pertemuan dengan bulik secara rutin dan teratur (pada masa reses ataupun diluar masa reses tersebut? Demikian pernyataan informan “JK”:

Ada. Karena masa reses itu digunakan oleh anggota DPRD Kota Manado secara perorangan atau berkelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi dari konsituen.“Dari yang saya amati pada masa perisidangan reses, anggota DPRD melakukan reses di setiap Dapil untuk menampung aspirasi dari masyarakat. (Wawancara, 21-09-2015)

Semua informan diatas menyatakan hal yang sama bahwa ada pertemuan dengan publik secara rutin dan teratur (pada masa reses ataupun diluar masa reses tersebut). Pertemuan tersebut ada, karena masa reses itu digunakan oleh anggota DPRD Kota Manado secara perorangan atau berkelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi dari konsituen.“Dari yang saya amati pada masa persidangan reses, anggota DPRD melakukan reses di setiap Dapil untuk menampung aspirasi dari masyarakat.” Demikian pernyataan informan DS:

Yang saya tahu hanya masa reses yang ada karena itu sudah diatur dalam tata tertib DPRD Kota Manado diluar itu tidak ada. (Wawancara, 27-10-2015)

Data yang berbeda dikemukakan oleh DM yang menyatakan bahwa tidak ada pertemuan dengan publik secara rutin dan teratur (pada masa reses ataupun diluar masa reses tersebut)? Demikian pernyataan informan DM:

Kalau untuk kunjungan kerja secara rutin dan teratur tidak ada. Kalaupun ada itu mungkin hanya kunjungan besifat individu anggota DPRD Manado dan/atau apabila ada laporan pengaduan dari masyarakat. Kalaupun untuk kegiatan reses itu dilaksanakan secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota dewan guna menyerap aspirasi masyarakat setelah itu anggota membuat laporan hasil pelaksanaan tugsasnya pada masa reses dan itu disampaikan pada pimpinan DPRD Manado dalam rapat paripurna,hanya saja masa reses ini banyak juga anggota yang tidak melaksanakan hal ini terlihat hanya sebagian anggota yang mengurus dan mengambil dana reses di bagian keuangan sekretariat DPRD Manado. Jadi tidak ada pertemuan yang bersifat rutin dan teratur pertemun DPRD dengan masyarakat (Publik) terlebih dalam rangka pembahasan perda inisiatif. (Wawancara, 07-10-2015)

Pernyataan yang dikemukan oleh informan DM tersebut pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh informan JD, HT, RP, RR dan DT mereka mengatakan bahwa tidak ada pertemuan yang dilakukan oleh DPRD Kota Manado dalam rangka pembuatan Perda inisiatif dengan publik secara teratur, terprogram secara rutin.

Menurutnya bahwa kalau untuk kunjungan kerja secara rutin dan teratur tidak ada. Kalaupun ada itu mungkin hanya kunjungan besifat individu anggota DPRD Manado dan/atau apabila ada laporan pengaduan dari masyarakat. Kalaupun untuk kegiatan reses itu dilaksanakan secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota dewan guna menyerap aspirasi masyarakat setelah itu anggota membuat laporan hasil pelaksanaan tugsasnya pada masa reses dan itu disampaikan pada pimpinan DPRD Manado dalam rapat paripurna,hanya saja masa reses ini banyak juga anggota yang tidak melaksanakan hal ini terlihat hanya sebagian anggota yang mengurus dan mengambil dana reses di bagian keuangan sekretariat DPRD Manado. Jadi tidak ada pertemuan yang bersifat rutin dan teratur pertemuan DPRD dengan masyarakat (Publik) terlebih dalam rangka pembahasan perda inisiatif.

Apa permasalahannya kalau menurut Pak Hengky? Demikian pernyataan informan HK:

Kalau saya amati itu semua lebih banyak disebabkan karena anggota DPRD tersebut tidak banyak tahu, atau mengetahui apa yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Manado, bahkan ada anggota yang kurang memahami apa tugas dan fungsi dia sebagai anggota DPRD. Ada banyak anggota yang cuek, masa bodoh dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD Kota Manado. Akhirnya dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan dan lakukan pada kegiatan reses. Belum lagi ada anggota DPRD Manado yang menghindar untuk melaksanakan kegiatan reses atau pertemuan bersama dengan masyarakat di daerah pemilihannya karena dia merasa canggung dan minder karena akan berhadapan dengan bekas guru, dosen, atau orang-orang yang menurutnya jauh lebih banyak mengetahui informasi ataupun sebab-sebab lainnya. (Wawancara, 14-09-2015)

Dari data tersebut, menunjukan bahwa tidak ada pertemuan yang dilakukan oleh DPRD yang bersifat rutin bersama dengan masyarakat. Bahkan untuk kegiatan resespun tidak semua anggota melakukannya sebagai wadah untuk memberikan kesempatan anggota masyarakat disetiap daerah pemilihan anggota Dewan untuk menyampaikan aspirasinya dan disatu pihak anggota Dewan menyampaikan atau mensosialisasikan berbagai informasi atau kegiatan-kegitan yang telah dan yang akan dilakukan oleh DPRD termasuk sosialisasi tentang berbagai Perda yang telah ditetapkan bersama dengan Walikota.

Temuan lainnya adalah sebagian anggota DPRD kurang mengetahui dan memahami esensi dari pertemuan dengan konsituen dalam hubungannya dengan kapasitas sebagai wakil rakyat, bahkan sebagian anggota Dewan enggan untuk mengagendakan pertemuan dengan konsituennya karena kurang percaya diri dan merasa enggan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah pemilihannya.

1. *Freedoms of Speech*

*Freedom of speech*, berahubungan dengan adanya kebebasan dari maysarakat dalam menyampaikan pendapat. Pertanggungjawaban politik DPRD dalam memperjuangkan aspirasi publik memiliki landasan normatif sebagai perwujudan akuntabilitas politik lembaga perwakilan yang mewakili publik. Kewajiban politik untuk memperjuangkan aspirasi, kepentingan, kesejahteraan publik menjadi tugas dan fungsi DPRD yang dilakukannya melalui pengaturan atas kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang implementasinya dilaksanakan oleh pihak eksekutif. Landasan normatif atas pelaksanaan akuntabilitas politik DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 42 Paragraf Ketiga tentang tugas dan wewenang DPRD dalam hal membentuk Perda, kemudian juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Bab IX Pasal 81 dan 82 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah baik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) berasal dari DPRD atau Ranperda dari kepala daerah), disamping itu juga diatur dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 Bab II tentang Produk Hukum Daerah, pada Pasal 3 yang mengatur mengenai produk hukum daerah yang salah satunya adalah Peraturan Daerah, dan yang terakhir diatur lebih lanjut melalui Peraturan DPRD Kota Manado Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 33 terkait tentang kewajiban memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada publik. Itulah berbagai landasan pelaksanaan akuntabilitas politik DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam pembentukan atau pembuatan peraturan daerah.

Dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 Bab IX tentang Partisipasi Masyarakat, Pasal 90, menjelaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. Masukan secara lisan dan/atau tertulis tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau melalui seminar, lokakarya, dan/atau diskusi serta dijamin kebebasannya dalam mengeluarkan pendapat, sesuai amanah UUD tahun 1945.

Untuk mengetahui adanya kebebasan dari maysarakat dalam menyampaikan pendapat peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang sudah ditentukan secara purposive (sengaja) dengan pertanyaan awal apakah masyarakat diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat baik dalam forum reses ataupun saat manyampaikan pendapatnya? Demikian pernyataan informan HK:

Ia prinsipnya kami anggota DPRD Kota Manado memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka ataupun kritik. Masyarakat diberikan hak dalam setiap penyampaian berbagi pendapat argumen dalam memenuhi kesejahteraan mereka. (Wawancara, 14-09-2015)

Dari tanggapan diatas oleh anggota DPRD Kota Manado memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka ataupun kritik. Masyarakat diberikan hak dalam setiap penyampaian berbagi pendapat argumen dalam memenuhi kesejahteraan mereka, terkait pertanyaan yang sama apakah masyarakat dijamin kebebasanya daalm menyampaikan pendapat? Demikian pernyataan informan “BP”:

Masyarakat diberikan hak dalam setiap penyampaian berbagi pendapat argumen dalam menyatakan setiap aspirasi demi kesejahteraan mereka. Dan masyarakat dijamin kebebasannya dalam menyampaikan pendapat. (Wawancara, 14-09-2015)

Apakah masyarakat dijamin kebebasannya dalam menyampaikan pendapat? Demikian pernyataan informan DS:

Pastilah itu tidak ada yang ditekan atau mau diatur-atur. Iya pasti. Dalam pertemuan dengan konstituen saat reses juga disosilisasikan dan disampaikan informasi-inforamsi soal hal-hal yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh DPRD Manado. (Wawancara, 29-10-2015)

Ada data yang berbeda terkait pertanyaan apakah masyarakat dijamin kebebasannya dalam menyampaikan pendapat. Demikian pernyataan informan RS:

Belum adanya jaminan dalam penyampaian pendapat saya rasa, sebab jika masyarakat terlau mengkritik, kadang diperhadapkan dengan tuntutan pidana pencemaran nama baik, atau HAM dan sebagainya, sehingga kebebasan pendapat yang dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan penguasa secara signifikan, kalau sebaliknya maka hal yang saya sebutkan tadi bisa saja terjadi, sehingga kebebasan yang dimaksud sifatnya pada pragmatisme. (Wawancara, 22-12-15)

Dari data diatas dijelaskan bahwa masyarakat belum dijamin kebebasannya dalam menyampaikan pendapat. Belum adanya jaminan dalam penyampaian pendapat saya rasa. Masyarakat sering mengkritik, kadang diperhadapkan dengan tuntutan pidana penecemaran nama baik, atau HAM dan sebagainya, sehingga kebebasan yang dimaksud sifatnya *pragmatisme.*

Apakah setiap pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat, mendapat respon balik dari DPRD Kota Manado. Demikian pernyataan informan HK:

Setiap pendapat menjadi masukan bagi kami anggota DPRD Kota Manado sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan Ranperda inisiatif DPRD Kota Manado. Setiap aspirasi dari masyarakat selalu diterima dengan baik di DPRD Manado, namun memang tidak semua bisa menjalankan tugas-tugas mereka dalam mengartikulasikan setiap aspirai yang disampaiakan oleh masyarakat. (Wawancara, 14-09-2015)

Anggota DPRD menerima dan mendapatkan masukan dari masyarakat dan masukan dari masyarakat menjadi bahan dan pertimbangan oleh DPRD dalam mengajukan dan melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah yang dibahas oleh DPRD, walaupun tidak semua yang disampaikan oleh masyarakat ditindaklanjuti oleh DPRD. Dengan demikian masukan dari masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam pembuatan Perda khususnya Perda inisiatif. Kemudian informan lain,Apakah setiap penyampaian pendapat mendapatkan respon dari DPRD? Demikian pernyataan informan BP:

Setiap aspirasi dari masyarakat selalu diterima dengan baik di DPRD dan dibahas terlebih dahulu apakah bisa dimasukan dalam Ranperda atau tidak. Biasanya langsung disampaikan kepada pimpinan DPRD melalui rapat paripurna untuk hasil reses tersebut. (Wawancara, 14-09-2015)

Dari kedua data diatas terkait apakah setiap penyampaian pendapat mendapat respon dari DPRD. Setiap aspirasi dari masyarakat selalu diterima dengan baik di DPRD dan dibahas terlebih dahulu apakah bisa dimasukan dalam Ranperda atau tidak. Dan biasanya langsung disampaikan kepada pimpinan DPRD melalui rapat paripurna untuk hasil reses tersebut Demikian pernyataan informan “NT”:

iya setiap penyampaian pendapat mendapat respon dari DPRD. (Wawancara, 29-09-2015)

Apakah setiap penyampaian pendapat mendapat respon dari DPRD? Dalam bentuk apa respon dari DPRD Kota Manado?Demikian pernyataan informan HK:

Diajak musyawarah bersama dan membahas setiap masalah yang dihadapi dan mencari jalan keluar yang terbaik dan juga kita pertimbangkan masukan-masukan tersebut untuk menjadi bahan masukan dalam materi pembahasan Ranperda inisiatif DPRD Kota Manado. (Wawancara, 14-09-2015)

Setiap penyampaian pendapat mendapat respon dari DPRD Jika direspon dalam bentuk seperti apa? Demikian pernyataan informan “NT”:

Disampaikan melalui dalam pembahasan ranperda di Pansus oleh anggota DPRD, ada juga yang langsung ditindaklanjuti ada yang dipertimbangkan. Apa yang dikemukakan oleh masyarakat dalam pertemuan reses ataupun dalam pertemuan yang dilaksanakan secara individu oleh anggota DPRD semua itu direkam dan dicatat oleh anggota DPRD dan dibawa dalam rapat paripurna juga menjadi bahan sebagai pemikiran dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan dan selain itu dapat menjadi bahan untuk dikonfirmasi dalam pertemuan dengar pendapat dengan pihak eksekutif. Setiap pendapat itu direspon dan dipertimbangkan untuk bahan masukan atau untuk ditindaklanjuti saat dengar pendapat dengan pihak eksekutif atau juga dengan memanggil pihak eksekutif untuk pengawasan dari DPRD Kota Manado. (Wawancara, 29-09-2015)

Dari keseluruhan dataterkait apakah setiap penyampaian pendapat mendapat respon dari DPRD. Dan itu disampaikan dalam pembahasan Ranperda di Pansus oleh anggota DPRD. Ada juga yang langsung ditindaklanjuti ada yang dipertimbangkan. Apa yang dikemukakan oleh masyarakat dalam pertemuan reses ataupun dalam pertemuan yang dilaksanakan secara individu oleh anggota DPRD semua itu direkam dan dicatat oleh anggota DPRD dan dibawa dalam rapat paripurna juga menjadi bahan sebagai pemikiran dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan dan selain itu dapat menjadi bahan untuk dikonfirmasi dalam pertemuan dengar pendapat dengan pihak eksekutif. Setiap pendapat itu direspon dan dipertimbangkan untuk bahan masukan atau untuk ditindaklanjuti saat dengar pendapat dengan pihak eksekutif atau juga dengan memanggil pihak eksekutif untuk pengawasan dari DPRD Kota Manado.Setiap aspirasi dari masyarakat selalu diterima dengan baik di DPRD dan dibahas terlebih dahulu apakah bisa dimasukan dalam Ranperda atau tidak. Dan biasanya langsung disampaikan kepada pimpinan DPRD melalui rapat paripurna untuk hasil reses tersebut. Hal lain juga menunjukan bahwa masyarakat belum dijamin kebebasannya dalam menyampaikan pendapat mereka oleh kalangan Dewan.

Kesimpulan dari keseluruhan indikator yang ada pada fokus satu Sub Fokus yakni *Responsiveness* (kepekaan terhadap aspirasi yang berkembang). Dapat disimpulkan bahwa belum nampak adanya kepekaan menangkap dan memenuhi keinginan dari kepentingan publik atau masyarakat. Sehubungan dengan materi yang diatur dalam Perda secara substansial dan terkait langsung dengan persoalan-persoalan publik atau berhubungan langsung dengan pengaturan tentang kebutuhan publik disatu pihak dan terkait dengan kepentingan pemerintahan Kota Manado. Demikian kesimpulan pada setiap indikator yang ada:

*Public participation and consultation*, belum adanya ruang dan media bagi terwujudnya komunikasi dan partisipasi publik bagi proses pembuatan Perda dari DPRD. Partisipasi mendorong: terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah. Belum ada ruang dan media sebagai sarana terwujudnya komunikasi dan partisipasi publik untuk proses pembuatan Perda oleh DPRD, misalnya melalui diskusi, seminar atau lokakarya. ruang dan media belum ada karena belum direncanakan dan dasar aturan sebagai pelaksanaan hal tersebut belum dipahami walaupun secara normatif memungkinkan. Belum ada mekanisme dialog publik dan mekanismenya belum dipahami. Yang ada hanya media konvensional yang terkait. Misalnya ada kejadian-kejadian pengembilan sampel mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Kalau menurut saya ada ketakutan untuk berdebat dengan masyarakat.

*Debate* maksudnya disini adalah adanya aktivitas diskusi dengan publik untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk konsep ide dan gagasan mereka. Masyarakat menjadi unsur utama yang dilibatkan dalam *debate* belumlah dilakukan sesuai harapan. Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yakni: memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat, meningkatkan peran serta masyarkat, dan mengembangkan peran dan fungsi. Aktivitas diskusi dengan publik untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk konsep ide dan gagasan mereka diperlukan dalam pembuatan Perda inisiatif. untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk konsep, ide dan gagasan dari masyarakat sebagaimana diatur PP Nomor 16/2010, Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 dan Peraturan DPRD Kota Manado Nomor 04 Tahun 2010 terkait dengan Partisipasi Masyarakat dan juga penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat Pasal 119 belum sepenuhnya dilakukan bahkan dipahami oleh DPRD kota Manado.

*Advisory Bodies* belum ada masukan-masukan ataupun kritikan baik dalam bentuk penyampaian lewat media massa ataupun lewat demonstrasi yang merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang direspon sebagai isu untuk dijadikan bahan masukan dalam pembentukan Perda oleh DPRD yang dimasukan dalam Prolegda. Seharusnya ada banyak masukan yang mereka sampaikan tapi sebelum memutuskan semuanya akan dibahas terlebih dahulu dalam setiap rapat paripurna apa akan disetujui atau mengadakan perubahan kearah yang lebih baik. tidak ada masukan-masukan ataupun kritikan baik dalam bentuk penyampaian lewat media masa ataupun lewat demonstrasi yang merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang direspon sebagai isu untuk dijadikan bahan masukan dalam pembentukan Perda oleh DPRD Manado.

*Public meeting*, tidak dimaksimalkan adanya pertemuan dengan publik secara rutin dan teratur. Pertemuan dengan publik secara rutin dan teratur (pada masa reses atau diluar masa reses) dilakukan/ada, yakni melalui kegiatan reses anggota DPRD Kota Manado melaksanakan pertemuan dengan konstituennya di setiap daerah pemilihan masing-masing tujuannya untuk menyampaikan rencana Prolegda, sekaligus kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh anggota atau DPRD Kota Manado juga untuk menampung aspirasi masyarakat. Hanya saja, kegiatan reses itu dalam pangamatan belum semua anggota DPRD melaksanakannya secara baik. ada anggota DPRD Manado yang menghindar untuk melaksanakan kegiatan reses atau pertemuan bersama dengan masyarakat di daerah pemilihannya karena dia merasa canggung dan minder karena akan berhadapan dengan bekas guru, dosen, atau orang-orang yang menurutnya jauh lebih banyak mengetahui informasi ataupun sebab-sebab lainnya.

*Freedom of speech*, belum adanya ruang yang disediakan untuk kebebasan dari masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 Bab IX tentang Partisipasi Masyarakat, Pasal 90, menjelaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. Masukan secara lisan dan/atau tertulis tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau melalui seminar, lokakarya, dan/atau diskusi serta dijamin kebebasannya dalam mengeluarkan pendapat, sesuai amanah UUD tahun 1945. Namun hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh DPRD Kota Manado.

Tabel 5.5 Temuan Sub Fokus *Responsiveness*

(kepekaan terhadap aspirasi yang berkembang)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fokus:Proses Akuntabilitas Politik Pada DPRD Kota Manado dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah  Sub Fokus : *Responsiveness* (kepekaan terhadap aspirasi yang berkembang). | | |
| Indikator | Temuan | Ket |
| *Public participation and consultation* | 1. Belum adanya ruang dan media bagi terwujudnya komunikasi dan partisipasi publik bagi proses pembuatan Perda dari DPRD. 2. Belum ada mekanisme dialog publik dan mekanismenya belum dipahami. Yang ada hanya media konvensional yang terkait | Belum sesuai harapan yang ada |
| *Debate* | 1. Aktivitas diskusi dengan publik untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk konsep ide dan gagasan mereka diperlukan dalam pembuatan Perda inisiatif. untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk konsep, ide dan gagasan dari masyarakat sebagaimana diatur PP Nomor 16/2010, Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 dan Peraturan DPRD Kota Manado Nomor 04 Tahun 2010 terkait dengan Partisipasi Masyarakat dan juga penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat Pasal 119 belum sepenuhnya dilakukan bahkan dipahami oleh DPRD kota Manado | Belum sesuai harapan yang ada |
| *Advisory Bodies* | 1. Belum ada masukan-masukan ataupun kritikan baik dalam bentuk penyampaian lewat media massa ataupun lewat demonstrasi yang merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang direspon sebagai isu untuk dijadikan bahan masukan dalam pembentukan Perda oleh DPRD yang dimasukan dalam Prolegda. | Belum sesuai harapan yang ada |
| *Public meeting* | 1. Tidak dimaksimalkan adanya pertemuan dengan publik secara rutin dan teratur. 2. Pertemuan dengan publik secara rutin dan teratur (pada masa reses atau diluar masa reses) telah dilakukan/ada, yakni melalui kegiatan reses anggota DPRD Kota Manado namun belum maksimal apalagi terkait meminta masukkan pada pembuatan Perda. | Belum sesuai harapan yang ada |
| *Freedom of speech* | 1. Belum adanya ruang yang disediakan untuk kebebasan dari masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 Bab IX tentang Partisipasi Masyarakat, Pasal 90, menjelaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. | Belum sesuai harapan yang ada |

Sumber: Diolah Peneliti (2016)

1. *Openness* (keterbukaan)

*Openness,* adalah menunjuk pada adanya keterbukaan dari DPRD Kota Manado terkait dengan proses agenda pengajuan, pembahasan dan penetapan setiap Perda kepada publik atau masyarakat.Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses, lembaga dan informasi secara langsung dapat dipahami dan dapat dimonitor dukungan DPRD Kota Manado terhadap tranparansi atau keterbukaan kepada publik ditunjukkan melalui keterbukaan disetiap pelaksanaan kebijakan. DPRD dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki tugas bersama dengan eksekutif dalam mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik, sesuai dengan tugas kewenangan dan fungsi yang dimilikinya. Terutama dalam melaksanakan fungsi legislasi atau pembuatan peraturan daerah (Perda) bersama-sama dengan unsur eksekutif. Dalam proses pembuatan Perda penerapan unsur-unsur dan prinsip-prinsip *good governance* menjadi penting dan urgen sebagai pedoman pelaksanaannya demi untuk membangun kesejahteraan masayakat.

Disamping itu pula bahwa DPRD Kota Manado memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mendapatkan dan menerima mandat politik rakyat untuk memperjuangkan berbagai aspirasi dan kepentingan rakyat, maka lembaga ini berperan dalam mewujudkan akuntabilitas politiknya terutama dalam hal bagaimana sebagai lembaga pejuang kepentingan rakyat melakukan tugasnya dalam menyusun dan menetapkan peraturan daerah yang benar-benar menyentuh dan berpihak untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat sebagai bagian daripada melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*.

Akuntabilitias politik DPRD Kota Manado sebagai sebuah organisasi publik yang memiliki tanggungjawab etis-politik kepada rakyat, salah satu indikatornya adalah terletak pada sejauh mana isntitusi ini memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilihnya melalui berbagai kebijakan yang berbentuk peraturan daerah yang dibahas secara bersama-sama dengan kalangan eksekutif (pemerintah) yang akan bemuara pada program-program yang didukung oleh anggaran yang secara teknis operasional akan dilaksanakan oleh jajaran eksekutif dibawa kendali walikota sebagai kepala daerah. Aspek yang perlu dipertanggungjawabkan DPRD Kota Manado kepada publik adalah terkait dengan bagaimana *proses* dan *prosedur* perencanaan, penyusunan dan pembahasan berbagai hal yang terkait dengan kepentingan masyakarat yang kemudian melahirkan *produk* kebijakan dalam bentuk Perda.

1. *Parliamentary question times*

*Parliementary questions times*, memberikan kesempatan bagi publik untuk mengetahui tentang materi dan agenda kerja DPRD Kota Manado dalam pembahasan Perda.

Untuk mengetahui lebih lanjut peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang sudah ditentukan sebelumnya secara *purposive*. Dengan pertanyaan awal apakah DPRD memberikan kesempatan kepada publik untuk mengetahui tentang materi dan agenda kerja DPRD dalam pembahasan Ranperda? Demikian pernyataan informan “HK”:

Selalu diberikan kesempatan bagi masyarakat untuk selalu update lewat media-media cetak ataupun media sosial selalu terbuka. (Wawancara, 14-09-2015)

Dari informan “HK” menyatakan bahwa publik mengetahui tentang materi dan agenda kerja DPRD Kota Manado dalam pembahasan Ranperda. Masyarakat selalu diberikan kesempatan bagi untuk selalu update lewat media-media cetak ataupun media sosial. Pemberian materi yang dimaksud oleh informan diatas terkesan kurang menanggapai prosedur yang ada, sehingga penyampaian materi secara resmi tidak dilakukan oleh DPRD Kota Manado.Informan “BP” mengatakan bahwa menyangkut materi dan agenda kerja atau kegiatan DPRD Kota Manado, masyarakat dapat mengetahuinya melalui media masa cetak ataupun elektronik serta media-media online. Karena teman-teman dari pers dapat meliputnya dan menyebarkannya, Demikian pernyataan informan BP:

Menyangkut materi dan agenda kerja atau kegiatan DPRD Manado, masyarakat dapat mengetahuinya melalui media masa cetak ataupun elektronik serta media-media online. Karena teman-teman dari pers dapat meliputnya dan menyebarkannya. (Wawancara, 14-09-2015)

Dari paparan diatas diketahui bahwa Apakah DPRD Kota Manado memberikan kesempatan kepada publik untuk mengetahui tentang materi dan agenda kerja DPRD dalam pembahasan Perda tidak dilaksanakan sesuai dengan akuntabilitas politik yang seharusnya dilakukan. Demikianpun pernyataan informan JK mengatakan bahwa hal tersebut ada dilakukan melalui media massa atau koran. Begitupula dengan informan “NT” menyampaiakan bahwa DPRD Kota Manado memberikan kesempatan kepada publik untuk mengetahui tentang materi dan agenda kerja DPRD dalam pembahasan Perda namun hal tersebut tidak diagendakan secara resmi, hanya situasional saja. Berbeda dengan beberapa informan diatas, informan “DS” menjawab secara gamblang bahwa hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh DPRD Kota Manado terkait memberikan kesempatan kepada publik untuk mengetahui tentang materi dan agenda kerja DPRDKota Manado dalam pembahasan Perda, demikian pernyataan informan “DS”:

Sepertinya tidak pernah dilakukan kalau mau jujur, karena DPRD hanya mengandalkan pihak wartawan melalui pemberitaan-pemberitaan mereka dalam surat kabar, tetapi tidak dilakukan secara resmi atau berproses sesuai agenda yang sudah direncanakan. (Wawancara, 29-09-2015)

Hal yang sama disampaikan oleh informan DM, bahwa DPRD Kota Manado belum memberikan kesempatan kepada masyarakat *(public)* untuk mengetahui materi dan agenda kerja DPRD Kota Manado dalam pembahasan Perda. Demikian pernyataan informan DM:

Memang diakui bahwa selama DPRD Kota Manado Periode 2009-2014 relatif kurang memberi ruang. Agenda kegiatan DPRD masyarakat dapat mengikuti dan mengetahuinya lewat pemberitaan melalui media masa. Media massa pun memuat karena mereka memang berposko dan meliput setiap kegiatan apa saja yang dilakukan oleh DPRD, tapi secara resmi belum pernah dilakukan oleh DPRD Kota Manado. (Wawancara, 07-10-2015)

Selanjutnya pertanyaan yang sama dikonfirmasi kepada beberapa anggota DPRD Kota Manado, peneliti mendapatkan jawaban yang sama bahwa kesempatan kepada masyarakat bentuknya seperti apa, informan menjawab tidak tahu dan tidak paham, hal ini dijawab oleh informan, DM, SL, MM, dan SS. Dari jawaban tersebut terlihat sikap acuh tak acuh bahkan kurang merespon tanggapan masyarakat untuk dilibatkan atau berpartisipasi dalam agenda serta materi-materi yang berkaitan dengan pembahasan Ranperda inisiatif DPRD Kota Manado.

Dari keseluruhan data diatas menunjukan temuan bahwaDPRD Kota Manado belum memberikan kesempatan kepada masyarakat *(public)* untuk mengetahui materi dan agenda kerja DPRD Kota Manado dalam pembahasan Perda. Jika ada hal tersebut bukanlah inisiatif dari DPRD Kota Manado, hal ini terlihat dari penuturan informan kalau untuk fasilitas tersebut belum ada diakui oleh salah satu anggota DPRD Kota Manado bentukmendapatkan informasi tentang agenda serta materi-materi yang berkaitan dengan pembahasan Ranperda inisiatif DPRD Kota Manado dapat diikuti oleh media sosial ataupun media cetak atau pertemuan langsung dalam setiap pembahasan tertentu yang harus melibatkan masyarakat.

Sehinggga dari temuan diatas menunjukan bahwa *Openness* belum terlaksana dengan baik di DPRD Kora Manado dimana seharusnya perlu adanya keterbukaan dari DPRD Kota Manado terkait dengan proses agenda pengajuan, pembahasan dan penetapan setiap Perda kepada publik atau masyarakat.Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat dipahami dan dapat dimonitor dukungan DPRD Kota Manado terhadap tranparansi atau keterbukaan kepada publik ditunjukkan melalui keterbukaan disetiap pelaksanaan kebijakan.

1. *Public Information Service*

*Public information service*, adanya pelayanan informasi bagi masyarakat terkait tentang agenda-agenda dan materi pembahasan Perda. Akuntabilitas dilihat dari aspekimplikasinya menunjukkan adanya pengendalian dari suatu tindakan dalam pencapaian tujuan dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dilakukan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan Si pemberi mandat mendapatkan informasi baik langsung, maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan baik itu keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas secara konsepsi memiliki dua dimensi, yaitu: *vertikal* dan *horizontal*. Secara *vertikal*, akuntabilitas adalah bagaimana negara mempertanggungjawabkan tugasnya kepada warga, sedangkan secara *horizontal*, negara mempertanggungjawabkan tugasnya pada institusi akuntabilitasnya sendiri. Dimensi vertikal diisni merujuk pada hubungan kekuasaan antara negara dengan warganya, dalam hal ini DPRD Kota Manado dengan masyarakatnya, sedangkan dimensi *horizontal*  merujuk pada pengawasan, pemeriksaan, dan perimbangan institusional, yakni antara pemerintah dengan aparatnya sebagai pelaksana dari kebijakan. Akuntabilitas dapat diperkuat melalui tuntutan masyarakat sipil, dalam hal ini pelaku masyarakat sipil dapat mempengaruhi akuntabilitas *horizontal* dengan dua cara: pertama, secara langsung, yaitu dengan mendukung pembentukan dan pemberdayaan pemeriksaan dan perimbangan institusional, dan kedua, secara tidak langsung dengan memperkuat institusi akuntabilitas vertikal yang mendukungnya, seperti demokrasi pemilihan, dan media yang independen derta pelayanan informasi kepada masyarakat lewat media yang independent.

Untuk mengetahui lebih lanjut, peneliti mengajukan pertanyaan kepada beberapa informan dengan pertanyaan awal, apakah ada pelayanan informasi bagi masyarakat seperti pusat informasi lewat media internet yang secara formal dilakukan terkati agenda dan materi pembahasan Perda dalam menjalankan fungsi legislasi? Demikian pernyatan informan “HK”:

pelayanan informasi bagi masyarkat seperti pusat informasi lewat media internet yang secara formal dilakukan terkait agenda dan materi pembahasan Perda dalam menjalankan fungsi legislasi belum ada, hal tersebut tergantung dari fasilitas dan anggaran yang disetujui bersama. Tapi selama ini belum ada. (Wawancara, 14-09-2015)

Pernyataan informan menunjukan bahwa pelayanan informasi bagi masyarkat seperti pusat informasi lewat media internet yang secara formal dilakukan terkait agenda dan materi pembahasan Perda dalam menjalankan fungsi legislasi belum dilaksanakan, menurutnya bahwa hal tersebut tergantung dari fasilitas dan anggaran yang disetujui bersama. Tapi selama ini belum ada. Namun penyediaan pusat informasi adalah salah hal yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, pertanyaan selanjutnya disampaikan pada informan BP dengan pertanyaan apakah ada pelayanan informasi bagi masyarakat seperti pusat informasi lewat media internet atau secara formal yang dilakukan terkait pada agenda dan materi pembahasan Perda dalam menjalankan fungsi legislasi?Demikian pernyatan informan “BP”:

Belum ada. Dalam pengamatan, masyarakat selalu mengikuti baik media sosial ataupun media cetak selalu ada. Memang menurut saya hal tersebut perlu dibahas untuk diadakan. Sebab selama ini ketika informasi yang kami ingin salurkan tidak tahu harus melalui apa, yah…kami memanggil wartawan yang biasa meliput di tempat kami, itu saja, tetapi sebenarnya banyak hal yang perlu disampaikan jika ada media tersebut, namun perlu dipelajari kembali mengenai pembiayaan, anggaran alokasi untuk media tersebut apa memungkinkan, jika ya, mengapa tidak direspon, sepanjang hal tersebut positif dan untuk masyarakat. Namun diakui banyak yang belum paham. (Wawancara, 14-09-2015)

Menurut informan bahwa pelayanan informasi bagi masyarakat seperti pusat informasi lewat media internet atau secara formal yang dilakukan terkait pada agenda dan materi pembahasan Perda dalam menjalankan fungsi legislasi hal tersebut perlu dibahas untuk diadakan. Sebab selama ini ketika informasi yang akan disalurkan belum ada sarananya. Sarana yang ada melaui media dengan menghubungi wartawan yang biasa meliput di DPRD Kota Manado. Hal tersebut perlu dipelajari kembali mengenai pembiayaan, anggaran alokasi untuk pusat informasinya tersebut apakah memungkinkan, sepanjang hal tersebut positif dan untuk masyarakat perlu direspon. Hal senada juga disampaikan oleh beberapa anggota DPRD Kota Manado sebagai informan terkait, informan: JK, DS, DM menyatakan dalam pengamatan mereka tidak ada dan belum direncanakan dan transparansi menurut mereka sudah cukup lewat media saja.

Pelayanan informasi bagi masyarakat seperti pusat informasi lewat media internet atau secara formal yang dilakukan terkait pada agenda dan materi pembahasan perda dalam menjalankan fungsi legislasi, menjadi masalah disebabkan karena masalah anggaran dan kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh DPRD, dimana kalau menurut informan tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung, menurut informan gedungnya sudah tidak lagi *representative*apalagi menganggarkan hal tersebut. Demikian pernyataan informan “DS”:

Tidak ada. Mungkin juga itu disebabkan karena masalah anggaran dan kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh DPRD,dimana gedungnya juga kalau menurut saya tidak lagi representatif. (Wawancara, 29-09-2015)

Apakah ada pelayanan informasi bagi masyarakat seperti pusat informasi lewat media internet atau secara formal yang dilakukan terkait pada agenda dan materi pembahasan Perda dalam menjalankan fungsi legislasi? Demikian pernyatan informan DM:

Tidak adadalam pengamatan saya tidak ada dan memang belum direncanakan. Transparansi menurut mereka sudah cukup lewat media saja. Karena situasi anggaran saat ini belum memadai. (Wawancara, 07-10-15)

Alasan yang sama dikemukakan oleh kedua informan terkait penyediaan anggaran, dengan membandingkan dengan sarana prasarana yang perlu ditunjang, padahal media center sebagai pusat informasi tidak perlu harus dengan gedung yang mewah dengan fasilitas yang lengkap, namun yang dibutuhkan disini adalah tersediakah pusat informasi bagi masyarakat terkait pada agenda dan materi pembahasan Perda dalam menjalankan fugnsi legislasi yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Manado. Pusat informasi bisa diadakan melalui website yang dibuka, ataupun di sekretariat yang difasilitasi oleh sekretariat Dewan, hal tersebut hanyalah disebabkan oleh faktor apakah mau transparan atau tidak, demikian ungkapan informan ”HT” sebagai pengamat politik di Manado terkait Apakah ada pelayanan informasi bagi masyarakat seperti pusat informasi lewat media internet atau secara formal yang dilakukan terkait pada agenda dan materi pembahasan Perda dalam menjalankan fungsi legislasi, Demikian pernyataan informan “HT” menjawab:

Terkait pusat informasi tidak perlu harus dengan gedung yang mewah dengan fasilitas yang lengkap, namun yang dibutuhkan disini adalah tersedianya pusat informasi bagi masyarakat terkait pada agenda dan materi pembahasan Perda dalam menjalankan fungsi legislasi yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Manado. Pusat informasi bisa diadakan melalui website yang dibuka atau bisa diakses umum, media sosial, ataupun di sekretariat yang difasilitasi oleh sekretariat dewan, dengan membuka office yang bisa menerima setiap masukan oleh masyarakat ataupun setiap rencana dan kegiatan oleh DPRD, seperti pembahasan atau paripuran. Hal tersebut hanyalah disebabkan oleh faktor apakah mau transparan atau tidak, itu saja kok repot kalau bisa pinjam ungkapan Gus Dur. (Wawancara, 17-11-15)

Mengkonfirmasi hal tersebut, Demikian pernyatan informan “SL”:

Di DPRD ada website, tetapi saya kurang tahu pasti apakah itu jalan atau bagimana. Yang menangani itu adalah di bagian umum di sekretariat. (Wawancara, 23-10-2015)

Hal yang sama disampaikan oleh informan MM, SS, RP, RR, DR, TU dan HK. Yang mana mereka mengatakan tidak ada pelayanan informasi bagi masyarakat seperti pusat informasi melalui internet atau website secara formal.

Dari keseluruhan data diatas menunjukan bahwa pelayanan informasi bagi masyarkat seperti pusat informasi lewat media internet yang secara formal dilakukan terkait agenda dan materi pembahasan Perda dalam menjalankan fungsi legislasi belum dilaksanakan, menurut mereka bahwa hal tersebut tergantung dari fasilitas dan anggaran yang disetujui bersama. Sebab selama ini ketika informasi yang akan disalurkan belum ada sarananya. Sarana yang ada melaui media dengan menghubungi wartawan yang biasa meliput di DPRD Kota Manado, dari pengamatan yang ada banyak hal yang perlu disampaikan jika ada media tersebut diadakan. Hal tersebut perlu dipelajari kembali mengenai pembiayaan, anggaran alokasi untuk pusat informasinya tersebut apakah memungkinkan, sepanjang hal tersebut positif dan untuk masyarakat perlu direspon. Hal senada juga disampaikan oleh beberapa sebagai anggota DPRD Kota Manado sebagai informan terkait Apakah ada pelayanan informasi bagi masyarakat seperti pusat informasi lewat media internet atau secara formal yang dilakukan terkait pada agenda dan materi pembahasan Perda dalam menjalankan fungsi legislasi, informan: JK, DS, DM menyatakan dalam pengamatan mereka tidak ada dan belum direncanakan. Transparansi menurut mereka sudah cukup lewat media saja.

1. *Freedom of Information Laws*

*Freedom of information laws*, adanya kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang berbagai produk Perda yang telah ditetapkan oleh DPRD*.* Deklarasi Tokyo tentang petunjuk akuntabilitas publik menyebutkan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dari pengertian diatas menunjukkan adanya hubungan antara responsibilitas *(responsibility)* dengan akuntabilitas *(accountabillity).*

Akuntabilitas Publik merupakan salah satu ciri atau karakteristik utama dari penyelenggaraan kepemerintahan yang baik *(Good Governance)* akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah *(agent)* untuk memberikan pertanggungjwaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah *(principal)* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

Untuk mengetahui lebih mendalam peneliti mengajukan pertanyaan kepada beberapa informan dengan pertanyaan apakah masyarakat juga diberikan kebebasan untuk memperoleh informasi setiap produk Perda yang telah ditetapkan oleh DPRD Kota Manado? Demikian pernyatan informan HK:

Masyarakat selalu diberikan kebebasan untuk mengikuti atau ingin memperoleh informasi tetang produk kebijakan Perda lewat media sosial atau cetak. (Wawancara, 14-09-2015)

Masyarakat selalu diberikan kebebasan untuk mengikuti atau ingin memperoleh informasi tetang produk kebijakan Perda lewat media sosial atau cetak Apakah masyarakat diberikan kebebasan untuk memperoleh informasi setiap kebijakan maupun produk Perda yang telah ditetapkan oleh DPRD. Demikian pernyatan informan BP:

Ada masyarakat dapat memperolehnya dapat berhubungan dengan secretariat. (wawancara, 14-09-2015)

Apakah masyarakat diberikan kebebasan untuk memperoleh informasi setiap kebijakan maupun produk Perda yang telah ditetapkan oleh DPRD Manado? Demikian pernyatan informan JK:

masyarakat belumdiberikan kebebasan untuk memperoleh informasi setiap kebijakan maupun produk Perda yang telah ditetapkan oleh DPRD Manado. (Wawancara, 21-09-2015)

Masyarakat belum diberikan kebebasan untuk memperoleh informasi setiap kebijakan maupun produk Perda yang telah ditetapkan oleh DPRD. Maksudnya setiap Perda yang sudah di putuskan itu dapat dimiliki oleh masyarakat dokumen peraturannya. Itu belum karena itu berkaitan dengan anggaran, kami terbatas untuk mencetak dan menggandakannya setelah Perda tersebut masuk dalam lembaran daerah. Memang tugas kami untuk mensosialisasikannya tetapi kami juga terbatas dalam hal-hal tertentu terutama untuk biaya penggandaannya. Hal ini sejalan dengan informan DS, DM, SL, MM, HK.

Dari keseluruhan data dapat dipaparkan bahwa masyarakat belum diberikan kebebasan untuk memperoleh informasi setiap kebijakan maupun produk Perda yang telah ditetapkan oleh DPRD Kota Manado. Maksudnya setiap Perda yang sudah di putuskan itu dapat dimiliki oleh masyarakat dokumen peraturannya. Itu belum karena itu berkaitan dengan anggaran, kami terbatas untuk mencetak dan menggandakannya setelah perda tersebut masuk dalam lembaran daerah. Memang tugas DPRD Kota Manado untuk mensosialisasikannya tetapi kami juga terbatas dalam hal-hal tertentu terutama untuk biaya penggandaannya. Karena kami berpendapat bahwa setelah DPRD menetapkan itu perda tersebut disampaikan kepada Walikota dan Walikota melalui Bagian Hukum akan mengundangkan dalam lembaran daerah sekaligus menjadi tugas pemerintah kota untuk menyebarluaskan kepada masyarakat. Dan masyarakat juga diberikan kebebasan untuk memperoleh informasi setiap produk perda inisiatif yang ditetapkan oleh DPRD Kota Manado melalui internet/website DPRD Kota Manado diluar itu belum ada forum.

1. *Public Hearings*

*Public Hearings*, adanya pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Akuntabilitas terkait dengan upaya menjawab beberapa pertanyaan bersifat tuntunan - apa, mengapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang perlu dijawab tersebut misalnya: apa yang harus akuntabel, siapa yang harus menyampaikan, kenapa harus memberikan akuntabilitas, kepada siapa harus disampaikan, siapa saja yang harus menyampaikan akuntabilitas dan berbagai segmen kegiatan dalam masyarakatoleh pihak DPRD Kota Manado.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah ada pertemuan pertemuan dengan masyarakat, peneliti mengajukan pertanyaan kepada beberapa informan, dengan pertanyaan apakah ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kota Manado yang bertujuan untuk menjaring aspirasi sebelum atau sesudah Ranperda di Perdakan? Demikian pernyatan informan HK:

Lebih banyak diterima di Kantor DPRD Kota Manado. Memang sebenarnya hahrus jemput bola tetapi bagi kami media itu sudah cukup mewlakil sebagai sarana pemberi informasi kepada masyarakat. Dengan kata lain bahwa secara rutin dan terencana belum ada, yang ada bersifat insidentil dan berdasarkan kebutuhan. Itupun dilakukan pada saat sebelum dan terutama pada proses pembahasan Ranpeda dengan melakukan pertemuan bersama dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan materi Ranperda yang sedang dibahas. Misalah Ranperda PD. Pasar yang merupakan Ranperda inisiatif DPRD, komisi, gabungan komisi, dan/atau pansus melakukan pertemuan hearing dengan pihak terkait yaitu para pedagang dan penjual serta pedagang kaki lima yang berkativitas dilokasi pasar untuk mendapatkan masukan-masukan dari mereka terhadap pemabahasan Ranperda PD Pasar. (Wawancara, 14-09-2015)

Dari data diatas dijelaskan bahwa lebih banyak diterima di Kantor DPRD Kota Manado. Memang sebenarnya harus jemput bola tetapi bagi kami media itu sudah cukup mewakili sebagai sarana pemberi informasi kepada masyarakat. Dengan kata lain bahwa secara rutin dan terencana belum ada, yang ada bersifat insidentil dan berdasarkan kebutuhan. Itupun dilakukan pada saat sebelum dan terutama pada proses pembahasan Ranpeda dengan melakukan pertemuan bersama dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan materi Ranperda yang sedang dibahas. Misalnya komisi, gabungan komisi, dan/atau pansus melakukan pertemuan hearing dengan pihak terkait dengan materi Ranperda yang akan dibahas. Kemudian pertemuan dengan masyarakat dalam penjaringan aspirasi sebelum atau sesudah Ranperda tersebut diperdakan tidak semua bisa diundang tergantung sesuai dengan kepentingan Perda apa perlu dilibatkan atau tidak karena takutnya akan terjadi konflik. Demikian pernyatan informan “BP”:

Tidak semua bisa diundang tergantung sesuai dengan kepentingan Perda apa perlu dilibatakan atau tidak karena takutnya akan terjadi konflik. (Wawancara, 14-09-2015)

Pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dalam penjaringan aspirasi sebelum atau sesudah Perda inisiatif ditetapkan tidak dilakukan. Setahu saya dalam pembahasan Perda khususnya Perda inisiatif biasanya bukan pertemuan untuk penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pansus tapi sifatnya Pansus yang mengundang pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan materi Perda untuk maksud meminta penjelasan, meminta keterangan atau data oleh Pansus. Juga setelah Perda ditetapkan bukan tugas dan kewenangan DPRD Kota Manadountuk mensosialisasikan Perda tersebut tetapi itu sudah tugas Pemerintah Kota Manado. Demikian pernyatan informan “JK”:

Setahu saya dalam pembahasan Perda khususnya Perda inisiatif biasanya bukan pertemuan untuk penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pansus tapi sifatnya Pansus yang mengundang pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan materi Perda untuk maksud meminta penjelasan, meminta keterangan atau data oleh Pansus. juga setelah Perda ditetapkan bukan tugas dan kewenangan DPRDKota Manado untuk mensosialisasikan Perda tersebut tetapi itu sudah tugas Pemerintah Kota Manado. (Wawancara, 21-09-2015)

Dari jawaban informan sebelumnya juga sama jawaban yang diberikan oleh informan NT, DM, MM, DR, SS, RS, TU. Namun jawaban berbeda demikian pernyataan dari informan SL:

Ada dan itu diserahkan kepada masing-masing anggota DPRD Kota Manadosecara kelembagaan DPRD tidak ada yang diprogramkan untuk pertemuan-pertemuan seperti itu. Sebab menurut kami, anggota Dewan setiap saat harus merekam atau sudah menjadi kewajiban anggota untuk mengikuti dan menyerap isu dan aspirasi yang bertumbuh dan berkembangan di masyarakat. Dan itu menjadi bahan dan materi untuk diperjuangkan dalam pembahasan setiap Perda termasuk kalau itu berhubungan dengan materi Perda inisiatif DPRD. (Wawancara, 23-10-2015)

Dari data diatas menyatakan bahwa ada dilakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dalam penjaringan aspirasi sebelum atau sesudah Ranperda ditetapkan dan itu diserahkan kepada masing-masing anggota DPRDKota Manado secara kelembagaan DPRD Kota Manado tidak ada yang diprogramkan untuk pertemuan-pertemuan seperti itu. Sebab menurut kami, anggota Dewan setiap saat harus merekam atau sudah menjadi kewajiban anggota untuk mengikuti dan menyerap isu dan aspirasi yang bertumbuh dan berkembangan di masyarakat. Dan itu menjadi bahan dan materi untuk diperjuangkan dalam pembahasan setiap Perda termasuk kalau itu berhubungan dengan materi Perda inisiatif DPRD. Data diatas dikonfirmasi kembali kepada informan lain dan berbeda apa yang disampaikan sebelumnya informan selanjutnya menyatakan bahwa memang tidak ada karena hal itu tidak diagenda untuk itu atau tidak dijadwalkan. Pansus mengundang orang perorang, atau kelompok profesi, untuk diminta keterangan atau data yang berhubungan dengan materi Perda yang dibahas.

Temuan yang ada dari indikator ini adalah bahwa pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dalam penjaringan aspirasi sebelum atau sesudah Perda inisiatif ditetapkan tidak dilakukan. Dalam pembahasan Perda khususnya Perda inisiatif biasanya bukan pertemuan untuk penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pansus tapi sifatnya Pansus yang mengundang pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan materi Perda untuk maksud meminta penjelasan, meminta keterangan atau data oleh Pansus. Dengan kata lain bahwa secara rutin dan terencana belum ada, yang ada bersifat insidentil dan berdasarkan kebutuhan. Itupun dilakukan pada saat sebelum dan terutama pada proses pembahasan Ranpeda dengan melakukan pertemuan bersama dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan materi Ranperda yang sedang dibahas.

1. *Annual Reports*

*Annual Reports* adalah merupakan kewajiban dan otoritas seseorang yang kepadanya dipercayakan sumberdaya publik untuk melaporkan pengelolaan sumberdaya tersebut dan mampu menjelaskan tanggungjawabnya menyangkut fiskal, manajerial dan program.Akuntabilitas diatas menunjukkan adanya hubungan antara responsibilitas *(responsibility)* dengan akuntabilitas *(accountability).* Akuntabilitas layanan publik mencakup tingkat pertanggungjawaban pada publik. Memiliki akuntabilitas adalah terkait menjawab tanggungjawab seseorang, melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, merespon, memikul kewajiban dan menetapkan keputusan eksternal.

Untuk mengetahui lebih mendalam peneliti mengajukan pertanyaan ke beberapa informan dengan pertanyaan mengenai bagaimana bentuk pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Balegda dalam menjalankan tugasnya? Demikian pernyatan informan HK:

Baleg selalu mempertanggungjawabkan setiap perencanaan rancangan dari pertama sampai pada hasil akhir ditetapkan rancangan atau perda tersebut. Sebab itu kalau hal itu tidak dilaksanakan berarti DPRD dapat dikatakan mandul dan kalau tidak dapat memenuhi apa yang sudah diprogramkan dalam Prolegda itu patut dipertanyakan karena hal tersebut akan berhubungan dengan legitimasi politik masyarakat terhadap insitusi DPRD Kota Manado. Pertanggungjawaban DPRD Manado bagi saya adalah seberapa banyak DPRD Manado berbuatu untuk rakyat melalui pembentukan Perda yang benar-benar berasal dari DPRD Manado, karena dia adalah representasi rakyat yang memiliki hak istiewa untuk berbicara dan membentuk Perda. Menurut saya, paling tidak sebenarnya khusus untuk Perda inisiatif dalam setahun DPRD Manado minimal harus melahirkan 6 (enam) Perda inisiatif yang juga tentu harus didukung dengan anggaran yang memadai. (Wawancara, 14-09-2015)

Dari data diatas menjelaskan bahwa Balegda selalu mempertanggung-jawabkan setiap perencanaan rancangan dari pertama sampai pada hasil akhir ditetapkan rancangan atau Perda tersebut. Sebab itu, kalau hal itu tidak dilaksanakan berarti DPRD dapat dikatakan mandul dan kalau tidak dapat memenuhi apa yang sudah diprogramkan dalam Prolegda itu patut dipertanyakan karena hal tersebut akan berhubungan dengan legitimasi politik masyarakat terhadap insitusi DPRD Kota Manado. Pertanggungjawaban DPRD Manado adalah seberapa banyak DPRD Manado berbuat untuk rakyat melalui pembentukan Perda yang benar-benar berasal dari DPRD Manado, karena dia adalah representasi rakyat yang memiliki hak istimewa untuk berbicara dan membentuk Perda. Menurut informan, paling tidak sebenarnya khusus untuk Perda inisiatif dalam setahun DPRD Manado minimal harus melahirkan 6 (enam) Perda inisiatif yang juga tentu harus didukung dengan anggaran yang memadai. Selanjutnya Balegda selalu mempertanggungjawabkan setiap perencanaan rancangan Perda dari pertama sampai pada hasil akhir ditetapkannya Perda tersebut. Demikian pernyatan informan BP:

Balegda selalu mempertanggungjawabkan setiap perencanaan Ranperda dari pertama sampai pada hasil akhir ditetapkan menjadi Perda. (Wawancara, 14-09-2015)

Bagaimana bentuk laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Balegda dalam menjalankan tugas legislasinya? Demikian pernyatan informan JK:

Balegda memberikan laporan pelaksanaan Prolegda kepada pimpinan.

Bagaimana bentuk laproan pertanggungajawaban yang dilakukan oleh Balegda dalam menjalankan tugas legislasinya? Demikian pernyatan informan NT:

Saya kurang tahu itu ada di DPRD Manado. (Wawancara, 29-09-2015)

Terdapat temuan terkait bagaimana bentuk laporan yang dilakukan oleh Balegda dalam menjalankan tugas legislasinya, informan memberi pernyataan bahwa Balegda tidak pernah memberikan laporan secara langsung, yang ada itu melalui pimpinan DPRD dalam rapat paripurna itupun tidak spesifik terkait dengan tugas-tugas Balegda tetapi bersifat umum saja. Demikian pernyatan informan “DS”:

Setahu saya Balegda tidak pernah memberikan laporan secara khusus langsung dari Balegda, yang ada itu melalui pimpinan DPRD dalam rapat paripurna itupun tidak spesifik terkait dengan tugas-tugas Balegda tetapi bersifat umum saja. (Wawancara, 29-09-2015)

Senada dengan jawaban informan sebelumnya seperti yang dinyatakan oleh informan DM, DS, MM yang menyatakan bahwa Balegda dalam menjalankan tupoksinya hingga selesai periode tidak memberikan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Balegda. Lain halnya yang dikemukakan informan SS dan DR, yang mengatakan:

Laporannya langsung kepada pimpinan DPRD melalui rapat paripurna. Jadi pertanggungjawabannya kepada pimpinan. (Wawancara, 26-10-2015)

Selanjutnya pertanyaan dikembangkan guna mendapatkan kedalaman informasi dengan menanyakan apakah Balegda telah melaksanakan tugasnya seperti yang telah di tetapkan melalui Prolegda setiap tahunnya. Dan apakah Prolegda yang telah ditetapkan setiap tahun tercapai sesuai rencana dan jadwalnya, belum secara optimal karena dari program legislasi daerah khusus untuk Ranperda inisiatif DPRD Manado belum terealisasi semuanya hanya 2 (dua) yang direalisasikan. Dapat dikatakan DPRD Manado Periode 2009 – 2014 kurang produktif. Sama halnya sekarang DPRD Manado sudah jalan setahun dari Prolegda yang sudah ditetapkan seluruhnya ada 19 Ranperda, 2 usulan dari DPRD Manado dan 17 usulan dari pemerintah. Tetapi sampai saat ini belum ada yang dibahas. Perencanaannya kurang matang sering berubah. Mungkin ini lebih disebabkan karena DPRD merupakan lembaga politik, sarat kepentingan dan politik sangat dinamis. Demikian pernyatan informan “HK”:

Menurut saya belum secara optimal karena dari Prolegda khusus untuk Ranperda inisiatif DPRD Manado belum terealisasi semuanya hanya 2 (dua) yang direalisasikan. Dapat dikatakan DPRD Manado Periode 2009 – 2014 kurang produktif. Sama halnya sekarang DPRD Manado sudah jalan setahun dari Prolegda yang sudah ditetapkan seluruhnya ada 19 Ranperda, 2 usulan dari DPRD Manado dan 17 usulan dari pemerintah. Tetapi sampai saat ini belum ada yang dibahas. Perencanaannya kurang matang sering berubah. Mungkin ini lebih disebabkan karena DPRD merupakan lembaga politik, sarat kepentingan dan politik sangat dinamis. (Wawancara, 14-09-2016)

Dalam bentuk pertanggungjawaban pembentukan Perda, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan agenda yang ditetapkan atau terjadwal? Demikian pernyatan informan BP:

Semua agenda yang dijadwalkan selalu berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditetapkan karena jika tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan berarti DPRD tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan dianggap gagal atau mandul dalam pelaksanaanya. (Wawancara, 14-09-2015)

Dalam bentuk pertanggungjawaban pembentukan Perda, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan agenda yang ditetapkan atau dijadwalkan? Demikian pernyatan informan JK:

Belum. Karena ada Perda yang sudah masuk dalam Prolegda tapi tidak dibahas, dan ada yang terjadi perubahan waktu pembahasan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh informan NT, DS, DM, SL, MM, SS, DR, RP, JD, TU. Pada dasarnya mereka mengatakan belum konsisten bahkan terkesan tidak terencana secara baik.

Apakah ada perbedaan pada perencanaan awal atau proses pengajuan/pembahasan sampai pada penetapan? Demikian pernyataan informan BP:

Selalu ada perbedaan dari setiap masing-masing anggota DPRD. Dan ada yang direncanakan untuk dibahas tetapi dalam kenyataan rencana tersebut tidak dapat direalisasikan. Misalnya ada beberapa Ranperda yang direncanakan untuk dibahas dan diprogramkan untuk ditetapkan tetapi akhirnya tidak dapat direalisasikan. (Wawancara, 14-09-2015)

Jawaban informan BP sejalan dengan jawaban dari informan JK, NT, DS, DM, SL, MM, SS, DR, dan RS.

Selanjutnya di explore data dengan menanyakan bagaimana bentuk laporan pertanggungjawaban yang dilakukan DPRD Kota Manado dalam menjalankan fungsi legislasinya kepada masyarakat (sesuai dengan UU Nomor 32/2004 dan Tata Tertib DPRD Kota Manado bandingkan dengan UU No. 23/2014 tentang Pemda)? Demikian pernyatan informan HK:

DPRD Kota Manado sesuai dengan tugas dan fungsinya salah satu adalah fungsi legislasi atau sebagai pembentuk Perda. Untuk periode 2019 – 2014 telah menjalankan tugasnya walaupun diakui bahwa ada beberapa Ranperda inisiatif yang sudah diprogramkan tetapi tidak terealisasi sesuai dengan agenda yang telah diprogramkan. Diawal wawancara saya sudah kemukakan bahwa performance DPRD sangat ditentukan juga oleh sumberdaya yang dimiliki dalam hal ini adalah salah satunya terletak pada kemampuan sumberdaya manusia yang ada. Produktivitas kerja lembaga ini sebagai lembagai politik dapat dilihat dari seberapa banyak Ranperda yang dibahas kemudian menjadi Perda sesuai dengan Prolegda yang ditetapkan. Sepanjang DPRD Manado periode 2009 – 2014, kalau tidak salah kami hanya melahirkan 2 Perda inisiatif, tidak maksimalnya DPRD Manado melahirkan Perda inisiatif itu juga banyak disebabkan oleh sumberdaya manusia yang ada dan keterbatasan anggaran yang ada. Masih banyak anggota Dewan yang tidak serius, tidak peduli, tidak memiliki kemampuan, komptensi untuk menjadi sebagai katalisator, penyambung lidah rakyat yang diwakilihnya, rakyat yang sudah memilihnya untuk memperjuangkan aspirasi kepentingan masyarakat didaerah pemilihannya. Ada yang hanya mengejar gaji, tetapi tidak peduli dengan hak sebagai anggota Dewan dalam hal ini hak mengajukan Ranperda, hak menyatakan pendapat dll. Singkatnya DPRD belum optimal berjuang untuk menjawab kepentingan masyarakat. (Wawancara, 14-09-2015)

DPRD Kota Manado sesuai dengan tugas dan fungsinya salah satu adalah fungsi legislasi atau sebagai pembentuk Perda. Untuk periode 2019 – 2014 telah menjalankan tugasnya walaupun diakui bahwa ada beberapa Ranperda inisiatif yang sudah diprogramkan tetapi tidak terealisasi sesuai dengan agenda yang telah diprogramkan. Diawal wawancara saya sudah kemukakan bahwa performance DPRD sangat ditentukan juga oleh sumberdaya yang dimiliki dalam hal ini adalah salah satunya terletak pada kemampuan sumberdaya manusia yang ada. Produktivitas kerja lembaga ini sebagai lembagai politik dapat dilihat dari seberapa banyak Ranperda yang dibahas kemudian menjadi Perda sesuai dengan Prolegda yang ditetapkan. Sepanjang DPRD Manado periode 2009 – 2014, kalau tidak salah kami hanya melahirkan 2 Perda inisiatif, tidak maksimalnya DPRD Manado melahirkan Perda inisiatif itu juga banyak disebabkan oleh sumberdaya manusia yang ada dan keterbatasan anggaran yang ada. Masih banyak anggota Dewan yang kurang serius, kurang peduli, kurang memiliki kemampuan, komptensi untuk menjadi sebagai katalisator, penyambung lidah rakyat yang diwakilihnya, rakyat yang sudah memilihnya untuk memperjuangkan aspirasi kepentingan masyarakat didaerah pemilihannya. Ada yang hanya mengejar gaji, tetapi kurang peduli dengan hak sebagai anggota Dewan dalam hal ini hak mengajukan Ranperda, hak menyatakan pendapat dll. Singkatnya DPRD belum optimal berjuang untuk menjawab kepentingan masyarakat. Laporan pertanggungjawaban sampai saat ini sudah sesuai dengan seharusnya tidak ada masalah . Demikian pernyatan informan “BP”:

Laporan pertanggungjawaban sampai saat ini sudah sesuai dengan seharusnya tidak ada masalah. (Wawancara, 14-09-2015)

Bagaimana bentuk laporan pertanggungjawaban yang dilakukan DPRD Kota Manado menjalankan fungsi legsilasinya kepada masyarakat (sesuai UU Nomor 32 Tahun 2003 dan Tatib DPRD Kota Manado? Demikian pernyataan informan JK:

DPRD memiliki tugas untuk membentuk Perda dan DPRD mempunyai fungsi legislasi. Pelaporan pelaksanaan tugas itu mestinya tergambar dari seberapa banyak Perda yang dihasilkan oleh DPRD. Jumlah Perda itu menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. (Wawancara, 21-09-2015)

Pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa DPRD memiliki tugas untuk membentuk Perda dan DPRD mempunyai fungsi legislasi. Pelaporan pelaksanaan tugas itu mestinya tergambar dari seberapa banyak Perda yang dihasilkan oleh DPRD. Jumlah Perda itu menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Bagaimana bentuk laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya kepada masyarakat (sesuai dengan UU. No. 32 Tahun 2004 dan Tatib DPRD Manado. Demikian pernyatan informan “NT”:

Mestinya DPRD harus melaksanakan pertanggungawaban tugasnya melaui sejauh mana mereka menyelesaikan apa yang sudah diputuskan dalam Prolegda khusus untuk pembentukan perda inisiatif. (Wawancara, 29-09-2015)

Bagaimana bentuk laporan pertangunggujawaban yang dilakukan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya kepada masyarakat (sesuai UU Nomor 32 Nomor 32 Tahun 2004 dan tata tertib DPRD Manado)? Demikian pernyatan informan DS:

Belum dilaksanakan secara baik khususnya dalam hal membentuk Perda yang berasal dari DPRD. (Wawancara, 29-09-2015)

Bagaimana bentuk laporan pertanggungjawaban yang dilakukan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya kepada masyarakat (sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Tatib DPRD Manado)? Demikian pernyatan informan DM:

Kalau menurut saya, pelaksanaan pertangungjawaban DPRD kepada masyarakat dalam menjalankan fungsinya untuk membentuk peraturan daerah termasuk peraturan daerah yang berasal dari DPRD belum maksimal. Ini dapat dilihat sepanjang periode 2009-2014 DPRD sangat kurang melahirkan perda inisiatif. (Wawancara, 07-10-2015)

Bagaimana bentuk laporan pertanggungjawaban yang dilakukan DPRD Manado dalam menjalankan fungsi legislasinya kepada masyarakat menurut UU Nomor 32/2004 dan Tatib DPRD Manado? Demikian pernyatan informan SL:

Kami DPRD melakukan itu melalui kegiatan reses. Jadi seluruh kerja kami, apa yang telah kami perjuangkan, dan kami lakukan untuk memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat kami pertanggungjawakan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan reses yang sudah terjadwal. Disamping itu pula kami lakukan pada saat menghadiri acara atau kegiatan lainnya seperti menghadiri undangan-undangan masyarakat pada forum itu kami sampaikan, misalnya pada pertemuan Musrembang, dan lain sebagainya. (Wawancara, 23-10-2105)

Bagaimana bentuk laporan pertanggungjawaban yang dilakukan dalam menjalankan fungsi legislasinya kepada masyarakat sesuai UU Nomor 32 tahun 2004 dan tata tertib DPRD Kota Manado? Demikian pernyatan informan MM:

Laporan oleh anggota DPRD kepada masyarakat menurut saya harus dilihat pada pelaksanaan ketiga fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Apakah DPRD telah menjalankan ketiga fungsi tersebut. Nah DPRD harus menjawabnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarkat. (Wawancara, 23-10-2105)

Bagaimana bentuk laporan pertanggungjawaban yang dilakukan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya kepada masyarakat (sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Tatib DPRD)? Demikian pernyatan informan SS:

Secara kelembagaan itu disampaikan oleh pimpinan DPRD melalui media masa tentang setiap yang telah dilakukan oleh DPRD, dan anggota DPRD juga menyampaikan itu secara langsung kepada masyarakat khususnya kepada konstituen di setiap daerah pemilihannya melalui persidangan masa reses DPRD. (Wawancara, 26-10-2015)

Bentuk laporan pertanggungjawaban yang dilakukan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya kepada masyarakat (sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 dan tata tertib DPRD Kota Manado langsung kepada masyarakat melalui petemuan reses. Biasanya anggota DPRD menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan oleh DPRD. Demikian pernyataan informan DR:

Langsung kepada masyarakat melalui petemuan reses. Biasanya anggota DPRD menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan oleh DPRD. (Wawancara, 27-10-2015)

Selanjutnya terkait bagaimana model pertanggungajawaban politik atau akuntabilitas politik yang dijalankan DPRD kepada masyarakat belum semua anggota dewan bisa mempertanggungjawabkannya. Banyak yang belum mengetahui dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD Manado. Banyak yang kurang aktif, hanya hadir, ikut dalam rapat-rapat mengisi absen lalu diam dan pergi. Belum terdengar suara dan gagasannya dan pemikirannya yang berhubungan dengan materi pembahasan. Ada yang kurang tahu menahu apa dan bagaimana kedudukannya, apa hak dan kewajibannya. Lebih terlihat mereka kurang siap menjadi anggota Dewan dalam arti kurang siap menjalankan tugas dan fungsinya. Demikian pernyatan informan “HK”:

Belum semua anggota dewan bisa mempertanggungjawabkannya, semua kembali pada masalah kepribadian diri sendiri. Banyak yang belum mengetahu dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD Manado. Banyak yang tidak aktif, hanya hadir, ikut dalam rapat-rapat mengisi absen lalu diam dan pergi. Tidak terdengarn suaranya dan gagasannya dan pemikirannya yang berhubungan dengan materi pembahasan. Ada yang tidak tahu menahu apa dan bagaimana kedudukannya, apa hak dan kewajibannya. Lebih terlihat mereka tidak siap menjadi anggota Dewan dalam arti tidak siap menjalankan tugas dan fungsinya. (Wawancara, 14-09-2015)

Banyak faktor sebagai penyebabnya antara lain karena tingkat pendidikan yang dimiliki, disiplin ilmu atau kompetensi yang kurang, latar belakang pekerjaan sebelum menjadi anggota DPRD juga pengalaman yang kurang. Sebenarnya menurut saya anggota dewan wajib memahami fungsi legislasi hanya saja paling banyak hanya 25% yang memahami, bahkan ada juga pimpinan DPRD yang tidak memahami fungsi legislasi. Mestinya anggota dewan harus siap dan konsekuensinya partai politik haris memperhatikannya. Ada anggota yang kemampuan dan kompetensinya datar-datar saja atau kurang. Demikian pernyatan informan “BP”:

Belum semua anggota dewan bisa mempertanggungjawabkannya, semua kembali pada masalah pribadi diri sendiri. Belum semua anggota DPRD Manado memahami kedudukan dia sebagai anggota Dewan apalagi kalau ditanya tentang apa tugas dan fungsi DPRD ada yang tidak mampu menjawabnya. Banyak faktor sebagai penyebabnya antara lain karena tingkat pendidikan yang dimiliki, disiplin ilmu, latar belakang pekerjaan sebelum menjadi anggota DPRD juga pengalaman yang kurang. Sebenarnya menurut saya anggota dewan wajib memahami fungsi legislasi hanya saja paling banyak hanya 25% yang memahami, bahkan ada juga pimpinan DPRD yang tidak memahami fungsi legislasi. Mestinya anggota dewan harus siap dan konsekuensinya partai politik haris memperhatikannya. Ada anggota yang kemampuan dan kompetensinya datar-datar saja atau kurang. (Wawancara, 14-09-2015)

Model pertanggungjawaban politik atau akuntabilitas politik yang dijalankan DPRD kepada masyarakat, pertanggungjawaban politik DPRD Kota Manado kepada masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Demikian pernyatan informan JK:

Pertanggungjawaban politik DPRD Kota Manado kepada masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. (Wawancara, 21-09-2015)

Model pertanggungajawaban politik atau akuntabilitas politik yang dijalankan DPRD kepada masyarakat belum maksimal DPRD masih kurang menghasilkan Perda inisiatif. Demikian pernyatan informan NT:

Belum maksimal DPRD masih kurang menghasilkan Perda inisiatif. (Wawancara, 29-09-2015)

Pertanggungjawaban politik atau akuntabilitas politik yang dijalankan DPRD kepada masyarakat masih jauh. DPRD masih terlalu mementingkan kepentingan mereka sendiri terbukti mereka kurang berpihak pada masyarakat dengan minimnya Perda inisiatif. Dari Perda inisiatif DPRD dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dia wakili namun kenyataannya tidak seperti itu?Demikian pernyatan informan “DS”:

Masih jauh, DPRD masih terlalu mementingkan kepentingan mereka sendiri terbukti mereka kurang berpihak pada masyarakat dengan minimnya perda inisiatif. Menurut saya, sebenarnya dari perda inisiatif DPRD dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dia wakili namun kenyataannya tidak seperti itu. (Wawancara, 29-09-2015)

Pertanggungjawaban politik atau akuntabilitas politik yang dijalankan DPRD kepada masyarakat belum dijalankan secara baik oleh DPRD, karena salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi dengan tugas membentuk Perda termasuk didalamnya membentuk Perda inisiatif tidak dijalankan sepenuhnya oleh DPRD. Demikian pernyatan informan “DM”:

Belum dijalankan secara baik oleh DPRD, karena salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi dengan tugas membentuk Perda termasuk didalamnya membentuk Perda inisiatif tidak dijalankan sepenuhnya oleh DPRD. (Wawancara, 07-10-2015)

Model pertanggungjawaban politik atau akuntabilitas politik yang dijalankan DPRD pada masyarakat dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat melaui pembahasan Perda termasuk Perda inisiatif oleh beberapa informan sebelumnya memiliki kesamaan dengan yang dinyatakan oleh informan SL, MM, SS, dan DR.

Secara keseluruhan DPRD Kota Manado sesuai dengan tugas dan fungsinya salah satu adalah fungsi legislasi atau sebagai pembentuk Perda. Untuk periode 2019 – 2014 telah menjalankan tugasnya walaupun diakui bahwa ada beberapa Ranperda inisiatif yang sudah diprogramkan tetapi tidak terealisasi sesuai dengan agenda yang telah diprogramkan. Performance DPRD sangat ditentukan juga oleh sumberdaya yang dimiliki dalam hal ini adalah salah satunya terletak pada kemampuan sumberdaya manusia yang ada. Produktivitas kerja lembaga ini sebagai lembagai politik dapat dilihat dari seberapa banyak Ranperda yang dibahas kemudian ditetapkan menjadi Perda sesuai dengan Prolegda. Sepanjang DPRD Manado periode 2009 – 2014, hanya2 (dua) Perda inisiatif telah dihasilkan namun tidak maksimalnya DPRD Manado melahirkan Perda inisiatif itu juga banyak disebabkan oleh sumberdaya manusia yang ada dan keterbatasan anggaran yang ada. Masih banyak anggota Dewan yang kurang serius, kurang peduli, kurang memiliki kemampuan, kompetensi untuk menjadi sebagai katalisator, penyambung lidah rakyat yang diwakilihnya, rakyat yang sudah memilihnya untuk memperjuangkan aspirasi kepentingan masyarakat didaerah pemilihannya. Ada yang hanya mengejar gaji, juga kurang peduli dengan hak sebagai anggota Dewan dalam hal ini hak mengajukan Ranperda, hak menyatakan pendapat dll.

Temuan yang ada pertanggungjawaban politik atau akuntabilitas politik yang dijalankan DPRD kepada masyarakat belum dijalankan secara baik oleh DPRD, karena salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi dengan tugas membentuk Perdatermasuk didalamnya membentuk Perda inisiatif tidak dijalankan sepenuhnya oleh DPRD Kota Manado.

Kesimpulan dari keseluruhan indikator yang ada pada fokus satu Sub Fokus*Openness,*keterbukaan atas informasi dan partisipasi). Adapun yang dapat disimpulkan dari keseluruhan indikator yang ada pada indikator *Openness,* ini bahwabelum adanya keterbukaan dari DPRD Kota Manado terkait dengan proses agenda pengajuan, pembahasan dan penetapan setiap Perda kepada publik atau masyarakat. Seharusnya Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses, lembaga dan informasi secara langsung dapat dipahami dan dapat dimonitor dukungan DPRD Kota Manado terhadap tranparansi atau keterbukaan kepada publik ditunjukkan melalui keterbukaan disetiap pelaksanaan kebijakan. Untuk jelasnya dapat disimpulkan sesuai temuan pada indikator-indikator dibawah ini:

*Parliementary questions times*, DPRD Kota Manado belum sepenuhnya memberikan kesempatan bagi publik untuk mengetahui tentang materi dan agenda kerja DPRD Kota Manado dalam pembahasan Perda. Jika ada hal tersebut bukanlah inisiatif dari DPRD Kota Manado. *Openness* belum terlaksana dengan baik di DPRD Kora Manado dimana seharusnya perlu adanya keterbukaan dari DPRD Kota Manado terkait dengan proses agenda pengajuan, pembahasan dan penetapan setiap Perda kepada publik atau masyarakat. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat dipahami dan dapat dimonitor dukungan DPRD Kota Manado terhadap tranparansi atau keterbukaan kepada publik ditunjukkan melalui keterbukaan disetiap pelaksanaan kebijakan.

*Public information service*, belum optimalnya pelayanan informasi bagi masyarakat terkait tentang agenda-agenda dan materi pembahasan Perda.Pelayanan informasi bagi masyarakat seperti pusat informasi lewat media internet atau secara formal yang dilakukan terkait pada agenda dan materi pembahasan perda dalam menjalankan fungsi legislasi, menjadi masalah disebabkan karena masalah anggaran dan kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh DPRD. Pelayanan informasi bagi masyarkat seperti pusat informasi lewat media internet yang secara formal dilakukan terkait agenda dan materi pembahasan Perda dalam menjalankan fungsi legislasi belum dilaksanakan.

*Freedom of Information Laws,* bahwa masyarakat belum diberikan kebebasan untuk mendapatkan informasi terkait dengan berbagai produk Perda yang ditetapkan oleh DPRD Kota Manado. Hal tersebut lebih disebabkan oleh keterbatasan dana untuk biaya penggandaan dan percetakannya yang tidak tersedia, disamping itu juga karena Dewan berpandangan untuk sosialisasi dan penyebarluasan tentang berbagai produk Perda itu adalah urusan pihak eksekutif.

*Public Hearings*, belum maksimalnya pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dalam penjaringan aspirasi sebelum atau sesudah Perda inisiatif ditetapkan tidak dilakukan.Dalam pembahasan Perda khususnya Perda inisiatif biasanya bukan pertemuan untuk penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pansus tapi sifatnya Pansus yang mengundang pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan materi Perda untuk maksud meminta penjelasan, meminta keterangan atau data oleh Pansus. Dengan kata lain bahwa secara rutin dan terencana belum ada, yang ada bersifat insidentil dan berdasarkan kebutuhan.

*Annual Reports,* model pertanggunjawaban politik DPRD Kota Manado kepada publik belum dilaksanakan secara baik, hal ini dapat dilihat dari kurangnya produk Perda inisiatif DPRD Kota Manado. Tugas dan fungsi Dewan adalah membentuk Perda dan harusnya DPRD kaya dengan Produk Perda termasuk dalam hal ini adalah Perda inisiatif, namun hal tersebut kurang dilahirkan oleh DPRD Kota Manado.

Tabel 5.6 Temuan Sub Fokus *Openness*

(keterbukaan atas informasi dan partisipasi)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fokus:Proses Akuntabilitas Politik Pada DPRD Kota Manado dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah  Sub Fokus : *Openness* (keterbukaan atas informasi dan partisipasi) | | |
| Indikator | Temuan | Ket |
| *Parliementary questions times* | 1. Belum terlaksana dengan baik di DPRD Kota Manadodimana seharusnya perlu adanya keterbukaan dari DPRD Kota Manado terkait dengan proses agenda pengajuan, pembahasan dan penetapan setiap Perda kepada publik atau masyarakat. | Belum sesuai harapan yang ada |
| *Public information service* | 1. Belum optimalnya pelayanan informasi bagi masyarakat terkait tentang agenda-agenda dan materi pembahasan Perda, 2. Masalah anggaran dan kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh DPRD. Pelayanan informasi bagi masyarkat seperti pusat informasi lewat media internet yang secara formal dilakukan terkait agenda dan materi pembahasan Perda dalam menjalankan fungsi legislasi belum dilaksanakan. | Belum sesuai harapan yang ada |
| *Freedom of Information Laws* | 1. Masyarakat belum menikmati kebebasan mendapatkan informasi berbagai produk Perda yang telah ditetapkan 2. Kurangnya dana untuk biaya percetakan dan pengadaan | Belum sesuai harapan yang ada |
| *Public Hearings* | 1. Belum maksimalnya pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dalam penjaringan aspirasi sebelum atau sesudah Perda inisiatif ditetapkan tidak dilakukan. 2. Secara rutin dan terencana belum ada, yang ada bersifat insidentil dan berdasarkan kebutuhan. | Belum sesuai harapan yang ada |
| *Annual Reports* | 1. Model pertanggungjawaban politik belum dilaksanakan secara baik kepada publik 2. Produk Perda terutama Perda inisiatif kurang | Belum optimal sesuai harapan |

Sumber: Diolah Peneliti dari hasil Penelitian (2016)

1. *Optimal Resources Utilization*

*Optimal resourcesutilization*, adanya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh DPRD secara optimal. Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi oleh penyelenggara pemerintahan merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukan kepada publik atau masyarakat. Hal ini dilatari oleh tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki merupakan amanat yang diberikan oleh rakyat sebagai pemilik kekuasaan dan pemegang kedaulatan yang dijamin oleh konstitusi. Sebab itu penyelenggaran pemerintahan dengan kekuasaan dan kewenangan yang diberikan melalui proses sistem demokrasi dan dengan penggunaan sumberdaya keuangan yang bersumber dari masyarakat berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan (*accountability*) kepada publik atau masyarakat itu sendiri. Akuntabilitas menjadi landasan bagi proses untuk penyelenggaraan kepemerintahan (*good governance*) dan keberadaannya menentukan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang benar-benar akuntabel. Akuntabilitas keuangan, artinya bahwa pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat dalam anggaran belanjanya

1. *Budgets*

*Buedget****s*** adalah terkait proses penganggaran. Akuntabilitas menunjuk pada kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk memberi pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan/atau pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Sebab itu akuntabilitas merupakan faktor yang dapat mengukur segala tindak-tanduk seseorang atau unit organisasi publik dalam menjalankan kewajibannya secara bertanggungjawab. Akuntabilitas ini yang menilai, adalah orang atau institusi yang berada diluar dirinya. Karenanya akuntabilitas ini, sering disebut sebagai tanggungjawab yang bersifat obyektif (*objective responsibility*). Responsibilitas obyektif ini bersumber kepada adanya pengawasan (*external control*) yang mendorong, atau memotivasi aparat untuk bekerja keras, sehingga prinsip *economy, efficiency, and effectiveness* dari organisasi pemerintah dapat dikatakan *accountable*, apabila mereka dinilai secara obyektif oleh orang (masyarakat atau melalui wakilnya) dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sikap, dan tindakannya kepada pihak mana kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki itu berasal. Eksekutif harus mempertanggungjawabkan implementasi kebijakan yang dilakukan kepada lembaga legislatif. Secara keseluruhan DPRD dan pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada masyarakat luas. Akuntabilitas proses memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas-aktivitas organisasi, sebab rakyat yang *notabene* pemegang kekuasaan, selayaknya memiliki kemampuan untuk menolak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi riil. Namun seringkali mereka menjadi tidak berdaya untuk melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang nyata-nyata sudah merugikan mereka. Untuk itu perlu dipertimbangkan masalah etika dan moral setiap kebijakan pemerintah serta pelaksanaannya, serta bagaimana dampaknya pada kondisi sosial.

Untuk mengetahui lebih lanjut peneliti menanyakan kepada beberapa informan terkait mengenai Bagaimana proses penganggaran dalam pembentukan Perda inisiatif oleh DPRD per Perda? Demikian pernyataan informan HK:

Diusulkan bersamaan dengan pengajuan Prolegda dan pada saat pengusulan dan pembahasan APBD. (Wawancara,14-00-2015)

Proses penganggaran dalam pembentukan Perda inisiatif oleh DPRD per perda diusulkan bersamaan dengan pengajuan Prolegda dan pada saat pengusulan dan pembahasan APBD. Bagaimanakah proses penganggaran dalam pembentukan Perda oleh DPRD per Perda. Demikian pernyatan informan BP:

Proses penganggaran dalam pembentukan Perda oleh DPRD per Perda Proses penganggaran setiap tahun. (Wawancara, 14-09-2015)

Bagaimana proses penganggaran dalam pembentukan Perda oleh DPRD per Perda? Demikian pernyatan informan “JK”:

Hal itu dilakukan oleh sekretariat DPRD dan setahu saya penyusunan Prolegda sekalian dengan estimasi anggarannya dilaksanakan sebelum penyusunan dan pembahasan APBD. Biaya satu perda berkisar 200-300 juta. (Wawancara, 21-09-2015)

Proses penganggaran dalam pembentukan Perda oleh DPRD per Perda itu tugasnya dari pihak skretariat DPRD Kota Manado dengan menunjuk pada jumlah Perda yang masuk dalam Prolegda. Setelah Prolegda ditetapkan oleh pimpinan DPRD Manado baru kemudian disusun estimasi anggaran yang dibutuhkan. Jadi perencanaan dan pengelolaan anggaran pembentukan Perda itu dilakukan oleh pihak sekretariat DPRD dibawah kordinasi oleh Sekwan dan dibahas bersama dengan pimpinan DPRD Manado. Demikian pernyatan informan “NT”:

Itu tugasnya dari pihak skretariat DPRD Kota Manado dengan menunjuk pada jumlah Perda yang masuk dalam Polegda. Setelah Prolegda ditetapkan oleh pimpinan DPRD Manado baru kemudian disusun estimasi anggaran yang dibutuhkan. Jadi perencanaan dan pengelolaan anggaran pembentukan Perda itu dilakukan oleh pihak sekretariat DPRD dibawah kordinasi oleh Sekwan dan dibahas bersama dengan pimpinan DPRD Manado. (Wawancara, 29-09-2015)

Proses penganggaran dalam pembentukan Perda oleh DPRD per Perda itu harus diusulkan oleh pimpinan DPRD dan Sekwan dalam Prolegda dan APBD setiap pembentukan Perda termasuk perda inisiatif yang berasal dari DPRD. Demikian pernyatan informan DS:

Itu harus diusulkan oleh pimpinan DPRD dan sekwan dalam Prolegda dan APBD setiap pembentukan perda termasuk perda inisiatif yang berasal dari DPRD. (Wawancara, 29-09-2015)

Pengajuan anggaran untuk pembentukan Perda insiatif dilakukan oleh DPRD. Biasanya sudah ditata dalam APBD induk untuk jumlah anggarannya dan itu masuk dalam pos DPRD Manado khusus untuk pembentukan Perda inisiatif. Total pos anggaran tersebut nanti kemudian dijabarkan dalam mata-mata anggaran dengan kegiatan-kegiatan kerja atau program terutama untuk pembentukan Perda inisiatif. Jadi pengelolaan anggaran tersebut ada di DPRD dalam hal ini oleh sekretariat DPRD Manado. Jadi alokasi biaya pembentukan Perda sudah ditata dalam APBD realisasi penggunaan disesuaikan dengan kegiatan dan program pembentukan Perda inisiatif. Biaya anggaran per Perda rata-rata disekitar 200 juta sampai 300 juta adalah bagian dari proses penganggaran dalam pembentukan Perda oleh DPRD per Perda. Demikian pernyatan informan “DM”:

Pengajuan anggaran untuk pembentukan Perda insiatif dilakukan oleh DPRD. Biasanya sudah ditata dalam APBD induk untuk jumlah anggarannya dan itu masuk dalam pos DPRD Manado khusus untuk pembentukan Perda inisiatif. Total pos anggaran tersebut nanti kemudian dijabarkan dalam mata-mata anggaran dengan kegiatan-kegiatan kerja atau program terutama untuk pembentukan Perda inisiatif. Jadi pengelolaan anggaran tersebut ada di DPRD dalam hal ini oleh sekretariat DPRD Manado. Jadi alokasi biaya pembentukan perda sudah ditata dalam APBD realisasi penggunaan disesuaikan dengan kegiatan dan program pembentukan Perda inisiatif. Biaya anggaran per Perda rata-rata disekitar 200 juta sampai 300 juta. (Wawancara, 07-10-2015)

Proses penganggaran dalam pembentukan Perda oleh DPRD per Perda, rata-rata biaya pembuatan Perda itu setiap Perda berkisar di 200-300 juta. Anggrannya masuk dalam pos di DPRD Kota Manado untuk pembentukan Perda inisiatif. Biasanya itu sudah tertata dalam APBD yang diajukan oleh Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kota Manado dengan sebelumnya berkordinasi dengan pimpinan DPRD. Karena DPRD juga adalah merupakan SKPD, maka pengelolaan anggaran di DPRD langsung oleh bagian sekretariat dalam hal ini bagian keuangan DPRD Kota Manado. Jadi seluruh kebutuhan anggaran dan pengelolaan keuangan itu ditangani oleh pihak sekretariat DPRD Kota Manado termasuk untuk anggaran pembentukan Perda inisiatif dikelolah oleh pihak bagian keuangan sekretariat DPRD Kota Manado. Demikian pernyataan informan “MM”:

Rata-rata biaya pembuatan Perda berkisar di 200-300 juta per Perda. Anggrannya masuk dalam pos di DPRD Kota Manado untuk pembentukan Perda inisiatif. Biasanya itu sudah tertata dalam APBD yang diajukan oleh Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kota Manado dengan sebelumnya berkordinasi dengan pimpinan DPRD. Karena DPRD juga adalah merupakan SKPD, maka pengelolaan anggaran di DPRD langsung oleh bagian sekretariat dalam hal ini bagian keuangan DPRD Kota Manado. Seluruh kebutuhan anggaran dan pengelolaan keuangan itu ditangani oleh pihak sekretariat DPRD Kota Manado termasuk untuk anggaran pembentukan Perda inisiatif dikelolah oleh pihak bagian keuangan sekretariat DPRD Kota Manado. (Wawancara, 23-10-2015)

Pernyataan dari informan-informan sebelumnya sejalan juga dengan yang disampaikan oleh informan lainya seperti DL, DR dan RS.

Dari data keseluruhan dapat dipaparkan bahwa proses penganggaran dalam pembentukan Perda inisiatif oleh DPRD diusulkan bersamaan dengan pengajuan Prolegda dan pada saat pengusulan dan pembahasan APBD yang disampaikan oleh pimpinan DPRD dan Sekwan dalam Prolegda dan APBD setiap pembentukan Perda termasuk Perda inisiatif yang berasal dari DPRD. Pengajuan anggaran untuk pembentukan Perda insiatif dilakukan oleh DPRD. Biasanya sudah ditata dalam APBD induk untuk jumlah anggarannya dan itu masuk dalam pos DPRD Manado khusus untuk pembentukan Perda inisiatif. Total pos anggaran tersebut nanti kemudian dijabarkan dalam mata-mata anggaran dengan kegiatan-kegiatan kerja atau program terutama untuk pembentukan Perda inisiatif. Jadi pengelolaan anggaran tersebut ada di DPRD dalam hal ini oleh sekretariat DPRD Manado. Jadi alokasi biaya pembentukan Perda sudah ditata dalam APBD dan realisasi penggunaan disesuaikan dengan kegiatan dan program pembentukan Perda inisiatif. Biaya anggaran per Perda rata-rata disekitar 200 juta sampai 300 juta adalah bagian dari proses penganggaran dalam pembentukan Perda oleh DPRD per Perda.

Karena DPRD juga adalah merupakan SKPD, maka pengelolaan anggaran di DPRD langsung oleh bagian sekretariat dalam hal ini bagian keuangan DPRD Kota Manado. Jadi seluruh kebutuhan anggaran dan pengelolaan keuangan itu ditangani oleh pihak sekretariat DPRD Kota Manado termasuk untuk anggaran pembentukan Perda inisiatif dikelolah oleh pihak bagian keuangan sekretariat DPRD Kota Manado.

Selanjutnya menegenai prosesnya: Pertama menyusun Prolegda dan dalam Prolegda itu juga sudah ada estimasi anggaran. Sebab itu penyusunan Prolegda ditetapkan satu tahun sebelumnya dan juga sebelum pembahasan APBD tahun berikutnya. Setiap usulan Perda inisiatif sudah juga diikuti oleh usulan anggarannya yang diajukan oleh Balegda bersama-sama dengan pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Manado proses penganggaran dalam pembentukan Perda inisiatif oleh DPRD per Perda.

1. *Financial Procedures*

*Financial procedures*, berkaitan dengan prosedur keuangan.Akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Akuntabilitas menjadi landasan bagi proses untuk penyelenggaraan kepemerintahan (*good governance*) dan keberadaannya menentukan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang benar-benar akuntabel.

Selanjunya prosedur keuangan yang dianggarkan dalam pembentukan Ranperda sampai pada penetapan Perda setiap tahun sebelum tahun anggaran dilakukan pembahasan termasuk Prolegda yang didalamnya berisi tentang berapa Ranperda yang akan dibahas pada tahun berikutnya. Termasuk dalam hal ini Ranperda usulan dari DPRD Kota Manado kemudian itu dikoordinasikan bersama secara internal DPRD Manado. Proses prosedur keuangan anggaran Ranperda DPRD diatur oleh DPRD itu sendiri. Artinya pengusulan anggaran juga dilakukan oleh sekretariat DPRD dibawah kordinasi Sekretaris DPRD Kota Manado. Demikian pernyatan informan “HK”:

Setiap tahun sebelum tahun anggaran dilakukan pembahasan termasuk program legislasi daerah (Prolegda) yang didalamnya berisi tentang berapa Ranperda yang akan dibahas pada tahun berikutnya. Termasuk dalam hal ini Ranperda usulan dari DPRD Kota Manado kemudian itu dikoordinasikan bersama secara internal DPRD Manado. Dan biasanya anggaran sebuah Ranperda berkisar 200 juta hingga 300 juta per Perda. Proses prosedur keuangan anggaran Ranperda DPRD diatur oleh DPRD itu sendiri. Artinya pengusulan anggaran juga dilakukan oleh sekretariat DPRD dibawah kordinasi Sekretaris DPRD Kota Manado. (Wawancara, 14-09-2015)

Bagaimanakah prosedur keuangan yang dianggarkan dalam pembentukan Ranperda sampai pada penetapan Perda? Demikian pernyatan informan BP:

Proses penganggaran Perda selalu ada dan include bersama-sama dengan anggaran per Perda sekitar 300 juta. (Wawancara, 14-09-2105)

Prosedur keuangan yang dianggarkan dalam pembentukan Ranperda sampai pada penetapan Perda Setiap perda yang masuk Prolegda itu sudah ada perkiraan anggaran dan itu akan nantinya dimasukan dalam APBD. Karena itu penyusunan Prolegda disusun pada tahun sebelumnya sekaligus juga sebelum pembahasan APBD tahun berikutnya. Dan yang mengelolah nanti anggaran tersebut adalah dari sekretariat DPRD Kota Manado. Demikian pernyataan informan JK:

Setiap Perda yang masuk Prolegda itu sudah ada perkiraan anggaran dan itu akan nantinya dimasukan dalam APBD. Karena itu penyusunan Prolegda disusun pada tahun sebelumnya sekaligus juga sebelum pembahasan APBD tahun berikutnya. Dan yang mengelolah nanti anggaran tersebut adalah dari sekretariat DPRD Kota Manado. (Wawancara, 21-09-2105)

Prosedur keuangan dianggarkan dalam pembentukan Ranperda sampai penetapan Perda dimana harus ada Prolegda dahulu dari situ akan dilihat berapa banyak Ranperda yang akan dibahas termasuk Ranperda inisiatif dan dari situ disusun kebutuhan anggarannya oleh bagian sekretariat dibawah pimpinan oleh Sekretaris DPRD dan diajukan dan dibahas lagi bersama dengan pimpinan DPRD dan diusulkan nanti dalam APBD. Demikian pernyatan informan “NT”:

Prosedurnya itu sepertu yang saya jelaskan sebelumnya, dimana harus ada prolegda dulu dari situ akan dilihat berapa banyak Perda yang akan dibahas termasuk Perda inisiatif dan dari situ disusun kebutuhan anggarannya oleh bagian sekretariat dibawah pimpinan oleh Sekretaris DPRD dan diajukan dan dibahas lagi bersama dengan pimpinan DPRD dan diusulkan nanti dalam APBD. (Wawancara, 29-09-2015)

Prosedur keuangan yang dianggarkan dalam pembentukan Ranperda inisiatif sampai pada penetapan Perda insiatif. Pembentukan Perda inisiatif ada anggarannya yang masuk pada pos DPRD khusus pembentukan Perda inisiatif yang diusulkan oleh sekwan bersama pimpinan DPRD. Anggaran itu mencakup keseluruhan kegiatan proses penyiapan hingga pada pembahasan dan penetapan Perda inisiatif. Demikian pernyatan informan DS:

Setiap pembentukan Perda inisiatif ada anggarannya yang masuk pada pos DPRD khusus pembentukan Perda inisiatif yang diusulkan oleh sekwan bersama pimpinan DPRD. Anggaran itu mencakup keseluruhan kegiatan proses penyiapan hingga pada pembahasan dan penetapan Perda inisiatif. (Wawancara, 29-09-2015)

Prosedur keuangan yang dianggarkan dalam pembentukan Ranperda sampai pada penetapan Perda anggaran pembentukan Perda diajukan oleh Balegda dan disampaikan kepada pimpinan DPRD yang dibahas bersama dengan sekretaris DPRD Kota Manado untuk nanti diajukan atau diusulkan dalam APBD. Hal ini sejalan juga dengan jawaban dari informan SL, MM, SS, DR, RS.

Pernyataan dari HK dan BP, juga sama yang disampaikan oleh informan JK, NT, DS, DM, JD.

Dari data keseluruhan dapat dipaparkan bahwa prosedur keuangan yang dianggarkan dalam pembentukan Ranperda sampai pada penetapan Perda setiap tahun sebelum tahun anggaran dilakukan pembahasan termarmasuk Prolegda yang didalamnya berisi tentang berapa Ranperda yang akan dibahas pada tahun berikutnya. Termasuk dalam hal ini Ranperda usulan dari DPRD Kota Manado kemudian itu dikoordinasikan bersama secara internal DPRD Manado. Dan biasanya anggaran sebuah Ranperda berkisar 200 juta hingga 300 juta per Perda. Proses prosedur keuangan anggaran Ranperda DPRD diatur oleh DPRD itu sendiri. Artinya pengusulan anggaran juga dilakukan oleh sekretariat DPRD dibawah kordinasi Sekretaris DPRD Kota Manado.Setiap pembahasan Perda inisiatif yang memiliki konsekuensi anggaran itu diselesaikan oleh bagian keuangan sekretariat DPRD. Menyangkut administrasi keuangannya ditangani oleh bagian sekretariat dan diajukan dibagian keuangan. Makanya setiap komisi memiliki staf sekretariat mereka yang mengurusnya semua aktivitas kegiatan dan kebutuhan komisi atau seluruh alat kelengkapan DPRD.

1. *Parliamentory Public Accounts Commitees*

*Parlieamentary public accounts commitees*, berhubungan dengan penyampaian keuangan institusi DPRD kepada masyarakat. Akuntabilitas merupakan aktivitas untuk memberikan penjelasan dan alasan pembenaran atas tindakan (cara) yang dilakukan dalam menggunakan kekuasaan, dan mengambil tindakan korektif ketika terjadi kesalahan. Pengertian ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang makna akuntabilitas. Artinya, akuntabilitas tidak sekedar mencakup aktivitas untuk memberikan penjelasan atas tindakan yang telah dilakukan, namun juga mencakup kegiatan melakukan koreksi terhadap tindakan yang dinilai sah atau tidak tepat.

Selanjutnya pertanyaan diajukan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyampaian laporan keuangan oleh setiap komisi ketika menjalankan fungsinya kepada masyarakat? Demikian pernyatan informan “HK”:

Komisi menyampaikan laporan kegiatan kunjungan komisi dan kalau untuk Ranperda itu sudah di Balegda. Pertangungjawaban keuangan komisi diserahkan pada panitia khusus di Baleg. (Wawancara, 14-09-2011)

Bentuk penyampaian disetiap komisi dalam laporan keuangan ketika menjalankan fungsi masing kepada masyarakat Komisi menyampaikan laporan kegiatan kunjungan Komisi dan kalau untuk Ranperda itu sudah di Balegda. Pertangungjawaban keuangan Komisi diserahkan pada panitia khusus di Balegda dan selanjutnya pemeriksaan keuangan langsung dipertanggungjawabkan oleh lembaga DPRD. Demikian pernyatan informan “BP”:

Pemeriksaan keuangan langsung dipertanggungjawabkan oleh lembaga DPRD. (Wawancara, 14-09-2015)

Bentuk penyampaian disetiap Komisi dalam laporan keuangan ketika menjalankan fungsi masing-masing kepada masyarakat, Komisi tidak mengelolah keuangan. Jadi untuk pengelolaan keuangan kegiatan DPRD termasuk untuk kegiatan-kegiatan Komisi atau seluruh alat kelengkapan DPRD Manado itu langsung dari sekretariat. Demikian pernyatan informan “JK”:

Komisi setahu saya tidak mengelolah keuangan. Jadi untuk pengelolaan keuangan kegiatan DPRD termasuk untuk kegiatan-kegiatan komisi atau seluruh alat kelengkapan DPRD Manado itu langsung dari sekretariat. (Wawancara, 21-09-2015)

Pernyataan informan JK sejalan dengan pernyataan informan JD, NT, DS, DM, SL, MM, SS, DR dan RS.

Dari data keseluruhan yang dipaparkan bentuk penyampaian disetiap Komisi dalam laporan keuangan ketika menjalankan fungsi masing kepada masyarakat diserahkan pada panitia khusus di Balegda dan selanjutnya pemeriksaan keuangan langsung dipertanggungjawabkan secara kelembagaan DPRD. Jadi untuk pengelolaan keuangan kegiatan DPRD termasuk untuk kegiatan-kegiatan Komisi atau seluruh alat kelengkapan DPRD Manado itu langsung dari sekretariat. Sebab itu seluruh kegiatan Komisi yang berimplikasi kebutuhan operasional keuangan itu diajukan ke bagian keuangan sekretariat Dewan setelah disetujui oleh pimpinan DPRD, termasuk mengenai urusan adminstrasi seperti administrasi keuangan dan kelengakapan surat menyurat ditangani oleh staf kesekretariatan DPRD yang ditempatkan di setiap Komisi. Termasuk dengan pelaporan keuangan ditangani oleh staf sekretariatan, anggota DPRD hanya menyerahkan berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan. Laporan kegiatan Komisi menyangkut administrasi keuangan itu langsung dilaksanakan oleh staf sekretariat DPRD, Komisi tidak mengelolah anggaran.

1. *Auditing*

*Auditing adalah* adanya pemeriksaan keuangan dalam insstitusi DPRD. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*check and balance*” dalam sistem administrasi. Akuntabilitas berarti menyelenggarakan penghitungan *(account)* terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan. Pandangan lainnya mengatakan “*accountability consists in a statuto obligation to provide*” (Salleh dan Iqbal, 1995). Dengan pengertian yang demikian, akuntabilitas memungkinkan memberi sanksi disiplin terhadap lembaga akuntabilitas, mengkritik kesalahannya, dan memberi kontribusi terhadap administrasi umum. Akuntabilitas politik yang berhubungan dengan proses penerimaan mandat yang diterima dari rakyat maupun oleh amanat sesuai dengan peraturan yang ada oleh DPRD harus dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat dalam penyelenggaraan kepemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya

Untuk mengetahui lebih lanjut ditanyakan apakah ada pemeriksaan keuangan dalam institusi atau lembaga DPRD Manado? Demikian pernyatan informan HK:

Pemeriksaan keuangan dilaksanakan oleh Inspektorat dan BPK. (Wawancara, 14-09-2015)

Pernyataan dari informan HK sama juga yang dinyatakan oleh informan JD, BP, JK, SL, DS, DM, MM, SS, DL, RS, dan NT. Jadi ada yang melakukan pemeriksaan keaungan DPRD Kota Manado yaitu Inspektoran dan BPK.

Bagaimana opini yang dikeluarkan oleh lembaga auditing mengenai kelembagaan DPRD Manado? Demikian pernyatan informan DM:

DPRD Manado sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) maka juga merupakan bagian dari pemerintah Kota Manado dan opini hasi pemeriksaan BPK untuk pemerintah Kota Manado termasuk didalamnya adalah institusi DPRD Manado pada tahun 2010 s.d 2013 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan tahun 2014 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). (Wawancara, 07-10-2015)

DPRD Manado sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) maka juga merupakan bagian dari pemerintah Kota Manado dan opini hasil pemeriksaan BPK untuk pemerintah Kota Manado termasuk didalamnya adalah institusi DPRD Manado pada tahun 2010 s.d 2013 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan tahun 2014 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Bagaimana hasil opini yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut? Demikian pernyataan informan SL:

WDP. (Wawancara, 23-10-2015)

Apakah opini yang dikeluarkan oleh lembaga auditing mengenai kelembagaan DPRD Manado? Demikian pernyatan informan MM:

Ini kalau DPRD Periode 2009-2014 kalau tidak salah sebelumnya WDP dan terakhir WTP. (Wawancara, 23-10-2015)

Apakah opini yang dikeluarkan oleh lembaga auditing mengenai kelembagaan DPRD? Demikian pernyatan informan SS:

Kalau BPK untuk DPRD periode lalu kalau tidak salah opininya dari disclaimer terus WDP itu kolektif untuk pemerintah Kota Manado termasuk DPRD Kota Manado. Mudah-mudahan tidak salah ya. (Wawancara, 26-10-2015)

Apakah opini yang dikeluarkan oleh lembaga audit mengenai kelembagaan DPRD Kota Manado? Demikian pernyatan informan DR:

Kalau tidak salah waktu itu bersama-sama dengan pemerintah kota adalah WDP. (Wawancara, 27-10-2015)

Apakah opini yang dikeluarkan oleh lembaga auditing mengenai kelembagaan DPRD. Demikian pernyataan informan RS:

Temuan ada pada biaya perjalanan. Banyak alasan yang diberikan seperti untuk mengadakan reses sehingga mendapatkan anggaran. (Wawancara, 22-12-2015)

Data keseluruhan dapat dideskripsikan bahwa pemeriksaan keuangan dilaksanakan oleh Inspektorat dan BPK. DPRD Manado sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) maka juga merupakan bagian dari pemerintah Kota Manado dan opini hasil pemeriksaan BPK untuk pemerintah Kota Manado termasuk didalamnya adalah institusi DPRD Manado pada tahun 2010 s.d 2013 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

1. *Public Enquiries and Participation*

*Public enqiries*, adanya partisipasi dan pengamatan dari masyarakat. media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek kemudahan pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung. Dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain, yaitu: siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas, kepada siapa dia berakuntabilitas, apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitas, dan nilai akuntabilitas itu sendiri.akuntabilitas hakekatnya adalah suatu kewajiban penerima mandat baik orang perorang, atau badan/organisasi yang mendapatkan amanah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mempertanggungjawabkannya terkait dengan pelaksanaan kebijakan, pengelolalan, dan pengendalian sumberdaya dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melaui media pertanggungjawaban secara terencana. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Proses pembentukan peraturan daerah bagi setiap Kabupaten dan Kota termasuk di Kota Manado unsur keterlibatan masyarakat melalui partisipasi masyarakat juga merupakan hak publik secara normatif. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 96: (1) masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, (2) masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui: (a) rapat dengar pendapat umum, (b) kunjungan kerja, (c) sosialisasi, dan/atau, (d) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi, (3) masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan-Perundang-undangan, (4) untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimna dimaksud pada ayat 1, setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Senada juga dengan itu dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 juga diatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Kemudian dalam penjelasan Pasal 139 Ayat 1 tersebut mengemukakan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Dari berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa: (1) masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan dalam rangka penyiapan penyusunan dan pembahasan rancangan Perda, (2) masukan masyarakat dapat diberikan secara lisan maupun tertulis, dan, (3) hak tersebut dilaksanakan melalui peraturan Tata Tertib DPRD. Kemudian selanjutnya juga partisipasi masyarakat lebih lanjut diatur dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah pada Bab IX Pasal 90 (ayat 1) masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, (ayat 2) masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui (a) rapat dengar pendapat umum, (b) kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Partisipasi publik dalam proses pembentukan Perda menjadi penting dalam proses demokrasi untuk tujuan terjaminnya suatu produk politik oleh DPRD dalam bentuk Perda yang didalamnya menggambarkan pengaturan berbagai hal tentang pengelolaan persoalan kebutuhan publik.

Selanjutnya ditanyakan tentang apakah ada bentuk pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat disetiap pengambilan keputusan dalam ini pembentukan Perda oleh DPRD Manado? Demikian pernyatan informan HK:

Masyarakat selalu mengikuti selalu mengupdate lewat media-media yang ada baik cetak maupun media elektronik. Kalau secara lembaga atau organisasi seperti LSM yang secara kontinu setahu saya belum ada. Kalaupun ada bersifat perorangan yang besifat temporer. (Wawancara, 14-09-2015)

Bentuk pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat disetiap pengambilan keputusan dalam hal ini pembentukan Perda oleh DPRD.Kalau untuk ikut campur langsung tergantung materi Ranperda, apakah akan melibatkan masyarakat atau tidak. Masyarakat selalu mengikuti selalu mengupdate lewat media-media yang ada baik cetak maupun media elektronik. Kalau secara lembaga atau organisasi seperti LSM yang secara kontinu setahu saya belum ada. Kalaupun ada bersifat perorangan dan temporer. Demikian pernyatan informan BP:

Kalau untuk ikut campur langsung tergantung materi Ranperda, apakah akan melibatkan masyarakat atau tidak. (Wawancara, 14-09-2015)

Tidak ada bentuk pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat disetiap pengambilan keputusan dalam hal ini pembentukan Perda oleh DPRD Manado. Demikian pernyatan informan JK:

Setahu saya tidak ada bentuk pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat disetiap pengambilan keputusan dalam hal ini pembentukan Perda oleh DPRD Manado. (Wawancara, 21-09-15)

Tidak adanya bentuk pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat disetiap pengambilan keputusan dalam hal ini pembentukan Perda inisiatif oleh DPRD Manado disampaikan oleh informan. Demikian pernyatan informan SL:

Tidak ada bentuk pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat disetiap pengambilan keputusan dalam hal ini pembentukan Perda inisiatif oleh DPRD. (Wawancara, 23-10-15)

Apakah ada bentuk pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat disetiap pengambilan keputusan dalam hal ini pembentukan Perda inisiatif oleh DPRD? Demikian pernyatan informan DS:

Tidak ada. (Wawancara, 29-09-2015)

Data berbeda disampaikan informan yang menyatakan bahwa ada bentuk pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat pada setiap pengambilan keputusan dalam hal ini pembentukan Perda inisiatif DPRD Manado melalui LSM, tapi kepastian data tidak dijelaskan. Demikian pernyatan informan “DM”:

Setahu saya ada, hanya saja saya lupa nama LSM tersebut. (Wawancara, 07-10-15)

Apakah ada bentuk pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat disetiap pengambilan keputusan pembentukan Perda inisiatif? Demikian pernyatan informan SL:

Tidak ada. (Wawancara, 23-10-2015)

Tidak ada bentuk pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat disetiap pengambilan keputusan dalam hal ini pembentukan Perda oleh DPRD Kota Manado diakui informan, namun sama dengan informan sebelumnya yang menyampaikan bahwa kalau dari LSM, mungkin ada tapi orang-perorangan. Tetapi kalau yang bersifat tetap setahu saya tidak ada. Demikian pernyatan informan MM:

Sepertinya tidak ada, apalagi kalau dari LSM, mungkin ada tapi orang-perorangan. Tetapi kalau yang bersifat tetap setahu saya tidak ada. (Wawancara, 23-10-2015)

Adanya bentuk pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat disetiap pengambilan keputusan dalam hal ini pembentukan Perda inisiatif oleh DPRD Kota Manado dijawab informan dalam bentuk baik orang perorang maupun yang membawa atas nama oganisasi, demikian pernyatan informan SS:

Ada. Baik orang perorang maupun yang membawa atas nama oganisasi. (wawancara, 26-10-2015)

Apakah ada bentuk pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat disetiap pengambilan keputusan dalam hal ini pembentukan Perda inisiatif oleh DPRD? Demikian pernyatan informan DR:

Ada, LSM kalau tidak salah. Saya lupa. (Wawancara, 27-10-2015)

Dapat dipaparkan data keseluruhan yang menyatakan bahwa bentuk pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat disetiap pengambilan keputusan dalam hal ini pembentukan Perda oleh DPRD, tidak ada bentuk pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat namun kalau dari LSM, mungkin ada tapi orang-perorangan. Dan kalau untuk ikut campur langsung tergantung materi Ranperda, apakah akan melibatkan masyarakat atau tidak. Masyarakat hanya mengikuti lewat media-media yang ada baik cetak maupun media elektronik. Kalau secara lembagai atau organisasi seperti LSM yang secara kontinu belum ada.

1. *Formal Planning Systems*

*Formal planning systems*, adanya sistem perencanaan secara formal. Perencanaan adalah suatu keputusan untuk waktu yang akan datang tentang:apa yang akan dilakukan, bilamana akan dilakukan, siapa yang akan melakukan, bagaimana melakukannya. Perencanaan itu dapat dilihat sebagai:Suatu keputusan untuk keadaan dimasa datang. Suatu proses merumuskan tujuan dan suatu fungsi dari manajemen. Hakekat perencanaan adalah analisa, baik analisa intern maupun ekstern, baik jangka pendek maupun jangka panjang sebagai landasan untuk menyusun serangkaian tindakan pada masa mendatang dalam usaha mencapai tujuan tertentu.

Apakah ada sistem perencanaan secara formal, jika ada diatur dalam peraturan apa? Demikian pernyatan informan HK:

Peraturan tentang efektivitas, efisiensi anggaran ada tetapi tergantung pada yang mengelola. Tentang aturan formalnya saya kurang paham tentang itu. (Wawancara, 14-09-2015)

Apakah ada sistem perencanaan secara formal, jika ada diatur dalam peraturan apa, informan mengatakan bahwa sistem perencanaan formal yang mengatur tentang kinerja ada di PP No 16 Kalau dulu UU 27.Dalam peraturan DPRD, atau keputusan. Demikian pernyatan informan BP:

Sistem perencanaan formal yang mengatur tentang kinerja ada di PP No 16 Kalau dulu UU 27. (Wawancara, 14-09-2015)

Pendekatan pada sistem perencanaan keuangan negara ditinjau dari sudut pendekatan keuangan negara, Sistem perencanaan formal yang mengatur tentang kinerja ada di PP No 16 Kalau dulu UU 27, maka keuangan negara ditekankan pada segi-segi yang berkaitan dengan pengeluaran negara, pendapatan negara, perpajakan, hutang negara dan anggaran negara. Selanjutnya peneliti menanyakan pada informan yang lainnya terkait apakah ada sistem perencanaan secara formal, jika ada diatur dalam peraturan apa? Apakah dalam peraturan DPRD atau keputusan? Demikian pernyatan informan “JK”:

Tidak ada sistem perencanaan secara formal. (Wawancara, 21-09-2015)

Hal yang sama dinyatakan oleh informan NT, DS, DM, dan SL yang menyatakan ketidaktahuan terhadap regulasi yang mengatur tentang perencanaan dalam penyusunan Prolegda dan pembentukan Perda.

Temuan penelitian ini menunjukan anggota DPRD kurang memaahami terkait sistem perencanaan secara formal, dan mereka sepertinya lebih menyerahkan kepada sekretariat DPRD. Ketidakpahaman anggota DPRD terkait seperti UU Nomor 17 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 tahun 2014 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara, serta serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Disini pimpinan DPRD Kota Manado adalah sebagai manager dapat mengelola sistem perencanaan, dan memahami proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dari data diatas dapat dianalisis bahwa *Formal planning systems*, adanya sistem perencanaan secara formal. Dimana perencanaan merupakan suatu keputusan untuk waktu yang akan datang tentang:apa yang akan dilakukan, bilamana akan dilakukan, siapa yang akan melakukan, bagaimana melakukannya, belum sepenuhnya dilakukan di DPRD Kota Manado terkait sistem perencanaan secara formal. Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran negara telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran negara pada saat ini telah mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan dinamika managemen sektor publik dan tuntutan yang muncul dimasyarakat, yaitu sistem penganggaran dengan pendekatan *New Public Managemen* (NPM).

Dapat disimpulkan terkait *Optimal Resources Utilization*, bahwa belum adanya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh DPRD secara optimal. Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi oleh penyelenggara pemerintahan merupakan seharusnya menjadi suatu hal yang mutlak untuk dilakukan kepada publik atau masyarakat. Hal ini dilatari oleh tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki merupakan amanat yang diberikan oleh rakyat sebagai pemilik kekuasaan dan pemegang kedaulatan yang dijamin oleh konstitusi, namun kenyataan yang terjadi belumlah memenuhi harapan yang ada. Untuk jelasnya dibawah ini diuraikan kesimpulan yang ada pada setiap indikator, sebagai berikut:

*Buedget****s*** adalah terkaitproses penganggaran masih kurang dipahami dengan baik. Proses penganggaran dalam pembentukan Perda inisiatif oleh DPRD per Perda, seharusnya diusulkan bersamaan dengan pengajuan Prolegda dan pada saat pengusulan dan pembahasan APBD.Proses penganggaran dalam pembentukan Perda oleh DPRD per Perda itu tugasnya dari pihak sekretariat DPRD Kota Manado dengan menunjuk pada jumlah Perda yang masuk dalam Prolegda. Setelah Prolegda ditetapkan oleh pimpinan DPRD Manado baru kemudian disusun estimasi anggaran yang dibutuhkan.Proses penganggaran dalam pembentukan Perda oleh DPRD per Perda, rata-rata biaya pembuatan Perda itu setiap Perda berkisar di 200-300 juta. Anggrannya masuk dalam pos di DPRD Kota Manado untuk pembentukan Perda inisiatif. Biasanya itu sudah tertata dalam APBD yang diajukan oleh Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kota Manado dengan sebelumnya berkordinasi dengan pimpinan DPRD.

*Financial procedures*, berkaitan dengan prosedur keuangan belum dikuasai sepenuhnya. Apalagi prosedur keuangan yang dianggarkan dalam pembentukan Ranperda sampai pada penetapan Perda setiap tahun sebelum tahun anggaran dilakukan pembahasan termasuk Prolegda yang didalamnya berisi tentang berapa Ranperda yang akan dibahas pada tahun berikutnya.Ranperda usulan dari DPRD Kota Manado kemudian itu dikoordinasikan bersama secara internal DPRD Manado. Dan biasanya anggaran sebuah Ranperda berkisar 200 juta hingga 300 juta per Perda. Proses prosedur keuangan anggaran Ranperda DPRD diatur oleh DPRD itu sendiri. Artinya pengusulan anggaran juga dilakukan oleh sekretariat DPRD dibawah kordinasi Sekretaris DPRD Kota Manado.

*Parlieamentary public accounts commitees*, penyampaian keuangan institusi DPRD kepada masyarakat masih kurang transparan. Pertangungjawaban keuangan Komisi diserahkan pada panitia khusus di Balegda dan selanjutnya pemeriksaan keuangan langsung dipertanggungjawabkan oleh lembaga DPRD.untuk pengelolaan keuangan kegiatan DPRD termasuk untuk kegiatan-kegiatan Komisi atau seluruh alat kelengkapan DPRD Manado itu langsung dari sekretariat.

*Auditing* terkait adanya pemeriksaan keuangan dalam insstitusi DPRD. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*check and balance*” dalam sistem administrasi.pemeriksaan keuangan dilaksanakan oleh Inspektorat dan BPK.DPRD Manado sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) maka juga merupakan bagian dari pemerintah Kota Manado dan opini hasi pemeriksaan BPK untuk pemerintah Kota Manado termasuk didalamnya adalah institusi DPRD Manado pada tahun 2010 s.d 2013 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

*Public enqiries*, masih kurang adanya partisipasi dan pengamatan dari masyarakat belum dipahami dengan baik oleh DPRD Kota Manado apalagi terkait secara normatif. Proses pembentukan peraturan daerah bagi setiap Kabupaten dan Kota termasuk di Kota Manado unsur keterlibatan masyarakat melalui partisipasi masyarakat juga diharuskan secara normatif. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 96.

*Formal planning systems*, belum adanya sistem perencanaan secara formal. Yang ada terkesan tiba saat tiba akal *(temporary).* Pendekatan pada sistem perencanaan keuangan negara ditinjau dari sudut pendekatan keuangan negara, Sistem perencanaan formal yang mengatur tentang kinerja ada di PP No 16 Kalau dulu UU 27, maka keuangan negara ditekankan pada segi-segi yang berkaitan dengan pengeluaran negara, pendapatan negara, perpajakan, hutang negara dan anggaran negara, hal ini belum dipahami secara baik. Peraturan terkait seperti dalam UU Nomor 17 tahun 2003 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 tahun 2014 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara, serta serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Disini seharusnya pimpinan DPRD Kota Manado adalah sebagai manager yang seharusnya mampu mengelola sistem perencanaan, sebagai manager seharusnya mampu memahami proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun hal tersebut belumlah sesuai harapan yang ada.

Tabel 5.7 Temuan Sub Fokus *Optimal Resources Utilization*

(pemanfaatan sumberdaya secara optimal)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fokus: Proses Akuntabilitas Politik Pada DPRD Kota Manado dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah  Sub Fokus : *Optimal resourcesutilization* (pemanfaatan sumberdaya secara optimal) | | |
| Indikator | Temuan | Ket |
| *Buedgets* | Proses penganggaran masih kurang dipahami dengan baik, hal ini terkait sumber daya yang kurang profesional. | Belum sesuai harapan yang ada |
| *Financial procedures* | Berkaitan dengan prosedur keuangan belum dikuasai sepenuhnya. Apalagi prosedur keuangan yang dianggarkan dalam pembentukan Ranperda sampai pada penetapan Perda | Belum sesuai harapan yang ada |
| *Parlieamentary public accounts commitees* | Penyampaian keuangan institusi DPRD kepada masyarakat kurang transparan | Belum sesuai harapan yang ada |
| *Auditing* | Opini hasi pemeriksaan BPK untuk pemerintah Kota Manado termasuk didalamnya adalah institusi DPRD Manado pada tahun 2010 s.d 2013 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). | Belum sesuai harapan yang ada |
| *Public enqiries*, | Masih kurang adanya partisipasi dan pengamatan dari masyarakat belum dipahami dengan baik oleh DPRD Kota Manado apalagi terkait secara normatif. | Belum sesuai harapan yang ada |
| *Formal planning systems* | belum adanya sistem perencanaan secara formal. Yang ada terkesan tiba saat tiba akal *(temporary).* Pendekatan pada sistem perencanaan keuangan negara ditinjau dari sudut pendekatan keuangan negara, | Belum sesuai harapan yang ada |

Sumber: Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian (2016)

1. *Improving Efficency and Effectivieness*

*Improving efficiency and effectiveness*, berhubungan dengan upaya peningkatan secara efektif dan efisiensi.Teknologi informasi adalah suatu teknik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, menggumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi informasi sangat berperan dalam menunjang kegiatan-kegiatan organisasi, oleh sebab itu banyak organisasi modern membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemennya sendiri.

Teknologi informasi dapat dipahami sebagai kumpulan informasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi untuk diterima, didistribusikan dan disimpan *(distributed and stored)*. Selain itu, TI juga dapat dipahami sebagai alat atau media yang secara efektif dapat digunakan untuk mensosialisasikan, mengkomunikasikan ide, konsep, jasa dan produk maupun visi baik untuk kepentingan internal organisasi, maupun eksternal dalam hal ini adalah pengguna jasa maupun pemasok dengan berbasiskan pada teknologi komputer maupun teknologi komunikasi lainnya.Pemanfaatan atau pengembangan e-government merupakan upaya untuk mendukung kinerja pemerintah yang berbasis elektronika dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

1. *Information System*

*Information System* berhubungan dengan sistem informasi yang dimiliki oleh DPRD Kota Manado. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengartikan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi informasi sangat berperan dalam menunjang kegiatan-kegiatan organisasi, oleh sebab itu banyak organisasi modern membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemennya sendiri. Sistem informasi manajemen (SIM) tersebut bukanlah sesuatu yang baru hadir dalam kehidupan manusia khususnya dalam kegiatan-kegiatan manajemen pada sebuah organisasi. Sejak dulu, SIM tersebut sebenarnya sudah dikenal, namun proses penanganannya masih menggunakan sistem manual. Sedangkan pada saat ini proses penanganan SIM tersebut sudah memanfaatkan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan sistem komputerisasi ataupun peralatan lainnya yang bermuatan *teknologi* tinggi.

Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu: (**1)** pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis, (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk mengetahui lebih lanjut peneliti mengajukan pertanyaan kepada beberapa informan terkait apakah ada sistem informasi manajemen (SIM) yang dimiliki oleh DPRD? Demikian pernyatan informan “HK”:

Tidak ada sistem informasi manajemen (SIM) yang dimiliki oleh DPRD. (Wawancara, 14-09-2015)

Pernyataan informan HK sejalan dengan informan BP, JK, NT, DS, DM, SL, MM, SS, JD dan DR. Intinya informan-informan tersebut mengakui bahwa DPRD Kota Manado belum memiliki SIM untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dari keseluruhan data yang ada menunjukan temuan bahwatidak ada sistem informasi manajemen (SIM) yang dimiliki oleh DPRD Kota Manado. Walaupun sudah puluhan tahun dikenal di Indonesia, namun implementasi sistem informasi manajemen di kantor-kantor pemerintahan termasuk di DPRD Kota Manado relatif masih rendah bahkan tidak dilakukan jika dibandingkan dengan implementasi SIM yang ada pada perusahaan-perusahaan swasta.

Belum terimplementasinya SIM di instansi-instansi pemerintahan disebabkan antara lain karena, (1) belum adanya satuan kerja yang secara struktural bertanggung jawab dalam pembangunan sistem informasi, (2) keterbatasan di dalam penguasaan sistem informasi, (3) sistem informasi dilaksanakan secara mandiri di masing-masing satuan kerja, (4) keterbatasan kemampuan SDM untuk pengelolaan sistem informasi. Pemanfaatan atau pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mendukung kinerja pemerintah yang berbasis elektonika dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan dan penerapan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan instansi pemerintah khususnyadi DPRD Kota Manado yang melaksanakan fungsi pelayanan publik, dengan berjalannya *e-government* ini maka diharapkan seluruh aktivitas organisasi pemerintah dapat dilaksanakan secara elektronik sehingga mempermudah fungsi kebijakan dan pelayanan.

1. *Value for Money Audits*

*Value of money audits*, menunjuk pada nilai dari hasil pemeriksaan keuangan untuk kelanjutannya. Dalam rangka untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaandan tanggung jawab keuangan negara.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara adalah terkait keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Bagaimana pandangan Anda mengenai hasil pemeriksaan keuangan oleh lembaga audit BPK atau Inspektorat? Demikian pernyatan informan HK:

Bagus namun demikian harus terus ditingkatkan agar dikemudian hari tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. (Wawancara, 14-09-2015)

Pernyataan informan HK sama dengan jawaban informan BP, NT, DS, DM, MM, SS, DR. Informan-informan tersebut menyatakan bahwa hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK maupun Inspektorat menunjukan hasil yang baik.

Dari keseluruhan data informan diatas menunjukan bahwa mengenai hasil pemeriksaan keuangan oleh lembaga audit (BPK dan Inspektorat) menurut mereka bagus namun demikian harus terus ditingkatkan agar dikemudian hari tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. *Value of money audits*, menunjuk pada nilai dari hasil pemeriksaan keuangan untuk kelanjutannya. Dalam rangka untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaandan tanggungjawab keuangan negara.

Dari hasil pemeriksaan BPK RI menunjukan opini WDP (wajar Dengan Pengecualian). Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara adalah terkait keseluruhan kegiatan pejabatpengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dankewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, dan pertanggungjawaban.

1. *Setting Objectives and Standarts*

*Setting objectives and standards*, berkaitan dengan ukuran standar yang diterapkan secara obyektif. Insitusi DPRD yang keanggotaannya dipilih dan mendapatkan legitimasi politik rakyat diberikan mandat sebagai wakil rakyat dengan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang bersumber dari rakyat yang telah memilihnya untuk menjalankan tugas mengatur, menetapkan prioritas dan mendistribusikan sumber daya. Kekuasaan otoritas politik ini harus dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pembuat peraturan daerah. *Accountability* (akuntabilitas) merujuk pada pertanggung-jawaban eksternal organisasi, yaitu apakah kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk kepada para *stakeholder*-nya. Efisiensi dan Efektivitas pelayanan merupakan ukuran *accountability* dari suatu kebijakan organisasi publik sebagai standar kinerja pelayanan *(provide standart of correct action).*

Kinerja legislatif merupakan perihal yang penting dan perlu mendapat perhatian yang cukup dalam rangka untuk peningkatan dan perbaikan kualitas akuntabilitas publik. Penilaian terhadap kinerja birokrasi akan sangat berguna untuk melihat atau menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan mendorong legislatif untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat melalui produk aturan yang dikeluarkannya.

Kinerja organisasi terkait produk Perda yang dihasilkan DPRD Kota Manado akan menunjuk pada efektivitas organisasi, dimana hal itu akan menyangkut pengharapan untuk mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan tujuan kebijakan dan harapan masyarakat. Isu efektivitas organisasi dalam kaitannya dengan kinerja organisasi, mencakup *how well the organization is doing*, bagaimana, suatu organisasi mencapaitujuannya dan harapan masyarakatnya.

Selanjutnya untuk mendalami ditanyakan kepada beberapa informan apakah dalam melaksanakan kinerjanya ada ukuran standar yang diterapkan dan diatur secara obyektif, jika ada seperti apa dan peraturan apa? Demikian pernyatan informan HK:

Ukuran standart dalam hal kepatuhan ada.(Wawancara, 14-09-2015)

Apakah dalam melaksanakan kinerjanya ada ukuran standart yang diterapakan dan diatur secara obyektif, jika ada seperti apa dan peraturan apa? Demikian pernyatan informan BP:

Ada tetapi saya lupa diatur aturan mana itu. (Wawancara, 14-09-2015)

Apakah dalam melaksanakan kinerjanya ada ukuran standar yang diterapkan dan diatur secara obyektif, jika ada seperti apa dan peraturan apa? Demikian pernyatan informan NT:

Di DPRD Kota Manado setahu saya belum ada. (Wawancara, 29-09-2105)

Jawaban dari informan NT sejalan dengan jawaban dari informan DS, DM, SL, MM, SS, DR. Pada dasarnya bahwa di DPRD Kota Manado menurut informan-informan tersebut belum ada standart mengukur kinerja mereka.

Kinerja legislatif merupakan perihal yang penting dan perlu mendapat perhatian yang cukup dalam rangka untuk peningkatan dan perbaikan kualitas akuntabilitas publik. Penilaian terhadap kinerja birokrasi akan sangat berguna untuk melihat atau menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan mendorong legislatif untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat melalui produk aturan yang dikeluarkannya. *Accountability* (akuntabilitas) merujuk pada pertanggungjawaban eksternal organisasi, yaitu apakah kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk kepada para *stakeholder*-nya. Efisiensi dan Efektivitas pelayanan merupakan ukuran *accountability* dari suatu kebijakan organisasi publik sebagai standar kinerja pelayanan *(provide standart of correct action).*

Dari keseluruhan data dapat dipaparkan terdapat temuan bahwa tidak ada ukuran standart secara obyektifdalam melaksanakan kinerja anggota/lembaga DPRD Kota Manado. Kinerja organisasi terkait produk Perda yang dihasilkan DPRD Kota Manado seharusnya akan menunjuk pada efektivitas organisasi, dimana hal itu akan menyangkut pengharapan untuk mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan tujuan kebijakan dan harapan masyarakat.

1. *Program Guidelines*

*Program guidelines*, adanya pedoman atau standar operasional prosedur kerja oleh DPRD.

Kebijakan yang telah direkomendasikan pada oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh para implementor mempertimbangkan dampak dari beberapa fase proses kebijakan, yaitu: Permasalahan dan tuntutan secara tetap didefenisikan kembali dalam proses kebijakan, Para pembuat kebijakan sering mendefenisikan masalah untuk mereka yang belum mendefenisikan sendiri, program-program yang membutuhkan partisipasi masyarakat dan antar pemerintahan bila mengandung berbagai penafsiran tentang maksud program itu sendiri. Penafsiran yang tidak konsisten tentang tujuan program sering kali tidak terpecahkan, Program mungkin dapat dilaksanakan tanpa perlu mempelajari kegagalan. Program sering mencerminkan kesepakatan yang dapat mudah dicapai ketimbang kepastian yang sesungguhnya, banyak program dikembangkan dan dilaksanakan tanpa mendefenisikan masalahnya secara jelas, untuk itu dibutuhkan adanya pedoman atau standar operasional prosedur kerja oleh DPRD.

Implementasi kebijakan dipahami juga sebagai suatu proses, *ouput,* dan *outcome*. Implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai proses karena didalamnya terjadi beberapa rangkaian aktivitas yang berkelanjutan. Sebagai contohnya, pada tahap awal setelah *statute* kebijakan ditetapkan, para legislator melakukan *hearing* dengan lembaga-lembaga terkait dengan kebijakan yang dibuat.Setelah itu aparat birokrasi menetapkan serangkaian keputusan administratif dan menetapkan rutinitas administrasi untuk melaksanakan aturan yang telah dibuat. Berikutnya dipersiapkan *resources* seperti uang dan sumberdaya manusia yang dibutuhkan negara untuk menjalankan kebijakan. Setelah aktivitas ini dilakukan, para legislator menjalankan pengawasan dan mempersiapkan langkah untuk mendesain kembali kebijakan sebagai respon terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada saat implementasi

Apakah ada semacam standart operasional prosedur (SOP) kerja oleh DPRD? Demikian pernyatan informan HK:

Sepengetahuan saya hingga saat ini, hanya ada yaitu Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kota Manado. Didalam peraturan tersebut telah diatur tentang beberapa alat kelengkapan DPRD Manado sekaligus dengan tugas dan kewenangan masing-masing alat kelengkapan Dewan. Termasuk juga hak, kewenangan dan kewajiban anggota DPRD Manado Selain itu juga didalamnya ada aturan tentang kode etik yang memuat norma yang wajib ditaati oleh setiap anggota DPRD Kota Manado dalam menjalankan tugasnya. Jadi kalau terkait dengan SOP lain tidak ada dan semua kurang tergantung dari masing-masing anggota dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya. (Wawancara, 14-09-2015)

Apakah ada SOP kerja oleh DPRD Manado? Demikian pernyatan informan JK:

Tidak ada. (Wawancara, 21-09-2015)

Pernyataan dari informan JK tersebut sejalan juga dengan jawaban dari informan BP, NT, DS, SL, MM, SS, DR, HK. Dimana tidak ada SOP baik di DPRD, Komisi dan di secretariat.

Dari keseluruhan data diatas terkait bahwa tidak ada SOP disekretariat DPRD dalam menjalankan tugasnya. Yang ada di DPRD itu hanya peraturan tata tertib. Diluar Tata Tertib DPRD Manado tidak ada terkecuali untuk sekretariat DPRD ada karena itu masuk dalam organisasi perangkat daerah yang juga diatur secara rinci tentang tupoksinya setiap unit atau bagian (struktur dan personalianya). Agak sulit untuk mengatur dalam bentuk SOP atau untuk mengukur kinerja anggota DPRD, karena landasannya tidak ada atau belum diatur secara jelas apalagi ini adalah lembaga politik yang didalamnya sarat dengan kepentingan politik.

Seharusnya DPRD Kota Manado menyediakan peta sederhana atau SOP untuk menunjukan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi itu dibingkai untuk menunjukan interaksi formal yang ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*standard operating prosedures* atau SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung akan melemahkan pengawasan dan meimbulkan *red-tape,* yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

1. *Appraisal*

*Appraisal*, adanya penilaian mengenai kinerja di DPRD Kota Manado. Pengukuran Kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. *Performance Measurement System* membantu manajer dalam memonitor (tracking) implementasi strategi bisnis dengan cara rnembandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Untuk itu diperlukan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan. tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk memiliki atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan *(ex-ante),* tahap pelaksanaan *(on-going),* maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi *(ex-post).*

Terkait penilaian terhadap kinerja DPRD Kota Manado dalam pembentukan Perda menurut informan masih kurang maksimal, karena tidak lebih dari 25% atau sekitar 10 anggota DPRD Manado saja yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Ada juga pimpinan yang tidak cakap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabanya sebagai pemimpin. Juga karena belum semua bisa menjalankan tugas mereka sesuai dengan tugas, kewenangan dan fungsi yang ada. Terkait dengan kemampuan menjalankan fungsi legislasi khususnya, dimana setiap anggota DPRD ada hak privilege dalam mengajukan Ranperda inisiatif. Sampai saat inipun belum ada, yang ada itu dari Balegda yang merancang Perda inisiatif. Demikian pernyatan informan “HK”:

Masih datar dan tidak maksimal, karena tidak lebih dari 25% atau sekitar 10 anggota DPRD Manado saja yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Ada juga pimpinan yang tidak cakap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabanya sebagai pemimpin. Juga karena belum semua bisa menjalankan tugas mereka sesuai dengan tugas, kewenangan dan fungsi yang ada. Terkait dengan kemampuan menjalankan fungsi legislasi khususnya, dimana setiap anggota DPRD ada hak privilege dalam mengajukan Ranperda inisiatif. Sampai saat inipun belum ada, yang ada itu dari Balegda yang merancang Perda inisiatif. (Wawancara, 14-09-2015)

Hal yang sama dikemukan informan terkait penilaian anda terhadap kienerja DPRD dalam pembentukan Perda, tanggapan informan mengenai kinerja anggota DPRD Kota Manado belum maksimal, hal ini disebabkan karena banyak anggota dan bahkan pimpinan yang tidak proaktif. Kurang perhatian terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Padahal masyarakat banyak berharap kepada lembaga ini. Anggota DPRD Kota Manado banyak yang kurang memiliki kompetensi dan kemampuan menjalankan tugas dan fungsi DPRD Kota Manado. Demikian pernyatan informan BP:

Sejujurnya belum maksimal, mengapa karena banyak anggota dan bahkan pimpinan yang tidak proaktif. Kurang perhatian terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Padahal masyarakat banyak berharap kepada lembaga ini. Anggota DPRD Kota Manado banyak yang kurang memiliki kompetensi dan kemampuan menjalankan tugas dan fungsi DPRD Kota Manado. (Wawancara, 14-09-2105)

Pernyataan informan HK dan BP sama jawabannya dengan informan NT, MM, SS, DR. Dimana kinerja DPRD Kota Manado belum maksimal.

Jika disinggung mengenai bagaimana penilaian terhadap kinerja sekretariat DPRDKota Manado? Demikian pernyatan informan HK:

Baik. (Wawancara, 14-09-2015)

Bagaimanakah penilai Anda terhadap kinerja sekretariat?Demikian pernyatan informan BP:

Semua tergantung pada kepribadian masing-masing ada yang sudah menjalankan tugas dengan baik tapi ada juga yang masih cuek. (Wawancara, 14-09-2015)

Berbeda dengan penilaian informan JK, NT terhadap kinerja sekretariat yang menyatakan baik. Selanjutnya pertanyaan yang sama ditanyakan tentang bagaimana penilaian anda terhadap kinerja DPRD Kota Manado dalam pembentukan Perda inisiatif? Demikian pernyataan informan “DS”:

Masih kurang. Kurang disiplin, kemampuan atau kompetensi terhadap peraturan perundang-undangan lemah dan penguasaan terhadap tugas dan fungsi baik anggota maupun secara lembaga atau insitusi kurang. (Wawancara, 29-09-2015)

Secara keseluruhan belum maksimal perihal kinerja anggota DPRD Kota Manado. Hal ini dapat lihat dari tugas dan fungsi DPRD Kota Manado maupun juga pelaksanaan hak anggota dalam hubungannya dengan hak mengajukan Ranperda inisiatif yang selama periode 2009-2014 tidak ada demikian dengan komisi. Belum lagi sebagian besar anggota DPRD Kota Manado relatif kurang aktif dalam sidang atau rapat pansus hanya anggota-anggota tertentu saja yang terlibat aktif. Bagaimana penilaian Bapak terhadap kinerja DPRD Kota Manado dalam pembentkan Perda inisiatif? Demikian pernyataan informan DM:

Secara keseluruhan belum maksimal. Hal ini dapat lihat dari tugas dan fungsi DPRD Kota Manado maupun juga pelaksanaan hak anggota dalam hubungannya dengan hak mengajukan Ranperda inisiatif yang selama periode 2009-2014 tidak ada demikian dengan komisi. Belum lagi sebagian besar anggota DPRD relatif tidak aktif dalam sidang atau rapat pansus hanya anggota-anggota tertentu saja yang terlibat aktif. (Wawancara, 07-10-2015)

Bagaimana penilaian anda tentang kinerja DPRD Manado Periode 2009-2014 dalam pembentukan Perda inisiatif? Demikian pernyatan informan SL:

Harus diakui masih kurang, apabila dikaitkan dengan tugas dan fungsi legislasi dari DPRD. (Wawancara, 23-10-2015)

Bagaimana penilaian anda terhadap kinerja sekretariat? Demikian pernyataan informan DS:

Baik karena mereka dapat membantu tugas-tugas DPRD walaupun lebih banyak yang kurang pekerjaan, kan mereka sangat tergantung pada kegiatan persidangan-persidangan di DPRD. (Wawancara, 29-09-2015)

Bagaimana penilaian anda terhadap kinerja sekretariat? Demikian pernyatan informan DM:

Baik, karena aktivitas anggota, komisi disuport oleh staf kesekretariatan terutama dalam hal urusan kepentingan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Manado. (Wawancara, 07-10-2015)

Bagaimana penilaian anda tentang kinerja dari bagian sekretariat? Demikian pernyataan informan SL:

Biasa-biasa saja. (Wawancara, 23-10-2015)

Bagaimana dengan kinerja bagian sekretariat? Demikian pernyatan informan MM:

Baik dalam hal mendukung untuk seluruh kegiatan anggota DPRD khususnya yang berhubungan dengan administrasi umum dan administrasi keuangan anggota atau komisi dan seluruh alat kelengkapan DPRD hingga kebutuhan pimpinan DPRD Kota Manado dalam menjalankan tugas.

Dari data keseluruhan dapat dipaparkan bahwa terkait penilaian terhadap kinerja DPRD Kota Manado dalam pembentukan Perda menurut informan masih kurang maksimal, karena tidak lebih dari 25% atau sekitar 10 anggota DPRD Manado saja yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Ada juga pimpinan yang tidak cakap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabanya sebagai pemimpin. Juga karena belum semua bisa menjalankan tugas mereka sesuai dengan tugas, kewenangan dan fungsi yang ada. Terkait dengan kemampuan menjalankan fungsi legislasi khususnya, dimana setiap anggota DPRD ada hak privilege dalam mengajukan Ranperda inisiatif. Sampai saat inipun belum ada, yang ada itu dari Balegda yang merancang Perda inisiatif.

Kinerja anggota DPRD Kota Manado sesuai temuan belum maksimal, hal ini disebabkan karena banyak anggota dan bahkan pimpinan yang kurang proaktif. Kurang perhatian terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Padahal masyarakat banyak berharap kepada lembaga ini. Anggota DPRD Kota Manado banyak yang kurang memiliki kompetensi dan kemampuan menjalankan tugas dan fungsinya sehingga masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan. Angota dan pimpinan alat kelengkapan DPRD juga kurang maksimal terutama anggota dan pimpinan komisi dan Balegda. Secara keseluruhan belum maksimal. Hal ini dapat lihat dari tugas dan fungsi DPRDKota Manado maupun juga pelaksanaan hak anggota dalam hubungannya dengan hak mengajukan Ranperda inisiatif yang selama periode 2009-2014 tidak ada demikian dengan komisi. Berbanding terbalik dengan penilaian terhadap kinerja sekretariat penilaian informan masih baik dalam hal mendukung untuk seluruh kegiatan anggota DPRD khususnya yang berhubungan dengan administrasi umum dan administrasi keuangan anggota atau komisi dan seluruh alat kelengkapan DPRD hingga kebutuhan pimpinan DPRD Kota Manado dalam menjalankan tugas.

1. *Feedback from Public*

*Feedback from public*, ada tanggapan dari publik. Aktualisasi akuntabilitas politik DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya merujuk pada berbagai bentuk regulasi atau kebijakan yang bersifat normatif tersebut. Atas rujukan tersebut maka DPRD memberikan pertanggungjawaban atas tugas selaku anggota DPRD sebagau wujud tanggungjawab politis terhadap konstituen yang telah memilihnya. Salah satu tugas bentuk perwujudan akuntabilitas politiknya adalah dengan melaksanakan kerja politik sebagaimana yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Salah satu kerja politik yang dilakuakan adalah *feedback from public*, ada tanggapan dari publik terkait Perda inisiatif yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Manado.

Untuk mengetahui lebih lanjut peneliti mengajukan pertanyaan kepada beberapa informan dengan pertanyaan apakah ada tanggapan dari masyarakat terkait pembentukan Perda dari DPRD Manado? Demikian pernyataan informan “HK”:

Ada dan ditanggapi dengan sangat baik dan selalu diikuti terus oleh masyarakat karena mereka selalu menginkan perubahan kearah yang lebih baik. (Wawancara, 14-09-2015)

Ada tanggapan dari masyarakat terkait pembentukan Perda dari DPRD.Ada dan ditanggapi dengan sangat baik dan selalu diikuti terus oleh masyarakat karena mereka selalu menginginkan perubahan kearah yang lebih baik. Untuk partisipasi masyarakat selalu ada lewat usul-usul lisan secara tertulis. Demikian pernyatan informan “BP”:

Untuk partisipasi masyarakat selalu ada lewat usul-usul lisan secara tertulis. (Wawancara, 14-09-2015)

Misalnya tanggapan dari masyarakat seperti apa kalau dikaitkan dengan Penetapan Perda inisiatif DPRD Manado pada periode 2009 – 2014? Dan seperti apa bentuk tanggapan tersebut, apakah lewat demonstrasi atau disampaikan langsung melalui tatap muka dengan pimpinan DPRD Manado? Demikian pernyatan informan HK:

Bentuk tanggapannya secara jelas saya tidak ingat lagi, tetapi ada. Ada yang disampaikan langsung kepada anggota DPRD dan ada juga yang dilakukan melalui demonstrasi. Berbagai macam tanggapan yang selalu muncul ada dengan sikap dengan datang langsung ke DPRD rapat bersama atau secara musyawarah tapi ada juga yang lewat demonstrasi. (Wawancara, 14-09-2015)

Bentuk tanggapannya ada. Ada yang disampaikan langsung kepada anggota DPRD dan ada juga yang dilakukan melalui demonstrasi. Berbagai macam tanggapan yang selalu muncul ada dengan sikap dengan datang langsung ke DPRD rapat bersama atau secara musyawarah tapi ada juga yang lewat demonstrasi.Kalau ada seperti apa bentuk tanggapan tersebut? Apakah lewat seminar atau melalui demonstrasi masyarakat? Demikian pernyataan informan BP:

Berbagai macam tanggapan yang selalu muncul ada dengan sikap baik dengan datang langsung ke DPRD rapat bersama atau secara musyawarah tapi ada juga yang lewat demonstrasi ataupu secara tertulis. (Wawancara, 14-09-2015)

Berbeda jawaban dari informan JK, NT, DS, DM, MM dan DR yang menjawab bahwa tidak ada tanggapan dari masyarakat terkait pembentukan Perda dari DPRD Manado.

Dari keseluruhan data diatas dapat dipaparkan bahwa bentuk tanggapannya ada. Ada yang disampaikan langsung kepada anggota DPRD dan ada juga yang dilakukan melalui demonstrasi. Berbagai macam tanggapan yang selalu muncul ada dengan sikap dengan datang langsung ke DPRD rapat bersama atau secara musyawarah tapi ada juga yang lewat demonstrasi. Kalau ada seperti apa bentuk tanggapan tersebut. Ada yang disampaikan langsung kepada anggota DPRD dan ada juga yang dilakukan melalui demonstrasi. Ada juga tanggapan dengan sikap dengan datang langsung ke DPRD rapat bersama atau secara musyawarah tapi ada juga yang lewat demonstrasi.

*Feedback from public* atau ada tanggapan dari publik sepertinya belum terlaksana dengan baik di DPRD Kota Manado. Aktualisasi akuntabilitas politik DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya merujuk pada berbagai bentuk regulasi atau kebijakan yang bersifat normatif tersebut belum sepenuhnya terjadi. Atas rujukan tersebut maka DPRD seharusnya memberikan pertanggungjawaban atas tugas selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggungjawab politis terhadap konstituen yang telah memilihnya dengan meminta tanggapan kepada publik terkait Perda inisiatif yang sudah ditetapkan.

Dapat disimpulkan terkait *Improving efficiency and effectiveness*, berhubungan dengan upaya peningkatan secara efektif dan efisiensi belum optimal dilakukan oleh DPRD Kota Manado. Hal tersebut tergambar pada indikator-indikator dibawah ini:

*Information System* belum adanya sistem informasi yang dimiliki oleh DPRD Kota Manado. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengartikan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi. Tidak ada sistem informasi manajemen (SIM) yang dimiliki oleh DPRD Kota Manado. Walaupun sudah puluhan tahun dikenal di Indonesia, namun implementasi sistem informasi manajemen di kantor-kantor pemerintahan termasuk di DPRD Kota Manado relatif masih rendah bahkan tidak dilakukan.

*Value of money audits*, menunjuk pada nilai dari hasil pemeriksaan keuangan untuk kelanjutannya. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara adalah terkait keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Hasil pemeriksaan keuangan oleh lembaga audit (BPK dan Inspektorat) adalah Opini BPK dengan WDP, namun demikian harus terus ditingkatkan agar dikemudian hari tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya juga belum adanya kesadaran dari DPRD Kota Manado untuk melaporakan kekayaannya ( LHKPN) secara transparan.

*Setting objectives and standards*, berkaitan dengan ukuran standar yang diterapkan secara obyektif. Tidak ada ukuran standart secara obyektif dalam melaksanakan kinerja anggota/lembaga DPRD Kota Manado. Kinerja organisasi terkait produk Perda yang dihasilkan DPRD Kota Manado seharusnya akan menunjuk pada efektivitas organisasi, dimana hal itu akan menyangkut pengharapan untuk mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan tujuan kebijakan dan harapan masyarakat.

*Program guidelines*, dimana belum adanya pedoman atau standar operasional prosedur kerja oleh DPRD Kota Manado. Seharusnya DPRD Kota Manado menyediakan peta sederhana atau SOP untuk menunjukan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukan status relatifnya. Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

*Appraisal*, adanya penilaian yang masih jauh dari harapan oleh masyarakat terkait/mengenai kinerja di DPRD Kota Manado.belum maksimal perihal kinerja anggota DPRD Kota Manado. Hal ini dapat lihat dari tugas dan fungsi DPRD Kota Manado maupun juga pelaksanaan hak anggota dalam hubungannya dengan hak mengajukan Ranperda inisiatif yang selama periode 2009-2014 tidaklah nampak ada.

*Feedback from public*, ada tanggapan dari publik. Bentuk tanggapannya ada. Ada yang disampaikan langsung kepada anggota DPRD dan ada juga yang dilakukan melalui demonstrasi. Berbagai macam tanggapan yang selalu muncul ada dengan sikap dengan datang langsung ke DPRD rapat bersama atau secara musyawarah tapi ada juga yang lewat demonstrasi. Tanggapan dari publik sepertinya belum terlaksana dengan baik di DPRD Kota Manado. Aktualisasi akuntabilitas politik DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya merujuk pada berbagai bentuk regulasi atau kebijakan yang bersifat normatif tersebut belum sepenuhnya terjadi.

Tabel 5.8 Temuan Sub Fokus*Improving Efficiency and Effectiveness*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fokus:Proses Akuntabilitas Politik Pada DPRD Kota Manado dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah  Sub Fokus : *Improving efficiency and effectiveness* | | |
| Indikator | Temuan | Ket |
| *Information System* | 1. Belum adanya sistem informasi yang dimiliki oleh DPRD Kota Manado. | Belum sesuai harapan yang ada |
| *Value of money audits* | 1. Hasil pemeriksaan keuangan oleh lembaga audit (BPK dan Inspektorat) adalah Opini BPK dengan WDP, namun demikian harus terus ditingkatkan agar dikemudian hari tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. | Belum sesuai harapan yang ada |
| *Setting objectives and standards* | 1. Tidak ada ukuran standart secara obyektif dalam melaksanakan kinerja anggota/lembaga DPRD Kota Manado | Belum sesuai harapan yang ada |
| *Program guidelines* | 1. Belum adanya pedoman atau standar operasional prosedur kerja oleh DPRD Kota Manado. Seharusnya DPRD Kota Manado menyediakan peta sederhana atau SOP untuk menunjukan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukan status relatifnya | Belum sesuai harapan yang ada |
| *Appraisal* | 1. Adanya penilaian yang masih jauh dari harapan oleh masyarakat terkait/ mengenai kinerja di DPRD Kota Manado. 2. Belum maksimal perihal kinerja anggota DPRD Kota Manado. | Belum sesuai harapan yang ada |
| *Feedback from public* | 1. Bentuk tanggapannya ada. 2. Ada yang disampaikan langsung kepada anggota DPRD dan ada juga yang dilakukan melalui demonstrasi. | Belum sesuai harapan yang ada |

Sumber: Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian (2016)

Adapun kesimpulan hasil temuan pada Fokus Proses Pelaksanaan Akuntabilitas Politik Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Pada DPRD Kota Manado dapat disajikan oleh peneliti dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 5.9 Temuan Akuntabilitas Politik DPRD Kota Manado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Akuntabilitas | Temuan | Ket |
| 1. | *Legitimacy decision Makers* (legitimasi pembuat kebijakan) | 1. Tidak ada usulan Prolegda dari DPRD yang ada hanya usulan dari pihak Pemerintah dan sebagian usulan diambil menjadi usulan inisiatif DPRD. 2. Pengusulan dan penetapan Ranperda inisiatif DPRD tidak prosedural. Karena pengajuan dan pembahasan Ranperda usulan DPRD tidak disertai dengan naskah akademik, serta proses pembahasan Ranperda inisiatif DPRD pada rapat paripurna tidak mengikuti mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku terutama pada Tahap Pembicaraan Tingkat Pertama. 3. Pelaksanaan sistem perwakilan dalam pengajuan dan pembahasan Ranperda tidak berjalan dengan baik. 4. Hak istimewa anggota DPRD untuk mengajukan Ranperda tidak dilaksanakan. 5. Tugas dan fungsi legislasi pembentukan Perda belum dilaksanakan dengan baik, dan sebagian besar (80%) anggota DPRD Kota Manado tidak memahami Tupoksi. 6. Bentuk kerja sama antar DPRD dan Pemerintah tidak berjalan secara maksimal dalam pengajuan usulan Prolegda, dan agenda pembahasan Ranperda yang yang tidak terencana dengan baik oleh DPRD 7. Dan proses pembahasan Ranperda inisiatif DPRD pada rapat paripurna tidak mengikuti mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku terutama pada Tahap Pembicaraan Tingkat Pertama. 8. Adanya muatan kepentingan tertentu oleh DPRD sebagai titipan atau pesanan dari pihak tertentu dalam pembahasan Ranperda, sehingga Produk Perda kurang berpihak dan menjawab aspirasi masyarakat. | Proses  Prosedur  Proses  Proses  Proses  Prosedur  Prosedur  Produk |
| 2 | *Moral Conduct* (Kualitas Moral) | 1. Kualitas moral anggota DPRD Manado kurang mendukung dalam proses Pembuatan Perda inisiatif. 2. Produk Perda belum memenuhi nilai-nilai yang dibutuhkan masyarakat. 3. Proses pengajuan, pembahasan dan penetapan Perda belum mengedepankan kualitas profesional anggota DPRD sebagai representasi masyarakat. 4. Pelaksanaan program pengembangan kapasitas anggota DPRD melalui Bimtek kurang direspon secara baik oleh anggota. Hal ini berimplikasi pada SDM yang kurang terampil, cakap dan profesional. | Proses  Produk  Proses  Proses |
| 3. | *Responsiveness* (Daya Tanggap) | 1. Tidak adanya ruang dan media sebagai sarana komunikasi dan partisipasi masyarakat karena belum direncanakan dan dasar aturan sebagai pelaksanaan hal tersebut belum dipahami walaupun secara normatif memungkinkan. 2. Tidak ada forum diskusi (FGD) dengan publik untuk melakukan kajian sebelum agenda pembahasan Ranperda inisiatif. 3. Kurang adanya masukan pendapat dari masyarakat terhadap materi Ranperda karena DPRD besifat tidak peduli. 4. Tidak adanya kegiatan pertemuan dengan publik yang bersifat rutin dan teratur khusus dengan publik terkait dengan materi Ranperda inisiatif. 5. Kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kurang difasilitasi oleh DPRD sekalipun kebebasan tersebut dijamin bagi masyarakat. | Proses  Prosedur  Prosedur  Prosedur  Proses |
| 4. | *Openness* (Keterbukaan) | 1. Agenda dan materi Ranperda inisiatif kurang disosialisasikan kepada publik. 2. Tidak adanya pelayanan informasi bagi publik. 3. Masyarakat mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan informasi berbagai kebijakan Produk Perda inisiatif yang telah ditetapkan oleh DPRD. 4. Tidak ada proses pertemuan dengan masyarakat untuk penjaringan aspirasi terkait dengan Pembahasan Ranperda hingga ditetapkan menjada Perda. 5. Laporan pertanggung jawaban Baleda DPRD terhadap realisasi pelaksanaan Porgram Legislasi Daerah (Prolegda) kepada publik setiap tahun dan pada masa akhir periode. | Proses  Proses  Produk  Prosedur  Prosedur |
| 5. | *Optimal Resouce Utilization* ( Pemanfaatan secara optimal sumber daya yg ada) | 1. Anggaran pembiayaan untuk setiap Perda inisiatif berkisar diantara 200 juta sampai 300 juta. 2. Proses penyusunan anggaran dilaksanakan oleh dilakukan bersama oleh pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD dibawah koordinasi oleh Sekretaris. 3. Pengelolaan administrasi keuangan untuk kegiatan Komisi baik proses perencanaan dan pelaporannya dikelolah oleh bagian kesekretariatan DPRD. 4. Pemeriksaan keuangan dilakukan oleh BPK dan Inspektoran Kota Manado 5. Pemantauan dan pengamatan dari masyarakat terhadap pengambilan keputusan dalam hal pembentukan Ranperda inisiatif DPRD kurang, karena kurangnya sosialisasi dari DPRD. 6. Belum adanya sistem perencanaan secara formal | Proses  Prosedur  Prosedur  Prosedur  Proses  Prosedur |
| 6. | *Improving efficienncy and effectiveness.*(Upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas. | 1. Lembaga DPRD Kota Manado belum memiliki sistem informasi manajemen (SIM). 2. Hasil pemeriksaan keuangan dari lembaga BPK dan Inspektorat baik 3. Belum adanya sistem dan prosedur kerja (SOP). 4. Kinerja DPRD dalam Pembentukan Perda inisiatif belum baik dan “miskin” Perda inisiatif. 5. Produk Perda inisiatif kurang mendapatkan respon dari publik, karena mereka tidak mengetahuinya. | Produk  Produk  Produk  Produk  Produk |

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari temuan penelitian (2016)

1. **Faktor determinan dalam pembuatan Perda inisiatif dari DPRD Kota Manado**

Faktor Determinan dalam Pembuatan Perda yang berasal dari DPRD, dalam penelitian ini menggunakan pengembangan dari konsep Jabbra dan Dwivedi tentang akuntabilitas politik yang merujuk pada 2 (dua) sub fokus sebagai pisau analisis yang dijadikan sebagai teori operasional. Kedua sub fokus tersebut, yaitu: (1) adanya partisipasi, dan (2) adanya legitimasi atau pengakuan.

Pertama: Adanya Partisipasi, maksudnya disini adalah adanya keterlibatan masyarakat, baik dalam aktivitas mengatur maupun mengurus urusan pemerintahan daerah. Keterlibatan masyarakat ini merupakan aktivitas partisipasi yang dijalankan, baik dalam kerangka mekanisme partisipasi yang disediakan maupun tidak disediakan oleh DPRD dan pemerintah daerah. Ada 3 indikator (Muluk, 2007:233), yaitu: (1) partisipasi (*legal framework*), (2) pemberian informasi berbagai agenda sidang terbuka kepada masyarakat, (3) merespon opini publik.

Kedua: Adanya legitimasi atau pengakuan, yaitu adanya kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan yang dimiliki (Seymour, 1969). Indikatornya, adalah: (1) kemampuan lembaga untuk diakui, (2) membentuk kepercayaan publik, (3) mempertahankan kepercayaan.

1. Partisipasi masyarakat

Partisipasi dapat dipahami guna untuk mendorong: (1) terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah, dan (2) keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu issu. Adanya keterlibatan masyarakat, baik dalam aktivitas mengatur maupun mengurus urusan pemerintahan daerah. Keterlibatan masyarakat ini merupakan aktivitas partisipasi yang dijalankan, baik dalam kerangka mekanisme partisipasi yang disediakan maupun tidak disediakan oleh DPRD dan pemerintah daerah.

Partisipasi secara logis memberi pengaruh positif terhadap kinerja/pencapaian hasil dan kepuasan. Artinya, semakin menggunakan suara yang berkepentingan atau yang paling memahami persoalan, maka semakin meningkat kinerja atau pencapaian hasil organisasi. Partisipasi juga penting dalam rangka membangun *public trust*. Ketika masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi maka mereka merasa bahwa pemerintah tidak menipu mereka, pemerintah dekat dengan mereka, pemerintah dapat dipercaya. Sementara itu, kepentingan mereka mendapatkan perhatian dalam kesempatan itu karena mereka diberikan keleluasan untuk menyampaikan berbagai pendapat, keluhan, dan sebagainya.Partisipasi publik seyogyanya tidak dilihat hanya dalam sekali atau serangkaian kejadian, tetapi dilihat dalam penentuan berbagai hal penting secara bersama-sama antara politisi, administrator, kelompok kepentingan, dan warga. Pada dasarnya, tujuan paritisipasi publik sangat beragam, meliputi berbagi informasi, akuntabilitas, legitimasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan berbagi kekuasaan secara nyata.

1. Pelembagaan partisipasi

Selanjutnya untuk mengetahui secara mendalam diajukan pertanyaan kepada beberapa informan mengenai apakah ada Perda yang mengatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan? Demikian pernyataan informan “HK”:

Setahu saya, belum ada peraturan daerah di Kota Manado yang mengatur mengenai bagaimana peran masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Manado. (Wawancara, 14-09-2015)

Pernyataan informan mengatakan bahwa belum ada Perda di Kota Manado yang mengatur mengenai bagaimana peran masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Manado, maka pernyataan yang sama atas pertanyaan tersebut, juga dinyatakan oleh informan: BP, JK, NT, DS, DM, SL, MM, SS, JD, RP, DT dan DR.

Perda inisiatif tidak diketahui oleh masyarakat luas. Secara administrasi dapat diketahui melalui SK DPRD namun tidak dilakukan secara transparan. DPRD tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Demikian pernyatan informan TU:

Perda inisiatif tidak diketahui oleh masyarakat luas. Secara administrasi dapat diketahui melalui SK DPRD namun tidak dilakukan secara transparan. DPRD tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. (Wawancara, 07-01-2016)

Data kemudian diexplore jika belum ada, apakah DPRD Periode 2009 – 2014 pernah menerima masukan baik secara lisan ataupun tertulis dari masyarakat atau kelompok masyarakat untuk perlunya pembentukan Peraturan tentang pemberdayaan partisipasi masyarakat atau public dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai Ranperda inisiatif DPRD Manado? Demikian pernyataan informan HK:

Kami tidak pernah menerima masukan baik secara lisan ataupun tertulis dari masyarakat atau kelompok masyarakat untuk perlunya pembentukan Peraturan tentang pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai Ranperda inisiatif DPRD Manado. (Wawancara, 14-09-2015)

Apakah ada masukan kepada DPRD Kota Manado sebagai Ranperda melalui hak inisiatif DPRD untuk membuat Perda, informan BP, JK, NT, DS, SL, MM dan DR menjawab tidak ada dan tidak tahu apakah ada masukan kepada DPRD Kota Manado sebagai Ranperda melalui hak inisiatif DPRD untuk membuat Perda tersebut.

Kunjungan yang dilakukan oleh anggota DPRD Manado selama ini hanyalah melalui kegiatan reses anggota Dewan, dan juga kunjungan monitor dan pengawasan terhadap mitra kerja sesuai dengan bidang lingkup tugas komisi dan/atau pengawasan langsung ke lapangan. Dan untuk masukan dari masyarakat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu secara tertulis tidak ada yang ada lebih banyak disampaikan secara lisan. Masukannyapun lebih banyak terkait dengan masalah-masalah infrastruktur, masalah kemacetan, masalah listrik yang sering padam, singkatnya bukan berhubungan dengan pembahasan Ranperda inisiatif DPRD Manado menjawab pertanyaan apakah ada masukan juga dari masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat DPRD melakukan kunjungan kerja. Demikian pernyatan informan “HK”:

Kunjungan yang dilakukan oleh anggota DPRD Manado selama ini hanyalah melalui kegiatan reses anggota Dewan, dan juga kunjungan monitor dan pengawasan terhadap mitra kerja sesuai dengan bidang lingkup tugas komisi dan/atau pengawasan langsung ke lapangan. Dan untuk masukan dari masyarakat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu secara tertulis tidak ada yang ada lebih banyak disampaikan secara lisan. Masukannyapun lebih banyak terkait dengan masalah-masalah infrastruktur, masalah kemacetan, masalah listrik yang sering padam, singkatnya bukan berhubungan dengan pembahasan Ranperda inisiatif DPRD Manado. (Wawancara, 14-09-2015)

Pernyataan dari informan HK sejalan juga dengan pernyataan dari informan BP, JK, NT, DS, DM, SL, MM, RS dan SS.

DPRD Manado tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan baik secara tertulis maupun secara lisan dalam Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Kota Manado Demikian pernyatan informan MM:

Setahu saya belum, DPRD Manado tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan baik secara tertulis maupun secara lisan dalam Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Kota Manado. (Wawancara, 23-10-2015)

Pernah dilakukan sosialisasi terkait partisipasi publik sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang mengatur masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan. Pernah, karena opini dari publik sangat diperlukan karena dengan membangun kepercayaan dari masyarakat sangatlah perlu dilakukan, Demikian pernyatan informan “BP”:

Pernah, karena opini dari publik sangat diperlukan karena dengan membangun kepercayaan dari masyarakat sangatlah perlu dilakukan. (Wawancara, 14-09-2015)

Tidak pernah dilakukan sosialisasi terkait partisipasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan yang mengatur masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan disampaikan oleh beberapa informan, sebagai berikut: JD, RP, HT, DT, JK, NT, DS, DM, SL, SS, DR, TU.

Selanjutnya ditanyakan kepada informan yang lain terkait Peraturan apa yang Anda ketahui tentang partisipasi publik dalam memberikan masukan secara lisan dan tertulis (misalnya dalam UU, PP, Permen, dsb)? Demikian pernyataan informan JK :

Saya lupa peraturannya. (Wawancara, 21-09-2015)

Peraturan apa yang anda ketahui tentang partisipasi publik dalam memberikan masukan secara lisan dan tertulis? Demikian pernyataan informan NT:

Tidak tahu. (Wawancara, 29-09-2015)

Pernyataan informan NT itu sejalan juga dengan yang dinyatakan informan DM, SL, MM, SS, DR.

Terkait Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 Pasal 90 yang mengatur tentang partisipasi masyarakat baik secara lisan maupun tertulis pada ayat 3 dikatakan bahwa masyarkat yang dimaksud adalah orang perorangan, kelompok yang memiliki kepentingan atas substansi ranperda. Tolong ditafsir oleh Anda mengenai yang dimaksud dengan “kepentingan” tersebut? Demikian pernyataan informan HK:

Itu ditujukan kepada orang perorangan atau kelompok masyarakat yang berkepentingan langsung dengan materi peraturan daerah yang akan atau sedang dibahas. (Wawancara, 14-09-2015)

Terkait Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 Pasal 90 yang mengatur tentang partisispasi masyarakat baik secara lisan maupun tertulis pada ayat 3 dikatakan bahwa masyarakat yang dimaksud adalah orang perorangan, kelompok yang memilki kepentingan atas substansi Ranperda, orang-orang tersebut yang memiliki kaitan dengan Perda yang direncanakan misalnya Perda Penyertaan Modal ke Bank Sulut disitu melibatkan bank Sulut begitu juga Perda PD Pasar dimana melibatkan PD Pasar dsb, begitu juga dengan Perda lain. Demikian pernyatan informan “BP”:

Orang-orang tersebut yang memiliki kaitan dengan Perda yang direncanakan misalnya Perda pernyataan modal ke bank sulut disitu melibatkan bank sulut begitu juga Perda PD Pasar dimana melibatkan PD Pasar dsb, begitu juga dengan perda lain. (Wawancara, 14-09-2015)

Jawaban informan BP, juga sama dengan pernyataan dari informan JK, NT, DS, DM, SL, MM, SS, DR.

Secara keseluruhan data yang dipaparkan belum ada Perda di Kota Manado yang mengatur mengenai bagaimana peran masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Manado. Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan: JD, BP, JK, NT, DS, TU, DT, HT yang menyatakan bahwa belum ada Perda yang mengatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Begitupun halnya dengan informan DM, SL, MM, SS, DR Perda yang mengatur peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan belum ada. Demikian pernyataan informan DM bahwa “seingat saya belum ada Perda yang mengatur untuk itu.” Terkait dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 pasal 90 yang mengatur tentang partisipasi baik secara lisan maupun tertulis pada ayat 3 dikatakan bahwa masyarakat yang dimaksud adalah orang perorang, kelompok yang memiliki kepentingan atau substansi Ranperda. Maksudnya mereka apakah itu perorangan atau korporasi yang berhubungan dengan materi Ranperda seperti pengusaha atau pedagang.

1. Pemberian Informasi.

Aspek akuntabilitas memang sangat menentukan keberhasilan partisipasi masyarakat. Selama tidak ada kewajiban bagi para pejabat atau birokrat untuk mempertanggungjawabkan keputusan atau perbuatannya kepada publik, maka para pejabat cenderung mengenyampingkan partisipasi masyarakat. Melalui partisipasi, berbagi kepentingan publik dapat diartikulasikan, diagregasikan dan diakomodasikan dalam kebijakan dan kegiatan publik, sementara melalui mekanisme akuntabilitas publik, apayang telah dijanjikan melalui kebijakan dan kegiatan publik itu dipertanggungjawabkan.

Indikator pemberian informasi secara tulus kepada masyarakat tentang berbagai agenda sidang termasuk pelibatan masyarakat secara aktif dalam sidang-sidang terbuka dewan merupakan bentuk perwujudan proses akuntabilitas politik insstitusi DPRD. Pemberian informasi yang tulus ditandai dengan pemilihan media informasi yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat seluas mungkin dan tersedia waktu yang memadai bagi masyarakat untuk mencerna informasi tesebut serta untuk terlibat dalam proses kebijakan yang terkait.

Menjawab pertanyaaan apakah agenda sidang DPRD dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, menurut beberapa informan bahwa agenda dan kegiatan DPRD Manado hanya disosialisasikan oleh teman-teman jurnalis dari berbagai media, baik media cetak, elektronik, dan media online. Dan dari situ masyarakat dapat mengaksesnya. DPRD Manado, belum memiliki website atau media khusus untuk kebutuhan informasi tentang kegiatan Dewan yang dapat diakses oleh publik Demikian pernyatan informan HK:

Agenda dan kegiatan DPRD Manado disosialisasikan oleh teman-teman jurnalis dari berbagai media,baik media cetak, elektronik, dan media online. Dan dari situ masyarakat dapat mengaksesnya. DPRD Manado, belum memiliki website atau media khusus untuk kebutuhan informasi tentang kegiatan Dewan yang dapat diakses oleh publik. (Wawancara, 14-09-2015)

Belum semua masyarakat dapat mengikuti dan mengetahui seluruh agenda kerja maupun sidang di DPRD Manado. Webside saja tidak efektif karena kurang maksimalkan oleh bagian hubmas DPRD Kota Manado. Mungkin karena juga faktor anggaran. Demikian pernyataan informan “BP”:

Menurut pengamatan saya boleh dikatakan belum semua masyarakat dapat mengikuti dan mengetahui seluruh agenda kerja maupun sidang di DPRD Manado. Webside saja tidak efektif karena kurang maksimalkan oleh bagian hubmas DPRD Kota Manado. Mungkin Karena juga faktor anggaran. (Wawancara, 14-09-2015)

Agenda sidang DPRD belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Demikian pernyataan informan JK:

Belum. Sebab yang saya lihat sampai sekarang kurang sekali masyarakat yang dapat mengikut pembahasan Perda di DPRD. (Wawancara, 21-09-2015)

Pernyataan dari informan HK, BP, JK tersebut sejalan juga dengan jawaban informan NT, DS. Kemudian lain halnya yang dikemukakan oleh informan MM:

Tergantung dari masyarakat, artinya kalau masyarakat yang sering datang ke DPRD Manado yang bersangkutan dapat mengetahuinya, atau juga masyarakat yang rajin membaca berita melalui media cetak atau mengikuti melalui media online. Karena di DPRD ada teman-teman dari jurnalis yang selalu memberitakan mengenai agenda-agenda DPRD Manado. (Wawancara, 23-10-2015)

Berbeda dengan beberapa informan diatas, SL mengatakan bahwa agenda sidang di DPRD Manado bisa dapat diakses secara mudah oleh masyarakat, melalui website, atau media surat kabar dsb. Termasuk juga pada pembahasan perda inisiatif? Demikian pernyataan informan “SL”:

Iya dapat melalui website, atau media surat kabar dsb. Termasuk juga pada pembahasan perda inisiatif. (Wawancara, 23-10-2015)

Namun setelah ditanya website apa yang bisa diakses, SL menjawab:

Maaf saya lupa websitenya. Coba ditanya di sekretariat mereka yang lebih tahu. Soalnya kalau tidak salah itu ada. (Wawancara, 23-10-2015)

Selanjutnya data diexplore kebagian sekretariat menanyakan perihal website yang dimaksud oleh informan”SL”, demikian informan DM menjawab:

Waktu lalu rencana akan dibuat website, tapi akhirnya tidak terealisasi karena keterbatasan anggaran. (Wawancara, 07-10-2015)

Kenyataan yang ada apa yang diungkapkan informan belum terlaksana seperti melalui website, yang ada hanya melalui Medsos. Terkait agenda sidang di DPRD Manado bisa dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Apakah agenda sidang DPRD dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat? Demikian pernyatan informan MM:

Sepertinya tidak karena agenda sidang DPRD paling yang tahu hanya orang-orang yang datang ke kantor DPRD atau hanya membaca dikoran yang diliput oleh wartawan. (Wawancara, 23-10-2015)

Setiap Ranperda seharusnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Harusnya juga DPRD memiliki media khusus sebagai media informasi bagi masyarakat umum untuk mengetahui seluruh agenda kerja dan kegiatan DPRD termasuk produk perda yang dihasilkan oleh DPRD. Karena masyarakat masih banyak mengetahuinya melalui berita-berita di media massa atau Koran dan melalui berita online. Demikian pernyatan informan “JK”:

Belum. Harusnya DPRD memiliki media khusus sebagai media informasi bagi masyarakat umum untuk mengetahui seluruh agenda kerja dan kegiatan DPRD termasuk produk perda yang dihasilkan oleh DPRD. Karena masyarakat masih banyak mengetahuinya melalui berita-berita di media massa atau Koran dan melalui berita online. (Wawancara, 21-09-2015)

Materi Ranperda hanya dibagikan dan dimiliki oleh Pansus yang membahas Ranperda tersebut. Sehingga tidak mudah diakses oleh masyarakat. Demikian pernyataan informan “NT”:

Tidak dapat karena materi Ranperda hanya dibagikan dan dimiliki oleh Pansus yang membahas ranperda tersebut. (Wawancara, 29-09-2015)

Hal senada disampaikan bahwa setiap Ranperda tidak dapat juga diakses dengan mudah oleh masyarakat karena Ranperda itu hanya diketahui oleh DPRD. Demikian pernyataan informan “DS”:

Tidak karena Ranperda itu hanya diketahui oleh DPRD. (Wawancara, 29-09-2015)

Pernyataan informan JK, NT dan DS sejalan juga dengan pernyataan dari informan SL, MM.

Agenda sidang DPRD tidak mudah untuk dapat diakses dengan oleh masyarakat, menurutnya tidak. Karena agenda sidang DPRD Kota Manado hanya dapat dilihat dan diikuti oleh masyarakat melalui pemberitaan surat kabar atau berita online dan tidak semua masyarakat berlangganan koran ataupun membuka internet.Setiap Ranperda seharusnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Harusnya juga DPRD memiliki media khusus sebagai media informasi bagi masyarakat umum untuk mengetahui seluruh agenda kerja dan kegiatan DPRD termasuk produk Perda yang dihasilkan oleh DPRD. Karena masyarakat masih banyak mengetahuinya melalui berita-berita di media massa atau koran dan melalui berita online. Materi Ranperda hanya dibagikan dan dimiliki oleh Pansus yang membahas Ranperda tersebut. Sehingga tidak mudah diakses oleh masyarakat.

Dukungan DPRD terhadap partisipasi publik ditunjukkan dalam beberapa indikator. Pelembagaan partisipasi dalam bentuk *legal framework* yang memandai merupakan indikator terpenting selain kesediaan DPRD untuk menyediakan anggaran yang cukup bagi aktivitas partisipasi masyarakat. Indikator lain dapat dilihat dari pemberian informasi secara tulus kepada masyarakat tentang berbagai agenda sidang termasuk pelibatan masyarakat secara aktif dalam sidang-sidang terbuka dewan. Pemberian informasi yang tulus ditandai dengan pemilihan media informasi yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat seluas mungkin dan tersedia waktu yang memadai bagi masyarakat untuk mencerna informasi tesebut serta untuk terlibat dalam proses kebijakan yang terkait. Selain itu, dukungan DPRD terhadap partisipasi publik dapat dilihat dari ketulusannya untuk merespons berbagai opini publik tentang isu tertentu. Bila respons yang diberikan bersungguh-sungguh dalam arti opini publik benar-benar menjadi pertimbangan dalam prsoes pembuatan kebijkan, hal tersebut merupakan pertanda betapa besar dukungan DPRD terhadap partisipasi publik. Namun bila opini publik sekadar ditampung namun tidak menjadi pertimbangan utama dalam prose kebijakan maka hal tersebut menunjukkan rendahnya dukungan DPRD terhadap partisipasi publik.

1. Merespon opini publik

Pentingnya partisipasi sebagai strategi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat (*voice*) dalam proses pemerintahan daerah. Arti penting partisipasi pada intinya terletak pada fungsinya. Fungsi pertama adalah sebagai sarana swaedukasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan publik. Dalam fungsi ini, partisipasi masyarakat tidak akan mengancam stabilitas politik dan seyoganya berjalan di semua jenjang pemerintahan. Fungsi lain adalah sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintahan sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintahan.

Bagaimana bentuk respon yang dilakukan oleh DPRD terhadap opini publik? Demikian pernyataan informan HK:

Ditanggapi dan direspon dengan baik oleh DPRD Manado. (Wawancara, 14-09-2015)

Bagaimana bentuk respon yang dilakukan oleh DPRD terhadapa opini publik. Demikian pernyataan informan BP:

Ada yang ditindaklanjuti dalam rapat dengar pendapat dengan eksekutif danada yang di lakukan dengan fungsi pengawasan DPRD. (Wawancara, 14-09-2015)

Bagaimana bentuk respon yang dilakukan oleh DPRD terhadap opini publik? Demikian pernyataan informan JK:

Masih lebih banyak ditanggai langsung oleh masing-masing anggota DPRD. (Wawancara, 21-09-2015)

Bagaimana bentuk respon yang dilakukan oleh DPRD terhadap opini publik? Demikian pernyataan informan NT:

Tidak tahu. (Wawancara, 29-09-2015)

Bagaimana bentuk respon yang dilakukan oleh DPRD terhadap opini publik? Demikian pernyataan informan DS:

Kebanyakan bersifat individu orang perorang dari anggota DPRD yang memberikan respon, namun tidak semua juga anggota DPRD, hanya anggota-anggota tertentu saja. (Wawancara, 29-09-2015)

Bagaimana bentuk respon yang dilakukan oleh DPRD terhadap opini publik? Demikian pernyataan informan DM:

Ada tetapi lebih banyak yang bersifat individual. (Wawancara, 07-10-2105)

Bagaimana bentuk respon yang dilakukan oleh DPRD Manado terhadap munculnya opini publik? Demikian pernyataan informan SL:

Kita melihat urgensinya dan seberapa jauh opini tersebut menjadi konsumsi publik. Kita pertimbangkan untuk ditanggapi secara proporsional. (Wawancara, 23-10-2015)

Bagaimana bentuk respon yang dilakukan oleh DPRD terhadap opini publik? Demikian pernyataan informan MM:

Pada umumnya yang kita lihat dan amati itu kalau ada opini-opini yang berkembang di masyarakat biasanya hanya ditanggapi oleh orang perorang anggota DPRD dengan memberikakan tanggapan kalaupun ditanya oleh wartawan. Kalau lembaga DPRD mungkin diwakili oleh pimpinan DPRD. (Wawancara, 23-10-2015)

Bagaimana bentuk respon yang dilakukan oleh DPRD terhadap opini publik? Demikian pernyataan informan SS:

Ditindaklanjuti dengan pihak eksekutif melalui rapat dengar pendapat dengan pihak eksekutif. (Wawancara, 26-10-2015)

Bagaimana bentuk respon yang dilakukan oleh DPRD terhadap opini publik? Demikian pernyataan informan DR:

Setiap isu-isu publik kami DPRD terus mengikutinya, paling tidak merekam dan menjadikan bahan pertimbangan kami dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD. (Wawancara, 27-10-2015)

Apakah setiap isu yang berkembang dimasyarakat ditanggapi oleh DPRD Manado, isu-isu apa yang direspon, boleh disebutkan? Demikian pernyataan informan HK:

Ya, misalnya kemarin waktu kenaikan bahan bakar minyak ditanggapi dengan baik oleh DPRD. (Wawancara,14-09-2015)

Apakah setiap isu yang berkembang dimasyarakat ditanggapi oleh DPRD isu-isu seperti apa yang direspon, sebutkan. Demikian pernyataan informan BP:

Kami DPRD Manado terus berusaha untuk mencermati setiap isu yang muncul di masyarakat. Walaupun dalam pengamatan saya belum semua juga anggota DPRD Manado memiliki perhatian terhadap isu-isu yang ada. Isu-isu yang direspon oleh DPRD Manado antara lain, seperti: isu perkelahian antar kampung/lorong/keluarahan. (Wawancara, 14-09-2015)

Apakah setiap isu yang berkembang dimasyarakat ditanggapi oleh DPRD, dan isu-isu apa yang direspon sebutkan? Demikian pernyataan informan JK:

Tergantung isunya, apa sudah mendesak untuk ditangani atau belum. Maksudnya kalau isu itu sudah meresahkan atau menjadi masalah bersama dan mempengaruhi kehidupan masyarakat umum seperti misalnya isu tentang kenaikan BBM tentu hal itu pasti mendapat tanggapan dari anggota DPRD. (Wawancara, 21-09-2015)

Bagaimana respon DPRD terhadap demonstrasi serta audiensi dengan anggota DPRD berkaitan dengan masalah-masalah sentral dalam masyarakat? Demikian pernyataan informan HK:

Selalu ditanggapi tapi sayang ketika ada demonstrasi tidak semua anggota dewan yang menjalankan tugas tersebut dengan baik ada yang lari tapi ada yang dengan tegas menghadapi atau menyambut dan menerima setiap demonstran yang ada. (Wawancara, 14-09-2015)

Bagaimanakah respons DPRD terhadap demonstrasi serta audiensi dengan anggota DPRD terkait dengan masalah-masalah sentral dalam masyarakat? Demikian pernyataan informan BP:

Memang bilamana ada demonstrasi tidak semua anggota dewan yang menjalankan tugas untuk melayani dan menerima masyarakat yang melakukan demo tersebut dengan baik ada yang lari tapi ada yang dengan tegas menghadapi setiap demonstran yang ada. (Wawancara, 14-09-2015)

Bagaimana respon DPRD terhadap demonstrasi serta audiensi dengan anggota DPRD terkait dengan masalah-masalah sentral dalam masyarakat? Demikian pernyataan informan JK:

Diterima dan biasanya ada yang langsung ditindaklanjuti dan ada yang akan menjadi bahan masukan sebagai pertimbangan DPRD untuk membicarakannya dengan pihak eksekutif atau pihak-pihak yang terkait lainnya. (Wawancara, 21-09-2015)

Bagaimana respon DPRD terhadap demonstrasi serta audiensi dengan anggota DPRD Manado terkait dengan masalah-masalah sentral dalam masyarakat? Demikian pernyataan informan NT:

Dalam pengamatan saya, penerimaan demonstrasi atau audiensi dengan DPRD, belum diatur secara baku dan bersifat tetap. Jadi kalau ada demonstrasi yang menerima itu tergantung anggota kesiapan anggota yang ada pada saat adanya demonstrasi, bahkan ada anggota yang tidak siap dan tidak mau menerima para demonstrasi. Jadi belum ada ketentuan yang mengatur bagaimana tata cara penerimaan demonstrasi dan atau ada audiensi dengan DPRD Kota Manado. (Wawancara, 29-09-2015)

Bagaimana respon DPRD terhadap demonstrasi serta audiensi dengan anggota DPRD terkait dengan masalah-masalah sentral dalam masyarakat? Demikian pernyataan informan DS:

Terkesan banyak anggota DPRD tidak siap menerima kalau adanya demonstrasi dari masyarakat bahkan mungkin ada pimpinan DPRD maupun dan komisi yang alergi dan tidak pernah menyambut atau menerima demonstrasi dari masyarakat walaupun yang bersangkutan saat ada demo berada di kantor DPRD. (Wawancara, 29-09-2015)

Mengapa ada anggota Dewan yang tidak mau menerima bahkan terkesan menghindari menghadap para pendemo? Demikian pernyataan informan HK:

Untuk pengamatan saya, itu lebih disebabkan karena pada dasarnya mereka tidak memiliki kemampuan atau keberanian menyambut mereka. Singkatnya mereka tidak siap karena mereka tidak tahu bagaimana untuk melayani mereka. Ini sudah berhubungan dengan masalah sumberdaya manusia. (Wawancara, 14-09-2015)

Apakah ada tim khusus yang dibentuk untuk menangani opini-opini public? Demikian pernyataan informan BP:

Tidak ada karena setiap anggota dapat menggunakan haknya untuk menyatakan pendapat. (Wawancara, 14-09-2015)

Apakah ada tim khusus yang dibentuk untuk menangani opini-opini publik? Demikian pernyataan informan SS:

Ada. Bagian Hubmas DPRD. (Wawancara, 26-10-2015)

Dari data diatas dapat dipaparkan bahwa DPRD kurang merespon terhadap opini publik dalam hal ini terkait demonstrasi. DPRD dalam menerima demonstrasi belum ada mekanismenya misalnya siapa yang menerima terus setelahpun diterima tindaklanjutinya bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Yang kita saksikan dan amati malah ada anggota DPRD saat ada aksi demonstrasi dari elemen masyarakat di DPRD, yang bersangkutan tidak mau keluar untuk melayani atau menyambut para pendemo malah sebaliknya cepat-cepat menghindar dan pergi. Jadi kalau ada demonstrasi atau ada yang mau datang audiensi di DPRD biasanya sekretariatan mengatur dan mengkoordinasikan dengan pimpinan dulu atau anggota DPRD baru kemudian dilayani. Syukur-syukur kalau ada anggota Dewan yang langsung berinisiatif menerima dan menyambut mereka. Tapi kalau itu jarang ada anggota Dewan seperti itu. Respons DPRD Manado terhadap demonstrasi serta tanggapan DPRD terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Banyak anggota Dewan yang tidak mau menerima bahkan terkesan menghindari menghadap para pendemo mereka tidak memiliki kemampuan atau keberanian. Ini sudah berhubungan dengan masalah sumberdaya manusia. penerimaan demonstrasi atau audiensi dengan DPRD, belum diatur secara baku dan bersifat tetap. Jadi kalau ada demonstrasi yang menerima itu tergantung anggota kesiapan anggota yang ada pada saat adanya demonstrasi, bahkan ada anggota yang tidak siap dan tidak mau menerima para demonstrasi. Jadi belum ada ketentuan yang mengatur bagaimana tata cara penerimaan demonstrasi dan atau ada audiensi dengan DPRD Kota Manado. Selanjutnya apakah setiap isu yang berkembang dimasyarakat ditanggapi oleh DPRD, jawabnya tidak semua isu dan tidak semua anggota DPRD memberikan tanggapan hanya anggota-anggota tertentu saja terutama yang ditanya oleh wartawan. Isu-isu itupun tidak terkait dengan materi Ranperda inisiatif.

Pemberian informasi yang tulus ditandai dengan pemilihan media informasi yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat seluas mungkin dan tersedia waktu yang memadai bagi masyarakat untuk mencerna informasi tesebut serta untuk terlibat dalam proses kebijakan yang terkait. Selain itu, dukungan DPRD terhadap partisipasi publik dapat dilihat dari ketulusannya untuk merespons berbagai opini publik tentang isu tertentu. Bila respons yang diberikan bersungguh-sungguh dalam arti opini publik benar-benar menjadi pertimbangan dalam prsoes pembuatan kebijkan, hal tersebut merupakan pertanda betapa besar dukungan DPRD terhadap partisipasi publik. Namun bila opini publik sekadar ditampung namun tidak menjadi pertimbangan utama dalam prose kebijakan maka hal tersebut menunjukkan rendahnya dukungan DPRD terhadap partisipasi publik.

Dapat disimpulkan pada fokus Faktor Determinan dalam Pembuatan Perda Inisiatif dari DPRD Kota Manado terkait *Sub Fokus Partisipasi* berhubungan dengan mendorong: terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah serta keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu issu, sesuai data yang ada dapat disimpulkan belum optimal dilakukan oleh DPRD Kota Manado. Sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan pada faktor penentu akuntabilitas politik ini tidaklah akuntabel dilaksanakan oleh pihak DPRD Kota Manado. Hal tersebut tergambar pada indikator-indikator dibawah ini:

*Pelembagaan Partisipasi,* Perda inisiatif tidak diketahui oleh masyarakat luas. Secara administrasi dapat diketahui melalui SK DPRD namun tidak dilakukan secara transparan. Belum ada Perda di Kota Manado yang mengatur mengenai bagaimana peran masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Manado. DPRD tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.Kunjungan yang dilakukan oleh anggota DPRD Manado selama ini hanyalah melalui kegiatan reses anggota Dewan, dan juga kunjungan monitor dan pengawasan terhadap mitra kerja sesuai dengan bidang lingkup tugas komisi dan/atau pengawasan langsung ke lapangan. Dan untuk masukan dari masyarakat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu secara tertulis tidak ada yang ada lebih banyak disampaikan secara lisan. Masukannyapun lebih banyak terkait dengan masalah-masalah infrastruktur, masalah kemacetan, masalah listrik yang sering padam, singkatnya bukan berhubungan dengan pembahasan Ranperda inisiatif DPRD Manado.

*Pemberian Informasi,* Indikator pemberian informasi secara tulus kepada masyarakat tentang berbagai agenda sidang termasuk pelibatan masyarakat secara aktif dalam sidang-sidang terbuka dewan merupakan bentuk perwujudan proses akuntabilitas politik insstitusi DPRD, namun hal ini belum sepenuhnya dilakukan.agenda dan kegiatan DPRD Manado hanya disosialisasikan oleh jurnalis dari berbagai media, baik media cetak, elektronik, dan media online. Dan dari situ masyarakat dapat mengaksesnya. DPRD Manado, belum memiliki website atau media khusus untuk kebutuhan informasi tentang kegiatan Dewan yang dapat diakses oleh publik. Bila respons yang diberikan bersungguh-sungguh dalam arti opini publik benar-benar menjadi pertimbangan dalam prsoes pembuatan kebijkan, hal tersebut merupakan pertanda betapa besar dukungan DPRD terhadap partisipasi publik. Namun bila opini publik sekadar ditampung namun tidak menjadi pertimbangan utama dalam prose kebijakan maka hal tersebut menunjukkan rendahnya dukungan DPRD terhadap partisipasi publik.

*Merespon Opini Publik,* Pentingnya partisipasi sebagai strategi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat (*voice*) dalam proses pemerintahan daerah.DPRD Kota Manado kurang merespon terhadap opini publik dalam hal ini terkait demonstrasi. DPRD dalam menerima demonstrasi belum ada mekanismenya yang jelas. misalnya siapa yang menerima terus setelahpun diterima tindaklanjutinya bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya diserahkan pada pihak sekretariat dewan untuk penanganan hal tersebut.

Tabel 5.10 Temuan Sub Fokus Adanya Partisipasi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fokus: Faktor Determinan dalam Pembuatan Perda Inisiatif dari DPRD Kota Manado  Sub Fokus : Adanya Partisipasi Masyarakat | | |
| Indikator | Temuan | Ket |
| Partisipasi (legal framework) | 1. Perda inisiatif tidak diketahui oleh masyarakat luas. 2. Secara administrasi dapat diketahui melalui SK DPRD namun tidak dilakukan secara transparan. 3. Belum ada Perda di Kota Manado yang mengatur mengenai bagaimana peran masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Manado. | Belum sesuai harapan yang ada |
| Pemberian informasi berbagai agenda sidang terbuka kepada masyarakat | 1. Belum dilakukan pemberian informasi secara tulus kepada masyarakat tentang berbagai agenda sidang termasuk pelibatan masyarakat secara aktif dalam sidang-sidang terbuka dewan. 2. Agenda dan kegiatan DPRD Manado hanya disosialisasikan oleh wartawan melalui media mereka masing-masing. (media konvensional) | Belum sesuai harapan yang ada |
| Merespon opini publik. | 1. DPRD Kota Manado kurang merespon terhadap opini public. 2. Terkait penanganan Demonstrasi belum ada diatur mekanisme yang tepat. 3. Penangananan demonstrasi sebagai bagaian dari opini publik sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekwan. | Belum sesuai harapan yang ada |

Sumber: Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian (2016)

1. Adanya pengakuan atas kewenangan DPRD

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan bagi Pemerintah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Akuntabilitas disini merupakan kewajiban DPRD yang mendapat legitimasi untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan dan masyarakat sebagai *stakeholder* pemberi mandat kepada legislatif untuk menjalankan tugas dan kewenangnnya.

Akuntabilitas berkenaan dengan standar eksternal, yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi negara. Akuntabilitas ini yang menilai, adalah orang atau institusi yang berada diluar dirinya. Karenanya akuntabilitas ini, sering disebut sebagai tanggungjawab yang bersifat obyektif (*objective responsibility*). Responsibilitas obyektif ini bersumber kepada adanya pengawasan (*external control*) yang mendorong, atau memotivasi aparat untuk bekerja keras, sehingga prinsip *economy, efficiency, and effectiveness* dari organisas pemerintah dapat dikatakan *accountable*, apabila mereka dinilai secara oebyektif oleh orang (masyarakat atau melalui wakilnya) dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sikap, dan tindakannya kepada pihak mana kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki itu berasal.Secara keseluruhan DPRD dan pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada masyarakat luas.

1. Kemampuan lembaga untuk diakui

Para aparat dalam menjalankan tugas-tugasnya dan juga kewajibannya harus mengakui adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan pelaksanaan perintah-perintahnya dan tanggungjawab legal harus dapat diterima oleh para pejabat politik.

Untuk mendalami permasalahan yang ada peneliti mengajukan pertanyaan kepada beberapa informan mengenai apakah dalam pembuatan Perda sudah sesuai dengan ketentuan sehingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat saat diimplementasikan menurut informan “HK” bahwa belum semuanya aktif dan memberi perhatian memang proses pembentukan misalnya sejak perencanaan melalui Balegda, kemudian ditetapkan menjadi Prolegda dan masuk pada pembahasan apakah di komisi, gabungan komisi atau melalui pansus sampai pada peresetujuan memang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada, hanya saja keterlibatan dan keaktifan anggota DPRD Manado yang belum maksimal. Demikian pernyataan informan “HK”:

Belum semuanya aktif dan memberi perhatian memang proses pembentukan misalnya sejak perencanaan melalui Balegda, kemudian ditetapkan menjadi prolegda dan masuk pada pembahasan apakah di komisi, gabungan komisi atau melalui pansus sampai pada peresetujuan memang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada, hanya saja keterlibatandan keaktifan anggota DPRD Manado yang belum maksimal. (Wawancara, 14-09-2015)

Berbeda tanggapan “BP” terkait pembuatan Ranperda sudah sesuai dengan ketentuan sehingga mendapatakan pengakuan dari masyarakat saat diimplementasikan menurutnya sudah sesuai karena jika tidak sesuai berarti DPRD tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan dianggap mandul dalam bekerja. Demikian pernyataan informan “BP”:

Sudah sesuai karena jika tidak sesuai berarti DPRD tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan dianggap mandul dalam bekerja. (Wawancara, 14-09-2015)

Dalam pembuatan Ranperda sudah sesuai dengan ketentuan sehingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat saat diimplementasikanSudah sesuai atau belum sesuai nanti masyarakat yang melihatnya. Demikian pernyataan informan JK:

Sudah sesuai atau belum sesuai nanti masyarakat yang melihatnya. (Wawancara, 21-09-2015)

Belum sesuai ketentuan kembali ditegaskan oleh informan “NT” karena pengajuan atau pengusulan ranperda masih sepenuhnya disiapkan oleh Balegda dan tidak dibahas secara internal di DPRD sebelum diajukan kepada pemerintah kota Manado dan langsung pada pembahasan. Ranperda juga diajukan tidak dilampiri dengan naskah akademik sehingga pembuatan Perda atau Ranperda belum sesuai dengan ketentuan sehingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat saat diimplementasikan. Demikian pernyataan informan NT:

Kalau menurut saya belum sesuai ketentuan, karena pengajuan atau pengusulan ranperda masih sepenuhnya disiapkan oleh Balegda dan tidak dibahas secara internal di DPRD sebelum diajukan kepada pemerintah kota Manado dan langsung pada pembahasan. Ranperda juga diajukan tidak dilampiri dengan naskah akademik. (Wawancara, 29-09-2015)

Pernyataan informan NT ini sejalan juga dengan jawaban dari informan DS, DM, SL, MM, SS, HK.

Apakah proses dalam pembuatan Ranperda inisiatif DPRD sudah memenuhi opini kewajaran? Demikian pernyataan informan BP:

Kami anggota DPRD Manado khususnya pada periode lalu sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pembahasan Ranperda, walaupun disadari memang masih banyak kendala untuk mendapatkan Perda yang betul-betul sesuai yang diharapkan bersama. (Wawancara, 14-09-2015)

Apakah proses dalam pembuatan Ranperda inisiatif DPRD sudah memenuhi opini kewajaran? Demikian pernyataan informan JK:

Belum tahu. (Wawancara, 21-09-2105)

Apakah proses dalam pembahasan Ranperda inisiatif DPRD sudah memenuhi opini kewajaran? Demikian pernyataan informan NT:

Belum, karena belum adanya melibatkan unsur masyarakat, kalangan perguruan tinggi, LSM, pengamat dan lain sebagainya. (Wawancara, 29-09-2015)

Pernyataan dari informan NT ini juga sama dengan jawaban informan DS, DM, MM, DR, SL.

Dari data diatas belum semuanya secara maksimal mengikuti proses sesuai dengan yang diharapkan terutama peran dan keaktifan anggota DPRD yang diikuti oleh kualitas sumberdaya yang ada. Banyak yang belum aktif berperan. Usulan dari anggota DPRD saja untuk Ranperda inisiatif hingga sekarang ini belum ada. Kalaupun ada, Ranperda yang disiapkan oleh Balegda yang murni dari anggota DPRD atau prakarsa dari anggota DPRD belum ada sudah ada upaya walaupun belum sesuai oleh DPRD pada saat pembentukan Perda inisiatif anggota DPRD berusaha mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tetapi kalau juga waktu lalu prosesnya belum maksimal mengikuti mekanismenya, hal itu akan dijadikan bahan evaluasi sekaligus menjadi masukan nanti untuk melakukan perbaikan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Proses dalam pembuatan Perda inisiatif DPRD belum memenuhi opini kewajaran, pembahasannya tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam setiam proses pembahasan baik dalam proses pengusulan Prolegda, hingga persiapan penyusunan Ranperda dan pembahasan Ranperda. Itu belum mengikuti ketentuan yang sebenarnya.

Sesuai temuan penelitian bahwa belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai aturan karena faktor SDM dalam penguasaan prosedurnya yang masih kurang. Sebagian besar anggota DPRD partisipasi mereka baik dalam bentuk kehadiran, perhatian, keseriusan, kontribusi pikiran, ide dan gagasan masih belummaksimal. Disamping itu juga karena belum melibatkan unsur masyarakat, kalangan perguruan tinggi, LSM, pengamat dan lain sebagainya. Tanggung jawab yang besar harus diiringi dengan proaktif atau peran serta yang lebih, kalau kehadirannya saja kurang bagaimana mau berperan atau menguasai prosedurnya. Dimensi proses belum maksimal memenuhi ketentuan yang ada, dan pembuatan Ranperda oleh beberapa informan belum sesuai dengan ketentuan sehingga kurang mendapatkan pengakuan dari masyarakat saat diimplementasikan, karena proses pembuatan Perda apalagi Perda inisiatif belum merupakan inisiasi keinginan murni dari anggota Dewan.Dalam proses pembentukan Perda inisiatif masih ada kekurangan-kekurangannya terutama menyangkut prosedurnya, menyangkut naskah akademik yang terlambat disiapkan, belum lagi soal pengajuan Ranperda dari anggota dan komisi tidak siap ataupun Balegda.

1. Membentuk kepercayaan publik

Membentuk kepercayaan (*trust*) merupakan upaya atau usaha kesediaan (*willingness*) individu/anggota DPRD untuk mengantungkan dirinya pada pihak lain (masyarakat) yang terlibat pertukaran karena individu mempunyai keyakinan (*confidence*) terhadap pihak lain, dan kepercayaan merupakan gambaran sikap untuk menerima suatu pernyataan atau pendirian tanpa menunjukkan sikap pro atau kontra. Secara konsepsi kepercayaan lebih mudah untuk tumbuh di antara orang-orang yang memiliki kapentingan dan tujuan yang sama, sehingga lebih mudah untuk mengubah kepercayaan individu daripada mengubah kepercayaan suatu kelompok.

Kepercayaan merupakan bagian dari sikap. Sikap terdiri dari aspek kognitif, afektif dan konasi. Kepercayaan adalah aspek yang dibentuk dalam kognitif. Sikap itu sendiri merupakan suatu perilaku pasif yang tidak kasat mata, namun tetap akan mempengaruhi perilaku aktif yang kasat mata. Dengan adanya kepercayaan, seorang individu akan bersedia mengambil risiko yang mungkin terjadi dalam hubungannya dengan pihak lain. Ketergantungan pada pihak lain selalu terlibat dengan tingkat kepercayaan.

Kepercayaan publik diberikan melalui partisipasi masyarakat pada pembentukan Perda inisiatif. Secara normatif dalam UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur pada Bab X pasal 53 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Penjelasan Pasal 53 itu menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Senada dengan hal tersebut, dalam pasal 139 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Penjelasan Pasal 139 (1) tersebut menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Dari bunyi pasal 53 UU Nomor 10 Tahun2004 dan pasal l39 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004, serta Penjelasannya dapat diketahui bahwa: (1) masyarakat berhak memberikan masukan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda, (2) masukan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan (3) hak masyarakat tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda merupakan hak masyarakat, yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan.

Upaya membentuk kepercayaan publik yang dilakukan oleh DPRD Kota Manado, secara prinsip seharusnya mereka komit dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Peduli dengan masyarakat atau perhatian dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Jangan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi harus melihat dan berjuang bersama masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat melalui kerja DPRD Manado. Anggota DPRD sudah dipilih dan oleh masyarakat, sebab itu DPRD harus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Demikian pernyataan informan “HK”:

Harus komit dengan memperjuang kan aspirasi masyarakat. Peduli dengan masyarakat atau perhatian dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Jangan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi harus melihat dan berjuang bersama masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat melalui kerja DPRD Manado. Anggota DPRD sudah dipilih dan oleh masyarakat, sebab itu DPRD harus memperjuangkan kepentingan masyarakat. (Wawancara, 14-09-2015)

Membentuk kepercayaan publik yang dilakukan oleh DPRD dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dilapangan, secara output atau ketika ada demo masyaarkat harus dibela bukan didiskriminasi. Demikian pernyataan informan BP:

Dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dilapangan, secara output atau ketika ada demo masyarkat harus dibela bukan didiskriminasi dsb. (Wawancara, 14-09-2015)

Bagaimana membentuk kepercayaan publik yang dilakukan oleh DPRD? Demikian pernyataan informan JK:

Bekerja untuk kepentingan rakyat. (Wawancara, 21-09-2015)

Membentuk kepercayaan publik yang dilakukan oleh DPRD nampaknya kurang dioptimalkan, hal ini sesuai tanggapan informan yang mengatakan bahwa Tidak ada kepercayaan publik, karena DPRDnya tidak mau berubah dan berusaha melakukan perubahan, begitu-begitu saja Demikian pernyatan informan DS:

Tidak ada karena DPRD-nya tidak mau berubah dan berusaha melakukan perubahan, begitu-begitu saja. (Wawancara, 29-09-2015)

Membentuk kepercayaan publik dapat dilakukan oleh DPRD Manado dengan seharusnya DPRD meningkatkan kinerjanya dan harus benar-benar berorientasi pada usaha untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. DPRD harus aktif untuk berjuang bagi kepentingan rakyat. Demikian pernyataan informan “DM”:

Saya memiliki pandangan bahwa harusnya DPRD meningkatkan kinerjanya dan harus benar-benar berorinetasi pada usaha untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. DPRD harus aktif untuk berjuang bagi kepentingan rakyat. (Wawancara, 07-10-2015)

Untuk membentuk dan membangun kepercayaan publik oleh DPRD Kota Manado, sebenarnya akan sangat bergantung pada bagaimana DPRD Kota Manado benar-benar berjuang untuk kepentingan masyarakat. Harus berpihak kepada usaha membantu masyarakat terutama usaha untuk membangung kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Demikian pernyataan informan “SL”:

Menyangkut membentuk dan membangun kepercayaan publik terhadap DPRD, sebenarnya akan sangat bergantung pada bagaimana DPRD benar-benar berjuang untuk kepentingan masyarakat. Harus berpihak kepada usaha membantu masyarakat terutama usaha untuk membangun kesejahteraan masyarakat itu sendiri. (Wawancara, 23-10-2015)

DPRD seharusnya lebih banyak berbuat untuk kebaikan masyarakat yang memilihnya. Misalnya mereka harus berjuang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan bukti berjuang adanya perda inisiatif yang benar-benar menjawa kebutuhan masyarakat itu sendiri. Itu pasti akan mendapat kepercayaan dari masyarakat, sehingga kepercayaan publik dimiliki oleh DPRD. Demikian pernyataan informan “MM”:

Menurut saya harusnya DPRD itu lebih banyak berbuat untuk kebaikan masyarakat yang memilihnya. Misalnya mereka harus berjuang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan bukti berjuang adanya Perda inisiatif yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat itu sendiri. Itu pasti akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. (Wawancara, 23-10-201)

Bagaimana membentuk kepercayaan publik yang dilakukan oleh DPRD Kota Manado, caranya yaitu harus bersama-sama dengan masyarakat terutama berjuang untuk kepentingan masyarakat. Demikian pernyataan informan “SS”:

Hanya satu caranya yaitu harus bersama-sama dengan masyarakat terutam berjuang untuk kepentingan masyarakat. (Wawancara, 26-10-2015)

Upaya yang dilakukan dalam membentuk kepercayaan publik terkait dengan penyusunan perda inisiatif nampaknya tidak dilakukan. Mereka tidak mau berubah. Upaya DPRD biasa-biasa saja tidak ada yang menonjol, justru yang menonjol ada ketidakaktifan sebagian besar anggota DPRD Manado baik dalam menggunakan hak-haknya maupun tidak disiplinnya dalam persidangan-persidangan di DPRD Manado. Demikian pernyataan informan “DS”:

Itu tadi begitu-begitu saja mereka tidak mau berubah.Upaya DPRD biasa-biasa saja tidak ada yang menonjol, justru yang menonjol ada ketidakaktifan sebagian besar anggota DPRD Manado baik dalam menggunakan hak-haknya maupun tidak disiplinnya dalam persidangan-persidangan di DPRD Manado. (Wawancara, 29-09-2015)

Upaya yang dilakukan dalam membentuk kepercayaan publik terkait dengan penyusunan perda inisiatif dengan usaha merekam apa yang diinginkan oleh rakyat dan kami perjuangkan itu di DPRD. Demikian pernyataan informan “SL”:

Upaya pasti ada dan itu dilakukan melalui usaha merekam apa yang diinginkan oleh rakyat dan kami perjuangkan itu di DPRD. (Wawancara, 23-10-2015)

Sejak DPRD periode lalu hingga saat ini yang saya amati hampir tidak ada upaya yang benar-benar dilakukan oleh DPRD, hanya biasa-biasa saja tidak ada yang luar biasa. Demikian pernyataan informan MM:

Sejak DPRD periode lalu hingga saat ini yang saya amati hampir tidak ada upaya yang benar-benar dilakukan oleh DPRD, hanya biasa-biasa saja tidak ada yang luar biasa. (Wawancara, 23-10-2015)

Dari keseluruhan data yang dihimpun dapat dipaparkan bahwa DPRD seharusnya lebih banyak berbuat untuk kebaikan masyarakat yang memilihnya. Misalnya mereka harus berjuang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan bukti berjuang adanya perda inisiatif yang benar-benar menjawa kebutuhan masyarakat itu sendiri. Itu pasti akan mendapat kepercayaan dari masyarakat, sehingga kepercayaan publik dimiliki oleh DPRD.

1. Mempertahankan kepercayaan publik

Kepercayaan adalah adalah keyakinan bahwa orang lain tempat kita bergantung akan memenuhi harapan-harapan kita. Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang- orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai

DPRD Kota Manado dalam mempertahankan kepercayaan terhadap publik upaya terus dilakukan terkait dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda berusaha melibatkan unsur publik karena itu harus dan wajib dilakukan karena dalam membangun kepercayaan publik harus selalu dilakukan secara konsisten. Misalnya pihak akademisi dilibatkan, NGO, dsb yang mewakili masyarakat. namun harus secara struktural dan serius, bukan pajangan. Demikian pernyataan informan HK:

Upaya terus dilakukan terkait dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda selalu melibatkan unsur dari luar eksekutif karena itu harus dan wajib dilakukan karena dalam membangun kepercayaan publik harus selalu dilakukan secara konsisten. Misalnya pihak akademisi dilibatkan, namun harus secara struktural dan serius, bukan pajangan. (Wawancara, 14-09-2015)

Dalam penyusunan Perda seharusnya melibatkan unsur publik karena itu harus dan wajib dilakukan karena dalam membangun kepercayaan publik arus selalu konsisten, namun kenyataan memang hal ini masih jauh dari harapan masyarakat, kepercayaan sering kurang dipertahankan karena faktor kepentingan atau ada instruksi dari kelompok kepentingan partai. Di satu sisi ingin merespon aspirasi publik, namun disatu sisi harus taat pada kebijakan partai, kalau tidak, siap-siap di berhentikan, miris memang, namun dapat disimpulkan sepertinya tidak ada upaya mempertahankan kepercayaan yang diberikan publik sebagai wakil rakyat. Demikian pernyataan informan BP:

Dalam penyusunan perda seharusnya melibatkan unsur publik karena itu harus dan wajib dilakukan karena dalam membangun kepercayaan publik arus selalu konsisten, namun kenyataan memang hal ini masih jauh dari harapan masyarakat, kepercayaan sering kurang dipertahankan karena faktor kepentingan atau ada instruksi dari kelompok kepentingan partai. Di satu sisi ingi merespon aspirasi publik, namun disatu sisi harus taat pada kebijakan partai, kalau tidak, siap-siap di berhentikan, miris memang, namun dapat disimpulkan memang sepertinya tidak ada upaya mempertahankan. (Wawancara, 14-09-2015)

Bekerja dan bekerja untuk kepentingan rakyat yang seharusnya dilakukan oleh DPRD kota Manado jika ingin mempertahankan kepercayaan terhadap publik? Demikian pernyataan informan JK:

Harusnya bekerja dan bekerja untuk kepentingan rakyat. (Wawancara, 21-09-2105)

Jika ingin mempertahankan kepercayaan publik, maka DPRD harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat bukan kepentingan anggota DPRD sendiri. Jika dilihat dari produk Perda masyarakat disini akan dapat terlihat bagaimana keberpihakan DPRD Kota Manado kepada rakyat, kalau tidak apakah kepercayaan akan tetap diberikan kepada DPRD Kota Manado. Tentunya kedepan harus ada perbaikan sistem dalam DPRD itu sendiri dan moral individu, revolusi mental diperlukan. Demikian pernyataan informan “NT”:

DPRD harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat bukan kepentingan anggota DPRD sendiri. Jika dilihat dari produk Perda masyarakat akan dapat menilai keberpihakan kepada rakyat, nah jika tidak, apakah kepercayaan akan tetap diberikan kepada DPRD Kota Manado? Tentunya kedepan harus ada perbaikan sistem dan moral individu, revolusi mental diperlukan memang. (Wawancara, 29-09-2015)

Upaya mempertahankan kayaknya masih jalan ditempat atau masih begitu-begitu saja, kurang respon, acuh tak acuh, namun ini tidak semua seperti itu. Tetapi saya setuju kalau ada perubahan sistem regulasi yang lebih menekankan pada etika moral, kalau tidak komiut terhadap sumpah janji, tanda tangan saja kontrak atau pakta integritas, kalau melanggar, yah..sanksinya berhenti, kalau parpol terlibat tentu sanksinya kepercayaan masyarakat akan berkurang, dan tentu sangat berpengaruh pada pemilihan umum legislatif nanti, kan yang dipilih pertama kartena figur, namun Parpol juga menentukan, semua terukur pada kepercayaan masyarakat. Demikian pernyataan informan DM:

Sepertinya upaya mempertahankan kayaknya masih Jalan, atau ditempat begitu-begitu saja, kurang respon, acuh tak acuh, tapi kalau didepan publik berbanding terbalik, namun ini tidak semua seperti itu, tetapi saya setuju kalau ada perubahan sistem regulasi yang lebih menekankan pada etika moral, kalau tidak komit terhadap sumpah janji, tanda tangan saja kontrak atau pakta integritas, kalau melanggar sanksinya harus berhenti, kalau parpol terlibat tentu sanksinya kepercayaan masyarakat akan berkurang, dan tentu sangat berpengaruh pada pemilihan umum legislatif nanti, kan yang dipilih pertama kartena figur, namun Parpol juga menentukan, semua terukur pada kepercayaan masyarakat. (Wawancara, 29-09-2015)

Ada upaya DPRD mempertahankan kepercayaan terhadap publik, perlu berjuang untuk demi kepentingan masyarakat yang telah memilih kami sebagai anggota DPRD dan sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah menjadi tugas utama kami untuk berjuang bersama untuk mensejahterakan masyarakat. Demikian pernyataan informan “SL”:

Berusaha berjuang untuk demi kepentingan masyarakat yang telah memilih kami sebagai anggota DPRD dan sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah menjadi tugas utama kami untuk berjuang bersama untuk mensejahterakan masyarakat. (Wawancara, 23-10-2015)

Terkait DPRD mempertahankan kepercayaan terhadap publik sepertinya tidak ada yang spesial yang dilakukan DPRD untuk mempertahankan kepercayaan publik, malah sebaliknya ada kecenderungan masyarakat tidak lagi percaya terhadap DPRD. Demikian pernyataan informan “MM”:

Tidak ada yang spesial yang dilakukan DPRD untuk mempertahankan kepercayaan publik, malah sebaliknya ada kecenderungan masyarakat tidak lagi percaya terhadap DPRD. (Wawancara, 23-10-2015)

DPRD sebaiknya haruslah mempertahankan kepercayaan terhadap publik. Hal ini wajib untuk bersama dengan masyarakat dan bekerja, berjuang untuk kepentingan masyarkat. Harus dengan menunjukan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Kenyataan memang cenderung kepercayaan kepada kami sepertinya berkurang, namun pasti kami akan berusaha sesuai kemampuan kami. Memang tidak semua punya keinginan seperti itu. Demikian pernyataan informan “SS”:

Sekali lagi menurut saya, wajib untuk bersama dengan masyarakat dan bekerja, berjuang untuk kepentingan masyarkat. Harus dengan menunjukan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Kalau lihat kenyataan memang cenderung kepercayaan kepada kami sepertinya berkurang, namun pasti kami akan berusaha sesuai kemampuan kami. Memang tidak semua punya keinginan seperti itu, diakui ada yang tidak sesuai dengan janjinya, namun hal ini terjadi pada beberapa orang saja, namun secara institusi, secara keseluruhan yang kena, ibarat pepatah nila setitik merusak susu sebelanga. (Wawancara, 26-10-2015)

Jika ingin mempertahankan kepercayaan publik, maka DPRD harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat bukan kepentingan anggota DPRD sendiri.

Temuan yang ada terkait DPRD Kota Manado mempertahankan kepercayaan terhadap publik sepertinya belum maksimal dan secara khusus belum ada yang luar biasa yang dilakukan DPRD untuk mempertahankan kepercayaan publik, masih cenderung terbalik sehingga masyarakat kurang manaruh kepercayaan terhadap DPRD Kota Manado.

Akuntabilitas politik menjadi indikator penting kemampuan suatu pemerintahan memperoleh kepercayaan dari masyarakatnya. Akuntabilitas menjadi satu parameter yang tidak dapat dipisahkan dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat. Akuntabilitas menjadi semacam kewajiban moral *(moral obligation)* dari para pemimpin yang dipilih secara absah oleh pendukungnnya atau rakyatnya. Keyakinan masyarakat akan akuntabilitas seorang pemimpin akan diikuti dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan yang telah dibuat oleh legislatif.

Pada sub fokus adanya legitimasi atau pengakuan, dapat disimpulkan bahwa DPRD Kota Manado belum menunjukan adanya kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan yang dimiliki. Hal ini tergambar pada ketiga indikator dibawah ini:

*Kemampuan lembaga untuk diakui,* belum sepenuhnya mendapat pengakuan masyarakat, diakibatkan karena karena faktor SDM dalam penguasaan prosedurnya yang masih kurang serta kurang profesionalnya DPRD Kota Manado dalam menjalankan tugasnya karena ketidakpahaman akan aturan yang ada. Contohnya pada pengajuan atau pengusulan ranperda masih sepenuhnya disiapkan oleh Balegda dan tidak dibahas secara internal di DPRD sebelum diajukan kepada pemerintah kota Manado dan langsung pada pembahasan. Ranperda juga diajukan tidak dilampiri dengan naskah akademik sehingga pembuatan Perda atau Ranperda belum sesuai dengan ketentuan sehingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat saat diimplementasikan, sehingga hal ini sulit bagi masyarakat untuk mengakui akan kemampuan lembaga ini, sehingga opini kewajaran belum diperoleh dari masyarakat terkait pembuatan Perda inisiatif.

*Membentuk kepercayaan publik,* kurangnya mendapat kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD Kota Manado, sehingga institusi ini perlu secara aktif membentuk kepercayaan publik dalam program kerjanya, namun hal tersebut belum secara optimal dilakukan. Belum semua masyarakat dapat mengikuti dan mengetahui seluruh agenda kerja maupun sidang di DPRD Manado. Webside saja tidak efektif karena kurang maksimalkan oleh bagian hubmas DPRD Kota Manado. Hal tersebut disebabkan kurang proaktifnya DPRD Kota Manado dalam perencanaan anggaran terkait memaksimalakan informasi kepada masyarakat secara transparan agar masyarakat dapat membentuk kepercayaan kepada DPRD Kota Manado dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

*Mempertahankan kepercayaan*, Kurang dilakukan oleh DPRD Kota Manado. Kepercayaan publik dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi yang dilakukan publik terhadap pembuatan Perda inisiatif di DPRD Kota Manado.

Tabel 5.11 Temuan Sub Fokus Adanya Pengakuan atas Kewenangan DPRD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fokus:Faktor Determinan dalam Pembuatan Perda Inisiatif dari DPRD Kota Manado  Sub Fokus : Adanya Pengakuan atas Kewenangan DPRD | | |
| Indikator | Temuan | Ket |
| *Kemampuan lembaga untuk diakui* | 1. Belum sepenuhnya mendapat pengakuan masyarakat, diakibatkan karena karena faktor SDM dalam penguasaan prosedurnya yang masih kurang serta kurang profesionalnya DPRD Kota Manado dalam menjalankan tugasnya karena ketidakpahaman akan aturan yang ada. | Belum sesuai harapan yang ada |
| *Membentuk kepercayaan publik* | 1. Kurangnya mendapat kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD Kota Manado, sehingga institusi ini perlu secara aktif membentuk kepercayaan publik dalam program kerjanya, | Belum sesuai harapan yang ada |
| *Mempertahankan kepercayaan* | 1. Kurang dilakukan oleh DPRD Kota Manado. Kepercayaan publik dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi yang dilakukan publik terhadap pembuatan Perda inisiatif di DPRD Kota Manado. | Belum sesuai harapan yang ada |

Sumber: Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian (2016)

Adapun kesimpulan secara keseluruhan dari hasil temuan pada Fokus Faktor Determinan dalam Pembuatan Perda oleh DPRD Kota Manado dapat disajikan oleh peneliti dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 5.12 Temuan Penelitian Faktor Determinan dalam Pembuatan Perda

di DPRD Kota Manado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Fokus | Temuan | Indikator Akuntabilitas |
| 1. | Partisipasi Masyarakat | 1. Kurangnya melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi. Dan belum ada Perda yang mengatur peran masyarakat dalam pembuatan Perda 2. Pemberian informasi bagi masyarakat tentang pembuatan Perda belum dilakukan secara maksimal 3. Belum optimalnya DPRD Kota Manado dalam merespon opini publik | 1. Pelembagaan partisipasi 2. Pemberian informasi 3. Merespon opini publik |
| 2. | Adanya pengakuan atas kewenangan. | 1. Kemampuan lembaga yang minim karena tidak ditunjang dengan SDM yang memadai, berbagai prosedur yang belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai aturan. 2. Kurangnya mendapat kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD Kota Manado. 3. Produk Perda inisiatif belum maksimal sehingga kepercayaan publik terhadap DPRD sulit dikembangkan dan dipertahankan. | 1. Kemampuan lembaga, 2. Kepercayaan publik   c.Mempertahankan kepercayaan publik |

Sumber: Diolah Peneliti dari Hasil Temuan Penelitian (2016)

1. **Model akuntabilitas politik di DPRD Kota Manado dalam pembuatan Peraturan Daerah**

Secara teori, akuntabilitas politik dapat dipahami adanya legitimasi program oleh masyarakat melalui partisipasinya dalam sistem demokrasi serta pengakuan atas kewenangan politik yang dimiliki oleh DPRD untuk mengatur, membuat dan menetapkan keputusan politik. Indikator akuntabilitas ini merujuk pada apa yang dikemukakan oleh David Hulme dan Mark Turner yang mengformulasikan 6 (enam) indikator utama, yaitu: Adanya legitimasi program oleh masyarakat melalui partisipasinya dalam sistem demokrasi serta pengakuan atas kewenangan politik yang dimiliki oleh DPRD untuk mengatur, membuat dan menetapkan keputusan politik.Indikator akuntabilitas ini merujuk pada apa yang dikemukakan oleh David Hulme dan Mark Turner yang mengformulasikan 6 (enam) indikator utama, yaitu: (1) *legitimacy decision makers* (legitimasi DPRD sebagai pembuat Perda), (2) *moral conduct* (keberadaan kualitas moral dari DPRD), (3) *responsiveness* (kepekaan terhadap aspirasi yang berkembang), (4) *openness* (keterbukaan atas informasi dan partisipasi), (5) *optimal resource utilization* (pemanfaatan sumberdaya secara optimal), dan (6) *improving efficiency and effectiviness* (peningkatan efisiensi dan efektivitas).

1. Proses pelaksanaan akuntabilitas politik pada DPRD Kota Manado dalam pembuatan Peraturan Daerah

*Legitimacy decision makers* adalah adanya pengakuan atau keabsahan dalam pembuatan dan pembahasan serta penetapan Perda yang berasal dari DPRD. Pada Sub fokus ini untuk mengetahui proses akuntabilitas yang dilaksanakan dibagi lagi menjadi beberapa indikator, yakni: (1) *constitutions* adalah pelaksanaan kewenangan pembuatan Perda oleh DPRD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) *electoral systems for governments and decisions-making*, dalam hal ini berkaitan dengan sistem dan mekanisme yang digunakan dalam pengajuan dan pembahasan serta penetapan Perda yang dilakukan oleh DPRD bersama eksekutif, (3) *bureaucratic system of representation,* adalah pelaksanaan sistem perwakilan dalam pembuatan Perda di DPRD, (4) *royal prerogrative,* berkaitan dengan hak istimewa yang melekat pada DPRD dalam hal ini hak untuk mengajukan Ranperda (hak inisiatif), (5) *legislation,* dalam hal ini tugas dan fungsi DPRD sebagai pembuat peraturan, (6) *letters of appointment,* dalam hal ini terkait dengan adanya kerjasama dalam pembahasan Ranperda baik DPRD dengan pihak eksekutif, (7) *formal delegation of authority,* adanya pendelegasian kewenangan secara formal dalam pelaksanaan pembahasan Ranperda secara delegatif, (8) *standing orders*, adanya muatan kepentingan tertentu oleh DPRD sebagai titipan atau pesanan dari pihak tertentu dalam pembahasan Ranperda.

*Moral conduct* adalah suatu keadaan kualitas moral yang mendukung dalam proses pembahasan dan penetapan Perda yang berasal dari DPRD. Akuntabilitas sebagai kewajiban bagi DPRD untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan. Akuntabilitas ini, sering disebut sebagai tanggungjawab yang bersifat obyektif (*objective responsibility*).

*Responsiveness* adalah menunjuk pada kepekaan menangkap dan memenuhi keinginan dan kepentingan publik atau masyarakat. Sehubungan dengan materi yang diatur dalam Perda secara substansial dan terkait langsung dengan persoalan-persoalan publik atau berhubungan langsung dengan pengaturan tentang kebutuhan publik disatu pihak dan terkait dengan kepentingan pemerintah, maka membangun konstruksi kebijakan yang transparan, partisipatif, akomodatif menjadi penting untuk menjadi pertimbangan utama bagi DPRD sebagai lembaga politik pembentukan Perda.

*Openness,* adalah menunjuk pada adanya keterbukaan dari DPRD Kota Manado terkait dengan proses agenda pengajuan, pembahasan dan penetapan setiap Perda kepada publik atau masyarakat. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat dipahami dan dapat dimonitor dukungan DPRD Kota Manado terhadap tranparansi atau keterbukaan kepada publik ditunjukkan melalui keterbukaan disetiap pelaksanaan kebijakan. DPRD dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki tugas bersama dengan eksekutif dalam mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik, sesuai dengan tugas kewenangan dan fungsi yang dimilikinya. Terutama dalam melaksanakan fungsi legislasi atau pembuatan peraturan daerah (Perda) bersama-sama dengan unsur eksekutif. Dalam proses pembuatan peraturan daerah penerapan unsur-unsur dan prinsip-prinsip *good governance* menjadi penting dan urgen sebagai pedoman pelaksanaannya demi untuk membangun kesejahteraan masayakat.

1. Faktor determinan dalam pembuatan Perda inisiatif dari DPRD Kota Manado

Faktor Determinan dalam Pembuatan Perda yang berasal dari DPRD, dalam penelitian ini menggunakan pengembangan dari teori Jabbra dan Dwivedi tentang akuntabilitas politik yang merujuk pada 2 (dua) sub fokus sebagai pisau analisis yang dijadikan sebagai teori operasional. Kedua sub fokus tersebut, yaitu: (1) adanya partisipasi, dan (2) adanya legitimasiataupengakuan.

Pertama: Adanya partisipasi, maksudanya disini adalah adanya keterlibatan masyarakat, baik dalam aktivitas mengatur maupun mengurus urusan pemerintahan daerah. Keterlibatan masyarakat ini merupakan aktivitas partisipasi yang dijalankan, baik dalam kerangka mekanisme partisipasi yang disediakan maupun tidak disediakan oleh DPRD dan pemerintah daerah. Ada 3 indikator (Muluk,2007:233), yaitu: (1) partisipasi (*legal framework*), (2) pemberian informasi berbagai agenda sidang terbuka kepada masyarakat, (3) merespon opini publik.

Kedua: Adanya legitimasi atau pengakuan, yaitu adanya kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan yang dimiliki (Seymour, 1969). Indikatornya, adalah: (1) kemampuan lembaga untuk diakui, (2) membentuk dan mempertahankan kepercayaan.

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam proses penyusunan Perda, yaitu: (1) Transparansi/keterbukaan. Proses yang transaparan memberikan kepada masyarakat: (a) informasi tentang akan ditetapkan suatu kebijakan, dan (b) peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Hal penting dalam proses pengambilan keputusan adalah bahwa kegiatan ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah secara langsung. Proses yang transparan haruslah mampu meniadakan batas antara pemerintah dan non pemerintah. (2) Partisipasi. Partisipasi mendorong: (a) terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah, dan (b) keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu issu Partisipasi mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan akuntabilitas, serta mendorong publik untuk mengamati apa yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi publik tercermin dalam: (a) kesempatan untuk melakukan kajian terhadap rancangan keputusan, (b) kesempatan untuk memberikan masukan, dan (c) tanggapan terhadap masukan publik dari pengambil keputusan, dalam hal ini pemerintah.

1. Model akuntabilitas politik di DPRD Kota Manado dalam pembuatan Peraturan Daerah
2. *Theoritical Model*

Penelitian ini membagi 3 (tiga) Fokus yakni: (1) proses akuntabilitas politik pada DPRD Kota Manado dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah, (2) faktor determinan dalam pembuatan peraturan daerah, (3) alternatif model akuntabilitas politik DPRD Kota Manado.

Gambaran yang lebih operasional dari konsep yang digunakan sebagai pisau analisis disetiap fokus dalam penelitian ini, dapat dideskripsikan sebagai berikut:akuntabilitas politik menunjuk pada adanya legitimasi program oleh masyarakat melalui partisipasinya dalam sistem demokrasi serta pengakuan atas kewenangan politik yang dimiliki oleh DPRD untuk mengatur, membuat dan menetapkan keputusan politik. Indikator akuntabilitas ini merujuk pada apa yang dikemukakan oleh David Hulme dan Mark Turner yang mengformulasikan 6 (enam) indikator utama, yaitu: Adanya legitimasi program oleh masyarakat melalui partisipasinya dalam sistem demokrasi serta pengakuan atas kewenangan politik yang dimiliki oleh DPRD untuk mengatur, membuat dan menetapkan keputusan politik.Indikator akuntabilitas ini merujuk pada apa yang dikemukakan oleh David Hulme dan Mark Turner yang mengformulasikan 6 (enam) indikator utama, yaitu: (1) *legitimacy decision makers* (legitimasi DPRD sebagai pembuat Perda), (2) *moral conduct* (keberadaan kualitas moral dari DPRD), (3) *responsiveness* (kepekaan terhadap aspirasi yang berkembang), (4) *openness* (keterbukaan atas informasi dan partisipasi), (5) *optimal resource utilization* (pemanfaatan sumberdaya secara optimal), dan (6) *improving efficiency and effectiviness* (peningkatan efisiensi dan efektivitas), (David Hulme and Mark Thurner, 1987).

Faktor Determinan, Faktor yang menentukan dalam proses pembahasan dan pembuatan Perda oleh DPRD. Indikator untuk faktor deteriminan ini merujuk pada pengembangan konsep akuntabilitas politik yang dikemukakan oleh Jabbra dan Dwivedi, yaitu the legitimate of public program with participation. Indikator dari rujukan konsep tersebut adalah, meliputi: (1) adanya partisipasi, dan (2) adanya pengakuan atas kewenangan (Jabbra and Dwivedi, 1989).

Alternatif Model, Adalah suatu model alternatif yang merupakan hasil rekomendasi dari penelitian ini setelah menganalisis dari aspek theroitical model dan existing model sebagai hasil kajian dari fokus akuntabilitas politik dan fokus faktor determinan dalam pembuatan Perda oleh DPRD yang dalam penelitian ini akan melahirkan rekomendasi tentang model akuntabilitas politik DPRD.

Akuntabilitias politik DPRD sebagai sebuah organisasi publik yang memiliki tanggungjawab etis-politik kepada rakyat, salah satu indikatornya adalah terletak pada sejauh mana isntitusi ini memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilihnya melalui berbagai kebijakan yang berbentuk peraturan daerah yang dibahas secara bersama-sama dengan kalangan eksekutif (pemerintah) yang akan bemuara pada program-program yang didukung oleh anggaran yang secara teknis operasional akan dilaksanakan oleh jajaran eksekutif dibawa kendali walikota sebagai kepala daerah. Aspek yang perlu dipertanggungjawabkan DPRD kepada publik adalah terkait dengan bagaimana *proses* dan *prosedur* perencanaan,(Scachter, 2003) penyusunan dan pembahasan berbagai hal yang terkait dengan kepentingan masyakarat yang kemudian melahirkan *produk* kebijakan dalam bentuk Perda.

Alternatif Model, Adalah suatu model alternatif yang merupakan hasil rekomendasi dari penelitian ini setelah menganalisis dari aspek theroitical model dan existing model sebagai hasil kajian dari fokus akuntabilitas politik dan fokus faktor determinan dalam pembuatan Perda oleh DPRD yang dalam penelitian ini akan melahirkan rekomendasi tentang model akuntabilitas politik DPRD.

Aspek yang perlu dipertanggungjawabkan DPRD kepada publik adalah terkait dengan bagaimana *proses* dan *prosedur* perencanaan, penyusunan dan pembahasan berbagai hal yang terkait dengan kepentingan masyakarat yang kemudian melahirkan *produk* kebijakan dalam bentuk Perda.

Adapun *theoritical model* yang dapat digambarkan dibawah ini untuk melihat tingkat akuntabilitas Politik di DPRD Kota Manado:

AKUNTABILITAS POLITIK

MODEL AKUNTABILITAS POLITIK DPRD KOTA MANADO

Proses Pelaksanaan Akuntabilitas Politik

- *Legitimacy of decision maker, Moral conduct, Responsiveness, Openness, Optimal resourcesutilization, Improving efficiency and effectiveness. (*(David Hulme and Mark Thurner, 1987)

Faktor-faktor Determinan:

1. Partisipasi Masyarakat

2. Adanya legitimasi

((Jabra and Dwiveidy, 1989)

Tingkat Pelaksanaan:

-Proses

-Prosedur

-Produk

(Schacter, 2003)

Gambar 5.1 *Theoritical Model* Tingkat Akuntabilitas

1. Prosedur pada pembuatan Perda Inisiatif*(Normative Model)*

Pada hakekatnya setiap kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk di negara kesatuan Republik Indonesia seyogyanya harus berlandaskan pada dasar negara kita yaitu Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan). Berangkat dari bagan yang nanti akan dipaparkan, maka keseluruhan proses pembentukan kebijakan ketentaun peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah yang dibentuk oleh DPRD harus merujuk pada Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian tidak juga bertentangan dengan ketentuan peraturan yang diatasnya. Untuk melihat bagaimana landasan kebijakan pembuatan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia termasuk didalamnya tentang kebijakan pembuatan Perda, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

1. UU NO. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Pasal 42)

Tugas dan Wewenang DPRD dalam pembentukan Perda

1. UU No. 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyususnan Peraturan DPRD

Tata Cara Pembentukan Perda (Pasal 81, 82, 83)

Ranperda dapat berasa dari:

1. Ranperda dari eksekutif

2. Ranperda dari DPRD dapat diajukan oleh:

Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, Balegda

3. Ranperda diajukan berdasarkan Prolegda

4. Dalam keadaan tertentu DPRD atau kepala daerah dp mengajajukan Ranperda diluar Prolegda

Pemendagri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Bab II Pasal 3 Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan Daerah

Peraturan DPRD Kota Manado No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Manado

Bab IX Pasal 85 dan 86

Pasal 85:

1. Ranperda dapat berasal dari DPRD dan Walikota

2. Ranperda disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik

3. Ranperda diajukan berdasarkan Prolegda

4. Dlm keadaan tertentu Ranperda dp diajikan diluar Prolegda

Pasal 86:

1. Ranperda yang berasal dari DPRD diaujukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda

2. Ranperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik

AKUNTABILITAS POLITIK

* UU No. 32/2004 Paragraf Keempat Pasal 45 (g) kewajiban tanggung jawab politik
* Peraturan DPRD Kota Manado No. 4/2010 ttg pertanggung kewajiban jawaban DPRD kepada konstituen/ masyarakat yang memilih secara politis

Gambar 5.2 Landasan Kebijakan Pembuatan Perda

Sumber: Diolah Peneliti (2016)

Bagan di atas dapat dijelaskan sebagaimana yang telah diatur dalam konsitusi UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 18 ayat 3 Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian hal ini lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan UU tersebut, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masing-masing dengan kedudukan yang sama tinggi. Dalam konteks ini, kepala daerah diharapkan bekerja sama secara serasi dengan DPRD atas dasar prinsip kemitraan agar tertib pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan baik. Dasar perwujudannya adalah pembagian tugas yang jelas dan tidak tumpang tindih, yaitu Kepala Daerah menjalangkan fungsi eksekutif, dan DPRD menjalankan fungsi legislatif, disamping fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Adapun wujud dari fungsi legislatif dapat dikelompokkan dalam tiga dimensi: (1) representais, (2) pembuatan keputusan, dan (3) pembentunkan legitimasi (Priyatmoko, 1993). Sebagai representasi, DPRD mewakili keanekaragaman demografis (jenis kelamin, umur, lokasi), sosiologis (strata sosial), ekonomi (pekerjaan, pemilikan atau kekayaan), kulutural (adat, kepercayaan, agama), dan politik dalam masyarakat. Kemudian pembuatan keputusan merupakan fungsi DPRD dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah demi tercapainya kesejahteraan bersama yang disepakati. Sedangkan fungsi ketiga berupa pembentukan legitimasi adalah fungsi DPRD, atas nama rakyat, dalam menghadapi pihak eksekutif. Secara konstitusional, DPRD berfungsi membentuk citra pemerintahan umum, dimana pemimpin dan atau kebijakansanaan-kebijaksanaan yang baik dan tidak baik, atau yang dapat diterima dan didukung oleh seluruh rakyat.Aktualisasi dari tugas dan fungsi DPRD khususnya berkaitan denan pembentukan paraturan daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Paragraf Ketiga tentang Tugas dan Wewenang Pasal 42 ayat 1 bagian (a) membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, (b) membahas dan menyetujui rancangan Perda tenang APBD bersama dengan kepala daerah.

Rancangan Perda itu sendiri dapat bersumber dari DPRD tetapi juga dapat berasal dari pihak eksekutif. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Bab IX tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Pasal 81: (1) rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah, (2) rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala darah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, (3) rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan berdasarkan program legislasi daerah, (4) dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar program legislasi daerah.

Selanjutnya Pasal 82 berbunyi: (1) rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah, (2) rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretarian DPRD, (3) rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 oleh pimpin DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian, (4) pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada rapat paripurna DPRD, (5) rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD, (6) dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 5: (a) pengusul memberikan penjelasan, (b) fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan, dan (c) pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya, (7) rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, berupa: (a) persetujuan, (b) persetujuan dengan pengubahan, atau (c) penolakan, (8) dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daeah tersebtu, (9) rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah.

Selanjutnya untuk Ranperda yang berasal dari kepala daerah diatur lebih lanjut pada Pasal 83: (1) rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah diajukan dengan surat kepala daerah kepada pimpin DPRD, (2) rancangan peraturan daerah yang berasal dari keapala daerah disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian selanjutnya tentang pembahasan rancangan peraturan daerah, diatur pada Pasal 85: (1) rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama, (2) pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II, (3) pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat 2, meliputi: (a) dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah, 2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah, dan 3. Tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi, (b) dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukakan dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah, 2. Pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda, dan 3. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya, (4) pembicaraan tingkat II sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, meliputi: a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasana, pen dpat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c, dan, 2. Permintahaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna, 3. Pendapat akhir kepala daerah, (5) dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, (6) dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Persetujuan rancangan peraturan diatur pada Pasal 87: (1) rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, (2) penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 88 mengatur tentang penetapan peraturan daerah: (1) rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan kepala daerah, (2) dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak ditandatangani oleh kepala daerah paling lambat 30 (tiga pulu) hari sejak ancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah, (3) dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka kalimat pengesahannnya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah, (4) kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah, (5) peraturan daeah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah, (6) peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daereah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau gubernu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain regulasi tersebut juga dalam aktualisasi tugas dan fungsi DPRD dalam hal pembuatan peraturan daerah, diatur lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2011. Dalam ketentuan Bab II tentang Produk Hukum Daerah Pasal 3 dimana Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum daerah dan pada Pasal 4 diatur tentang Perda, yaitu ada Perda Provinsi dan ada Perda Kabupaten/Kota. Penyusunan Program Legislasi Daerah (Porlegda) dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Jadi ada penyusunan Prolegda dari pemerintah juga ada Prolegda di lingkungan DPRD itu sendiri. Kepala daerah menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD. Kemudian Prolegda di lingkungan DPRD diatur berdasarkan Pasal 12 sebagai berikut: (1) Balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD, (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Ranperda, (3) penyusunan dan penetapak Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Ranperda tentang APBD Kota. Selanjutnya pasal 25 mengatur tentang pengajuan Ranperda oleh kepala daerah kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan setelah sebelumnya Ranperda tersebut disusun oleh Tim Penyusun Rancangan Perda yang dibentuk oleh kepala daerah. Dan setelah Ranperda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan, maka kepala daerah kepala daerah membentuk tim asistensi pembahasan Ranperda yang diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah (Pasal 26).

Untuk penyiapan penyusunan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27: (1) rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda, (2) rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pokiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk dilakukan pembahasan (Pasal 32). Penjabaran lebih teknis lagi terhadap penyelenggaran kerja politik DPRD Kota Manado ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado.

Aktualisasi Akuntabilitas politik DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya merujuk pada berbagai bentuk regulasi atau kebijakan yang bersifat normative tersebut. Atas rujukan tersebut maka DPRD sebagai wujud tanggungjawab politis terhadap konstituen yang telah memilihnya. Salah satu tugas bentuk perwujudan Akuntabilitas politiknya adalah dengan melaksanakan kerja politik sebagaimana yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

1. Empirical model akuntabilitas politik di DPRD Kota Manado

Model Akuntabilitas yang ada *(Empirical model)* berdasarkan temuan yakni melalui hasil data primer yaitu dengan wawancara mendalam dan dari data sekunder yaitu dokumen-dokumen hasil temuan peneliti, maka *empirical model* dari DPRD Kota Manado adalah sebagai berikut:

Proses Pembentukan Perda Insiatif

DPRD Kota Manado

1. Landasan Regulasi (Prosedur):

* UU Nomor 32/2004,
* UU Nomor 10/2004 yang diubah dengan UU Nomor 12/2011,
* PP Nomor 16/2010
* Permendagri Nomor 53/2011
* Peraturan DPRD Kota Manado Nomor 04/2010

B. Pelaksana:

* Balegda
* Pansus/Komisi
* Unsur Pemerintah

I. Tahap Penyusunan Prolegda:

A. Penyusunan Prolegda antara DPRD Kota Manado dan Pemerintah Kota Manado dikoordinasi oleh Balegda

B. Rapat paripurna untuk kesepakatan dan penetapan Prolegda dengan keputusan DPRD Kota Manado

A

K

U

N

T

A

B

I

L

I

T

A

S

P

O

L

I

T

I

K

II. Tahap Pembentukan Perda Insiatif

1. Rapat paripurna memutuskan usul Ranperda yang diajukan oleh Balegda.
2. Draft Ranperda dan Naskah akademik belum disiapkan

III. Tahap Pembahasan Perda

*A. Pembicaraan Tingkat I*

1. Pendapat Walikota Manado terhadap Ranperda

2. Tanggapan Fraksi terhadap pendapat Walikota Manado

3. Pembahasan melalui Pansus bersama dengan Walikota

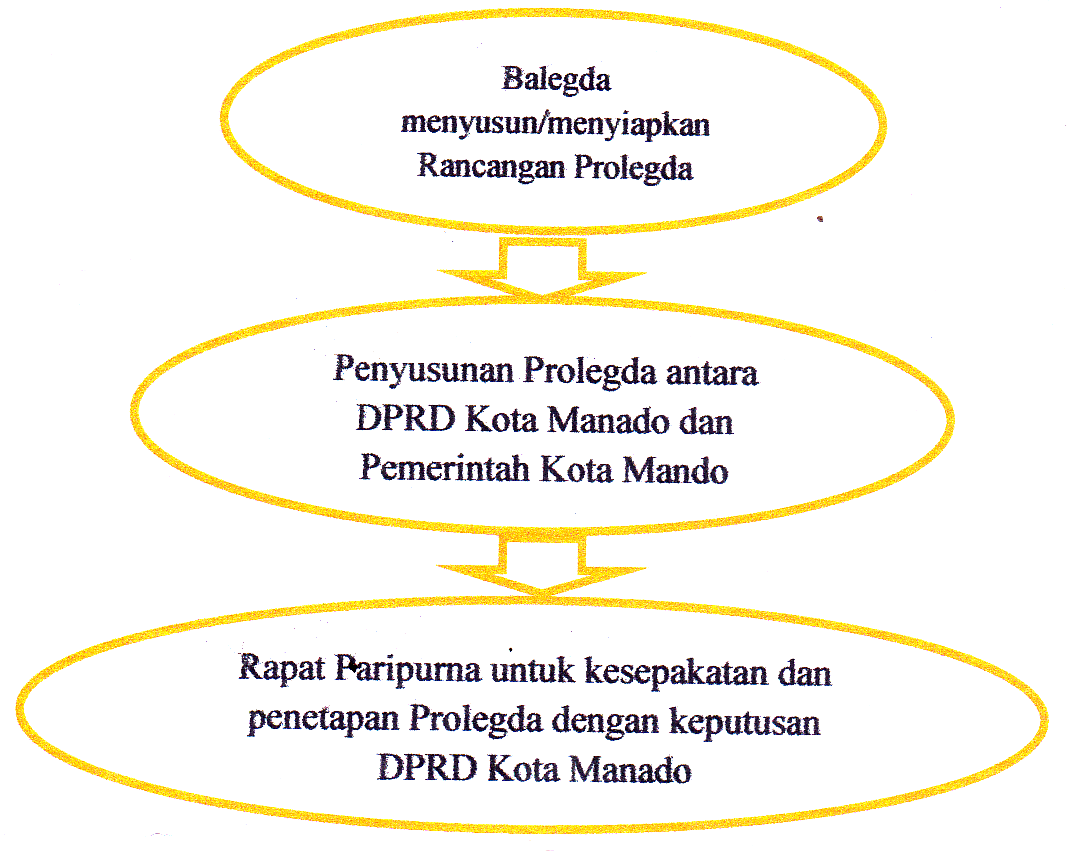
*B. Pembicaraan Tingkat II*Pengambilan keputusan dan pendapat akhir Walikota Manado

Feedback Proses Akuntabilitas Politik Pada Pembuatan Perda Inisiatif DPRD Kota Manado

Gambar 5.3 *Existing/Empirical* Akuntabilitas Politik DPRD Kota Manado dalam Pembuatan Perda Inisiatif (Sumber: Diolah oleh Peneliti)

Dapat dijelaskan pada *Empirical model* diatas dalam proses pelaksanaan akuntabilitas politik DPRD Kota Manado dalam pembuatan Perda dimana berdasarkan temuan peneliti dilihat dari tingkat akuntabilitas prosedur, proses dan produk masih sangatlah rendah, begitu juga dilihat dari proses akuntabilitas politik, pada pembuatan Perda Inisiatif dimana tingkat akuntabilitas cenderung rendah dilihat pada indikator *Legitimacy of decision maker, Moral conduct, Responsiveness, Openness, Optimal resourcesutilization, Improving efficiency and effectiveness* dimana berdasarkan pada temuan dari peneliti di lapangan. Proses pelaksanaan akuntabilitas Politik di DPRD Kota Manado dalam Pembuatan Perda dapatlah disimpulkan tidaklah sesuai prosedur atau belum memenuhi ketentuan peraturan, sehingga dapat disimpulkan tidaklah akuntabel.Adapun prosedur yang dimaksud yakni sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 16 tahun 2010 dan Peremendagri Nomor 53 Tahun 2011 serta Peraturan DPRD Kota Manado Nomor 04 Tahun 2010, bahwa Tata Cara Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kota Manado dilakukan melalui 2 (dua) Tahapan, yaitu (1) Tahap Persiapan Penyusunan Perda dan (2) Tahap Pembahasan Perda.

Pada tahap persiapan penyusunan Perda dilakukan dengan kegiatan dimana Ranperda disiapkan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, Balegda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD Manado, kemudian pimpinan DPRD Kota Manado menyampaikan Ranperda tersebut kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian, hasil kajian Balegda disampaikan dalam rapat paripurna oleh pimpinan DPRD Manado, dan Ranperda yang telah dikaji oleh Balegda disampaikan oleh pimpinan DPRD Manado kepada semua anggota DPRD Manado selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna dilaksanakan. Dan dalam rapat paripurna diberikan kesempatan pengusul Ranperda memberikan penjelasan setelah itu fraksi dan anggota DPRD Manado lainnya memberikan pandangan dan diakhiri dengan kembali pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD Manado lainnya. Setelah mekanisme tersebut dilalui baru kemudian rapat paripurna memutuskan usul Ranperda tersebut, berupa persetujuan, persetujuan dengan pengubahan, atau menolak. Dan setelah itu Ranperda usul DPRD Manado disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Manado kepada Walikota Manado. Dan selanjutnya persiapan masuk dalam pembahasan Ranperda dalam rapat paripurna DPRD Kota Manado yang dihadiri dan diikuti oleh Pemerintah Kota Manado (Walikota bersama jajarannya). Dilanjutkan dengan pembahasan yang menempuh 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.



Gambar 5.4 Proses Penyusunan Prolegda di DPRD Kota Manado

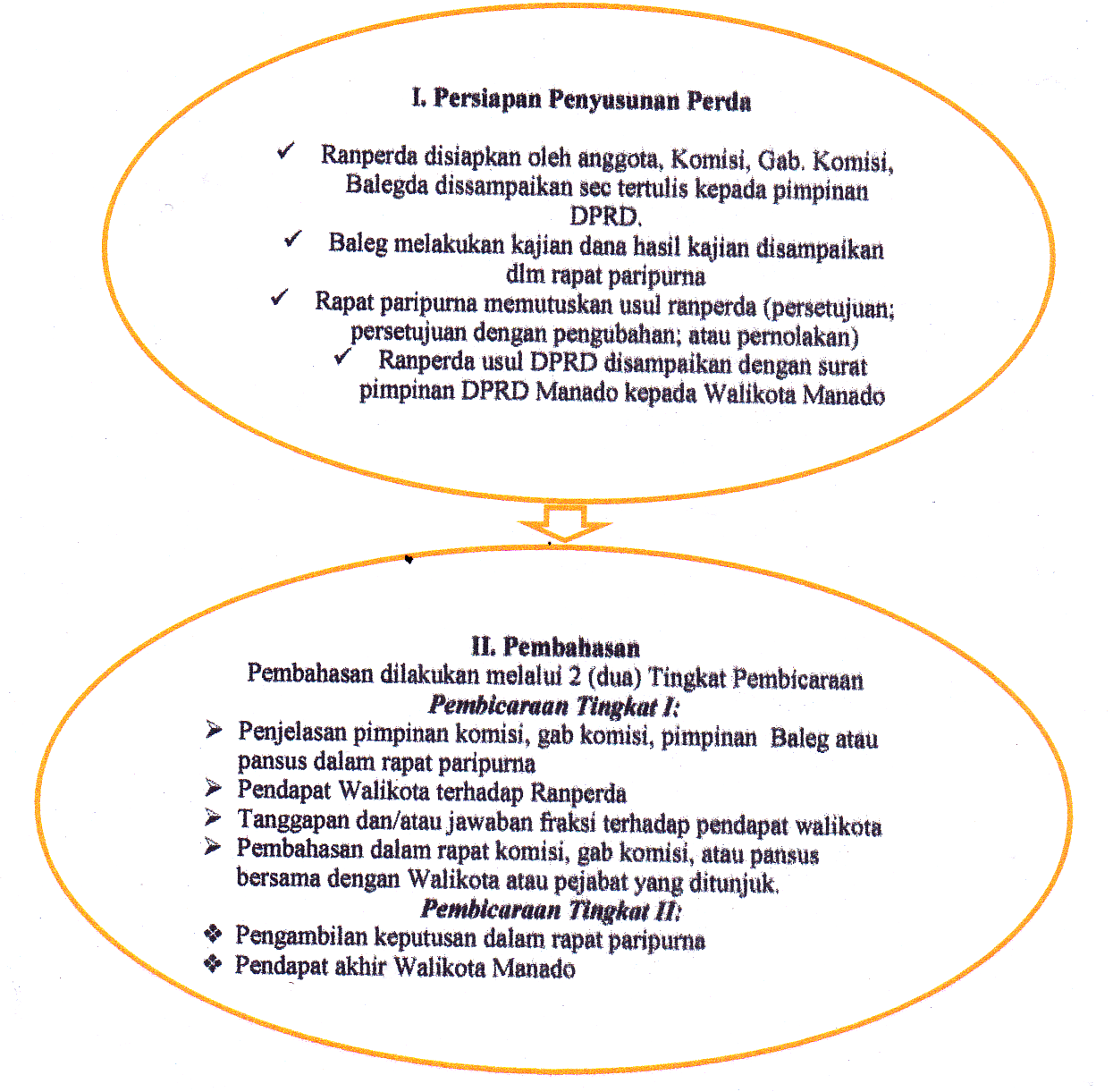
Sumber: Peraturan DPRD Kota Manado Nomor 04 Tahun 2010

Kemudian untuk pembentukan Perda khususnya Perda inisiatif DPRD apabila merujuk pada ketentuan yang ada, maka setiap anggota selain Komisi, Gabungan Komisi dan Balegda memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tetapi kenyataannya berdasarkan hasil data penelitian hingga saat ini hal tersebut belum ada anggota DPRD Kota Manado menggunakan hak tersebut sebagai representasi sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Manado.

Demikian juga proses pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kota Manado (Perda Inisiatif DPRD) dalam prakteknya tidak lagi mengikuti proses dan prosedur yang diatur dalam ketentuan baik dalam Peraturan DPRD Kota Manado Nomor 04 Tahun 2010 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011. Persiapan penyusunan Perda inisiatif DPRD Kota Manado tidak lagi melalui proses rapat paripurna khususnya terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tetapi langsung Ranperda tersebut dibahas tahap pembahasan Perda bersama dengan pihak pemerintah yang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.

Kemudian juga proses pembahasannya ditingkat pertama tidak dilakukan mengikuti tahapan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang ada. Harusnya Perda yang berasal dari DPRD Kota Manado (Perda inisiatif) dilakukan melalui kegiatan yang diawali oleh penjelasan oleh pimpinan pansus kalau sudah ada pansus, dan atau oleh pimpinan Balegda dalam rapat paripurna, baru kemudian ada pendapat dari Walikota Manado terhadap Ranperda yang diajukan oleh DPRD Kota Manado, dan diakhiri dengan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota Manado. Namun kenyataannya yang dilakukan adalah proses sebagaimana tahapan apabila Ranperda tersebut berasal dari pihak pemerintah, yaitu dengan kegiatan yang diawali oleh penjelasan Walikota kemudian tanggapan dari Fraksi dan kembali jawaban dari Walikota terhadap tanggapan fraksi-fraksi.

Proses tata cara pembentukan Perda inisiatif dari DPRD Kota Manado secara normatif dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 5.5 Model Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kota Manado

Sumber: Peraturan DPRD Kota Manado Nomor 04 Tahun 2010

1. **Pembahasan**
2. **Proses pelaksanaan akuntabilitas politik pada DPRD Kota Manado dalam pembuatan Peraturan Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyan Daerah (DPRD) sebagaimana yang dimanatkan oleh undang-undang tentang pemerintahan daerah, memiliki peran yang sangat strategis dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Dalam kedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggaran pemerintah didaerah lembagai DPRD memiliki fungsi membentuk peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Kebijakan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, mestinya juga harus dipahami oleh DPRD sebagai lembaga representasi rakyat bahwa regulasi tersebut secara jelas menunjukkan dan mengedepankan keberpihakannya kepada rakyat. Hal ini dinyatakan secara implisit dalam tataran konsep desentralisasi dimana intinya adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada masyarakat bukan kepada pemerintah daerah. Artinya kebijakan undang-undang tersebut mengakui dan menempatkan masyarakat sebagai hal yang utama dalam penyelenggaraan dan pengelolalan berbagai urusan yang ada.

Lahirnya undang-undang otonomi daerah ini sekaligus juga telah terjadi pergeseran model pemerintahan lokal bila dibandingkan dengan kebijakan desentralisasi sebelum lahirnya undang-undang ini seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Saat ini, *structural efficency model* telah bergeser menjadi *local democracy model*. Meski pergeseran antar model tersebut bukan yang pertama dalam rentang sejarah perubahan kebijakan pemerintahan daerah di Indonesia, namun pengutamaan model yang terakhir ini mempertegas fungsi desentralisasi untuk mengakomodasi kemajemukan aspriasi masyarakat lokal. Kebijakan desentralisasi melahirkan *political variety* untuk menyalurkan *local voice* dan *local choice* (Hoessein, 2002). Dalam model ini jelas terlihat bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia menghendaki penyelenggaran pemeritnahan daerah yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Partisipasi menjadi konsep penting karena masyarakat ditempatkan sebagai subyek utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Era reformasi tahun 1998 ditanah air Indonesia, telah membawa angin perubahan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan dari sistem sentralistik dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 kepada sistem desentralisasi dan otonomi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa semangat tersendiri terhadap daerah yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan desentralisasi itulah, masyarakat menjadi unsur utama pemerintah daerah. Ada 4 tujuan yang hendak dicapai, yakni: memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat, meningkatkan peran serta masyarkat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD (Muluk, 2007:2).

Merujuk pada hasil penelitian ini dimana telah dilihat dari beberap indikator untuk melihat akuntabilitas politik , yakni: legitimasi bagi para pembuat kebijakan *(legitimacy decisions makers)*, keberadaan kualitas moral yang memadai *(moral conduct),* kepekaan *(responsiveness),* keterbukaan *(openess)*, pemanfaatan sumber daya secara optimal *(optimal resource utilization)*, dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas *(improving efficiency and effectiveness)*, Maka nampak bahwa belum akuntabelnya proses pelaksanaan akuntabilitas politik pada DPRD Kota Manado terkait pada proses, prosedur, dan produknya.Jika merujuk pada teori akuntabilitas bahwa untuk menjawab hal tersebut diatas, Schacter (2000) menyatakan bahwa akuntabilitas seringkali dinyatakan sebagi bentuk operasional dan responsibilitas, karena keduanya sangat berkaitan. Artinya, setiap aparat pemerintah harus bertanggung jawab *(responsible)* atas pelaksanaan tugastugasnya secara efektif, efisien, produktif dengan tetap menjaga berlangsungnya tugas-tugas dengan baik dan lancar, mengelolanya secara profesional, dan pelaksanaan berbagal peran yang dapat dipercaya. Sedangkan Miriam Budiardjo mengartikan akuntabilitas, yaitu persoalan seputar pertanggungjawaban yang diberikan mandat untuk memerintah (pemerintah) kepada mereka yang memberi mandat itu (publik) (Budiardjo, 1998). Pada batasan ini, akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan kedaulatan rakyat, sebab bertanggungjawabnya penguasa kepada rakyat berarti mengakui bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan yang sesungguhnya.

Aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, perlu diukur kinerjanya dengan jelas. Dalam kaitan ini, Levine, dkk. (1990) mengusulkan ada tiga konsep penting dalam pengukuran kinerja birokrasi publik terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya yaitu konsep akuntabilitas *(accountability)*, responsibilitas *(responsibility*), dan responsivitas *(responsiveness).* Ketiga konsep tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Akuntabilitas *(accountability),* berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi negara. Akuntabilitas publik menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, karena dilihat dari dimensi kinerja birokrasi publik tidak bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, tetapi juga dinilai dan ukuran eksternal seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Kedua, Responsibilitas *(responsibility)* berkenan dengan standar profesional dan kompetisi teknis yang dimiliki administrator negara dalam menjalani tugasnya. Administrator negara dinilai *responsible* jika perilakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi.Tiga, *Responsivitas*, merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dalam pengembangan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Akuntabilitas adalah “*government to explain and justify publicly the way its uses its power, and take prompt corrective action when things go wrong*” (Schacter:2000) pemerintah menjelaskan dan memberi pembenaran secara terbuka bagaimana Ia menggunakan kekuasaannya dan segera melakukan tindakan koreksi bila ada sesuatu kesalahan). Akuntabilitas merupakan aktivitas untuk memberikan penjelasan dan alasan pembenaran atas tindakan (cara) yang dilakukan dalam menggunakan kekuasaan, dan mengambil tindakan korektif ketika terjadi kesalahan. Pengertian ini memberikan pemahaman yang Iebih luas tentang makna akuntabilitas. Artinya, akuntabilitas tidak sekedar mencakup aktivitas untuk memberikan penjelasan atas tindakan yang telah dilakukan, namun juga mencakup kegiatan melakukan koreksi terhadap tindakan yang dinilai sah atau tidak tepat. Dengan demikan, akuntabilitas pada hakikatnya Iebih sebagai siklus *(cycle)* yang terdiri atas sejumlah aktivitas fungsional daripada sebagai sebuah aktivitas tunggal (*single action*) (Schacter, 2000). Secara konseptual apa yang dikemukakan para Ahli sudah ter]adi.

Teori *Governance* dengan salah satu pendekatannya yang disebut *socio cybernatics approach* (Rhoders,1996), intinya bahwa sejalan dengan pesatnya perkembangan masyarakat dan kian kompleksnya isu yang harus segera diputuskan, beragamnya institusi pemerintah serta kekuatan masyarakat madani (*civil society*) yang berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan (*policy making*), maka hasil akhir (*out come*) yang memuaskan dari kebijakan publik tidak mungkin dicapai jika hanya mengandalkan sektor pemerintah tetapi terkait fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD srta partisipasi dari masyarakat dan privat sector. Dimana secar teknis bahwa Kebijakan publik yang efektif dari sudut pandang teori *governance* adalah produk sinergi interaksional dari beragam aktor atau institusi (Abdul Wahab, 2007:64).

Kemudian pernyataan tersebut kembali dipertegas oleh Bhatta, (1997) secara umum *governance* mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*opennes*), dan aturan hukum (*rule of law*). Kemudian keempat unsur tersebut Adamulekun dan Bryan dalam Indradi (2007:56) menambahkan dua unsur lainnya yaitu kompetensi manajemen (*management competence)* dan hak-hak asasi manusia (*human rights*). Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan bagian dari unsur *governance* (meskipun pada tingkatan pengertian umum atau global). Sedangkan kompetensi manajemen lebih cenderung merupakan akibat atau gejala (*sympton*) dari adanya *good governance* daripada sebagai bagian daru unsur utama.

Berkaitan dengan *good governance*, UNDP merumuskan ciri-ciri pokok (*key features*) *good governance* adalah: (1) bahwa legitimasi pemerintah diakui dan diterima secara umum oleh rakyatnya, (2) bahwa masyarakat memiliki kebebasan individu maupun kelompok untuk berserikat dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan, pembangunan pelayanan publik, (3) bahwa kerangka landasan hukum telah dibentuk secara jelas dan diketahui, dipahami, dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat, (4) bahwa pemerintah memiliki akuntabilitas yang tinggi serta transparan dalam setiap tindakan dan kebijakannya, (5) bahwa pemerintah selalu menyediakan informasi yang akurat bagi masyarakat untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan. Pendekatan inilah yang dilakukan untuk melihat proses akuntabilitas yang dilakukan oleh DPRD dalam membuat suatu kebijakan bersama dengan eksekutif.

Sebuah pendekatan terbalik dilakukan oleh Kennet Thompson sebagaimana yang dikutip oleh Riswanda Imawan (2007:46), daripada menyebutkan ciri *good governance*, dia lebih suka menyebutkan ciri *bad governance*. Kebalikan dari ciri *bad governance* inilah yang layak disebut sebagai *good governance*. Menurut Thompson, ciri *bad governance* adalah: (1) tidak adanya pemisahan yang jelas antara kekayaan dan sumber-sumber milik rakyat dan miliki pribadi, (2) tidak ada aturan hukum yang jelas dan sikap pemerintah yang tidak kondusif untuk pembangunan, (3) adanya regulasi yang berlebihan sehingga menyebabkan “ekonomi biaya tinggi”, (4) prioritas pembangunan yang tidak konsisten, (5) tidak adanya tranparansi dalam pengambilan keputusan.

*Good governance* mengarahkan kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Pola dan gaya pemerintah harus segera dibenahi dan dikembangkan dengan menggunakan konsep *good governance* sebagaimana diuraikan oleh Stoker (1998:50) dalam lima proposisi kepemerintahan yang baik (*good governance*), sebagai berikut: (1) *governance refers to a complex set of institution and actors that are draw from but also beyond government.* Penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu memanfaatkan seperangkat institusi dan aktor baik dari dalam maupun luar birkoraksi pemerintah, (2) *governance recognize the blurring of boundaries and responsibilities for tackling social and economic issues*. Penyelenggara pemerintahan yang baik tidak memun gkinkan lagi terjadinya trikotomi peran sektor pertama (eksekutif dan legislatif): sektor kedua (swasta) dan sektor kegita (masyarakat) dalam menangani masalah-masalah sosial-ekonomi, karena peran tersebut sekarang sudah demikian kabur. Peran ketiga sektor tersebut seyogyanya menyatu padu karena mereka mempunyai kepentingan dan komitmen yang sama tingginya untuk mengatasi sosial ekonomi tersebut, (3) *governance identifies the power dependence involved in the relationship between institution involved in collective action.* Penyelenggara pemerintahan yang baik mengakui adanya saling ketergantungan diantara ketiga sektor tersebut diatas dalam peran bersama untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi. Tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tidak membutuhkan lagi satu kekuatan atau sektor maupun yang dominan yang melebihi perannya atas yang lain, melainkan semua berinteraksi dan berinterelasi serta punya akses yang sama dalam berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, (4) *governance is about autonomous self governing networks of actors.* Penyelenggara pemerintahan yang baik merupakan jaringak kerja antar sektor dari ketiga kekuatan (sektor) yang menyatu dalam suatu ikatan yang kuat. Institusi-insitusi dan aktor-aktor ketiga sektor tadi akan menjadi kekuatan yang solid dan dahsyat bila mereka bersedia memberikan dan menerima kontribusi sumber-sumber, keahlian, kepentingan maupun tujuan-tujuan dalam rangka mencapai tujuan bersama yang diinginkan, (5) *governance recognizies the capacity to get thing done which does not rest on the power of government to command or use its authority. It sees government as able to used new tools and techniques to steer and guide.*

Sebagai landasan berpijak dari teori operasional yang dijadikan sebagai pisau analisis dari ke tiga fokus dalam penelitian ini, peneliti menyandingkan dengan pandangan dari UNDP (2000:7) yang merumuskan karakteristik *good governance,* sebagai berikut: (1) *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan/kebijakan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. (2) *Rule of law.* Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. (3) *Transparancy.* Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat dipahami dan dapat dimonitor. (4) *Responsiviness.* Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*. (5) *Consensus orientation. Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijkan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. (6) *Equity.* Seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. (7) *Effectiviness and efficiency.* Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. (8) *Accountability.* Para pembuat keputusan dalam pemerintahan (s*tate*), sektor swasta (*privat sector/market*) dan masyarakat madani (*civil society*) bertanggungjwab kepada publik dan lembaga-lembaga s*takeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. (9) *Strategic vision.* Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pembangunan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Dari sudut pandangan ini Akuntabilitas Publik merupakan kewajiban bagi penyelenggara kebijakan (pembuatan, pelaksanaan dan penilaian) dalam hal ini adalah DPRD Kota Manado untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya itu kepada publik, baik tindakan yang berhasil terlebih lagi tindakan yang gagal. Sehingga dalam pelaksanaan akuntabilitas politikoleh legislatif perlu memperhatikan prinsip-pninsip berikut: (1) harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, (2) harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumbersumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan, (4) harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (5) harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan dan memperlibatkan pencapaian misi yang ditetapkan (Benveniste, 1991). Organisasi pemerintahan dibuat oleh publik untuk kepentingan publik karena itu perlu mempertanggungjawabkan dan kebijakannya kepada publik (Widodo, 2000). Kemudian (Rakhmat, 2009) dalam administrasi negara disebut akuntabilitas. Akuntabilitas dalam konteks ini ada bagian dari pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat terkait kinerja yang dilakukan, apakah sesuai dengan regulasi yang ada ataukah belum. Hal ini terkait pada kinerja DPRD Kota Manado dalam pembuatan Perda. Teori akuntabilitas publik ini adalah sebagai dasar teori *(grand Theory)* untuk menyandingkannya dengan operasional teori yakni akuntabilitas politik yang dalam aktualisasi regulasi terlihat pada proses, prosedur dan produknya dari DPRD Kota Manado didalam pembuatan Perda inisiatifnya.

Secara operasional Penelitian ini membagi 3 (tiga) Fokus yakni: (1) proses akuntabilitas politik pada DPRD Kota Manado dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah, (2) faktor determinan dalam pembuatan peraturan daerah, (3) alternatif model akuntabilitas politik DPRD Kota Manado. Gambaran yang lebih operasional dari konsep yang digunakan sebagai pisau analisis disetiap fokus dalam penelitian ini, dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Akuntabilitas Politik, adanya legitimasi program oleh masyarakat melalui partisipasinya dalam sistem demokrasi serta pengakuan atas kewenangan politik yang dimiliki oleh DPRD untuk mengatur, membuat dan menetapkan keputusan politik. Indikator akuntabilitas ini merujuk pada apa yang dikemukakan oleh David Hulme dan Mark Turner yang mengformulasikan 6 (enam) indikator utama, yaitu: adanya legitimasi program oleh masyarakat melalui partisipasinya dalam sistem demokrasi serta pengakuan atas kewenangan politik yang dimiliki oleh DPRD untuk mengatur, membuat dan menetapkan keputusan politik. Indikator akuntabilitas ini merujuk pada apa yang dikemukakan oleh David Hulme dan Mark Turner yang mengformulasikan 6 (enam) indikator utama, yaitu: (1) *legitimacy decision makers* (legitimasi DPRD sebagai pembuat Perda), (2) *moral conduct* (keberadaan kualitas moral dari DPRD), (3) *responsiveness* (kepekaan terhadap aspirasi yang berkembang), (4) *openness* (keterbukaan atas informasi dan partisipasi), (5) *optimal resource utilization* (pemanfaatan sumberdaya secara optimal), dan (6) *improving efficiency and effectiviness* (peningkatan efisiensi dan efektivitas).

Selanjutnya untuk melihat faktor Determinan atau Faktor yang menentukan dalam proses pembahasan dan pembuatan Perda oleh DPRD, maka sebagai tools atau alat untuk melihat akuntabel atau tidaknya berdasarkan penelitian yang ada ditentukan Indikator untuk faktor deteriminan ini merujuk pada pengembangan konsep akuntabilitas politik yang dikemukakan oleh Jabbra dan Dwivedi, yaitu *the legitimate of public program with participation*. Indikator dari rujukan konsep tersebut adalah, meliputi: (1) adanya partisipasi, dan (2) adanya pengakuan atas kewenangan.

Sedangkan untuk menghasilkan Alternatif Model dimana adalah suatu model alternatif yang merupakan hasil rekomendasi dari penelitian ini setelah menganalisis dari aspek *theroitical model* dan *existing model* sebagai hasil kajian dari fokus akuntabilitas politik dan fokus faktor determinan dalam pembuatan Perda oleh DPRD yang dalam penelitian ini akan melahirkan rekomendasi tentang model akuntabilitas politik DPRD.

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian menunjukan bahwa pada fokus satu Sub Fokus *Legitimacy Decision Makers* (Legitimasi dari Pembuat kebijakan) dapat disimpulkan sebagai berikut: *Constitutions* dimana pelaksanaan kewenangan pembuatan Perda oleh DPRD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belumlah sesuai harapan yang ada. Dari temuan diperoleh bahwa prosedur atau tata cara pengajuan dan pembahasan Ranperda yang berasal dari DPRD Kota Manado dimulai dari setiap komisi menyusun program-program legislasi lalu disampaikan kepada Baleg untuk dikaji apakah disetujui atau tidak. Namun hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan atau tidak memenuhi prosedur dan belum memenuhi regulasi yang ada. Selanjutnya tentang prosedur atau tata cara dalam pengajuan dan pembahasan Ranperda yang berasal dari DPRD Kota Manado, dari temuan yang diperoleh sebagian besar anggota DPRD Kota Manado belum melaksanakan secara maksimal Tupoksi.

Dari data diatas dapat didiskusikan dengan teori bahwa akuntabilitas paling tidak memiliki lima dimensi penting, yaitu: (1) ada pihak yang melaksanakan akuntabilitas, (2) ada mekanisme akuntabilitas, (3) akuntabilitas dilaksanakan kepada siapa, (4) ada ukuran atau standar dalam meniIai pelaksanakan akuntabilitas, dan (5) ada nilai-nilai yang terkandung dalam akuntabilitas itu sendiri. Sheila Elwood, mengemukakan 4 (empat) jenis akuntabilitas publik, yaitu: (1) *accountability for probity and legality* (akuntabilitas hukum dan peraturan), (2) *process accountability* (akuntabilitas proses), (3) *program accountability* (akuntabilitas program) dan (4) *policy accountability* (akuntabilitas kebijakan). Pertama, Akuntabilitas hukum dan peraturan *(accountability for probity and legality),* yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan *(complience audit).*

Akuntabilitas proses *(process accountability)*, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Akuntabilitas program *(program accountability),* yaitu akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas kebijakan *(policy accountability)*, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Setelah memperhatikan jenis-jenis akuntabilitas seperti dikemukakan Sheila Elwood dalam Mardiasmo (2002) diatas, maka pejabat publik didalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya disamping harus berakuntabilitas menurut hukum atau peraturan, juga dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, dalam program yang diimplementasikan dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau dirumuskan sehingga hakekat konstitusi yang dijalankan oleh DPRD Kota Manado dapat terwujud secara akuntabel.

Selanjutnya terkait indikator *Electoral systems for governments and decisions-making*, dalam hal ini berkaitan dengan sistem dan mekanisme yang digunakan dalam pengajuan dan pembahasan serta penetapan Perda yang dilakukan oleh DPRD bersama eksekutif, dapat diketahui mengenai alur pembentukan Perda yang berasal dari DPRD yang digunakan dalam pembentukan Perda yang berasal dari DPRD belumlah sesuai dengan tahapan prosedur yang ada. Alur tersebut tidak lagi dilakukan oleh DPRD Kota Manado, maksudnya mekanisme internal tersebut tidak lagi dilakukan oleh DPRD karena Ranperdanya langsung disiapkan oleh Balegda bersama dengan tim akademisi setelah itu langsung dibawah dalam rapat paripurna DPRD masuk dalam pembahasan pembicaraan tingkat I. Dari temuan peneliti selanjutnya bahwa prosedur alur pembentukan Perda banyak tidak dimengerti oleh para anggota DPRD.

Merujuk pada teori Chaiden dalam Jabra & Dwivedi (1989:42) mengatakan bahwa memiliki akuntabilitas adalah menjawab tanggungjawab seseorang, melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, merespon, memikul kewajiban dan menetapkan keputusan eksternal. Selanjutnya, Stoker (1998:82) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan upaya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenang oleh pejabat publik atau oleh penyelenggara pemerintahan. Sebab itu setiap penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan berbagai tugas dan kewenangannya harus lebih mengedepankan akuntabilitas sehingga hak dan kewajibannya, tindakan, keahliannya dan bahkan waktu yang dipergunakan didepan publik harus dapat dipertanggunjawabakan sehingga akan terwujud pemerintahan yang baik “*good governance*.”

Pemunculan istilah konsep *good governance* memiliki latar belakang akibat kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dimana masyarakat ditempatkan pada posisi yang lemah secara politis dan/atau masyarakat hanya menjadi obyek kekuasaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada awalnya, pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat warga menjalankan fungsi utama melayani masyarakat yang memberikan kewenangan kepadanya. Dalam perjalanan waktu, pemerintah kemudian menjadi sangat berkuasa dan kemudian “menelan” masyarakat yang membentuknya. Masyarakat hanya menjadi obyek kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah. Kenyataan tersebut dapat dilihat secara jelas dalam panggung kehidupan masyarakat dunia sebelum abad ke-19, pada saat terjadinya pemerintahan kolonialisme ataupun pemerintahan yang corak monarki absolut (Wasistiono, 2007:51). Pemimpin politik dan pemerintahan yang dipilih oleh warga masyarakat kemudian banyak yang menyalahgunakan kepercayaan dari rakyat. Kondisi ini kemudian mendorong kesadaran masyarakat sebaga warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menyimpang dari tujuan mulianya.

Memahami *Bureaucratic system of representation,* terkait pelaksanaan sistem perwakilan dalam pembuatan Perda di DPRD. Pelaksanaan sistem perwakilan dalam pembuatan Perda di DPRD, terkait apakah dalam setiap Komisi ada perwakilan dari setiap Fraksi yang ada di DPRD Manado ditemui bahwa keanggotaan di setiap komisi merupakan representasi dari setiap fraksi yang ada, namun pelaksanaan sistem perwakilan belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Begitu juga mengenai *Royal prerogrative,* berkaitan dengan hak istimewa yang melekat pada DPRD dalam hal ini hak untuk mengajukan Ranperda (hak inisiatif). Dari temuan bahwa ada beberapa anggota DPRD Kota Manado yang kurang mengetahui mengenai hak istimewa yang dimiliki DPRD terkait membuat Perda inisiatif. Selanjutnya *Legislation,* dalam hal ini tugas dan fungsi DPRD sebagai pembuat Perda. Terkait fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Perda inisiatif dapat disimpulkan bahwa DPRD mempunyai wewenang dalam pembentukan Peraturan daerah bersama Walikota namun anggota DPRD Kota Manado masih kurang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan hak tersebut. Hal ini terkait kualitas SDM pada anggota Dewan. Karena banyak yang kurang memilikinya sehingga banyak yang bersifat tak peduli, cuek masa bodoh. Yang peduli dan mau belajar serta yang melaksanakan hak-hak istimewa tersebut hanya sedikit saja. Harusnya setiap anggota harus melihat itu sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan kebutuhan bagi kesejahteraan konstituen atau masyarakat tetapi hal itu tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh sebagian besar anggota DPRD Kota Manado. Kajian akuntabilitas Pemerintah Daerah juga terletak pada aktivitas fungsional informasi *(information function)* yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dan aktivltas fungsional tindakan yang berkaitan dengan kemampuan menilai dan mengajukan sejumlah tuntutan *(demands)* tertentu tehadap kebijakan atau kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Argumentasi tersebut diatas diperkuat oleh pendapat Salleh dan Iqbal (Salleh dan Iqbal, 1995:6) yang menjelaskan bahwa *accountability can also regards as a viable instrument of control which can be operated to extent that public servants understand and acknowledge their assigned responsibility for the result.* Dalam pemahamannya, dikatakan bahwa akuntabilitas penyelenggaraan fungsi DPRD akan berjalan dengan baik, jika DPRD selaku aktor pembuat aturan memiliki tujuan dan misi yang jelas dan adanya tanggung jawab secara moral terhadap kebijakan yang telah dltetapkan. Dalam hal inilah kebijakan daerah yang dibuat harus tepat sasaran, berkeadilan, demokratis, dan akuntabel. Faktor-faktor yang menyebabkan Rendahnya Akuntabilitas dapat dilihat dari Akuntabilitas Prosedur, akuntabilitas Proses dan Akuntabilitas Produk.

Merujuk pada hasil penelitian terkait *Letters of appointment,* dalam hal ini terkait dengan adanya kerjasama dalam pembahasan Ranperda baik DPRD dan pihak eksekutif. Bentuk-bentuk kerjasama dalam pembahasan Ranperda oleh DPRD dengan eksekutif terlihat dalam penyusunan Ranperda dibahas dalam badan musyawarah (Banmus) setelah itu dibuat agenda-agenda khusus pembahasan nota pengantar ke pihak pemerintah lalu ditindak lanjuti oleh Balegda dalam bentuk Prolegda. Pembahasan ranperda dilakukan bersama antara DPRD Manado bersama Walikota Manado. Bentuk-bentuk kerjasama dalam pembahasan ranperda inisiatif oleh DPRD dengan eksekutif kerjasamanya yaitu bersama-sama membahas mulai dari pembahasan Prolegda hingga sampai pembahasan Ranperda baik melalui komisi, gabungan komisi atau melalui pansus sampai pada penetapan Perda itu sendiri. Selanjutnya *Formal delegation of authority,* belum adanya pendelegasian kewenangan secara formal dalam pelaksanaan pembahasan Ranperda secara delegatif. Bentuk-bentuk pendelegasian kewenangan secara formal dalam pembahasan Ranperda insiatif dimana DPRD sama dengan Walikota memiliki tugas membentuk Perda inisiatif, DPRD membahas bersama-sama dengan Walikota dan memberikan persetujuan dan Walikota melaksanakan Perda tersebut terus DPRD mengawasi pelaksanaan Perda yang ditetapkan itu. *Standing orders*, adanya muatan kepentingan tertentu oleh DPRD sebagai titipan atau pesanan dari pihak tertentu dalam pembahasan Ranperda. muatan kepentingan tertentu oleh DPRD dalam pembahasan materi Ranperda bahwa muatan kepentingan tertentu oleh DPRD dalam pembahasan materi Ranperda selalu ada karena setiap Perda inisiatif sangat sarat dengan kepentingan pribadi, kepentingan fraksi atau Parpol. Pembuatan Perda tidak konsekuen dengan Prolegda, penyebabnya karena tarik ulur soal kepentingan. Dapat diketahui bahwa budget Perda yang dianggarkan berasal dari APBD murni. Di DPRD juga ada yang disebut dengan tim 9 yang mempengaruhi pengambilan keputusan atau dapat dikatakan pembuat skenario dalam pengambilan keputusan. Dari keseluruhan indikator pada sub fokus ini sebagai alat untuk melihat apakah akuntabel atau tidak DPRD Kota Manado dapat disimpulkan bahwa belum akuntabelnya Proses Akuntabilitas Politik Pada DPRD Kota Manado dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah pada *Legitimacy of decision Makers* (Legitimasi dari Pembuat kebijakan).

Selanjutnya pada pada fokus satu Sub Fokus yakni *Moral conduct* (keberadaan kualitas moral dari DPRD), *Moral conduct* dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kualitas moral yang mendukung dalam proses pembahasan dan penetapan Perda yang berasal dari DPRD. *Society values* dalam hal ini menunjuk pada kualitas Perda harus linier dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat belum terpenuhi sesuai harapan. Adanya perbedaan persepsi diakibatkan karena mereka kurang memahami prosedur dan tidak mengikuti dengan baik tahapan-tahapan dalam penyusunan Perda tersebut sangat menentukan kualitas Perda tersebut. Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Manado, berdasarkan data yang ada secara efektif baru ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kota Manado pada tahun 2011 untuk Program Legislasi Daerah tahun 2012. Dan untuk Prolegda tahun-tahun berikutnya tidak ditemukan lagi. Hal ini disebabkan proses penyiapan dan penyusunan Prolegda tidak lagi mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan DPRD Kota Manado dimana tidak lagi ditetapkan melelui keputusan pimpinan DPRD Kota Manado, tetapi dalam prakteknya proses penyusunan Prolegda langsung dibahas bersama oleh Badan Legislasi daerah (Balegda) bersama dengan pihak pemerintah Kota Manado. Ada 2 (dua) Perda insiatif yang telah ditetapkan. sumber daya manusia yang ada pada anggota DPRD kota Manado menunjukan kurang profesional dan akuntabel dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi.

*Concept of social justice and public interest*, hal ini berkaitan dengan bagaimana Perda insiatif yang ditetapkan sejalan dengan keinginan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat itu sendiri, belumlah memenuhi sesuai harapan yang ada. Perda yang ditetapkan kurang sejalan dengan rasa keadilan dan kepentingan masyaraka, hal tersebut lebih disebabkan karena sebagian besar anggota DPRD kurang serius ikut dalam pembahasannya padahal kita semua ini mewakili rakyat dan diforum pembahasan Perda inisiatif sebenarnya itu adalah kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang kita wakili namun kenyataan itu sebagian besar tidak aktif memberikan kontribusinya dalam bentuk ide atau gagasan.

Terkait hal ini Saragih, (2011:15) mengungkapkan bahwa selama ini peran masyarakat dalam proses pembentukan perda masih bersifat parsial dan simbolik. Beberapa komunikasi massa yang dilakukan hanyalah sebagai pelengkap prosedur adanya *basic research* (penelitian dasar) yang melandasi perencanaan pembentukan perda. Sementara dalam tahap perancangan pembahasan pemerintah atau oleh unit kerja dinas dari pemerintah atau panitia khusus dari DPRD (tahap ini melibatkan akademis atau pakar-pakar yang kompeten dibidangnya).

*Profesional value,* proses pengajuan, pembahasan dan penetapan Perda oleh DPRD belumlah mengedepankan kualitas nilai profesionalnya sebagai representasi publik. DPRD Manado kurang produktif melahirkan Perda terlebih lagi dengan Perda inisiatif, begitu juga dengan kinerjanya kurang dan belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat. Proses pengajuan pembahasan dan penetapan Perda inisiatif oleh DPRD Kota Manado belum mengedepankan kualitas profesional sebagai representasi publik. Disebabkan proses pengajuan usulan mulai dari usulan Prolegda dari DPRD, itu hampir tidak ada usulan dari DPRD. Selalu hanya mengambil usulan dari pihak eksekutif kemudian dijadikan sebgaai perda inisiatif DPRD dalam Prolegda. Belum lagi soal proses pengusulan Ranperda inisiatif yang harusnya juga dibahas terlebih dahulu di internal persidangan DPRD tetapi tidak dilaksanakan itu langsung masuk pada pembahasan pembicaraan tingkat I. Sebagian besar anggota DPRD kurang aktif, kurang terlibat dalam pembahasan secara aktif, pemikiran, pandangan kontribusi terhadap materi Ranperda. Pada setiap persidangan termasuk dalam rapat-rapat pansus hanya didominiasi oleh anggota DPRD tertentu saja. Dari data banyak anggota DPRD yang sebenarnya belum siap dan memiliki kapasitas menjadi anggota DPRD, ada yang anggota yang kurang mengetahui tentang tugas dan fungsinya, kurang profesional dan kurang cakap.

Merujuk pandangan teori terkait *moral conduct* dapat kita sandingkan dengan pemahaman *Moral Accountability* menurut pandangan Jabra dan Dwiveidy, dikatakan bahwa bahwa DPRD dalam hal ini dituntut untuk mempertanggungjawabkan secara moral atas tindakan-tindakannya. Oleh sebab itu setiap tindakan aparat hendaknya didasari pada prinsip-prinsip moral dan etika sebagaimana diakui oleh konstitusi dan peraturan-peraturan lainnya serta diterima oleh publik sebagai norma dan perilaku sosial yang telah mapan. Oleh karena itu tidak berlebihan bila publik berharap agar perilaku para politisi dan aparat pemerintah didasarkan atas nilai-nilai moral, Akuntabilitas moral perlu dikembangkan untuk menghindari *devian behavior.* Dari sudut pandang ini dapat disimpulkan bahwa kualitas moral belum memadai pada proses akuntabilitas politik DPRD Kota Manado pada pembuatan Perda inisiatif.

Selanjutnya dapat disimpulkan dari keseluruhan indikator yang ada pada fokus satu Sub Fokus yakni *Responsiveness* (kepekaan terhadap aspirasi yang berkembang). Dapat disimpulkan dan diintepretasikan bahwa belum nampak adanya kepekaan menangkap dan memenuhi keinginan dari kepentingan publik atau masyarakat. Sehubungan dengan materi yang diatur dalam Perda secara substansial dan terkait langsung dengan persoalan-persoalan publik atau berhubungan langsung dengan pengaturan tentang kebutuhan publik disatu pihak dan terkait dengan kepentingan pemerintahan Kota Manado. Akuntabilitas adalah “*government to explain and justify publicly the way its uses its power, and take prompt corrective action when things go wrong*” (Schacter:2002) atau (pemerintah menjelaskan dan memberi pembenaran secara terbuka bagaimana Ia menggunakan kekuasaannya dan segera melakukan tindakan koreksi bila ada sesuatu kesalahan). Akuntabilitas merupakan aktivitas untuk memberikan penjelasan dan alasan pembenaran atas tindakan (cara) yang dilakukan dalam menggunakan kekuasaan, dan mengambil tindakan korektif ketika terjadi kesalahan. Pengertian ini memberikan pemahaman yang Iebih luas tentang makna akuntabilitas. Artinya, akuntabilitas tidak sekedar mencakup aktivitas untuk memberikan penjelasan atas tindakan yang telah dilakukan, namun juga mencakup kegiatan melakukan koreksi terhadap tindakan yang dinilai sah atau tidak tepat. Dengan demikan, akuntabilitas pada hakikatnya Iebih sebagai sikius *(cycle)* yang terdiri atas sejumlah aktivitas fungsional daripada sebagai sebuah aktivitas tunggal (single action) (Schacter, 2000).

Aktifitas fungsional yang dimaksud Schacter (2000) terdiri atas 3 (tiga) aktivitas, yaitu: (1) informasi *(information),* untuk memberikan penjelasan (penyampaian informasi) atas tindakan (kebijakan) yang dilakukan dan hasilnya, serta alasan-alasan yang menjadi pembenarnya, (2) tindakan (*action)*, untuk menilai dan sekaligus mengajukan tuntutan *(demands)* atas informasi tentang tindakan (kebijakan) dan hasilnya serta alasan pembenarnya yang telah disampaikan tersebut, dan (3) tanggapan *(response)*, untuk mengenali dan memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang berkembang (diajukan) setelah informasi disampaikan, termasuk melakukan tindakan koreksi apabila dinilai memang ada kesalahan yang terjadi. Ketiga aktivitas fungsional ini berhubungan sebagai suatu sikIus yang terus berulang. Merujuk teori ini dapat disimpulkan melalui indikator ini yang dijadikan sebagai alat ukur untuk melihat tingkat akuntabilitas politik dapat disimpulkan bahwa belum akuntabel pada proses akiuntabilitas politik pada pembuataan Perda inisiatif di DPRD Kota Manado.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang menyoal tentang transparansi/keterbukaan *(Openness)* dan partisipasi publik serta prosedur terkait pembuatan peraturan Daerah, dimana dari aspek keterlibatan publik dalam proses pembuatan peraturan daerah oleh DPRD, juga telah ditelaah dan dibahas oleh Ni Made Ari Yuliartini Geriadhi dan Anak Agung Sri Utari. Menurut mereka hakekat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda adalah: (1) memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik dalam menciptakan *good governance*, (2) memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik, (3) meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif, (4) efisiensi sumberdaya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumberdaya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat. Kemudian partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan dengan: (1) memberikan masukan-masukan atau pendapat dalam rapat dengar pendapat umum atau rapat-rapat lainnya, (2) memberikan masukan-masukan kepada anggota DPRD pada saat melakukan kunjungan kerja, (3) mengikuti seminar-seminar atau kegiatan yang sejenis dalam rangka melakukan pengkajian atau menindaklanjuti berbagai penelitian untuk menyiapkan suatu rancangan peraturan daerah. Penulis juga memberikan rekomendasidalam rangka pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, yaitu dengan perlunya mengatur tentang bentuk-bentuk partisipasi publik dalam proses pembuatan dan pembentukan peraturan daerah serta perlunya DPRD memberikan ruang bagi publik untuk memberikan kontribusinya dalam pembentukan peraturan daerah. (Kerta Patrika, Vol 33 No. 1, Januari 2008).

Selanjutnya dalam penelitian ini yang serupa yang mengemukakan tentang prosedur juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Budiman, tentang mekanisme DPRD Provinsi dalam menerima dan menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat (Studi Kasus di DPRD Sumatera Selatan dan Sulawesi Utara). Fokus penelitian ini melihat tentang proses penerimaan dan tindaklanjut dari penyampaian aspirasi rakyat kepada DPRD yang lokus penelitiannya pada DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan DPRD Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga perwakilan rakyat tersebut memiliki proses dan prosedur yang berbeda dalam hal menerima aspirasi masyarakat. Penerimaan delegasi aspirasi masyarakat di DPRD Sumatera Selatan dilakukan oleh Pimpinan dan Komisi di DPRD sesuai dengan ketentuan tata tertib yang mengaturnya, sementara DPRD Sulawesi Utara lebih memilih membentuk Panitia Khusus yang tidak permanen dan komisi terkait. Kendala utama dalam penerimaan delegasi aspirasi masyarakat yaitu koordinasi penanganan delegasi dalam jumlah banyak dan keinginan masyarakat untuk segera dipertemukan dengan ketua DPRD serta ditindaklanjuti aspirasinya. Kemudian penerimaan aspirasi masyarakat tidak hanya dilakukan kepada delegasi aspirasi masyarakat yang datang di DPRD, tetapi juga dilakukan pada masa reses, namun demikian pada pelaksanaannya, serap aspiarasi ini tidak efektif karena dilakukan terbatas pada pertemuan dengan pejabat dan tidak dilakukan pembanding dengan aspirasi masyarakat. Anggota DPRD tidak mengetahui dan tidak mendapatkan secara lengkap mengenai permasalahn yang riil yang dihadapi oleh masyarakat.

Hal ini lebih disebabkan juga karena faktor terbatasnya sumber data bagi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah daerah. Budiman memberikan saran, bahwa penerimaan delegasi aspirasi masyarakat perlu terus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar dapat membantu memperlancar masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD.

Penyempurnaan prosedur penerimaan delegasi masyarakat perlu terus dikaji dan disesuaikan dengan tuntutan/aspirasi dan dinamika kehidupan masyarakat. Seluruh alat kelengkapan DPRD, termasuk alat kelengkapan yang tidak permanen seperi panitia khusus dan termasuk Fraksi perlu mengoptimalkan kinerjanya dalam rangka menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Keberpihakan wakil rakyat kepada masyarakat perlu disempurnakan dengan membuka sebanyak mungkin saluran komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPRD. Prosedur tindaklanjut aspirasi masyarakat perlu diselenggarakan seefektif dan seefisien mungkin dengan tetap mematuhi kaidah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tata tertib DPRD. Pelaksanaan serap aspirasi yang dilakukan pada masa reses, perlu dijadikan alternatif pilihan bagi masyarakat di daerah untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD diluar prosedur yang telah ditetapkan. (518 Kajian, Vol 13, No. 4, Desember 2008).

Merujuk pada persandingan dan pertandingan teori dan penelitian terdahulu yang ada pada keseluruhan indikator, selanjutnya adapun yang dapat disimpulkan dari keseluruhan indikator yang ada pada indikatorini bahwabelum adanya keterbukaan dari DPRD Kota Manado terkait dengan proses agenda pengajuan, pembahasan dan penetapan setiap Perda kepada publik atau masyarakat. Seharusnya Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses, lembaga dan informasi secara langsung dapat dipahami dan dapat dimonitor dukungan DPRD Kota Manado terhadap tranparansi atau keterbukaan kepada publik ditunjukkan melalui keterbukaan disetiap pelaksanaan kebijakan.

Secara umum menurut Indradi, (2007:77) unsur utama dalam konsep *governance* terdiri dari akuntabilitas *(accountability),* transparansi *(transparancy),* keterbukaan *(openess)*, dan aturan hukum *(rule of law).* Kepemerintahan yang baik (*governance)* berarti “tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan”. Atau bisa juga diartikan: “suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman (1993), bahwa *“governance”* berarti serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut (Mustafa, 2013:185).

Akuntabilitias politik DPRD sebagai sebuah organisasi publik yang memiliki tanggungjawab etis-politik kepada rakyat, salah satu indikatornya adalah terletak pada sejauh mana isntitusi ini memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilihnya melalui berbagai kebijakan yang berbentuk peraturan daerah yang dibahas secara bersama-sama dengan kalangan eksekutif (pemerintah) yang akan bemuara pada program-program yang didukung oleh anggaran yang secara teknis operasional akan dilaksanakan oleh jajaran eksekutif dibawa kendali walikota sebagai kepala daerah. Aspek yang perlu dipertanggungjawabkan DPRD kepada publik adalah terkait dengan bagaimana *proses* dan *prosedur* perencanaan, penyusunan dan pembahasan berbagai hal yang terkait dengan kepentingan masyakarat yang kemudian melahirkan *produk* kebijakan dalam bentuk Perda.

DPRD dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki tugas bersama dengan eksekutif dalam mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik, sesuai dengan tugas kewenangan dan fungsi yang dimilikinya. Terutama dalam melaksanakan fungsi legislasi atau pembuatan Perda bersama-sama dengan eksekutif. Dalam proses pembuatan Perda penerapan unsur-unsur dan prinsip-prinsip *good governance* menjadi penting dan urgen sebagai pedoman pelaksanaannya demi untuk membangun kesejahteraan masayakat.

Disamping itu pula bahwa DPRD memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mendapatkan dan menerima mandat politik rakyat untuk memperjuangkan berbagai aspirasi dan kepentingan rakyat, maka lembaga ini berperan dalam mewujudkan akuntabilitas politiknya terutama dalam hal bagaimana sebagai lembaga pejuang kepentingan rakyat melakukan tugasnya dalam menyusun dan menetapkan Perda yang benar-benar menyentuh dan berpihak untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat sebagai bagian daripada melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*.

Akuntabilitias politik DPRD sebagai sebuah organisasi publik yang memiliki tanggungjawab etis-politik kepada rakyat, salah satu indikatornya adalah terletak pada sejauh mana isntitusi ini memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilihnya melalui berbagai kebijakan yang berbentuk Perda yang dibahas secara bersama-sama dengan kalangan eksekutif (pemerintah) akan bemuara pada program-program yang didukung oleh anggaran yang secara teknis operasional akan dilaksanakan oleh jajaran eksekutif dibawa kendali Walikota sebagai kepala daerah. Aspek yang perlu dipertanggungjawabkan DPRD kepada publik adalah terkait dengan bagaimana *proses* dan *prosedur* perencanaan, penyusunan dan pembahasan berbagai hal yang terkait dengan kepentingan masyakarat yang kemudian melahirkan *produk* kebijakan dalam bentuk Perda.

Terkait *Optimal resources utilization*, bahwa belum adanya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh DPRD secara optimal. Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi oleh penyelenggara pemerintahan merupakan seharusnya menjadi suatu hal yang mutlak untuk dilakukan kepada publik atau masyarakat. Hal ini dilatari oleh tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki merupakan amanat yang diberikan oleh rakyat sebagai pemilik kekuasaan dan pemegang kedaulatan yang dijamin oleh konstitusi, namun kenyataan yang terjadi belumlah memenuhi harapan yang ada.

Implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut menjadi landasan normatif bagi instisusi DPRD sebagai bentuk akuntabilitas politiknya kepada publik yang telah memilih dan melegitimasi atas kewenangan-kewenangan uantuk menjabarkan berbagai kepentingan publik baik melalui penyusunan anggaran, pembuatan peraturan daerah dan pengawasan yang benar-benar merepresentasikan kepentingan dan untuk kesejahteraan rakyat yang memilihnya. Perwujudan atas tugas dan fungsi yang berorientasi pada perjuangan aspirasi dan kepentingan publik tersebut merupakan perwujudan daripada akuntabilitas politik DPRD itu sendiri bagi publik. Sebaliknya bila DPRD tidak dapat melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya yang benar-benar tidak berorientasi kepada aspirasi dan kepentingan serta kesejahteraan publik dan hanya mementingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok dan golong, maka DPRD tidak menunjukkan akuntabilitas politik secara baik kepada publik.

Terkait *Improving efficiency and effectiveness*, berhubungan dengan upaya peningkatan secara efektif dan efisiensi belum optimal dilakukan oleh DPRD Kota Manado. Hal tersebut tergambar pada indikator-indikator dibawah ini: *Information System*belum adanya sistem informasi yang dimiliki oleh DPRD Kota Manado. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengartikan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi. tidak ada sistem informasi manajemen (SIM) yang dimiliki oleh DPRD Kota Manado.

Walaupun sudah puluhan tahun dikenal di Indonesia, namun implementasi sistem informasi manajemen di kantor-kantor pemerintahan termasuk di DPRD Kota Manado relatif masih rendah bahkan tidak dilakukan. *Value of money audits*, menunjuk pada nilai dari hasil pemeriksaan keuangan untuk kelanjutannya. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara adalah terkait keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. hasil pemeriksaan keuangan oleh lembaga audit (BPK dan Inspektorat) adalah Opini BPK dengan WDP, namun demikian harus terus ditingkatkan agar dikemudian hari tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya juga belum adanya kesadaran dari DPRD Kota Manado untuk melaporakan kekayaannya (LHKPN) secara transparan. *Setting objectives and standards*, berkaitan dengan ukuran standar yang diterapkan secara obyektif. tidak ada ukuran standart secara obyektif dalam melaksanakan kinerja anggota/lembaga DPRD Kota Manado. Kinerja organisasi terkait produk Perda yang dihasilkan DPRD Kota Manado seharusnya akan menunjuk pada efektivitas organisasi, dimana hal itu akan menyangkut pengharapan untuk mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan tujuan kebijakan dan harapan masyarakat. *Program guidelines*, dimana belum adanya pedoman atau standar operasional prosedur kerja oleh DPRD Kota Manado. Seharusnya DPRD Kota Manado menyediakan peta sederhana atau SOP untuk menunjukan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukan status relatifnya. Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. *Appraisal*, adanya penilaian yang masih jauh dari harapan oleh masyarakat terkait/mengenai kinerja di DPRD Kota Manado. belum maksimal perihal kinerja anggota DPRD Kota Manado. Hal ini dapat lihat dari tugas dan fungsi DPRD Kota Manado maupun juga pelaksanaan hak anggota dalam hubungannya dengan hak mengajukan Ranperda inisiatif yang selama periode 2009-2014 tidaklah nampak ada. *Feedback from public*, ada tanggapan dari publik. Bentuk tanggapannya ada. Ada yang disampaikan langsung kepada anggota DPRD dan ada juga yang dilakukan melalui demonstrasi. Berbagai macam tanggapan yang selalu muncul ada dengan sikap dengan datang langsung ke DPRD rapat bersama atau secara musyawarah tapi ada juga yang lewat demonstrasi. tanggapan dari publik sepertinya belum terlaksana dengan baik di DPRD Kota Manado. Aktualisasi akuntabilitas politik DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya merujuk pada berbagai bentuk regulasi atau kebijakan yang bersifat normatif tersebut belum sepenuhnya terjadi. Keseluruhan indikator yang ada menunjukan bahwa belum akuntabelnya Proses Akuntabilitas Politik Pada DPRD Kota Manado dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah.

1. **Faktor determinan dalam pembuatan Perda inisiatif dari DPRD Kota Manado**

Faktor Determinan dalam Pembuatan Perda yang berasal dari DPRD, dalam penelitian ini menggunakan pengembangan dari konsep Jabbra dan Dwivedi tentang akuntabilitas politik yang merujuk pada 2 (dua) sub fokus sebagai pisau analisis yang dijadikan sebagai teori operasional. Kedua sub fokus tersebut, yaitu: (1) Adanya Partisipasi, dan (2) Adanya legitimasi atau pengakuan.

Pertama: Adanya Partisipasi, maksudnya disini adalah adanya keterlibatan masyarakat, baik dalam aktivitas mengatur maupun mengurus urusan pemerintahan daerah. Keterlibatan masyarakat ini merupakan aktivitas partisipasi yang dijalankan, baik dalam kerangka mekanisme partisipasi yang disediakan maupun tidak disediakan oleh DPRD dan pemerintah daerah. Ada 3 indikator (Muluk, 2007:233), yaitu: (1) partisipasi (*legal framework*), (2) pemberian informasi berbagai agenda sidang terbuka kepada masyarakat, (3) merespon opini publik.

Kedua: Adanya legitimasi atau pengakuan, yaitu adanya kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan yang dimiliki (Seymour, 1969). Indikatornya, adalah: (1) kemampuan lembaga untuk diakui, (2) membentuk kepercayaan publik, (3) mempertahankan kepercayaan.

Fokus Faktor Determinan dalam Pembuatan Perda Inisiatif dari DPRD Kota Manado terkait *sub fokus Partisipasi* berhubungan dengan mendorong: terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah serta keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu issu, sesuai data yang ada dapat disimpulkan belum optimal dilakukan oleh DPRD Kota Manado. Sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan pada faktor penentu akuntabilitas politik ini tidaklah akuntabel dilaksanakan oleh pihak DPRD Kota Manado. Hal tersebut tergambar pada indikator-indikator dibawah ini:

*Pelembagaan Partisipasi,* Perda inisiatif tidak diketahui oleh masyarakat luas. Secara administrasi dapat diketahui melalui SK DPRD namun tidak dilakukan secara transparan. Belum ada Perda di Kota Manado yang mengatur mengenai bagaimana peran masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Manado. DPRD tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kunjungan yang dilakukan oleh anggota DPRD Manado selama ini hanyalah melalui kegiatan reses anggota Dewan, dan juga kunjungan monitor dan pengawasan terhadap mitra kerja sesuai dengan bidang lingkup tugas komisi dan/atau pengawasan langsung ke lapangan. Dan untuk masukan dari masyarakat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu secara tertulis tidak ada yang ada lebih banyak disampaikan secara lisan. Masukannyapun lebih banyak terkait dengan masalah-masalah infrastruktur, masalah kemacetan, masalah listrik yang sering padam, singkatnya bukan berhubungan dengan pembahasan Ranperda inisiatif DPRD Manado.

*Pemberian Informasi,* Indikator pemberian informasi secara tulus kepada masyarakat tentang berbagai agenda sidang termasuk pelibatan masyarakat secara aktif dalam sidang-sidang terbuka dewan merupakan bentuk perwujudan proses akuntabilitas politik insstitusi DPRD, namun hal ini belum sepenuhnya dilakukan. agenda dan kegiatan DPRD Manado hanya disosialisasikan oleh jurnalis dari berbagai media, baik media cetak, elektronik, dan media online. Dan dari situ masyarakat dapat mengaksesnya. DPRD Manado, belum memiliki website atau media khusus untuk kebutuhan informasi tentang kegiatan Dewan yang dapat diakses oleh publik. Bila respons yang diberikan bersungguh-sungguh dalam arti opini publik benar-benar menjadi pertimbangan dalam prsoes pembuatan kebijkan, hal tersebut merupakan pertanda betapa besar dukungan DPRD terhadap partisipasi publik. Namun bila opini publik sekadar ditampung namun tidak menjadi pertimbangan utama dalam prose kebijakan maka hal tersebut menunjukkan rendahnya dukungan DPRD terhadap partisipasi publik.

*Merespon Opini Publik,* Pentingnya partisipasi sebagai strategi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat (*voice*) dalam proses pemerintahan daerah. DPRD Kota Manado kurang merespon terhadap opini publik dalam hal ini terkait demonstrasi. DPRD dalam menerima demonstrasi belum ada mekanismenya yang jelas. misalnya siapa yang menerima terus setelahpun diterima tindaklanjutinya bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya diserahkan pada pihak sekretariat dewan untuk penanganan hal tersebut.

Merujuk pada teori dari UNDP (dalam LAN dan BPKP 2000:7) merumuskan karakteristik *good governance,* salah satunya adalah *Participation*. Dimana dikatakan bahwa Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan/kebijakan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan sangat diperlukan dalam rangka demokrasi, bahkan beberapa dekade lalu (Ventris, 2001) pernah mengatakan bahwa partisipasi adalah syarat mutlak untuk suatu kehidupan demokrasi. Partisipasi publik menjadi keharusan bagi suatu negara yang menganut sistem demokrasi sebagaimana Indonesia, sebab itu partisipasi merupakan unsur yang menentukan bagi sistem politik dan administrasi pemerintahan dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan dan tak terkecuali juga dalam pembuatan Perda.

Partisipasi secara logis memberi pengaruh positif terhadap kinerja/pencapaian hasil dan kepuasan. Artinya, semakin menggunakan suara yang berkepentingan atau yang paling memahami persoalan, maka semakin meningkat kinerja atau pencapaian hasil serta kepuasan, (Keban, 2008:83). Partisipasi juga penting dalam rangka membangun *public trus* (Wang & Wart, 2007). Ketika masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi maka mereka merasa bahwa pemerintah tidak menipu mereka, pemerintah dekat dengan mereka, pemerintah dapat dipercaya. Sementara itu, kepentingan mreka mendapatkan perhatian dalam kesempatan itu karena mereka diberikan keleluasan untuk menyampaikan berbagai pendapat, keluhan, dan sebagainya.

Partisipasi juga diperlukan masyarakat karena mereka dapat belajar dan menjadi terdidik bahkan mendapatkan keterampilan (*learning process/education and gain skills*). Partisipasi juga diperlukan pemerintah karena pemerintah berkesempatan untuk meyakinkan masyarakat, membangun *trust*, mengurangi kegelisahan, membangun aliansi strategis (*strategic alliances*), dan mendapatkan legitimasi (*gain legitimacy*). Sayangnya sering muncul dilema karena ada upaya pemerintah untuk menghindari atau meniadakan partisipasi dengan alasan makan waktu (*time consumming*), mahal biayanya (*costly*), bikin masalah atau menimbulkan permusuhan terhadap pemerintah (*creating more hostliity toward government*), dan bagi masyarakat juga malas karena: makan waktu dan mendapat banyak tantangan dari berbagai kelompok kepentingan yang saling bertentangan (Irving & Stansburry, 2004).

Muluk, (2007:53) mengemukakan bahwa partisipasi publik seyogyanya tidak dilihat hanya dalam sekali atau serangkaian kejadian, tetapi dilihat dalam penentuan berbagai hal penting secara bersama-sama antara politisi, administrator, kelompok kepentingan, dan warga. Pada dasarnya, tujuan paritisipasi publik sangat beragam, meliputi berbagi informasi, akuntabilitas, legitimasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan berbagi kekuasaan secara nyata (Graham dan Phiips, 1998). Arnstein dalam *A Ladder of Citizen Participation* (1971): mulai dari *manipulation, therapy, informing, consultation, placation, patnership, delegated, dan citizen control*. Dalam banyak kesempatan banyak pihak yang melakukan bentuk partisipasi manipulatif tapi telah mengklaim sebagai partisipasi murni.

Di Indonesia, praktek partisipasi masyarakat masih bersifat manipulatif. Selama beberapa dekade, partisipasi dari bawah mulai dari desa, kecamatan, sampai kabupaten telah diklaim berjalan, tetapi banyak mendapatkan kritikan karena lebih menonjol adalah partisipasi manipulatif, atau partisipasi semu. Apalagi dengan latar belakang fisik/geogradis, kondisi sosial, ekonomi dan politik seperti ini, partisipasi pasti mendapat banyak hambatan. Akan tetapi, dalam beberapa kasus sudah ada tanda positif munculnya praktek partisipasi masyarakat yang murni (Keban, 2008:84). Hal tersebut juga terlihat pada DPRD Kota Manado melalui hasil penelitian yang telah disimpulkan dapat dilihat bahwa: Dapat disimpulkan pada fokus Faktor Determinan dalam Pembuatan Perda Inisiatif dari DPRD Kota Manado terkait *sub fokus Partisipasi* berhubungan dengan mendorong: terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah serta keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu issu, sesuai data yang ada dapat disimpulkan belum optimal dilakukan oleh DPRD Kota Manado. Sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan pada faktor penentu akuntabilitas politik ini tidaklah akuntabel dilaksanakan oleh pihak DPRD Kota Manado. Hal tersebut tergambar pada indikator-indikator dibawah ini:

*Pelembagaan Partisipasi,* Perda inisiatif tidak diketahui oleh masyarakat luas. Secara administrasi dapat diketahui melalui SK DPRD namun tidak dilakukan secara transparan. Belum ada Perda di Kota Manado yang mengatur mengenai bagaimana peran masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Manado. DPRD tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kunjungan yang dilakukan oleh anggota DPRD Manado selama ini hanyalah melalui kegiatan reses anggota Dewan, dan juga kunjungan monitor dan pengawasan terhadap mitra kerja sesuai dengan bidang lingkup tugas komisi dan/atau pengawasan langsung ke lapangan. Dan untuk masukan dari masyarakat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu secara tertulis tidak ada yang ada lebih banyak disampaikan secara lisan. Masukannyapun lebih banyak terkait dengan masalah-masalah infrastruktur, masalah kemacetan, masalah listrik yang sering padam, singkatnya bukan berhubungan dengan pembahasan Ranperda inisiatif DPRD Manado.

*Pemberian Informasi,* Indikator pemberian informasi secara tulus kepada masyarakat tentang berbagai agenda sidang termasuk pelibatan masyarakat secara aktif dalam sidang-sidang terbuka dewan merupakan bentuk perwujudan proses akuntabilitas politik insstitusi DPRD, namun hal ini belum sepenuhnya dilakukan. agenda dan kegiatan DPRD Manado hanya disosialisasikan oleh jurnalis dari berbagai media, baik media cetak, elektronik, dan media online. Dan dari situ masyarakat dapat mengaksesnya. DPRD Manado, belum memiliki website atau media khusus untuk kebutuhan informasi tentang kegiatan Dewan yang dapat diakses oleh publik. Bila respons yang diberikan bersungguh-sungguh dalam arti opini publik benar-benar menjadi pertimbangan dalam prsoes pembuatan kebijkan, hal tersebut merupakan pertanda betapa besar dukungan DPRD terhadap partisipasi publik. Namun bila opini publik sekadar ditampung namun tidak menjadi pertimbangan utama dalam proses kebijakan maka hal tersebut menunjukkan rendahnya dukungan DPRD terhadap partisipasi publik.

*Merespon Opini Publik,* Pentingnya partisipasi sebagai strategi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat (*voice*) dalam proses pemerintahan daerah. DPRD Kota Manado kurang merespon terhadap opini publik dalam hal ini terkait demonstrasi. DPRD dalam menerima demonstrasi belum ada mekanismenya yang jelas. misalnya siapa yang menerima terus setelahpun diterima tindaklanjutinya bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya diserahkan pada pihak sekretariat dewan untuk penanganan hal tersebut. Sepertinya keseluruhan indikator diatas menunjukan bahwa mengoptimalkan partisipasi masyarakat pada pembuatan Perda sebagaimana diatur dalam aturan yang berlaku belumlah berhasil dilaksanakan oleh DPRD Kota Manado.

Dan untuk menjawab permasalahan diatas secara teoretik dapat dijelaskan bahwa ada lima kondisi yang perlu diperhatikan untuk menentukan keberhasilan paritispasi (Ventris, 2001), yaitu (1) *community* (tingkat pendidikan), (2) *political complexity* (sistem politik yang berlaku), (3) *political economy*, (4) *accountability* (kesiapan melakukan tanggung gugat terhadap keputusan dan kegiatan publik), (5) tidak ada praktek kooptasi (praktek kooptasi mematikan partisipasi murni).

Hasil intepretasi teori dari hasil penelitian yang disarankan dari pandangan teori diatas yang telah didiskusikan dengan hasil penelitian: Pertama, kesiapan dari DPRD Kota Manado terkait tingkat SDM yang diukur dari tingkat pendidikan perlu diperhatikan, hal ini merujuk pada intepretasi peneliti agar pola *recruitmen* dalam menyeleksi calon anggota legislatif perlu memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM) agar profesional dalam menjalankan tugas, jika perlu dilakukan *fit and propertest* dan melihat *track record* atau rekam jejak calon. Kedua, perlunya diatur ulang atau melakukan *deregulasi* sistem politik kita menuju suatu sistem yang baru dimana terkait pemilihan bisa bukan pada suara terbanyak, tapi didasarkan pada kualitas pendidikan, moral, kapabilitas dan profesionalitas yang dilakukan melalui serangkaian test yang ada yang diatur melalui aturan formal, ketiga secara aspek *political economy* perlu memperhatikan efektivitas dan efisiensi dengan membuat aturan agar calon tidak perlu mengeluarkan uang banyak dalam proses kampanye dan pendaftaran, untuk mencegah terjadinya korupsi ketika menjabat karena mengembalikan pengeluaran yang besar. Keempat, Akuntabilitas Publik wajib dilakukan oleh anggota legislatif pada setiap menjalankan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Dan yang kelima tentunya perlu diatur dalam suatu kebijakan untuk mempertegas partisipasi masyarakat untuk menghindari terjadinya kooptasi.

Apabila dikaitkan dengan fenomena dan kenyataan yang ada, maka faktor-faktor tersebut memang sangat berpengaruh. Karakteristik masyarakat kita yang sangat variatif (ada yang sudah maju, ada yang belum, ada yang telah terdidik, ada yang masih buta huruf, ada masyarakat yang berbudaya terbuka sementara ada yang tertutup, ada yang melarang tidak boleh protes, tidak boleh berbicara terbuka, dsb.) belum lagi letak fisik/geografis yang berjauhan seperti kepulauan yang terpencil, keterbatasan alat transportasi, dan sarana komunikasi, dsb, tentu memakan biaya yang tidak sedikit. Semua ini jelas menghambat proses partisipasi murni.

Dari berbagai aspek yang ada secar teori memang tak dapat dipungkiri aspek akuntabilitas memang sangat menentukan keberhasilan partisipasi masyarakat. Selama tidak ada kewajiban bagi para pejabat atau birokrat untuk mempertanggungjawabkan keputusan atau perbuatannya kepada publik, maka para pejabat cenderung mengenyampingkan partisipasi masyarakat. Melalui partisipasi, berbagi kepentingan publik dapat diartikulasikan, diagregasikan dan diakomodasikan dalam kebijakan dan kegiatan publik, sementara melalui mekanisme akuntabilitas publik, apaya telah dijanjikan melalui kebijakan dan kegiatan publik itu ditagih dipertanggungjawbannya, (Keban, 2007:85)

Salah satu model yang memberikan ruang bagi proses partisipasi politik dalam suatu sistem politik, yaitu sistem politik model David Easton. Model ini didasarkan pada konsep-konsep teori informasi (*input, withininputs, outputs atau feedback*) dan memandang kebijakan negara/daerah sebagai respon suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis dan sebagainya) yang ada disekitarnya. Sehingga demikian kebijakan negara dipandang oleh model ini sebagai hasil (output) dari sistem politik (Islamy, dalam Indradi, 2007:69).

Dukungan DPRD terhadap partisipasi publik ditunjukkan dalam beberapa indikator. Pelembagaan partisipasi dalam bentuk *legal framework* yang memandai merupakan indikator terpenting selain kesediaan DPRD untuk menyediakan anggaran yang cukup bagi aktivitas partisipasi masyarakat. Indikator lain dapat dilihat dari pemberian informasi secara tulus kepada masyarakat tentang berbagai agenda sidang termasuk pelibatan masyarakat secara aktif dalam sidang-sidang terbuka dewan. Pemberian informasi yang tulus ditandai dengan pemilihan media informasi yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat seluas mungkin dan tersedia waktu yang memadai bagi masyarakat untuk mencerna informasi tesebut serta untuk terlibat dalam proses kebijakan yang terkait. Selain itu, dukungan DPRD terhadap partisipasi publik dapat dilihat dari ketulusannya untuk merespons berbagai opini publik tentang isu tertentu. Bila respons yang diberikan bersungguh-sungguh dalam arti opini publik benar-benar menjadi pertimbangan dalam prsoes pembuatan kebijkan, hal tersebut merupakan pertanda betapa besar dukungan DPRD terhadap partisipasi publik. Namun bila opini publik sekadar ditampung namun tidak menjadi pertimbangan utama dalam prose kebijakan maka hal tersebut menunjukkan rendahnya dukungan DPRD terhadap partisipasi publik (Muluk, 2007:233).

Dari pemikiran Muluk (2007) tersebut, maka partisipasi publik merujuk pada 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) pelembagaan partisipasi (*legal framework*), (2) pemberian informasi berbagai agenda sidang terbuka dewan kepada masyarakat, (3) merespon berbagai opini publik. Dalam penelitian ini akan menggunakan kedua indikator tersebut sebagai teori operasional untuk melihat partisipasi publik sebagai salah satu faktor determinan dalam pembubatan Peraturan Daerah di DPRD Kota Manado. Arti penting partisipasi pada intinya terletak pada fungsinya. Fungsi pertama adalah sebagai sarana swaedukasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan publik. Dalam fungsi ini, partisipasi masyarakat tidak akan mengancam stabilitas politik dan seyoganya berjalan di semua jenjang pemerintahan. Fungsi lain adalah sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintahan sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintahan (Lee & Mills, 1982:130).

Makna penting partisipasi dapat juga dilihat dari manfaatnya dalam meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan pada kepentingan dan pengetahuan riil yang ada didalam masyarakat. Partisipasi juga bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat untuk membantu penerapan keputusan yang telah dibuat. Komitmen ini merupakan modal utama bagi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Mengingat fungsi dan manfaat yang dapat dipetik darinya, kini partisipasi tidak lagi dapat dipandang sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah tetapi justru sebagai hak masyarakat. Partisipasi dapat sebagai layanan dasar dan bagian integeral dari *local gavernance* (Antoft & Novack, 1998:81).

Semula partisipasi hanya didefinisikan secara politis sepenuhnya sebagaimana yang berkembang pada tahun 1950-an dan 1960-an. Dalam hal ini, partisipasi diartikan sebagai pemungutan suara, keanggotaan dalam partai, kegiatan dalam perkumpulan sukarela, gerakan protes, dan sebagainya. Partisipasi politik ini dapat dibagai dalam dua arena. Pertama,partisipasi horizontal yang melibatkan masyarakat secara kolektif untuk mempengaruhi keputusan kebijakan. Kedua, arena vertikal yang terjadi ketika anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elit dan pejabat yang bermanfaat bagi kedua belah pihak (Bryant dan White, 1987:268). Kemudian padan tahun 1970-an, paritispasi mulai dihubungkan dengan proses administratif dengan menambahkan kegiatan peran serta dalam proses implementasi sehingga individu dan kelompok dapat mengejar kepentingan yang bertentangan dan bersaing untuk memperebutkan sumberdaya yang langka. Dalam perkembangannya perluasan konsep partisipasi tidak hanya mencakup prosees perencanaan dan pelaksanaan lagi tetapi juga partisipasi dalam penerimaan manfaat. Ada kemungkinan masyarakat tidak mendapat manfaat dari kontribusi yang diberikannya. Bryan dan White mengingatkan pula agar konsep partisipasi tidak dipersempit hanya pada aspek penerimaan manfaat belaka karena akan mengubah pengertian umum partisipasi.

Selanjutnya partisipasi dalam perencanaan, implementasi, dan penerimaan manfaat Griesgraber & Gunter (1996:144) “*mechanism for enabling affected peopel to share in the creation of a project or program, beginning with identification all teh way through to implementation and evalutation*.” Mereka menambahkan aspek yang lain, yaitu evaluasi dengan mengartikan partisipasi sebagai suatu mekanisme yang melibatkan masyarakat dalam suatu program mulai dari tahap identifikasi sampai implementasi dan evaluasi. Dengan demikian, konsep paritisipasi menjadi sedemikian luas mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi, sampai penerimaan manfaat.

Sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, setiap produk kebijakan dalam berbagai bentuk seperti produk peraturan perundang-undangan memiliki jenis dan hirarkinya termasuk dengan isi muatan materinya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat 1 mengatur tentang jenis dan hirarki peruturan perundang-undangan yang terdiri atas: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (d) Peraturan Pemerintah, (e) Peraturan Presiden, (f) Peraturan Daerah Provinsi, dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur pada ketentuan tersebut, maka peraturan daerah yang dibentuk oleh DPRD merupakan salah satu produk hukum nasional di negara kita. Kemudian untuk proses pembentukan peraturan daerah bagi setiap Kabupaten dan Kota termasuk di Kota Manado unsur keterlibatan masyarakat melalui partisipasi masyarakat juga diharuskan secara normatif. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 96: (1) masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, (2) masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui: (a) rapat dengar pendapat umum, (b) kunjungan kerja, (c) sosialisasi, dan/atau, (d) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi, (3) masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan-Perundang-undangan, (4) untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisa dan/atau tertulis sebagaimna dimaksud pada ayat 1, setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakese dengan mudah oleh masyarakat. Senada juga dengan itu dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 juga diatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Kemudian dalam penjelasan Pasal 139 Ayat 1 tersebut mengemukakan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Dari berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahw: (1) masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan dalam rangka penyiapan penyusunan dan pembahasan rancangan Perda, (2) masukan masyarakat dapat diberikan secara lisan maupun tertulis, dan, (3) hak tersebut dilaksanakan melalui peraturan Tata Tertib DPRD. Kemudian selanjutnya juga partisipasi masyarakat lebih lanjut diatur dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah pada Bab IX Pasal 90 (ayat 1) masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, (ayat 2) masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui (a) rapat dengar pendapat umum, (b) kunjun.

Menurut Griadhi dan Sri Utari (2008), pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan suatu Perda dapat dilakukan dengan cara: (1) memberikan masukan-masukan atau pendapat-pendapat dalam rapat dengar pendapat umum atau rapat-rapat lainnya yang sejenis, (2) memberikan masukan-masukan kepada anggota DPRD pada saat melakukan kunjugan kerja, (3) mengiktui seminar-seminar atau kegiatan yang sejenis dalam rangka melakukan pengkajian atau menindaklanjuti berbagai penelitian untuk menyiapkan suatu rancanang peraturan daerah.

Saragih (2011:15), selama ini peran masyarakat dalam proses pembentukan perda masih bersifat parsial dan simbolik. Beberapa komunikasi massa yang dilakukan hanyalah sebagai pelengkap prosedur adanya *basic research* (penelitian dasar) yang melandasi perencanaan pembentukan perda. Sementara dalam tahap perancangan pembahasan pemerintah atau oleh unit kerja dinas dari pemerintah atau panitia khusus dari DPRD (tahap ini melibatkan akademis atau pakar-pakar yang kompeten dibidangnya).

Dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, maka DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Atas dasar fungsi tersebut maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain adalah membentuk Peraturan daerah yang dibahas bersama dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan. Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama kepala daerah. Tata cara pembentukan peraturan daerah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah. Dan Ranpeda yang berasal dari DPRD dapat diaujukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah (Balegda), dan Ranperda yang berasal dari kepala daerah diajukan dengan surat kepala daerah kepada pimpinan DPRD. Ranperda yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama (PP Nomor Tahun 2010).

Insitusi DPRD yang keanggotaannya dipilih dan mendapatkan legitimasi politik rakyat diberikan mandat sebagai wakil rakyat dengan kewenangan yang dimilikinya. Oleh Jabbra dan Dwivedi (1989) kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang bersumber dari rakyat yang telah memilihnya untuk menjalankan tugas mengatur, menetapkan prioritas dan mendistribusikan sumber daya. Kekuasaan otoritas politik ini harus dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pembuat peraturan daerah.

Sehingga dapat disimpulkan pada fokus Faktor Determinan dalam Pembuatan Perda Inisiatif dari DPRD Kota Manado terkait *sub fokus Partisipasi* berhubungan dengan mendorong: terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah serta keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu issu, sesuai data yang ada dapat disimpulkan belum optimal dilakukan oleh DPRD Kota Manado. Sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan pada faktor penentu akuntabilitas politik ini tidaklah akuntabel dilaksanakan oleh pihak DPRD Kota Manado.

Kesimpulan penelitian ini didukung oleh peneliti terdahulu yang di lakukan oleh Ahmad Budiman, tentang Mekanisme DPRD Provinsi Dalam Menerima Dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat (Studi Kasus di DPRD Sumatera Selatan dan Sulawesi Utara). Fokus penelitian ini melihat tentang proses penerimaan dan tindaklanjut dari penyampaian aspirasi rakyat kepada DPRD yang lokus penelitiannya pada DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan DPRD Sulawesi Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga perwakilan rakyat tersebut memiliki proses dan prosedur yang berbeda dalam hal menerima aspirasi masyarakat. Penerimaan delegasi aspirasi masyarakat di DPRD Sumatera Selatan dilakukan oleh Pimpinan dan Komisi di DPRD sesuai dengan ketentuan tata tertib yang mengaturnya, sementara DPRD Sulawesi Utara lebih memilih membentuk Panitia Khusus yang tidak permanen dan komisi terkait. Kendala utama dalam penerimaan delegasi aspirasi masyarakat yaitu koordinasi penanganan delegasi dalam jumlah banyak dan keinginan masyarakat untuk segera dipertemukan dengan ketua DPRD serta ditindaklanjuti aspirasinya. Kemudian penerimaan aspirasi masyarakat tidak hanya dilakukan kepada delegasi aspirasi masyarakat yang datang di DPRD, tetapi juga dilakukan pada masa reses, namun demikian pada pelaksanaannya, serap aspiarasi ini tidak efektif karena dilakukan terbatas pada pertemuan dengan pejabat dan tidak dilakukan pembanding dengan aspirasi masyarakat. Anggota DPRD tidak mengetahui dan tidak mendapatkan secara lengkap mengenai permasalahn yang riil yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini lebih disebabkan juga karena faktor terbatasnya sumber data bagi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah daerah.

Selanjutnya Pada sub fokus adanya legitimasi atau pengakuan, dapat disimpulkan bahwa DPRD Kota Manado belum menunjukan adanya kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan yang dimiliki. Hal ini tergambar pada ketiga Indikator dibawah ini:

Kemampuan lembaga untuk diakui,belum sepenuhnya mendapat pengakuan masyarakat, diakibatkan karena karena faktor SDM dalam penguasaan prosedurnya yang masih kurang serta kurang profesionalnya DPRD Kota Manado dalam menjalankan tugasnya karena ketidakpahaman akan aturan yang ada. Contohnya pada pengajuan atau pengusulan ranperda masih sepenuhnya disiapkan oleh Balegda dan tidak dibahas secara internal di DPRD sebelum diajukan kepada pemerintah kota Manado dan langsung pada pembahasan. Ranperda juga diajukan tidak dilampiri dengan naskah akademik sehingga pembuatan Perda atau Ranperda belum sesuai dengan ketentuan sehingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat saat diimplementasikan, sehingga hal ini sulit bagi masyarakat untuk mengakui akan kemampuan lembaga ini, sehingga opini kewajaran belum diperoleh dari masyarakat terkait pembuatan Perda inisiatif.

Membentuk kepercayaan publik*,* kurangnya mendapat kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD Kota Manado, sehingga institusi ini perlu secara aktif membentuk kepercayaan publik dalam program kerjanya, namun hal tersebut belum secara optimal dilakukan. Belum semua masyarakat dapat mengikuti dan mengetahui seluruh agenda kerja maupun sidang di DPRD Manado. Webside saja tidak efektif karena kurang maksimalkan oleh bagian hubmas DPRD Kota Manado. Hal tersebut disebabkan kurang proaktifnya DPRD Kota Manado dalam perencanaan anggaran terkait memaksimalakan informasi kepada masyarakat secara transparan agar masyarakat dapat membentuk kepercayaan kepada DPRD Kota Manado dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Mempertahankan kepercayaan, kurang dilakukan oleh DPRD Kota Manado. Kepercayaan publik dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi yang dilakukan publik terhadap pembuatan Perda inisiatif di DPRD Kota Manado. Manfaat partisipasi dalam mempertahankan kepercayaan publik pada pembuatan kebijakan publik, termasuk dalam pembentukan Perda adalah: (1) memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik, (2) memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan melihat dalam pembuatan kebijakan publik, (3) meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif, (4) efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat, namun hal diatas belum sepenuhnya dilakukan oleh DPRD Kota Manado.

Salah satu ciri negara demokrasi adalah kedudukan rakyat sebagai pemilik pemerintahan (*people own government*). Sebagai pemilik pemerintahan, maka kedaulatan berada ditangan rakyat. Dalam hal ini rakyat ikut aktif dalam pemerintahan dan memiliki kewenangan untuk melakukan sosial kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Konsekuensinya, pemerintah yang terbentuk harus berusaha menyenangkan rakyatnya, sehingga rakyat merasakan bahwa pengelolaan pemerintahan dilakukan secara baik. Hal ini akan menyebabkan dukungan rakyat terhadap pemerintaan akan semakin besar (*legitimate*). Dalam kenyataannya di Indonesia sepanjang perjalanan Orde baru, rakyat beada pada posisi yang lema (*strong state and weak society*), dimana nilai-nilai kedaulatan rakyat mengalami pengikisan akibat kuatnya kekuasaan pemerintahan. Karenanya kedaulatan rakyat masih dianggap sebagai suatu konsep nilai saja. Kedaulatan rakyat yang lemah menyebabkan *bergaining power*nya terhadapa pemerintah sangat terbatas, sehingga rakyat tidak dapat mengekspresikan kedaulatannya dalam proses pemerintahan. Rakyat seakan-akan tidak mempunyai pilihan selain harus taat terhadap berbagai kebijakan pemerintah, karena dalam kenyataannya kelompok-kelompok yang sering berseberangan denga pemerintah akan menghadapi persoalan (Sarundajang, 2011:192).

Di era reformasi saat ini rakyat mulai menemukan kembali kedaulatannya. Masyarakat semakin kritis dalam menilai pengelolalan kekuasaan negara dan bahkan tidak mengherankan jika kita mendengar adanya tuntutan-tuntutan masyarakat terhadap pengelolalan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Tumbuhnya kedaulatan rakyat tersebut diikuti dengan pergerseran saluran politik rakyat menjadi multi partai politik. Hal ini telah melahirkan kekuatan-kekuatan masyarakat dalam berbagai kepentingan politiknya, yang harus direspons oleh pemerintah dengan pengelolaan pemerintahan secara baik. Jika tidak demikian maka pemerintah akan mengalami persoalan legitimasi. Kondisi ini telah menggeser paradigma pemerintahan di Indonesia dari s*trong state* menjadi s*trong society*.

Pemerintah daerah pasca reformasi menghadapi berbagai kekuatan masyarakat yang datang dari berbagai elemen dengan didukung oleh pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, keberanian sehingga hal ini menuntut dan diperlukan pendekatan yang tepat untuk menghadapi dan mengelolanya. Dewan Perwakilan Rakyan Daerah (DPRD) sebagaimana yang dimanatkan oleh undang-undang tentang pemerintahan daerah, memiliki peran yang sangat strategis dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Dalam kedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggaran pemerintah didaerah lembagai DPRD memiliki fungsi membentuk peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Dapat disandingkan dengan penelitian sebelumnya terkait akuntabilitas publik DPRD oleh H.M. Anis Zakaria Karma, 2011 tentang Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimanahasil temuan penelitiannya menunjukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik mutlak adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban, karena dengan adanya akuntabilitas tersebut menjadi persyaratan mendasar untuk mencegah terjadinya penyalagunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, kemudian aspek akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, jika komponen pertanggungjawaban berupa akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas dapat dilaksanakan dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembahasan penelitian ini hanya lebih melihat unsur akuntabilitasnya pada pihak eksekutif sebagai salah satu unsur dalam penyelenggara pemerintahan disamping lembaga DPRD.

Merujuk dari Penelitian terdahulu diatas dapat dintepretasikan dengan DPRD Kota Manado dalam menjalankan fungsinya bahwaKebijakan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, mestinya juga harus dipahami oleh DPRD sebagai lembaga representasi rakyat bahwa regulasi tersebut secara jelas menunjukkan dan mengedepankan keberpihakannya kepada rakyat. Hal ini dinyatakan secara implisit dalam tataran konsep disentralisasi dimana intinya adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada masyarakat bukan kepada pemeritnah daerah. Artinya kebijakan undang-undang tersebut mengakui dan menempatkan masyarakat sebagai hal yang utama dalam penyelenggaraan dan pengelolalan berbagai urusan yang ada.Pada sub fokus adanya legitimasi atau pengakuan, sebagai faktor determinan untuk melihat akuntabilitaspolitik dapat disimpulkan bahwa DPRD Kota Manado belum menunjukan adanya kemampuan untuk membentuk dan mempertahankankepercayaan yang dimiliki, sehingga dapat dikatakan belum akuntabel. Secara keseluruhan dari Faktor Determinan dalam Pembuatan Perda yang berasal dari DPRD, dalam penelitian ini menggunakan pengembangan dari konsep Jabbra dan Dwivedi tentang akuntabilitas politik yang merujuk pada 2 (dua) sub fokus sebagai pisau analisis yang dijadikan sebagai teori operasional. Kedua sub fokus tersebut, yaitu: (1) adanya partisipasi, dan (2) adanya legitimasi atau pengakuan.

Disimpulkan kedua sub fokus yang ada sebagai faktor determinan untuk melihat akuntabilitas politik bahwa belum maksimalnya partisipasi yang ada sehingga legitimasi dan pengakuan publik terkait akuntabilitas politik DPRD Kota Manado dapat dikatakan belum akuntabel. Sehingga disini dituntut perbaikan dan perubahan kearah yang lebih baik dengan memperhatikan peningkatan aspek Partisipasi publik dan legitimasi serta pengakuan publik agar akuntabilitas politik dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

1. **Model *recommended* akuntabilitas politik DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah**

Model akuntabilitas yang ada *(empirical model)* berdasarkan temuan yakni melalui hasil data primer yaitu dengan wawancara mendalam dan dari data sekunder yaitu dokumen-dokumen hasil temuan peneliti, maka *recomended model* akuntabilitas politik dari DPRD Kota Manado adalah sebagai berikut:

Gambar 5.6 *Model Recommended*

Akuntabilitas Politik

Faktor Determinan

Model Akuntabilitas Politik

Proses Pelaksanaan

P = Participating

Legitimacy of Decision Makers

Moral Conduct

F

e

e

dba

c

k

F

e

e

dba

c

k

E = Elaborating Conduct

Partisipasi Masyarakat

Responsiveness

A = Act to Reform Inovation

Openness

C = Control Publik

Legitimasi

Optimal Resource Utilization

Inproving Efficency and effective

E = Effectiveness

Pembuatan Perda oleh DPRD yang memiliki Akuntabilitas Politik

(Prosedur dan Produk)

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Menunjuk pada Gambar 5.5, maka dengan memperhatikan theoritical model, normative model dan empirical/ekxisting model, pembuatan Perda inisiatif DPRD tidak hanya terkait pada aspek legitimacy of decision makers, moral conduct, responsiveness, openness, optimal resource utilization, improving efficiency dan effectivenessserta faktor partisipasi dan legitimasitetapi agar pembuatan Perda bersifat akuntabel, maka harus juga memperhatikan unsur-unsur seperti: participating, elaborating conduct, act to reforme invation, controling public, dan effectivenness (PEACE). *Participating*, yaitu pelibatan masyarakat dalam pembuatan perda insiatif sesuai ketentuan yang berlaku, *elaborating conduct*, yaitu memiliki kualitas karakter moralitas yang memadai dan peka terhadap aspirasi masyarakat, *act to reform innovation*, yaitu tindakan yang nyata menuju pada perubahan sistem yang lebih baik dengan memperhatikan inovasi, *control public*, yaitu upaya untuk mendorong adanya pengawasan oleh publik dalam setiap pembuatan keputusan/perda, *effectiveness to product*, yaitu upaya melahirkan kemajuan/keberhasilan pertanggungjawaban politik dalam mencapai tujuan yang ditetapkan melalui produk-produk kebijakan secara efektif. Suatu perbedaan dari empirical model atau existing mode dan recomeded model dimana empirical/existing model kurang memperhatikan prosedur tata cara dan tahapan sesuai dengan regulasi yang ada, sementara kalau model rekomendasi, lebih memberi solusi dalam hal:

1. Lebih memperhatikan prosedur tata cara pembentukan Perda
2. Memberi jalan keluar pada masalah dengan perubahan system
3. Pelembagaan partisipasi
4. Perilaku pemimpin yang berkarakter
5. Pengawasan masyarakat
6. Upaya efektivitas dan efisiensi pada pencapaian tujuan